

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 35 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019

BAB I  
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

RKPD sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya maupun dengan dokumen anggaran, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam RPJMD akan dijabarkan secara operasional per tahun selama lima tahun menjadi prioritas perencanaan tahunan daerah yang dituangkan ke dalam RPKD yang berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada RENSTRA Perangkat Daerah.

Sedangkan keterkaitan dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran, bahwa seluruh dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang sebelumnya melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang masih perlu dirumuskan secara bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

## I.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

18. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D).

### I.3 Hubungan Antar Dokumen

Mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek



(operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

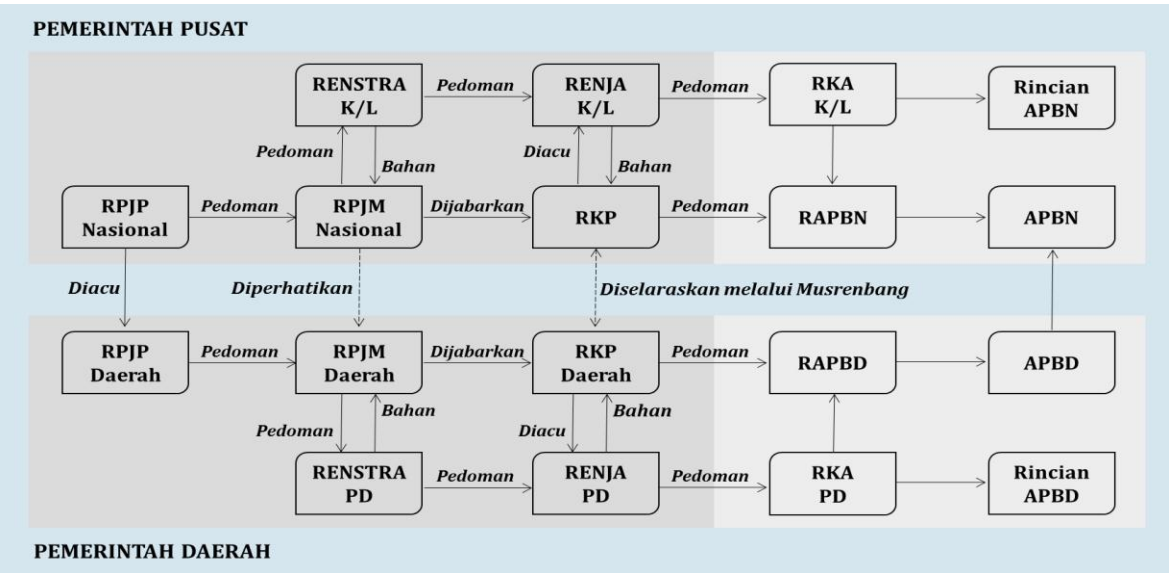
Pada skala nasional dikenal rencana pembangunan jangka panjang nasional atau disingkat RPJPN yang berdimensi jangka panjang (20 tahun), rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN berdimensi 5 tahun dan rencana kerja pemerintah berdimensi tahunan yang disingkat dengan RKP.

Dokumen perencanaan RPJMN berdimensi 5 tahun dijabarkan lebih lanjut oleh kementerian/lembaga (K/L) yang disebut dengan rencana strategis (RENSTRA-K/L) dan Dokumen perencanaan berdimensi tahunan yaitu RKP dijabarkan lebih lanjut oleh kementerian/lembaga yang disebut dengan rencana kerja (RENJA-K/L) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja anggaran (RKA-K/L).

Pada skala daerah, dikenal dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang disingkat dengan RPJPD, rencana jangka menengah daerah yang disingkat dengan RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD.

Dokumen perencanaan RPJMD berdimensi 5 tahun dijabarkan lebih lanjut oleh Perangkat Daerah (PD) yang disebut dengan rencana strategis (RENSTRA-PD) dan Dokumen perencanaan berdimensi tahunan yaitu RKPD dijabarkan lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang disebut dengan rencana kerja (RENJA-PD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja anggaran (RKA-PD).

Gambar I.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan



#### I.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah untuk menentukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 adalah sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah provinsi;
- b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan
- c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi.

#### I.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

#### 1.3. Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi, RKP/program strategis nasional.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

#### 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

### 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi.

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Provinsi Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

## BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

#### 4.2. Prioritas Pembangunan

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

### BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota didasarkan menjelaskan kinerja seluruh pembangunan di daerah baik dari sisi ekonomi maupun social yang merupakan bagian dari integrasi pembangunan baik ditingkat provinsi maupun pusat.

### BAB VIRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana rogram dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

### BAB VI I KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

### BAB VIII PENUTUP

Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Provinsi

## BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### II.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

#### II.1.1 Aspek Geografi

##### II.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa luas wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur sebesar 47.799,75 Km<sup>2</sup>, Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa, Batas wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan terbuka, yaitu Samudra Hindia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar II.1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Timur



Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia – Badan Informasi Geospasial

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan sebesar 90 persen, sementara luas Kepulauan Madura sekitar 10 persen. Secara administratif Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 664 Kecamatan dengan 777 Kelurahan dan 7.724 Desa. Sementara itu

Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan dan Kabupaten dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lamongan sebanyak 474 desa/kelurahan.

Tabel II.1 *Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur*

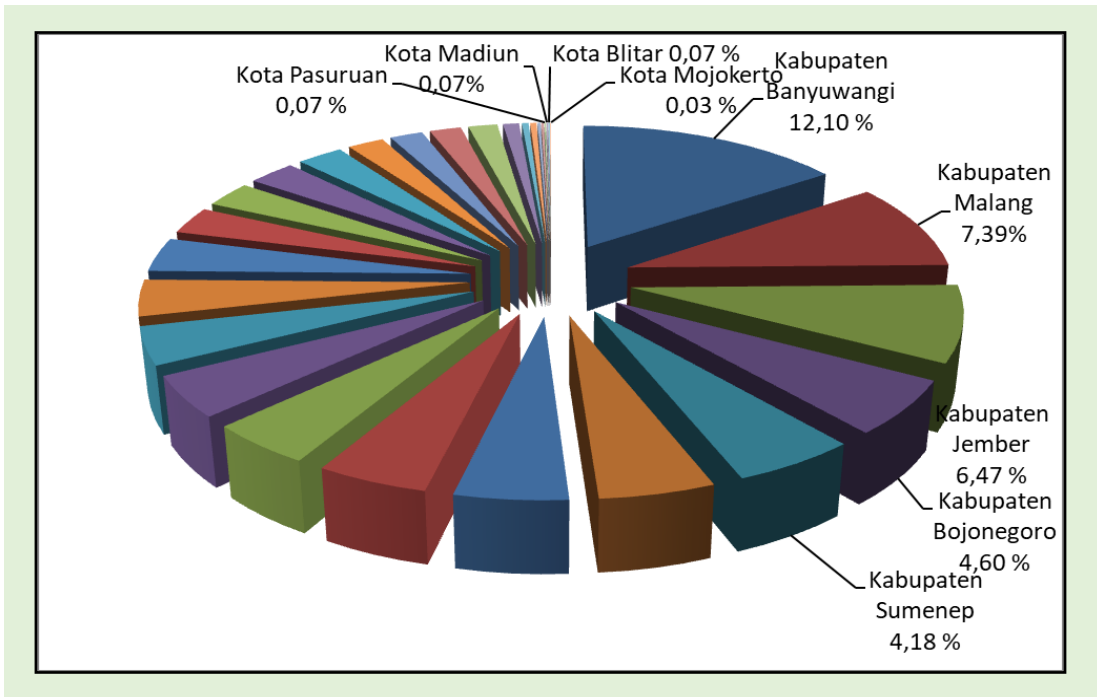
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km2)
			Kelurahan	Desa	Jumlah	
1	Kabupaten Pacitan	12	5	166	171	1.389,92
2	Kabupaten Ponorogo	21	26	281	307	1.305,70
3	Kabupaten Trenggalek	14	5	152	157	1.147,22
4	Kabupaten Tulungagung	19	14	257	271	1.055,65
5	Kabupaten Blitar	22	28	220	248	1.336,48
6	Kabupaten Kediri	26	1	343	344	1.386,05
7	Kabupaten Malang	33	12	378	390	3.530,65
8	Kabupaten Lumajang	21	7	198	205	1.790,90
9	Kabupaten Jember	31	22	226	248	3.092,34
10	Kabupaten Banyuwangi	24	28	189	217	5.782,40
11	Kabupaten Bondowoso	23	10	209	219	1.525,97
12	Kabupaten Situbondo	17	4	132	136	1.669,87
13	Kabupaten Probolinggo	24	5	325	330	1.696,21
14	Kabupaten Pasuruan	24	24	341	365	1.474,02
15	Kabupaten Sidoarjo	18	31	322	353	634,38
16	Kabupaten Mojokerto	18	5	299	304	717,83
17	Kabupaten Jombang	21	4	302	306	1.115,09
18	Kabupaten Nganjuk	20	20	264	284	1.224,25
19	Kabupaten Madiun	15	8	198	206	1.037,58
20	Kabupaten Magetan	18	28	207	235	688,84
21	Kabupaten Ngawi	19	4	213	217	1.295,98
22	Kabupaten Bojonegoro	28	11	419	430	2.198,79
23	Kabupaten Tuban	20	17	311	328	1.834,15
24	Kabupaten Lamongan	27	12	462	474	1.782,05
25	Kabupaten Gresik	18	26	330	356	1.191,25
26	Kabupaten Sampang	14	6	180	186	1.233,08
27	Kabupaten Pamekasan	13	11	178	189	792,24
28	Kabupaten Sumenep	27	4	330	334	1.998,54
29	Kabupaten Bangkalan	18	8	273	281	1.001,44
30	Kota Kediri	3	46	0	46	63,4
31	Kota Blitar	3	21	0	21	32,57
32	Kota Malang	5	57	0	57	145,28
33	Kota Probolinggo	5	29	0	29	56,67
34	Kota Pasuruan	4	34	0	34	35,29
35	Kota Mojokerto	2	18	0	18	16,47
36	Kota Madiun	3	27	0	27	33,92
37	Kota Surabaya	31	154	0	154	350,54
38	Kota Batu	3	5	19	24	136,74
J U M L A H		664	777	7.724	8.501	47.799,75

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi yakni seluas 5.782,40 Km2 atau 12,10 persen dari luas total Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kota Mojokerto yakni 16,47 Km2 setara 0,03 persen dari luas Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut ini :



Gambar II.2 Komposisi Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

II.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

a. Posisi astronomis dan geostrategik

Provinsi Jawa Timur secara astronomis terletak pada 111°0’ hingga 114°4’ Bujur Timur dan 7°12’ hingga 8°48’ Lintang Selatan. Provinsi Jawa Timur sebagian besar wilayahnya berada pada wilayah Timur dari Pulau Provinsi Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah, sedangkan luas Kepulauan Madura hanya sekitar 10%.

Gambar II.3 Peta Orientasi Wilayah Provinsi Jawa Timur



Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia – Badan Informasi Geospasial

Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau (Sumber: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004). Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, di sebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan.

b. *Kondisi/Kawasan*

Kondisi kawasan pada Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 5 aspek antara lain kondisi kawasan Perkotaan, kondisi kawasan tertinggal, kondisi kawasan pesisir, kondisi kawasan pegunungan dan kondisi kawasan kepulauan.

1) *Kawasan Perkotaan*

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dalam rencana struktur ruang berdasarkan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, terdapat perkotaan-perkotaan di Provinsi Jawa Timur yang berfungsi menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan; Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) yaitu Pasuruan dan Batu; serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang, Sumenep, Magetan, Situbondo, Trenggalek, Bondowoso, Sampang, Kepanjen, Mejayan, Kraksaan, Kanigoro, dan Bangil.

Gambar II.4 Peta Persebaran Pusat Perkotaan Berdasarkan Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi Jawa Timur





*Sumber : Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031*

## 2) Kawasan Tertinggal

Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Penentuan daerah tertinggal menggunakan 6 (enam) kriteria dasar, yaitu: Perekonomian masyarakat, Sumberdaya manusia, Infrastruktur, Kemampuan keuangan lokal, Aksesibilitas, dan Karakteristik daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal mengamanatkan bahwa daerah tertinggal ditetapkan setiap lima tahun secara nasional dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, terdapat Empat Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu: Kabupaten Sampang, Bangkalan, Situbondo dan Bondowoso merupakan bagian dari 122 Kabupaten diidentifikasi mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya secara nasional. Daerah Tertinggal rata-rata mempunyai keterbatasan infrastruktur & komunikasi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta banyaknya sumberdaya yang belum dikelola secara optimal.

Gambar II.5 Peta Kawasan/Daerah Tertinggal di Provinsi Jawa Timur



*Sumber: Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019*

## 3) Kawasan Pesisir

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Pesisir bagian utara, selatan dan laut di wilayah Provinsi Jawa Timur mempunyai hamparan hutan mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu karang yang mengelilinginya yang harus dilestarikan. Ketiga ekosistem tersebut memiliki ciri, sifat dan karakter yang berbeda – beda akan tetapi saling terkait satu sama lainnya. Hubungan ketiga ekosistem tersebut adalah mutualistik yaitu di antaranya: mangrove menyediakan makanan/hara bagi padang lamun sedangkan padang lamun memecah/meredam gelombang dari lautan sehingga mangrove tumbuh dengan baik karena mangrove tidak tahan terhadap gelombang cukup besar.

Berdasarkan kondisi geografis, wilayah pesisir dan laut Jawa Timur ke arah daratan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan sehingga kemiringan wilayah pesisirnya relatif tinggi. Kemiringan rendah (datar) dijumpai pada sebagian kecil wilayah teluk dan lembah. Ke arah laut wilayah pesisir tersusun oleh pasir, tanah padas, batu dan karang dengan kemiringan yang relatif tajam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2037, secara umum wilayah pesisir laut di Provinsi Jawa Timur direncanakan untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional. Kawasan pemanfaatan umum yang setara dengan kawasan budidaya pada wilayah darat, pada wilayah pesisir laut Provinsi Jawa Timur dikembangkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang berupa perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri, pelabuhan, pertambangan, dan energi. Alokasi Ruang dari kawasan dan zona kegiatan dapat dilihat pada gambar peta sebagai berikut:

Gambar II.6 Peta Rencana Alokasi Ruang



Sumber : Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2037

4) Kawasan Pegunungan

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwartir yang dipengaruhi adanya gunung berapi dan salah satunya adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru. Jajaran pegunungan di Provinsi Jawa Timur tersebar mulai dari perbatasan di timur dengan adanya Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Lamongan, Gunung Bromo, Gunung Argopuro, Gunung Pendil, Gunung Suket, Gunung Ijen, Gunung Merapi, Gunung Raung.

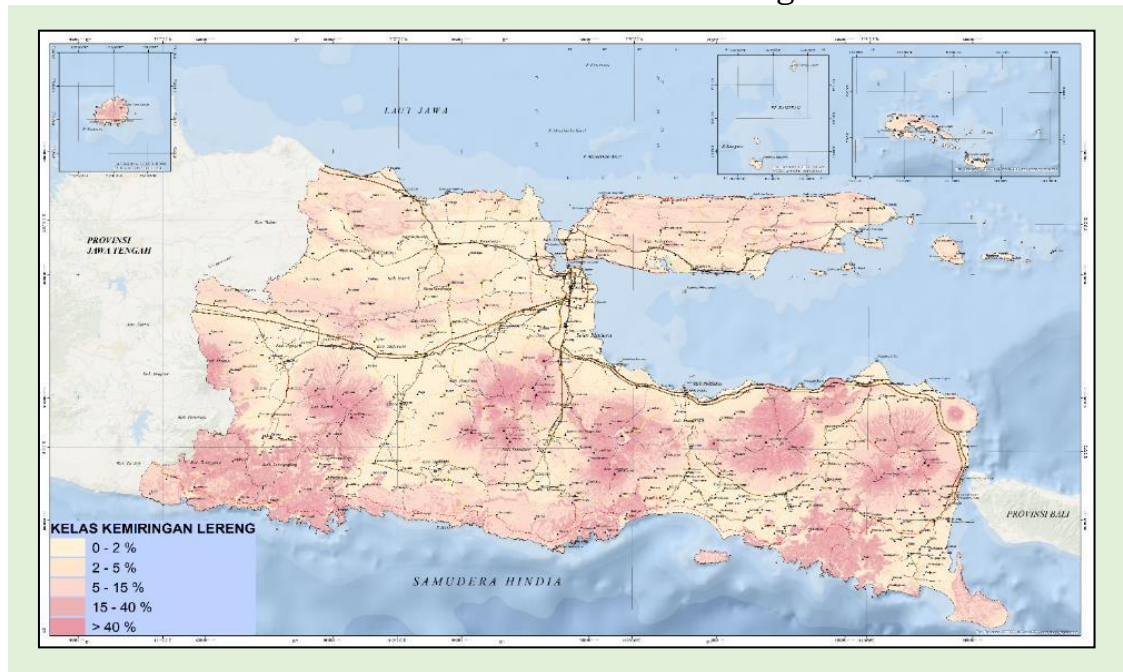
5) Kawasan Kepulauan.

Secara geografis kepulauan dan pulau-pulau di Provinsi Jawa Timur berada pada wilayah perairan utara dan perairan selatan. Pulau-pulau kecil di Jawa Timur berada dalam wilayah administratif terdiri dari 445 buah pulau yang tersebar di Kabupaten Pacitan (31 pulau), Kabupaten Tulungagung (19 pulau), Kabupaten Blitar (28 pulau), Kabupaten Malang (100 pulau), Kabupaten Situbondo (5 pulau), Kabupaten Sumenep (121 pulau), Kabupaten Gresik (13 pulau), Kabupaten Sampang (1 pulau), Kabupaten Trenggalek (57 pulau), Kabupaten Sidoarjo (4 pulau), Kabupaten Banyuwangi (15 pulau), Kabupaten Jember (50 pulau), dan Kabupaten Probolinggo (1 pulau). Dari beberapa wilayah tersebut kawasan yang memiliki pulau terbanyak adalah Kabupaten Sumenep.

### II.1.1.3 Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai karakteristik topografi daratan relatif datar dengan kemiringan lereng 0-15 % yang berada hampir di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di bagian Utara, sedangkan untuk kemiringan lereng 15-40% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >40% berada pada daerah pegunungan yang sebagian besar pada wilayah Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan.

Gambar II.7 Peta Persebaran Kemiringan Lahan



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

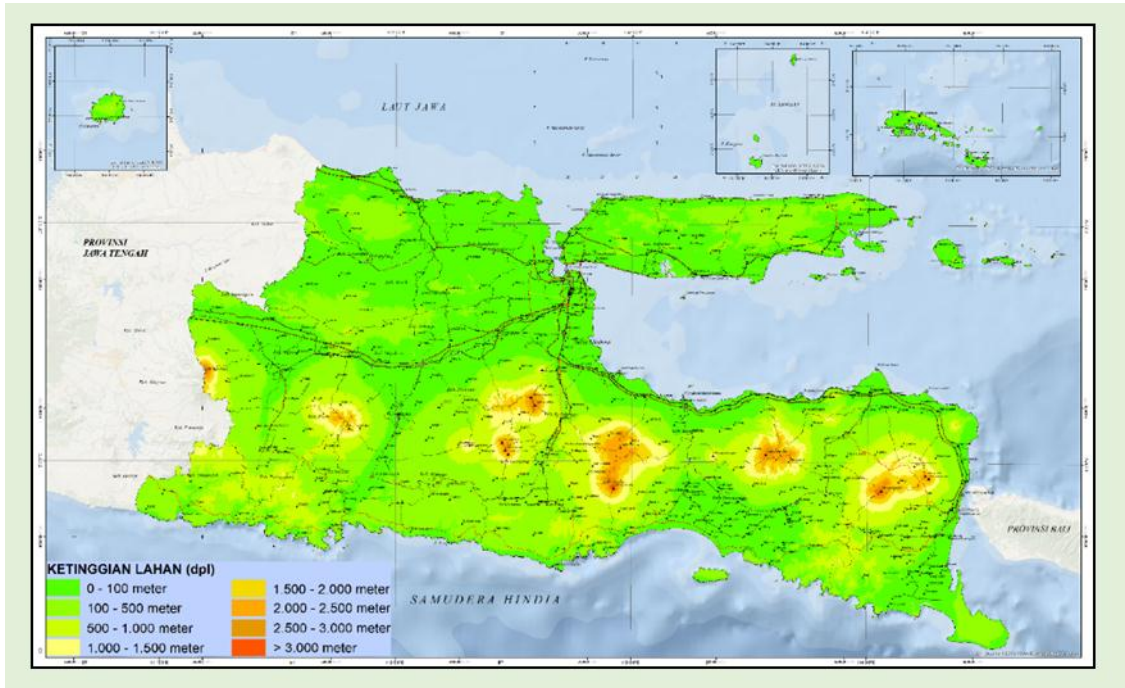
#### a. Ketinggian Lahan

Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu :

- Ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut: meliputi 41,39 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.
- Ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut: meliputi 36,58 % dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung.
- Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut: meliputi 9,49 % dari luas wilayah dengan kondisi berbukit.
- Ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut: meliputi 12,55 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

Gambar II.8 Peta Ketinggian Lahan Provinsi Jawa Timur





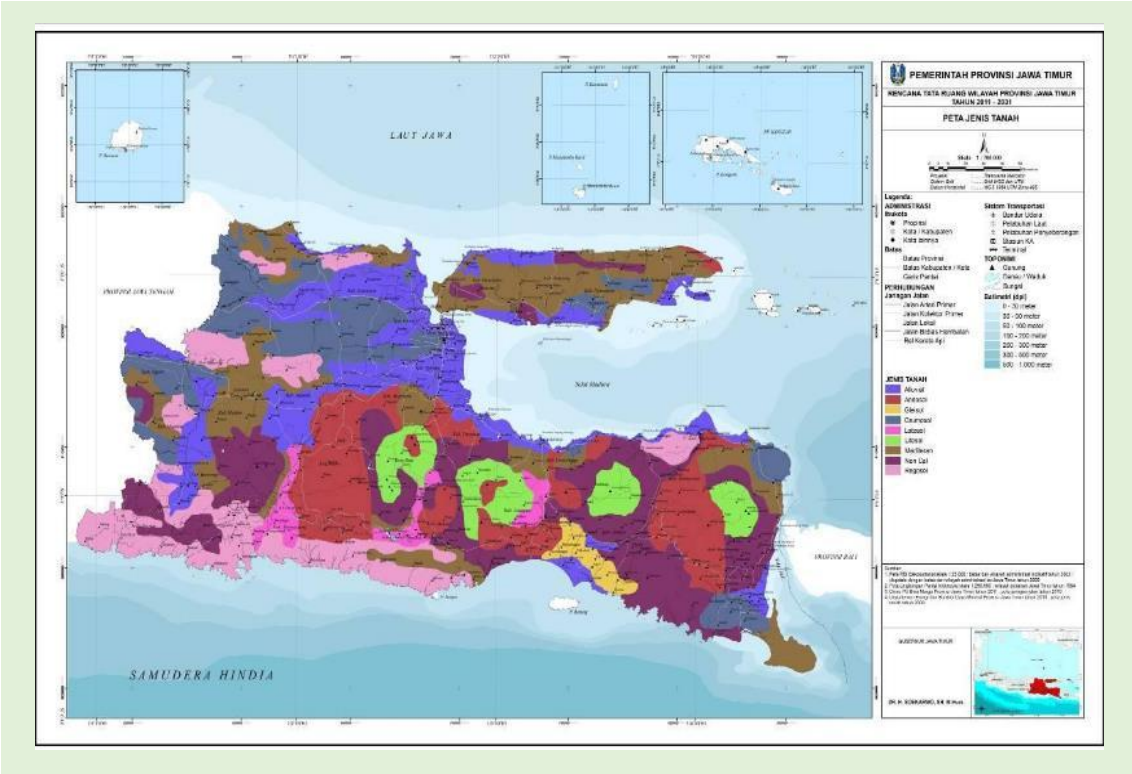
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

2.1.1.1 Kondisi Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

Secara umum wilayah Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwarter yang dipengaruhi adanya gunung berapi. Sekitar 20,60 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur adalah wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai sifat erosif, sehingga tidak baik untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian namun sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan tanah 0-15 % dan sekitar 65,49 % merupakan wilayah yang subur yang terdiri atas dataran aluvial antar gunung api sampai delta sungai dan pesisir, dataran aluvial di lajur Kendeng, dataran aluvial di daerah gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan.

Gambar II.9 Peta Jenis Tanah Provinsi Jawa Timur



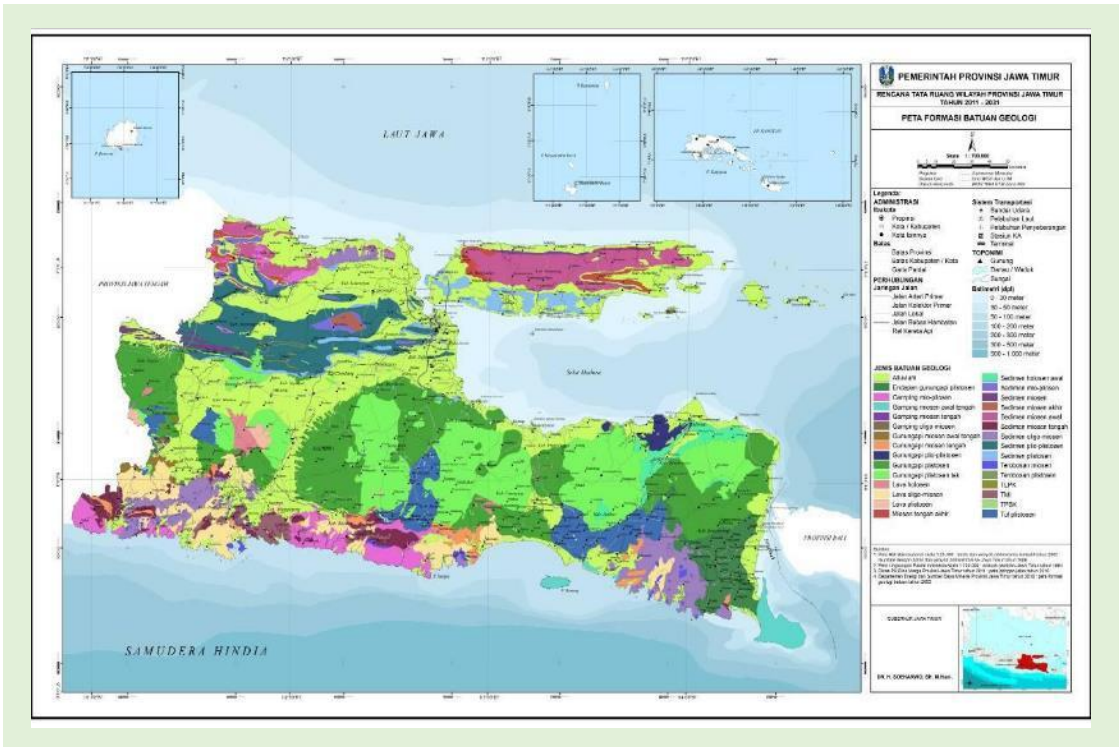
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

b. Potensi Kandungan

Kondisi geologi Jawa Timur yang cukup kaya potensi sumber daya mineral memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang mendukung sektor industri maupun konstruksi, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) lajur, yaitu:

- Lajur Rembang terbentuk oleh batu lempung napalan dan batu gamping merupakan cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi;
- Lajur Kendeng terbentuk batu lempung dan batu pasir, potensi lempung, bentonit, gamping;
- Lajur Gunung Api Tengah terbentuk oleh endapan material gunung api kuartar, potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah, krakal, krikil, pasir, tuf; dan
- Lajur Pegunungan Selatan terbentuk oleh batu gamping dengan intrusi batuan beku dan aliran lava yang mengalami tekanan, potensi mineral logam, marmer, onyx, batu gamping, bentonit, pospat.

Gambar II.10 Peta Formasi Batuan Geologi Provinsi Jawa Timur



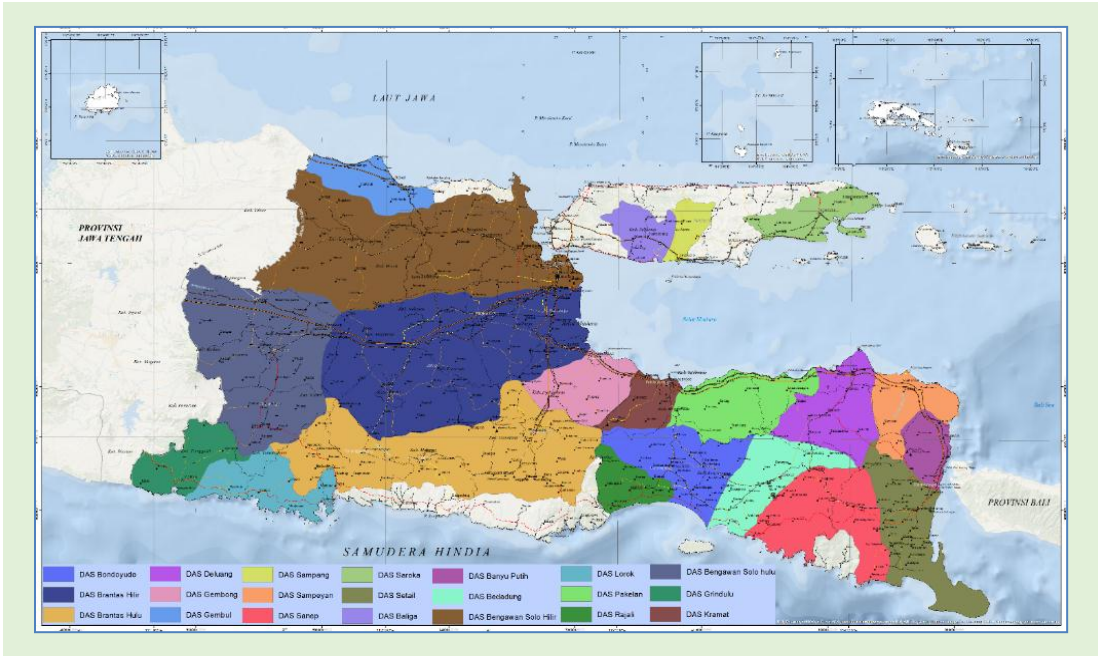
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

2.1.1.2 Kondisi Hidrologi

a. Daerah Aliran Sungai

Provinsi Jawa Timur dialiri oleh 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) strategis nasional, yaitu DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo. DAS Brantas merupakan sebuah sungai/kali terbesar di Jawa Timur dengan panjang  $\pm 320$  km yang mengalir secara melingkar dan di tengahnya terdapat gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Kelud. Kali Brantas yang bersumber dari lereng Gunung Arjuno, mulamula mengalir ke arah timur melalui Kota Malang, lalu membelok ke arah selatan setelah itu pada wilayah Kepanjen, Kali Brantas membelok ke arah barat bertemu dengan Kali Lesti yang bersumber dari Gunung Semeru dan bertemu dengan Kali Ngrowo di Tulungagung, Kali Brantas berbelok ke utara melalui Kota Kediri dan pada wilayah Kertosono, Kali Brantas bertemu dengan Kali Widas, kemudian ke Timur mengalir ke Kota Mojokerto dan terbagi menjadi 2 (dua), ke arah Surabaya dan ke Porong yang selanjutnya bermuara di selat Madura.

Gambar II.11 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Jawa Timur





Sumber : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031

b. Wilayah Sungai dan Danau/Waduk

Secara hidrologi wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi Wilayah Sungai, dan Waduk, sedangkan air tanah berupa mata air. Pembagian Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur meliputi 7 (tujuh) Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Bengawan Solo, WS Brantas, WS Welang Rejoso, WS Pekalen Sampean, WS Baru Bajulmati, WS Bondoyudo Bedadung, dan WS Madura Bawean

Gambar II.12 Peta Pembagian Wilayah Sungai Provinsi JawaTimur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Tabel II.2 Luas Catchment Area (km<sup>2</sup>) pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur

No	Wilayah Sungai (WS)	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah DAS
1	WS Bengawan Solo (Jatim-Jateng)	13.070,00	96 DAS
2	WS Brantas	13.880,00	220 DAS
3	WS Welang Rejoso	2.601,00	36 DAS
4	WS Pekalen Sampean	3.953,00	56 DAS
5	WS Baru Bajulmati	3.675,00	60 DAS
6	WS Bondoyudo Bedadung	5.364,00	47 DAS
7	WS Madura Bawean	4.575,00	173 DAS

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur, 2017



Luas *catchment area* tertinggi di Provinsi Jawa Timur berada pada Wilayah Sungai Brantas dengan luas 13.880 km<sup>2</sup> dan terendah di Wilayah Sungai Welang Rejoso dengan luas 2.601 km<sup>2</sup>. *Catchment area* ini berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan baik ke danau, sungai maupun ke laut, sehingga menciptakan suatu ekosistem, *catchment area* ini erat kaitannya dengan Daerah Aliran Sungai (DAS).

c. *Debit*

Secara hidrologi wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi Wilayah Sungai (WS), dan Waduk. Pembagian WS di Jawa Timur meliputi 7 (tujuh) WS, yaitu WS Bengawan Solo, WS Brantas, WS Welang Rejoso, WS Pekalen Sampean, WS Baru Bajulmati, WS Bondoyudo Bedadung, dan WS Madura Bawean. Berikut ini adalah debit aliran rerata di 7 Wilayah Sungai.

Tabel II.3 Debit aliran rerata di 7 Wilayah Sungai.

No ·	Wilayah Sungai UPT PSDA Kab/Kota	Lokasi Pemantauan				Debit Aliran Rerata (m3/dt)
		Induk Sungai	Stasiun Duga Air	Kecamatan	Desa	
I.	WS Bengawan Solo					
	UPT PSDA di Madiun					
	Madiun	Madiun	K. Jerohan	Balerejo	Balerejo	0,96
		Bengawan Solo	K. Madiun	Kerto Banyon	Kerto Banyon	0,33
				Madiun	Nambanga n	8,18
	Magetan	Madiun	K. Gandong	Magetan	Magetan	1,12
	Ngawi	Bengawan Solo	K. Bengawan Solo	Widodaren	Kauman	131,22
				Ngawi	Napel	230,35
			K. Madiun	Ngawi	Ngawi	40,35
	Ponorogo	Madiun	K. Asin	Sawo	Jenangan	0
			K. Slahung	Sumoroto	Sumoroto	13,19
			K. Talun	Ngebel	Wagir Lor	2,74
			Sal. Kel. Ngebel	Ngebel	Ngebel	5,43
			Sal. Masuk Ngebel	Ngebel	Ngebel	2,08
			Bengawan Solo	K. Keang	Sawo	Ngindeng
		Pacitan	Grindulu	K. Grindulu	Arjosari	Gunungsar i
	K. Kedungprin g			Nawangan	Kedungprin g	0,06
	Lorok		K. Lorok	Wonodadi	Lorok	366,93
	UPT PSDA di Bojonegoro					
	Bojonegoro	Bengawan Solo	K. Cawak	Modo	Kedunglere p	1,02
			Gandong Setren	Ngasem	Setren	5,17
			K. Gangseng	Temayang	Kedungsari	1,28
			K. Solo	Bojonegoro	Kaliketek	295,19
			K. Solo	Bubulan	Celebung	0,09
			K. Kerjo	Poh Baru	Pejok	0,09
			Waduk Pacal	Temayang	Kd. Sumber	12,83

No	Wilayah Sungai UPT PSDA Kab/Kota	Lokasi Pemantauan				Debit Aliran Rerata (m3/dt)
		Induk Sungai	Stasiun Duga Air	Kecamatan	Desa	
			K. Pacal	Gondang	Senganten	0,28
			K. Solo Padangan	Padangan	Denguk	215,49
	Tuban	Gembul	K. Gembul	Merak Urak	Becok	0,42
		Bengawan Solo	K. Kening	Parengan	Selogabus	29,93
			K. Kening	Bangilan	Kd Jambangan	0,91
			K. Kloro	Semanding	Genaharjo	2,71
			K. Nglirip	Singgahan	Mulyoagun g	2,30
			K. Lohgung	Palang	Brondong	1,23
		K. Prumpung	K. Krumpung	Bancar	Sidomulyo	0,24
	Lamongan	Bengawan Solo	K. Solo Babat	Babat	Banaran	5,65
			K. Solo Karang Geneng	Karang Geneng	Karang Geneng	154,25
	Gresik	Bengawan Solo	K. Solo	Manyar	Sembayat	688,80
II.	WS Brantas					
	UPT PSDA di Malang					
	Malang	Brantas	K. Bango	Pakis	Jabon	25,53
			K. Sayang	Ngantang	Jabon	0,55
			K. Cuban Rondo	Pujon	Ngroto	0,38
			K. Brantas	Dau	Mulyoagun g	2,85
			K. Sumberamp el	Wajak	Baros	0,07
	Blitar	Brantas	K. Lahar	Nglegok	Bacom	0,99
	Tulungagung	Brantas	K. Pundensari	Sutojayan	Pundensari	56,21
	Trenggalek	Brantas	K. Bagong	Trenggalek	Temon	6,47
			K. Duren	Nglinggis	Kebak	0,37
			K. Keser	Nglinggis	Pucangana k	3,79
	UPT PSDA di Kediri					
	Kediri	Brantas	K. Brantas Mojoroto	Mojoroto	Mojoroto	0
	Nganjuk	Brantas	K. Widas	Tanjung Anom	Widas	0
		Brantas	K. Widas	Patihanro wo	Bukur	1,16
	Jombang	Brantas	K. Brantas Ploso	Ploso	Ploso	1,25
			K. Brantas Kertosono	Kertosono	Kertosono	2,781
	UPT PSDA di Surabaya					
	Mojokerto	Brantas	Bangsai	Bangsai	Kedung Uneng	1,28
		Lamong	K. Lamong	Lamong	Simoanggro k	8,27
	Sidoarjo	Brantas	K. Brantas Perning	Krian	Perning	61,41
III.	WS Welang Rejoso					
	UPT PSDA di Pasuruan					
	Pasuruan	Kadalpang	K. Kadalpang	Bangil	Kenep	4,19
		Gembong	K. Gembong	Poh Jentrek	Warungdow o	2,77
		Petung	K. Petung	Gondang Wetan	Sekarputih	2,47
		Rejoso	K. Rejoso	Winongan	Winongan Lor	12,03
			K. Rejoso	Winongan	Sidepan	6,21
		Welang	K. Welang Hilir	Poh Jentrek	Dompo	9,61

No .	Wilayah Sungai UPT PSDA Kab/Kota	Lokasi Pemantauan				Debit Aliran Rerata (m3/dt)
		Induk Sungai	Stasiun Duga Air	Kecamatan	Desa	
			K. Welang	Purwosari	Purwodadi	5,05
	Probolinggo	Kramat	K. Kramat	Leces	Kramat	2,99
		Pancarglaga s	K. Pancarglaga s	Paiton	Randumera k	1,66
		Pekalen	K. Pekalen	Gading	Condong	15,93
		Pekalen	K. Rondoningo	Kraksaan	Jurangjero	2,42
		K. Laweyan	K. Laweyan	Nguling	Watestani	0,25
IV.	WS Pekalen Sampean					
	UPT PSDA di Bondowoso					
	Bondowoso	Sampean	K. Sampean	Tenggaran	Tenggaran	0
			Keloposawit	Wonosari	Taman	18,78
	Situbondo	Deluang	K. Deluang	Besuki	Demung	31,57
V.	WS Baru Bajulmati					
	UPT PSDA di Bondowoso					
	Banyuwangi	Setail	K. Setail	Benculuk	Kradenan	0
				Sempu	Jambewang i	0
		Tambong	K. Tambong	Rogojampi	Pakisaji	10,19
		Baru	K. Baru	Gambiran	Karang Doro	85,04
				Glenmore	Jolondoro	8,87
		Bomo	K. Bomo	Rogojampi	Mangir	1,072
				Srono	Parijata Kulon	0
VI.	WS Bondoyudo Bedadung					
	UPT PSDA di Lumajang					
	Lumajang	Asen	K. Asen	Sentul	Sentul	4,2691666 7
		Bondoyudo	K. Bondoyudo	Wonorejo	Wonorejo	24,73
		Mujur	K. Mujur	Tempeh	Lempeni	6,41
	Jember	Bedadung	K. Bedadung	Rawatamt u	Rawatamtu	15,12
		Mayang	Sanen	Jenggawah	Mangli	34,43
K. Mayang			Pakusari	Kertosari	3,39	
VII .	WS Madura Bawean					
	UPT PSDA di Pamekasan					
	Bangkalan	Blega	K. Blega	Blega	Telok	0,095
	Sampang	Nipah	K. Nipah	Sampang	Tebanah	8,21
		Sampang	K. Kemuning	Sampang	Pangilen	1,32
			K. Sampang	Sampang	Polagan	0
		Klampis	K. Klampis	Kedundun g	Banjar	11,59
	Pamekasan	Sela	K. Samiran	Propo	Kacok	0,02
		Semajid	K. Semajid	Pamekasa n	Sumedanga n	0,75
	Sumenep	Sarokah	K. Sarokah	Lenteng	Madelan	0,84
		Klampok	K. Klampok	Ambuten	Tambak Agung	0,34

Sumber : Pengairan Dalam Angka

II.1.1.4 Kondisi Klimatologi

a. Tipe

Keadaan iklim di Jawa Timur secara umum sama dengan provinsi lain di tanah air, yaitu termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim Kemarau (Mei-Oktober) dan musim Penghujan (Nopember-sampai sekitar bulan April). Temperatur Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 tertinggi mencapai

35,6°C di bulan November dan terendah 20,4°C di bulan Maret. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Maret sebesar 589,6 mm3.

Rata-rata kecepatan angin di Jawa Timur berkisar 6,5 – 7,7 Knot dan bulan Juli-Februari kecepatan angin diatas 7 knot. Sedangkan dibulan Maret-Juni kecepatan angin maksimal 7 knot. Rata-rata lama penyinaran matahari terendah dibulan Desember – April dibawah 70 persen, sedangkan pada bulan Mei – November rata-rata lama penyinaran diatas 80 persen, kecuali pada bulan Oktober yang rata-rata lama penyinaran paling rendah dalam tahun 2016 yaitu sebesar 36 persen.

Tabel II.4 Keadaan Cuaca Bulanan Tahun 2016

Bulan	Temperatur – Max (0C)	Temperatur – Min (0C)	Jumlah Curah Hujan (mm3)	Penyinaran Matahari	Kecepatan Angin Maks
Januari	35,4	23,5	167,1	69	7,1
Februari	34,0	24,1	589,6	52	7,7
Maret	34,3	20,4	251,6	67	6,5
April	34,4	24,2	235,1	68	7,0
Mei	33,7	23,6	392,8	76	6,7
Juni	33,0	23,3	174,0	70	6,8
Juli	32,2	23,8	258,4	84	7,2
Agustus	32,6	22,4	100,7	87	7,9
September	33,4	22,7	120,8	80	7,4
Oktober	34,3	24,0	501,7	36	7,5
November	35,6	24,6	52,6	89	7,0
Desember	35,4	23,6	132,4	62	7,5

Sumber : Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya

b. Curah Hujan

Curah hujan rata-rata antara 1.500 mm/tahun - 2.700 mm/tahun. Hingga bulan Desember seluruh wilayah di Jawa Timur sudah memasuki musim penghujan. Hampir setiap hari hujan mengguyur semua wilayah dengan intensitas ringan hingga lebat. Suhu rata-rata kisaran minimum 15,2 derajat celcius dan maksimal 34,2 derajat celcius. Berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson sebagian besar wilayah (52%) mempunyai iklim tipe D dengan kelembaban udara berkisar 40% hingga 97%.

Rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2015 terjadi di bulan Januari-Mei namun curah hujan tertinggi terjadi di Maret, yaitu sebesar 479,8 mm sedangkan curah hujan terendah terjadi di bulan Juni-September. Rata-rata jumlah hari hujan di bulan Januari - April lebih dari 20 hari. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi di bulan Pebruari, yaitu 25 hari sedangkan pada bulan Mei terjadi curah hujan sebesar 181,6 mm namun hanya memiliki jumlah hari hujan 12 hari. Kondisi tersebut juga terjadi di bulan Desember, yaitu dengan curah hujan 129,9 mm namun hari hujan hanya 17 hari. Di sisi lain, musim

kemarau terasa di bulan Juni hingga Nopemver 2015. Pada periode tersebut curah hujan sangat rendah, yaitu di bawah 20 mm dan jumlah hari hujan sangat sedikit di bawah 5 hari per bulannya.

c. *Suhu*

Suhu udara rata-rata berkisar 27-31<sup>0</sup>C tetapi juga terdapat wilayah yang memiliki suhu agak panas berkisar 31-35<sup>0</sup>C dan suhu sejuk antara 20-25<sup>0</sup>C. Wilayah dengan suhu agak panas umumnya berada di daratan rendah dan pesisir, sedangkan wilayah yang bersuhu sejuk umumnya di daerah dataran tinggi. Kelembaban udara rata-rata selama tahun 2015 adalah 66-83% dan maksimal kelembaban udara bias mencapai 99%, sedangkan terendah bias mencapai 37%. Rata-rata kecepatan angin di Jawa Timur berkisar 6,6-9 knot namun pada bulan Juli-Maret kecepatan angin di atas 7 knot sedangkan di bulan April-Juni di bawah 7 knot. Kecepatan angin tertinggi terjadi di bulan Oktober. Rata-rata lama penyinaran matahari terendah terjadi di bulan Desember-Maret , yaitu di bawah 70% sedangkan pada bulan lainnya di atas 85%. Penyinaran matahari terbanyak terjadi di bulan September dan Oktober, yaitu sebesar 99% sedangkan penyinaran matahari terendah terjadi di bulan Januari hanya sebesar 54%.

II.1.1.5 Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

a. *Kawasan Budidaya*

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi SDA, SDM, dan sumber daya buatan. Penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 4.201.403,70 Ha atau 87,90% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Gambaran perubahan proporsi penggunaan lahan di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurunnya luas wilayah pertanian. Pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 911.863 Ha atau 19,08% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur dengan tetap diiringi pelaksanaan pengendalian penggunaan lahan terbangun agar tidak mengkonversi luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis.

Tabel II.5 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur

No.	Penggunaan Lahan	Eksisting (Ha)	Prosentase (%)
B	Kawasan Budidaya	4.201.403,70	87,89
1	Kawasan Hutan Produksi	782.772,00	16,38
2	Kawasan Hutan Rakyat	361.570,30	7,56
3	Kawasan Pertanian	2.020.490,71	42,27
	a. Pertanian Lahan Basah	911.863,00	19,08
	b. Pertanian Lahan Kering/	1.108.627,71	23,19

No.	Penggunaan Lahan	Eksisting (Ha)	Prosentase (%)
	Tegalan/Kebun Campur		
4	Kawasan Perkebunan	359.481,00	7,52
5	Kawasan Industri	7.403,80	0,15
6	Kawasan Pemukiman	595.255,00	12,45
7	Lainnya	74.430,89	1,56

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

b. Kawasan Lindung

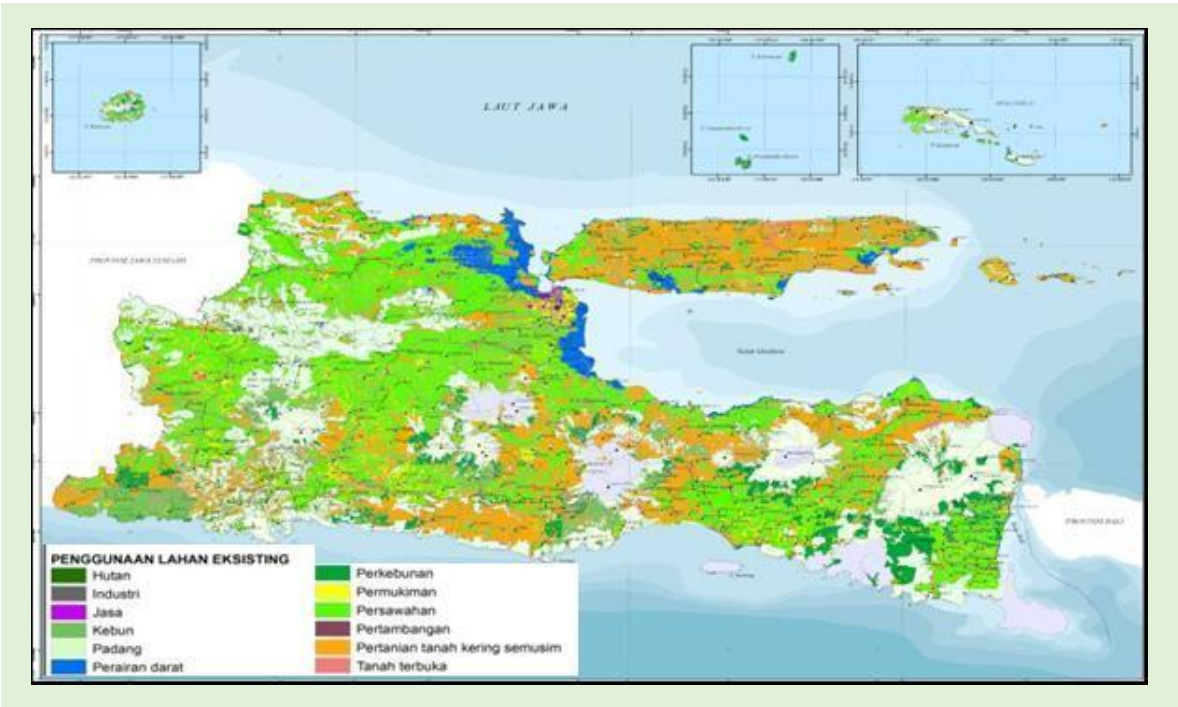
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup SDA dan sumber daya buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 578.374 Ha atau sekitar 12,10% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya kawasan lindung mutlak yang di dalamnya terdapat Cagar Alam seluas kurang lebih 10.958 Ha, Suaka Margasatwa seluas kurang lebih 18.009 Ha, Taman Nasional seluas kurang lebih 176.696 Ha, Taman Hutan Raya seluas kurang lebih 27.868,3 Ha serta Taman Wisata Alam seluas ± 298 Ha (SK Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011).

Tabel II.6 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur

No.	Penggunaan Lahan	Eksisting (Ha)	Prosentase (%)
A	Kawasan Lindung	578.571,30	12,11
1	Hutan Lindung	344.742,00	7,21
2	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam	233.829,30	4,90
	a. Suaka Margasatwa	18.009,00	0,38
	b. Cagar Alam	10.958,00	0,23
	c. Taman Nasional	176.696,00	3,70
	d. Taman Hutan Raya	27.868,30	0,58
	e. Taman Wisata Alam	298,00	0,01

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Gambar II.13 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur Tahun





2012  
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

II.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

II.1.2.1 Potensi Pertanian

Pengamanan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing potensi pengembangan komoditi produk Pertanian tahun 2019, dilakukan melalui kegiatan untuk meningkatkan produktivitas, jaminan kemudahan akses perbankan, perlindungan asuransi, peningkatan kesejahteraan petani dan mekanisasi/modernisasi sarana-prasarana Pertanian pada sentra-sentra produksi.

Sektor Pertanian merupakan peluang terbesar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di perdesaan. Untuk meningkatkan daya saing Pertanian, akan dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan Industri Primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna meningkatkan *Nilai Tambah Komoditi Produk Pertanian* serta kegiatan intensifikasi dan mekanisasi/modernisasi Pertanian dari hulu ke hilir untuk meningkatkan Indek Pertanaman (IP).

Gambar II.11 Peta Peruntukan Pertanian Pangan Lahan Basah dan Kering Perkebunan Provinsi Jawa Timur



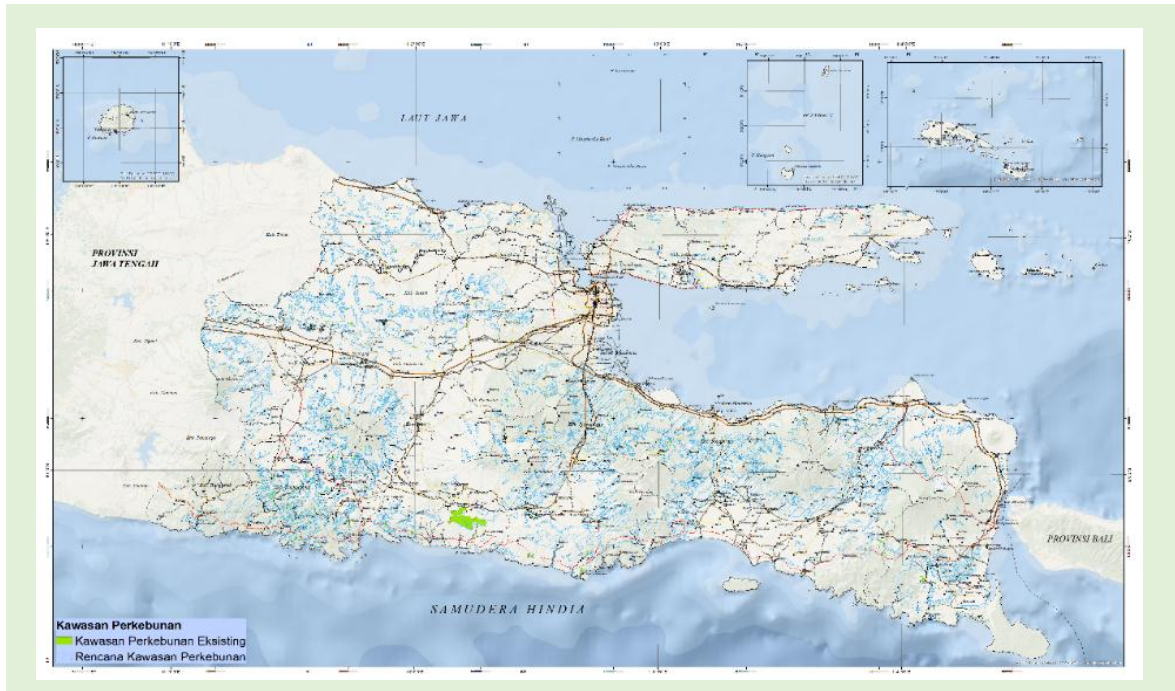
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Pengamanan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing potensi pengembangan komoditi produk perkebunan tahun 2019, dilakukan melalui kegiatan untuk meningkatkan produktivitas, jaminan kemudahan akses perbankan, perlindungan asuransi, mekanisasi sarana dan prasarana perkebunan serta upaya peningkatan kesejahteraan petani kebun.

Pengembangan kawasan perkebunan dibagi dalam 2 kelompok yaitu Perkebunan Tanaman tahunan seperti: tebu, tembakau, kapas, serat karung dan wijen dan Perkebunan tanaman semusim antara lain berupa: kelapa, kopi, kakao, cengkeh, jambu mete, cabe jamu, kapok randu, teh, kenanga, panili, lada, kemiri, jarak kepyar, jarak pagar, siwalan, serat nanas, pinang, kayu manis, asam jawa, aren, mendong, janggolan, nilam, pandan, nipah, pala, melinjo, karet, dan sebagainya.



Gambar II.12 Peta Potensi Perkebunan Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Untuk meningkatkan daya saing Petani Kebun (Pekebun), akan dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan Industri Primer yang diarahkan untuk pengembangan pasar baik internasional maupun domestik yang dilakukan dengan memperluas promosi komoditas dan produk perkebunan. Strategi yang bisa diterapkan adalah dengan mengefektifkan penerapan teknologi perkebunan dan mengefisienkan usaha perkebunan untuk menghasilkan output dengan biaya minimum. Potensi perkebunan lainnya dalam mendukung Peningkatan Daya Saing adalah adanya program pengembangan Industri Primer Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berupaya untuk *Meningkatkan Nilai Tambah Komoditi Perkebunan* yang fokus kegiatan pada Kopi dan Kakao serta adanya kesediaan Perhutani bila lahannya ditanami kopi pada lereng Gunung Wilis.

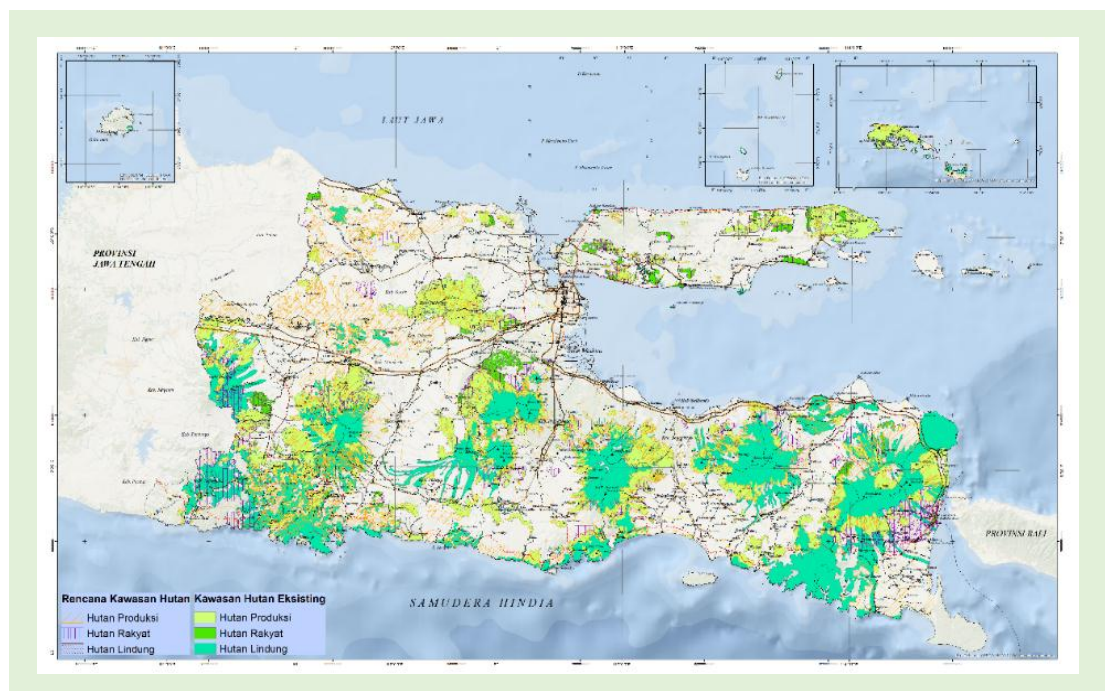
Kredit untuk sektor Pertanian mencatat pertumbuhan yang tinggi dan meningkat dari 35,61% (yoy) menjadi 49,73% (yoy) dalam periode yang sama. Hal ini disebabkan oleh peningkatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk KUR Tani dan kredit yang dikucurkan untuk perkebunan tebu. Upaya ini karena adanya penambahan pembukaan jaringan pemberian kredit KUR di daerah-daerah Pertanian, memudahkan akses para petani untuk dapat meminjam kredit. Suku bunga KUR yang diberikan relatif rendah sebesar 0,49%/bulan. Adanya program-program keterkaitan usaha (linkage) terhadap gabungan kelompok tani (gapoktan) dan perusahaan pengolah tebu dapat memberikan rasa aman bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor Pertanian.

Pengamanan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing potensi pengembangan komoditi produk hutan tahun 2019,

dilaksanakan melalui kegiatan untuk meningkatkan produktivitas dan promosi produk hutan.

Kawasan hutan budidaya dibedakan menjadi hutan produksi dan hutan rakyat. Hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Sedangkan Hutan rakyat dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan iklim makro, memenuhi kebutuhan akan hasil hutan dan berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Gambar II.14 Peta Potensi kawasan Kehutanan Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

#### II.1.2.2 Potensi Perikanan

Pengamanan ketahanan pangan dan penguatan konektivitas kemaritiman tahun 2019, dilakukan melalui kegiatan untuk peningkatan produktivitas, konservasi dan rahabilitasi laut, pesisir serta pulau-pulau kecil, optimalisasi kinerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI), jaminan kemudahan akses perbankan, perlindungan asuransi, peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan daya saing potensi pengembangan komoditi produk perikanan.

Gambar II.15 Peta Peruntukan Perikanan Budidaya Air Payau Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Berdasarkan Peta tersebut, pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri dari perikanan Budidaya Air Payau, perikanan Budidaya Air Tawar, dan perikanan Budidaya Air Laut. Sektor perikanan Budidaya Air Payau berada pada kawasan Ujung Pangkah dan Panceng di Kabupaten Gresik, serta Sedati di Kabupaten Sidoarjo dengan komoditas Ikan Bandeng dan Garam. Sedangkan potensi Garam yang merupakan salah satu potensi Budidaya Air Payau berada pada Kabupaten Bangkalan, Gresik, Lamongan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sumenep, Tuban, Kota Pasuruan, dan Surabaya. Perikanan Budidaya Air Tawar berada pada Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Magetan, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Jember, dan Banyuwangi. Perikanan Budidaya Air Laut tersebar pada wilayah pesisir seperti adanya sentra pengembangan ikan laut di bagian Pantai Utara Jawa Timur.

Stok ikan Nasional terus meningkat setiap tahun. Sejak 2013, stok perikanan meningkat dari 6,5 juta ton, hingga tahun 2017 menjadi 12,51 juta ton. Angka konsumsi ikan Nasional Tahun 2017 ditargetkan sebesar 47,12 Kg/Kapita, naik jika dibandingkan Tahun 2016 mencapai 43,94 Kg/Kapita (setara ikan utuh segar). Sementara Tingkat konsumsi ikan tertinggi di Jawa Timur, terjadi di Kabupaten Sumenep, sebesar 53 Kg per Kapita/Tahun, diatas rata-rata Jawa Timur sebesar 31 Kg per Kapita/Tahun. Untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan, harus segera dilakukan upaya Peningkatan Kinerja dari fungsi dari masing-masing TPI di wilayah kerja UPT di Kabupaten/Kota, yaitu untuk memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang yang partisipatif, transparan, akuntabel, professional, dan berkelanjutan, mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan Nelayan,



mempermudah pengumpulan data statistik seperti pendataan tentang volume ikan, jenis ikan dan pengontrol stabilitas harga ikan agar terlaksana dengan baik, tentunya harus ditunjang oleh sarana-prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang professional. Sementara, pengembangan kawasan Perikanan Tangkap memiliki prospek yang bagus yang didukung oleh revitalisasi Pelabuhan Ikan yang dikhususkan untuk penangkapan Ikan Tuna pada Wilayah Pantai Selatan yaitu Muncar di Kabupaten Banyuwangi, Pondok Dadap di Malang dan Tamperan di Pacitan. Waktu yang efektif untuk melakukan operasi penangkapan yaitu diatas 100% yang terjadi pada bulan april, Mei, Juni , Juli, Agustus, September, dan Oktober. Ikan Tuna adalah Ikan berlemak rendah yang berdaging tebal, tingkat migrasinya tinggi, kaya asam lemak omega 3, sangat bagus untuk menurunkan kolesterol jahat dan resiko penyakit jantung. Jenis Ikan Tuna sirip kuning banyak diburu. Ikan Tuna menduduki komoditas nomor dua setelah udang dalam nilai ekspor hasil perikanan. Selain dijual untuk pasar lokal, juga diekspor ke China, Jepang sampai Amerika Serikat (AS) untuk kebutuhan restoran, seperti di Jepang disajikan dalam bentuk sashimi. Harga Tuna Sirip Kuning dengan berat 7 Kg pada pasar lokal di kisaran Rp. 33.000 – 180.000/Kg sedangkan pada Pasar Eksport mencapai Rp. 1.100.000/Kg.

### II.1.2.3 Potensi Peternakan

Pengamanan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing komoditi produk peternakan tahun 2019, dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas, jaminan kemudahan usaha, perlindungan, serta upaya peningkatan kesejahteraan peternak melalui pengolahan produk derivate/pabrikan serta peningkatan informasi perkembangan dan pemasaran *produksi peternakan*.

Pada Tahun 2016 terjadi kenaikan kebutuhan daging sapi Nasional 2,56 Kg/Kapita/Tahun naik menjadi 2,61 Kg/Kapita/Tahun. Hal ini disebabkan kenaikan jumlah penduduk dan naiknya pendapatan per Kapita masyarakat yang mempengaruhi gaya hidup, daging sapi semakin banyak dikonsumsi. Pada akhir Tahun 2017, populasi sapi Jawa Timur mencapai 4,5 juta atau 28% dari populasi sapi Nasional.

Gambar II.16 Peta Klasifikasi Sapi Potong Provinsi Jawa Timur



*Sumber : Dinas Peternakan Jawa Timur*

#### II.1.2.4 Potensi Pertambangan

PDRB yang dihasilkan dari sektor pertambangan dan penggalian tercatat pada tahun 2016 sebesar Rp. 69,9 trilyun. Angka ini lebih tinggi Rp. 3,37 trilyun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 66,53 trilyun. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang berada pada kisaran 14,18 persen yang mampu mengantarkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,55 persen di tahun 2016. Pertumbuhan sektor ini sangat berarti, mengingat sektor utama pembangkit PDRB Jawa Timur (industri pengolahan dan pertanian) pertumbuhannya melambat.

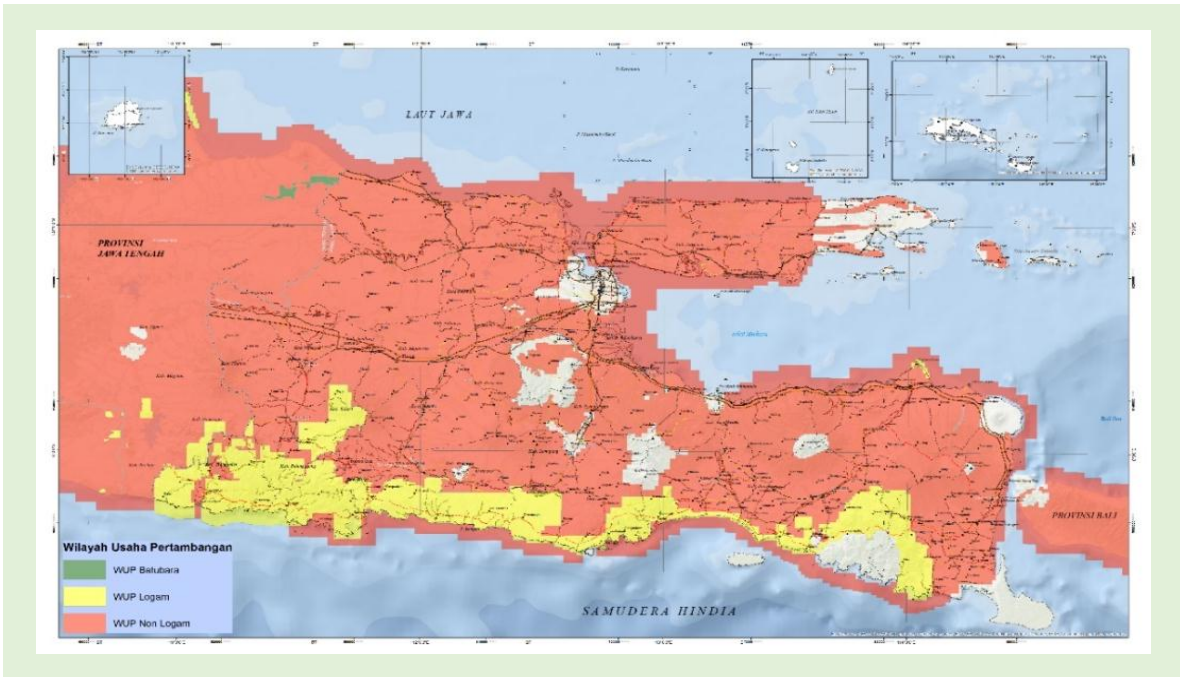
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, Kawasan peruntukan pertambangan di wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan mineral, pertambangan minyak dan gas bumi dan kawasan potensi daerah panas bumi.

##### 1. Pertambangan Mineral

Pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan mineral logam, mineral non logam dan batuan, diantaranya :

- a. Kawasan pertambangan mineral logam berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Jember, Lumajang, Malang, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung. Adapun potensi pertambangan mineral logam yang ada di Jawa Timur, diantaranya adalah Pasir Besi, Emas dan Mineral Pengikutnya, dan Mangan. Beberapa di antaranya sudah teridentifikasi, seperti di Kabupaten Pacitan diketahui terdapat potensi Pasir Besi sebesar kurang lebih 24.948.189 ton yang berada di Kecamatan Ngadirejo.
- b. Kawasan pertambangan mineral bukan logam tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur. Potensi pertambangan mineral bukan logam yang sejauh ini dianggap potensial meliputi: Bentonite, Phiropilit, Feldspar, Zeolit, Feldspar, Kaolin, Phiropilit, Toseki, Pasir/Sirtu, dan Pasir Kwarsa yang tersebar di berbagai kabupaten di Jawa Timur.
- c. Kawasan pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur, terutama pada wilayah sekitar gunung api. yaitu batuan gamping, andesit, trass, marmer, tanah liat, tanah urug, opal, kalsedon, diorit, pasir, sirtu, onyx, toseki, breksi, jasper dan tuff. Sedangkan untuk potensi Potensi batubara tersebar di tiga kabupaten yaitu Trenggalek, Pacitan dan Tulungagung.

Gambar II.17 Peta Wilayah Usaha Pertambangan Provinsi Jawa Timur



Sumber: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031

Gambar II.18 Peta Kawasan Potensi Pertambangan Batuan Provinsi Jawa



Timur

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031

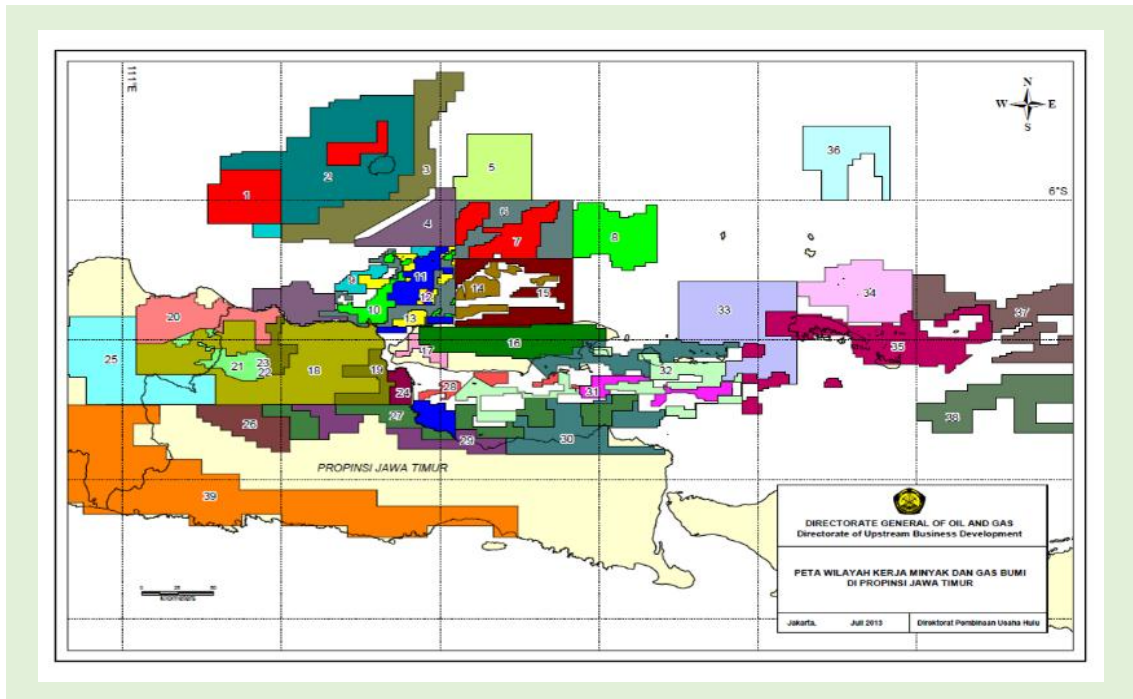
2. Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki potensi pertambangan migas yang cukup potensial, dimana cadangan migas yang telah terbukti maupun yang masih terduga masih sangat besar. Jawa Timur menduduki posisi peringkat ke-3 (tiga) sebagai daerah



penghasil pertambangan migas setelah Riau dan Kalimantan Timur. Di wilayah Jawa Timur terdapat 39 blok migas, yang berstatus Produksi sebanyak 13 (tiga belas) Wilayah Kerja, status eksplorasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) Wilayah Kerja dan status development sebanyak 3 (tiga) Wilayah Kerja.

Gambar II.19 Peta Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya



Sumber : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, 2013

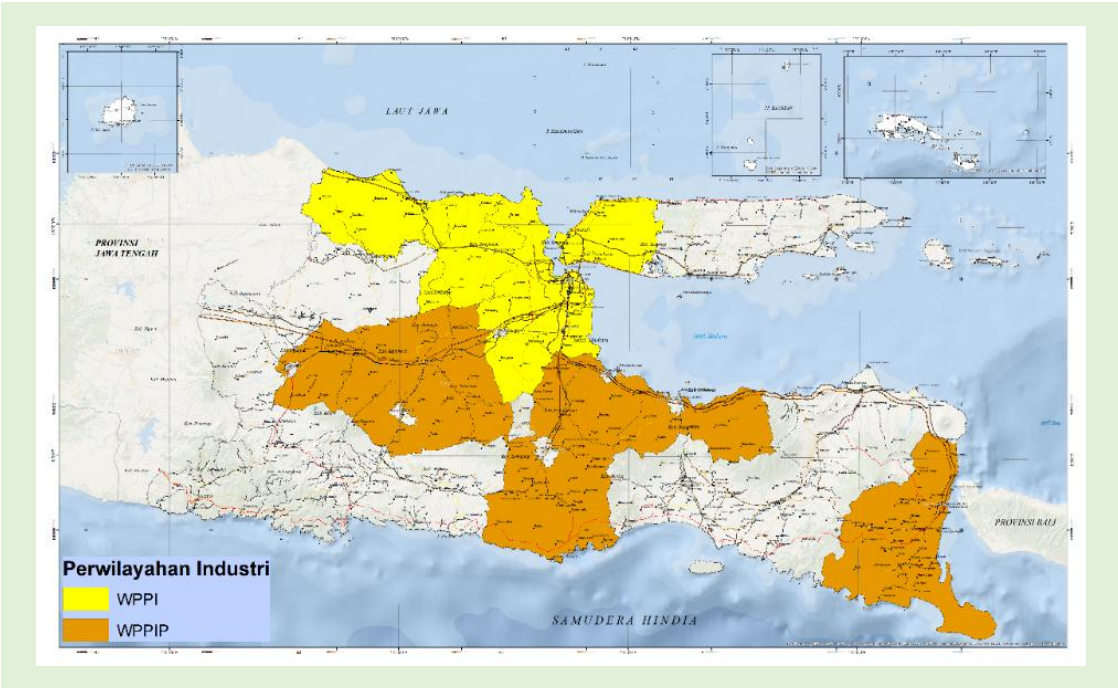
#### II.1.2.5 Potensi Industri

Sektor industri merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur dengan kontribusi hampir 29 persen, pengembangan kawasan industri baru di Jawa Timur sangat besar terutama di wilayah pantura serta sekitar Surabaya. Meskipun demikian beberapa wilayah lain juga potensial untuk mengembangkan kawasan industri terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara. Berbagai industri pengolah hasil alam lebih cenderung kewilayah utara Jawa Timur, diantaranya pengembangan kawasan industri Tuban, diarahkan pengembangan di wilayah utara dan selatan sebagai pengembangan industri semen, dan petrochemical dengan ditunjang oleh adanya pelabuhan, pengembangan kawasan industri Lamongan, diarahkan pengembangan di wilayah utara sebagai pengembangan industri manufaktur, pengalengan ikan, kawasan penunjang kegiatan dilepas pantai (Shorebase), pengembangan kawasan industri Banyuwangi, diarahkan pengembangan di wilayah timur selatan, sebagai pengembangan industri perikanan, pengembangan kawasan industri wilayah selatan, diarahkan di wilayah Kabupaten Jember tepatnya di Puger dan di wilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya di Prigi sebagai pengembangan kawasan industri perikanan, pengembangan kawasan industri Madiun, diarahkan sebagai pengembangan industri

perkeretaapian dengan melibatkan masyarakat pengrajin, pergudangan, pengembangan kawasan industri Bangkalan, diarahkan sebagai kawasan industri pengolahan, pergudangan.

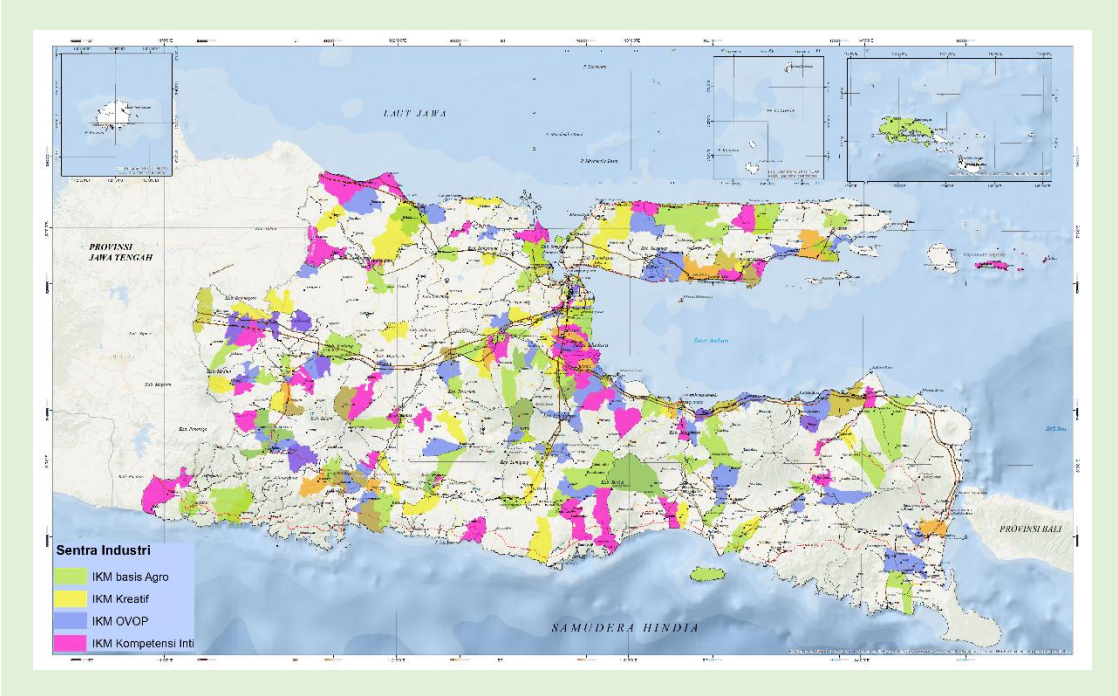
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 menyebutkan arahan pengembangan industri Pengembangan kawasan industri di Jawa Timur didasarkan pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri di Jawa Timur saat ini dan potensi kawasan. Pengembangan kawasan industri skala besar yang berdampak penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa pasar ekspor saat ini dikonsentrasikan di sekitar pantai utara Jawa, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo pada kawasan gerbangkertokusila. Industri kimia dasar berdampak penting terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah, seperti industri semen, farmasi, bahan makanan, serta petro kimia dapat dikonsentrasikan di wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan.

Gambar II.20 Peta Perwilayahan Idustri Provinsi Jawa Timur



Sumber : Rencana Induk Perindustrian Nasional

Gambar II.21 Peta Arahan Rencana Sentra Industri Provinsi Jawa Timur





#### II.1.2.6 Potensi Pariwisata

Jawa timur memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk dapat meningkatkan PDRB dan Pertumbuhan ekonominya, potensi yang dimiliki oleh Jawa Timur terdiri dari potensi wisata yang ada di daratan maupun di laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata hasil buatan manusia.

##### Daya Tarik Wisata Alam, meliputi:

1. Air Terjun Dlundung di Kabupaten Mojokerto;
2. Air Terjun Sedudo dan Pemandian Sumber Karya di Kabupaten Nganjuk;
3. Air Terjun Madakaripura, Bromo-Ngadisari, dan Pantai Bentar di Kabupaten Probolinggo;
4. Air Terjun Watu Ondo di perbatasan Kabupaten Mojokerto, Kota Batu;
5. Api Abadi di Kabupaten Pamekasan;
6. Arak-Arak di Kabupaten Bondowoso;
7. Banyuanget, Gua Gong, Gua Tabuhan, Pantai Teleng Ria di Kabupaten Pacitan;
8. Bukit Bededung dan Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo;
9. Coban Glotak, Pantai Balekambang, Pantai Ngliyep di Kabupaten Malang;
10. Danau Kastoba dan Pantai Labuhan di Pulau Bawean Kabupaten Gresik;
11. Grajagan, Pantai Plengkung, Pantai Sukamade, Kawah Ijen di Kab. Banyuwangi;
12. Gua Lowo, Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, dan Tirta Jualita di Kab.Trenggalek;
13. Gua Maharani dan Pantai Tanjung Kodok di Kabupaten Lamongan;
14. Gunung Kelud di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri;
15. Gunung Wilis di Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung;
16. Hutan Bambu, Pantai Watu Godeg, Ranu Bedali, Ranu Klakah, dan Ranu Pane di Kabupaten Lumajang;
17. Hutan Surya, Pemandian Talun, dan Waduk Pondok di Kab Ngawi;
18. Kakek Bodo di Kabupaten Pasuruan;
19. Kayangan di Kabupaten Bojonegoro;
20. Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso;
21. Pantai Lombang dan Pantai Slopeng di Kabupaten Sumenep;
22. Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung;
23. Pantai Rongkang di Kabupaten Bangkalan;
24. Pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember;

25. Pemandian Air Panas Cangar Tahura R. Soerjo di Kota Batu;
26. Tahura R. Soeryo di Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang,
27. Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu;
28. Taman Nasional Bromo–Tengger–Semeru (BTS) di Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo;
29. Telaga Ngebel dan Tirta Manggolo di Kabupaten Ponorogo; dan Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan.

Daya Tarik Wisata Budaya, meliputi:

1. Asta Yusuf, Asta Tinggi, Keraton, Masjid Agung, dan Museum di Kabupaten Sumenep;
2. Candi Jabung di Kabupaten Malang;
3. Candi Jabung Tirta di Kabupaten Probolinggo;
4. Candi Penampihan di Kabupaten Tulungagung;
5. Candi Penataran di Kabupaten Blitar;
6. Gereja Poh Sarang dan Petilasan Jayabaya di Kabupaten Kediri;
7. Gua Akbar, Makam Bekti Harjo, Makam Ibrahim Asmorokondi, dan Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban;
8. Kompleks Makam K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wachid Hasyim, Gus Dur, dan Sayid Sulaiman di Kabupaten Jombang;
9. Makam Aer Mata Ebu di Kabupaten Bangkalan;
10. Makam Batoro Katong di Kabupaten Ponorogo;
11. Makam Proklamator Bung Karno di Kota Blitar;
12. Makam Ratu Ebu di Kabupaten Sampang;
13. Makam Sunan Ampel dan Mbah Bungkul di Kota Surabaya;
14. Makam Sunan Drajat di Kabupaten Lamongan;
15. Makam Sunan Giri, Makam Maulana Malik Ibrahim, dan Fatimah Binti Maemun di Kabupaten Gresik;
16. Makam Troloyo di Kabupaten Mojokerto;
17. Pura Mandara Giri Semeru Agung di Kabupaten Lumajang; dan Situs Peninggalan Budaya Majapahit di Kabupaten Mojokerto.
18. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia

Daya tarik wisata hasil buatan manusia di wilayah Jawa Timur meliputi:

1. Bendungan Widas dan Taman Umbul Kab Madiun;
2. Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) di Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya;
3. Kebun Binatang Surabaya di Kota Surabaya;
4. Kebun Raya Purwodadi & Pemandian Banyubiru di Kab Pasuruan;
5. Kolam Renang Ubalan di Kabupaten Mojokerto;
6. Pemandian Blambangan, Pemandian Kebon Agung, dan Pemandian Petemon di Kabupaten Jember;
7. Pemandian Talun & Waduk Pondok Kabupaten Ngawi;
8. Sumber Boto dan Tirta Wisata di Kabupaten Jombang;
9. Taman Kosala Tirta, Taman Manunggal,& Tirtosari di Kab Magetan;
10. Taman Safari di Kabupaten Pasuruan;
11. Taman Sengkaling dan Waduk Selorejo Kab Malang;
12. Taman Suruh di Kabupaten Banyuwangi;

- 13. Ubalan Kalasan di Kabupaten Kediri;
- 14. Waduk Gondang dan Wisata Bahari Lamongan Kabupaten Lamongan; dan
- 15. Waduk Wonorejo di Kabupaten Tulungagung.

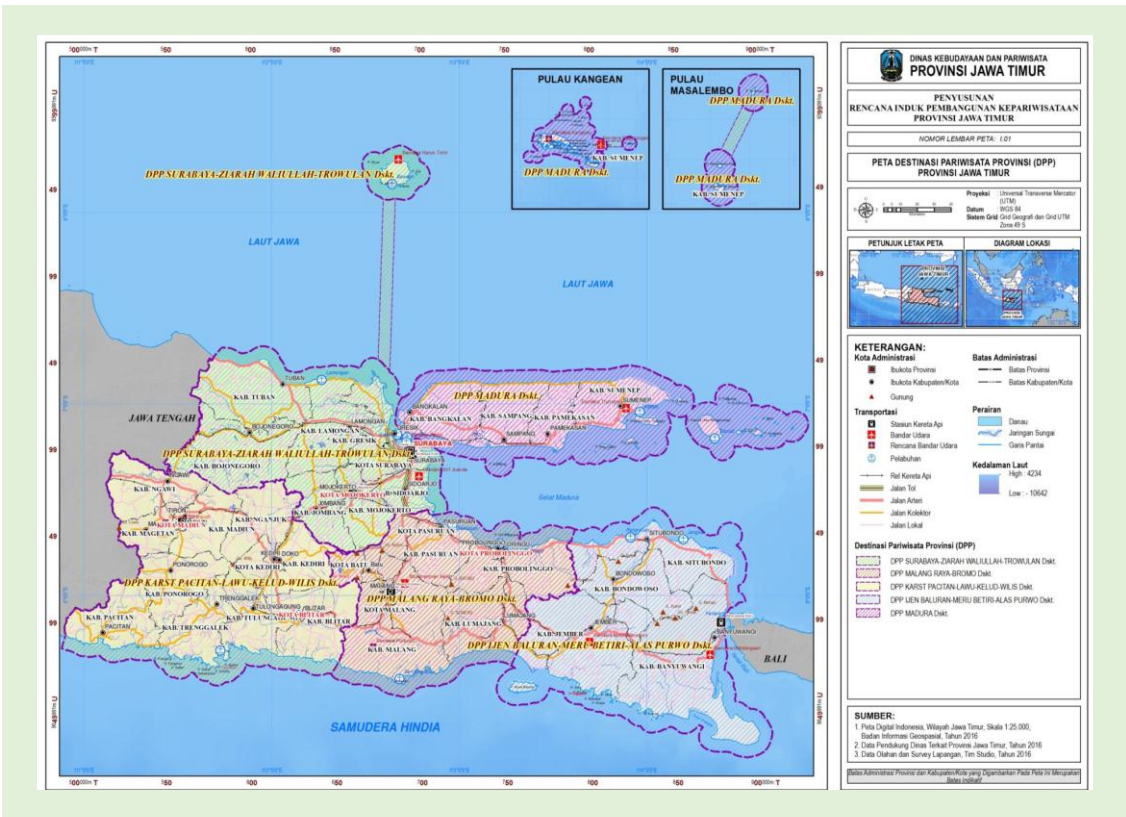
Gambar II.22 Peta Potensi Pariwisata Provinsi Jawa Timur



Sumber: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031

Daya Tarik Wisata yang merupakan potensi pariwisata Provinsi Jawa Timur, pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017- 2032 ditetapkan kewilayahan pariwisatanya pada Destinasi Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Gambar II.23 Peta Destinasi Pariwisata Provinsi Jawa Timur



*Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017– 2032*

Sesuai arahan dan penetapan dalam RZWP3K Provinsi Jawa Timur 2017-2037, untuk zona pariwisata pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diklasifikasikan ke dalam sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut, dan wisata olahraga air sesuai potensi sumber daya wisata bahari.

#### *Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*

Sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan area wisata bahari yang memanfaatkan potensi bentang darat pantai dan bentang laut. Bentang darat pantai ini antara lain pasir putih, ombak, biota pantai (kerang), dan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan antara lain kegiatan rekreasi olahraga susur pantai, bola voli pantai, bersepeda pantai, panjat tebing pada dinding terjal di pantai (cliff), dan menelusuri gua pantai. Wilayah pantai menawarkan jasa dalam bentuk panorama pantai yang indah, terutama pada pantai yang landai, memiliki ombak yang besar, dan berkesinambungan. Selain itu wisata ini juga memanfaatkan potensi bentang laut yaitu ombak, angin, arus laut, dan lain-lain dengan kegiatan berenang (swimming), memancing (fishing), bersampan yang meliputi mendayung (boating), sea kayaking dan berlayar (sailing), berelancar (surfing), parasailing, dan seacruising.

#### *Sub Zona Wisata Alam Bawah Laut*

Keragaman terumbu karang dan biota laut menjadi daya tarik untuk sub zona wisata alam bawah laut. Berbagai aktivitas wisata bawah laut yang dapat dilakukan wisatawan terdiri atas kegiatan menyelam (diving), snorkeling, dan coral viewing dengan alat bantu dan/atau kendaraan (kapal selam kaca mini) atau tanpa alat bantu sama sekali. Alokasi ruang untuk sub zona ini memerlukan analisis kesesuaian perairan untuk aktivitas wisata bawah laut yaitu snorkeling dan selam (diving).

#### *Sub Zona Wisata Olahraga Air*

Sub zona wisata olahraga air merupakan area wisata bahari yang memanfaatkan potensi bentang laut untuk kegiatan permainan dan olahraga air. Wisata jenis ini memanfaatkan potensi ombak, angin, arus laut, dan lain-lain dengan kegiatan berenang (swimming), memancing (fishing), bersampan yang meliputi mendayung (boating), sea kayaking dan berlayar (sailing), berelancar (surfing), parasailing, seacruising, atau olahraga lainnya. Alokasi ruang untuk sub zona ini khususnya perairan Jawa Timur menggunakan analisis kesesuaian perairan dan mengakomodasi kebijakan daerah setempat.

Gambar II.24 Peta Potensi Wisata Selam di Jawa Timur



Sumber : Draft Peraturan Daerah Perubahan RZWP3K Provinsi Jawa Timur

II.1.2.7 Potensi Panas Bumi

Sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Pemanfaatan energi panas bumi diyakini menjadi salah satu sumber energi alternatif. Potensi panas bumi di Wilayah Provinsi Jawa Timur berada pada lokasi yang berdekatan dengan gunung api aktif.

Tabel II.7 Potensi Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur

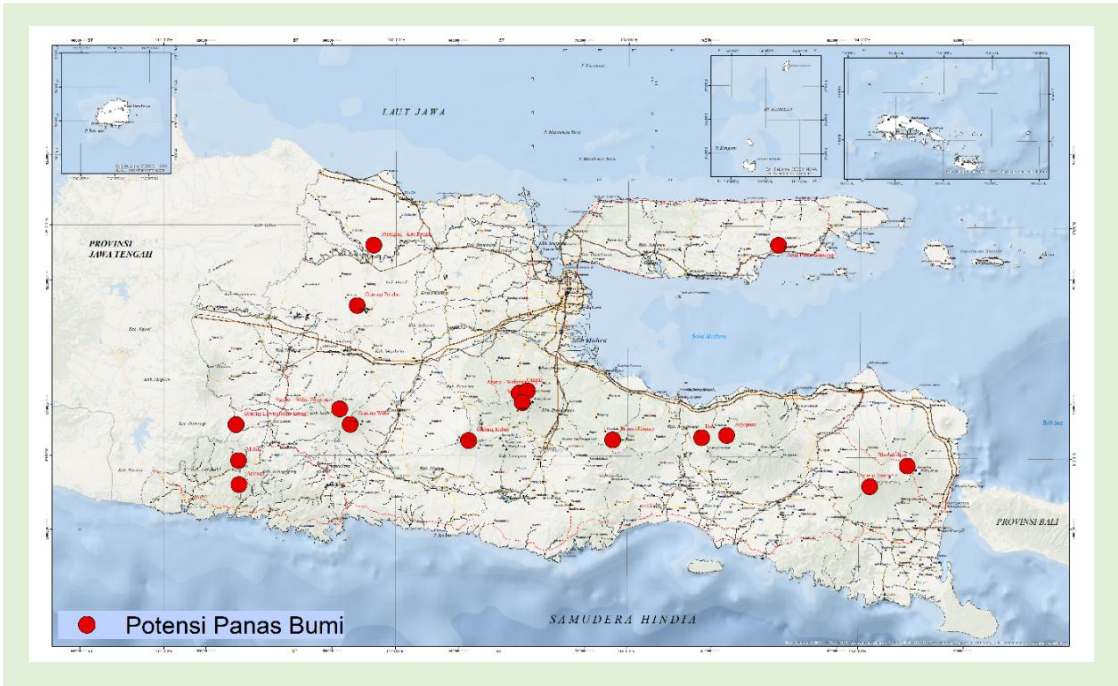
No.	Lapangan	Potensi (MWE)	Kabupaten / Kota	Keterangan
1	Gunung Lawu	195	Kab. Karanganyar, Sragen, Wonogiri (Prov. Jawa Tengah), Kab. Ngawi, Magetan (Prov. Jawa Timur) kewenangan Pusat	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2518 K/30/MEM/2014 13 Agustus 2012 Lelang oleh Pemerintah Pusat
2	Arjosari	18,5	Kab. Pacitan	Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jawa Timur
3	Melati	13,5	Kab. Pacitan	Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jawa Timur
4	Ngebel - Wilis	165	Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun	Eksplorasi Ijin Usah Pertambangan (IUP) 188/63/KPTS/119.3/2011 16 Juni 2011 PT. Medco



No.	Lapangan	Potensi (MWE)	Kabupaten / Kota	Keterangan
				Cahaya Geothermal
5	Gunung Wilis	50	Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2775 K/30/MEM/2014 3 Juni 2014
6	Gunung Pandan	60	Kab. Madiun dan Kab. Bojonegoro	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2774 K/30/MEM/2014 3 Juni 2014
	Songgoriti	35	Kota Batu dan Kab. Malang	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2776 K/30/MEM/2014 2 Juni 2014
8	Arjuno - Welirang	185	Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan dan Kab. Malang	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2773K/30/MEM/ 2014 (3 Juni 2014)
9	Bromo - Tengger	-	Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Malang dan Kota Malang	Penugasan Survey Pendahuluan (PSP) 2903 K/30/MEM/2013 30 Juli 2013 PT. Hitay Renewable Energy
10	Krucil-Tiris	147	Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang	Penugasan Survey Pendahuluan (PSP) PT. Hitay Rawas Energy
11	Iyang - Argopuro	295	Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang	Eksplorasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 1521K/034/M.PE/1990 30 Oktober 1990 PT. Pertamina Geothermal Energy
12	Gunung Raung	-	Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi	Pelaksanaan Survey Pendahuluan Panasbumi (PSP) PT. Hitay Runcing Energy
13	Blawan - Ijen	110	Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi dan Kab. Situbondo	Eksplorasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 188/62/KPTS/119.3/2011 25 Mei 2011 PT. Bakrie Dharmakarya Energy
14	Pulau Bawean	14,5	Kabupaten Gresik	Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jawa Timur
15	Gunung Kelud	Potensi yang belum teridentifikasi	Kabupaten Blitar dan Kediri	Terdapat Sumber air panas yang diduga berasal dari kawah Gunung Kelud
16	Parengan - Kec. Rengel	Potensi yang belum teridentifikasi	Kabupaten Tuban	Terdapat sumber air panas: 1. Dsn. Nganget Ds. Kedungjambe Kec. Singgahan T = 46,6 °C pH = 6,9 2. Dsn. Prataan Ds. Wukiharjo Kec. Parengan T = 43,8 °C pH = 6,99

Sumber : Dinas ESDM Prov Jawa Timur

Gambar II.25 Peta Potensi Panas Bumi Provinsi Jawa Timur

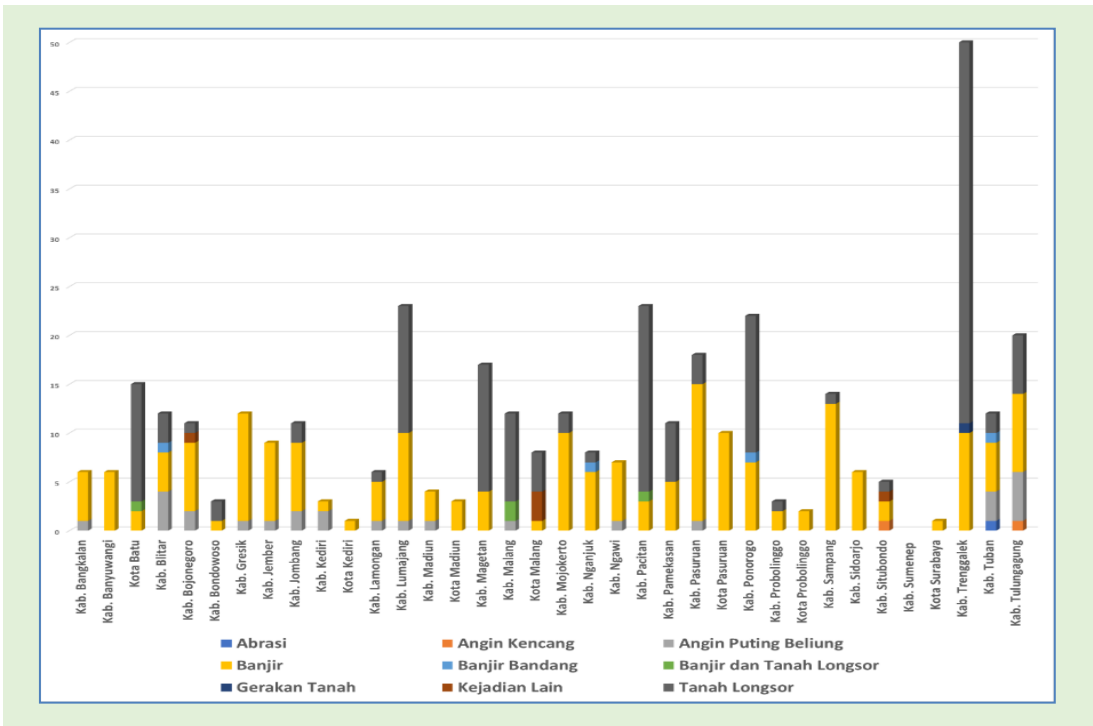


Sumber: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031

II.1.3 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Di Provinsi Jawa Timur, kawasan rawan bencana diklasifikasikan dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana kebakaran hutan, Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api, kawasan rawan angin kencang dan puting beliung, kawasan rawan bencana tsunami. Dengan adanya bencana ini dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian harus melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, melalui pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini. Rincian kejadian bencana adalah sebagai berikut :

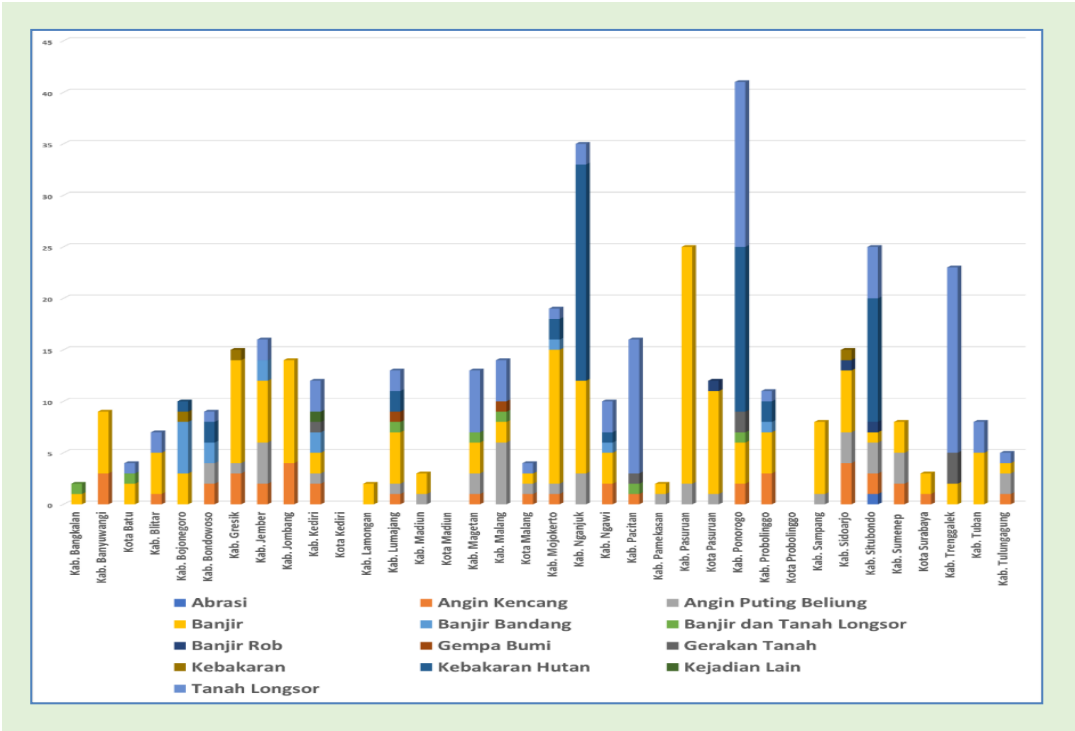
Gambar II.26 Grafik Kejadian Bencana Tahun 2016





Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2018

Gambar II.27 Grafik Kejadian Bencana Tahun 2017



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2018

Tabel II.8 Kejadian Bencana Abrasi, Angin Kencang, Angin Puting Beliung, Banjir, Banjir Bandang, Banjir dan Tanah Longsor, Banjir Rob di Jawa Timur Tahun 2016-2017

Kabupaten/Kota	Abrasi		Angin Kencang		Angin Puting Beliung		Banjir		Banjir Bandang		Banjir dan Tanah Longsor		Banjir Rob
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2017
Kabupaten Bangkalan					1		5	1				1	
Kabupaten Banyuwangi				3			6	6					
Kota Batu							2	2			1	1	
Kabupaten Blitar				1	4		4	4	1				
Kabupaten Bojonegoro					2		7	3		5			
Kabupaten Bondowoso				2		2	1			2			
Kabupaten Gresik				3	1	1	11	10					
Kabupaten Jember				2	1	4	8	6		2			
Kabupaten Jombang				4	2		7	10					
Kabupaten Kediri				2	2	1	1	2		2			
Kota Kediri							1						
Kabupaten Lamongan					1		4	2					
Kabupaten Lumajang				1	1	1	9	5				1	
Kabupaten Madiun					1	1	3	2					
Kota Madiun							3						
Kabupaten Magetan				1		2	4	3				1	
Kabupaten Malang					1	6		2			2	1	
Kota Malang				1		1	1	1					
Kabupaten Mojokerto				1		1	10	13		1			
Kabupaten Nganjuk						3	6	9	1				
Kabupaten Ngawi				2	1		6	3		1			
Kabupaten Pacitan				1			3				1	1	
Kabupaten Pamekasan						1	5	1					
Kabupaten Pasuruan					1	2	14	23					
Kota Pasuruan						1	10	10					1

Kabupaten/Kota	Abrasi		Angin Kencang		Angin Puting Beliung		Banjir		Banjir Bandang		Banjir dan Tanah Longsor		Banjir Rob
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2017
Kabupaten Ponorogo				2			7	4	1			1	
Kabupaten Probolinggo				3			2	4		1			
Kota Probolinggo							2						
Kabupaten Sampang						1	13	7					
Kabupaten Sidoarjo				4		3	6	6					1
Kabupaten Situbondo		1	1	2		3	2	1					1
Kabupaten Sumenep				2		3		3					
Kota Surabaya				1			1	2					
Kabupaten Trenggalek							10	2					
Kabupaten Tuban	1				3		5	5	1				
Kabupaten Tulungagung			1	1	5	2	8	1					
J U M L A H	1	1	2	39	27	39	187	153	4	14	4	7	3

Tabel II.9 Kejadian Bencana Gempa Bumi, Gerakan Tanah, Kebakaran, Kebakaran Hutan, Kejadian Lain, dan Tanah Longsor di Jawa Timur Tahun 2016-2017

Kabupaten/Kota	Gempa Bumi	Gerakan Tanah		Kebakaran	Kebakaran Hutan	Kejadian Lain		Tanah Longsor	
	2017	2016	2017	2017	2017	2016	2017	2016	2017
Kota Batu								12	1
Kabupaten Blitar								3	2
Kabupaten Bojonegoro				1	1	1		1	
Kabupaten Bondowoso					2			2	1
Kabupaten Gresik				1					
Kabupaten Jember									2
Kabupaten Jombang								2	
Kabupaten Kediri			1				1		3
Kabupaten Lamongan								1	
Kabupaten Lumajang	1				2			13	2
Kabupaten Magetan								13	6
Kabupaten Malang	1							9	4
Kota Malang						3		4	1
Kabupaten Mojokerto					2			2	1
Kabupaten Nganjuk					21			1	2
Kabupaten Ngawi					1				3
Kabupaten Pacitan			1					19	13
Kabupaten Pamekasan								6	
Kabupaten Pasuruan								3	
Kabupaten Ponorogo			2		16			14	16
Kabupaten Probolinggo					2			1	1
Kabupaten Sampang								1	
Kabupaten Sidoarjo				1					
Kabupaten Situbondo					12	1		1	5

Kabupaten/Kota	Gempa Bumi	Gerakan Tanah		Kebakaran	Kebakaran Hutan	Kejadian Lain		Tanah Longsor	
	2017	2016	2017	2017	2017	2016	2017	2016	2017
Kabupaten Trenggalek		1	3					39	18
Kabupaten Tuban								2	3
Kabupaten Tulungagung								6	1
J U M L A H	2	1	7	3	59	5	1	155	85



Berdasarkan Buku III RPJMN Tahun 2015-2019 menyebutkan hampir sebagian besar wilayah perkotaan di Jawa Timur memiliki indeks kerawanan yang tinggi untuk ancaman banjir, pada wilayah yang memiliki gunung aktif juga memiliki indeks kerawanan yang tinggi untuk ancaman letusan gunung berapi.

Tabel II.10 Profil Kerawanan dan Resiko Bencana di Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Indeks Kerawanan (IRBI 2011)
1	Malang	Tinggi untuk ancaman banjir, gempabumi
2	Gresik	Tinggi untuk ancaman banjir, tanah longsor, angin topan
3	Bangkalan	Tinggi untuk ancaman banjir
4	Mojokerto	Tinggi untuk ancaman banjir dan tanah longsor
5	Surabaya	Tinggi untuk ancaman cuaca ekstrim
6	Sidoarjo	Tinggi untuk ancaman banjir
7	Lamongan	Tinggi untuk ancaman banjir
8	Tuban	Tinggi untuk ancaman banjir
9	Bojonegoro	Tinggi untuk ancaman banjir
10	Pacitan	Tinggi untuk ancaman banjir dan tanah longsor
11	Kediri	Tinggi untuk ancaman letusan gunung api
12	Jember	Tinggi untuk ancaman banjir dan tanah longsor, angin topan
13	Banyuwangi	Tinggi untuk ancaman gempabumi, tsunami, angin topan, kekeringan
14	Blitar	Tinggi untuk ancaman letusan gunung api, gempa bumi
15	Madiun	Tinggi untuk ancaman angin topan, kekeringan
16	Probolinggo	Tinggi untuk ancaman banjir
17	Mojokerto	Tinggi untuk ancaman banjir
18	Pamekasan	Tinggi untuk ancaman banjir

Sumber : Buku III RPJMN Tahun 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, terdapat 2 arahan kawasan rawan bencana yaitu Kawasan Rawan Bencana Alam dan Kawasan rawan Bencana Alam Geologi. Kawasan rawan bencana alam dikelompokkan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, kawasan rawan bencana kebakaran hutan serta kawasan rawan angin kencang dan puting beliung. Selain itu Kawasan rawan bencana alam geologi di Provinsi Jawa Timur meliputi kawasan rawan bencana letusan gunung api, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan bencana tsunami dan kawasan rawan luapan lumpur.

Dengan adanya potensi bencana yang dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh, maka harus dilakukan antisipasi

terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, melalui pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini.

Berdasarkan data hasil pemetaan yang bersumber dari Pusdalops-PB BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki resiko ancaman bencana, secara keseluruhan dapat dikelompokkan dalam katagori rendah, sedang dan tinggi sebagaimana nampak pada tabel berikut ini.

Tabel II.11 Klasifikasi Katagori Kebencanaan Umum

NO	KATEGORI	KABUPATEN/KOTA
1.	Rendah	Hampir di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2.	Sedang	Hampir di semua pesisir Madura, Wilayah Pantai Selatan serta Wilayah Kabupaten Tuban, Gresik dan Lamongan.
3.	Tinggi	Kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Banyuwangi, Situbondo, Sidoarjo, Tuban, Malang, Kediri, Madiun dan Lumajang.

Sumber : Pusdalops-PB BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

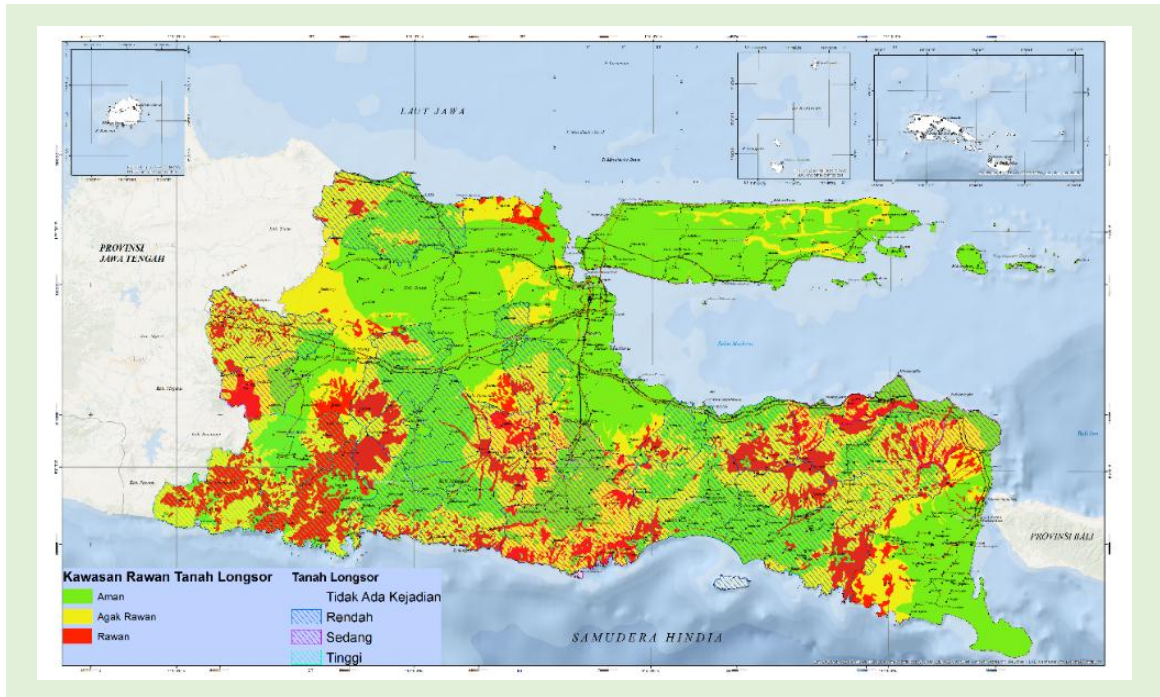
II.1.3.1 Kawasan Rawan Bencana Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Kriteria penetapan kawasan rawan tanah longsor menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan.

Secara umum klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor di Jawa Timur terbagi dalam tiga klasifikasi yakni Rawan, Agak Rawan, dan Aman. Wilayah dengan klasifikasi tingkat kerawanan agak rawan hingga rawan berada pada wilayah dengan kelerengan menengah hingga curam atau berada pada bentang alam berupa gunung dan perbukitan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar II.28 Peta Rawan Bencana Longsor



*Sumber : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031; dan Tabel Kejadian Bencana Jawa Timur 2016-2017*

#### II.1.3.2 Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

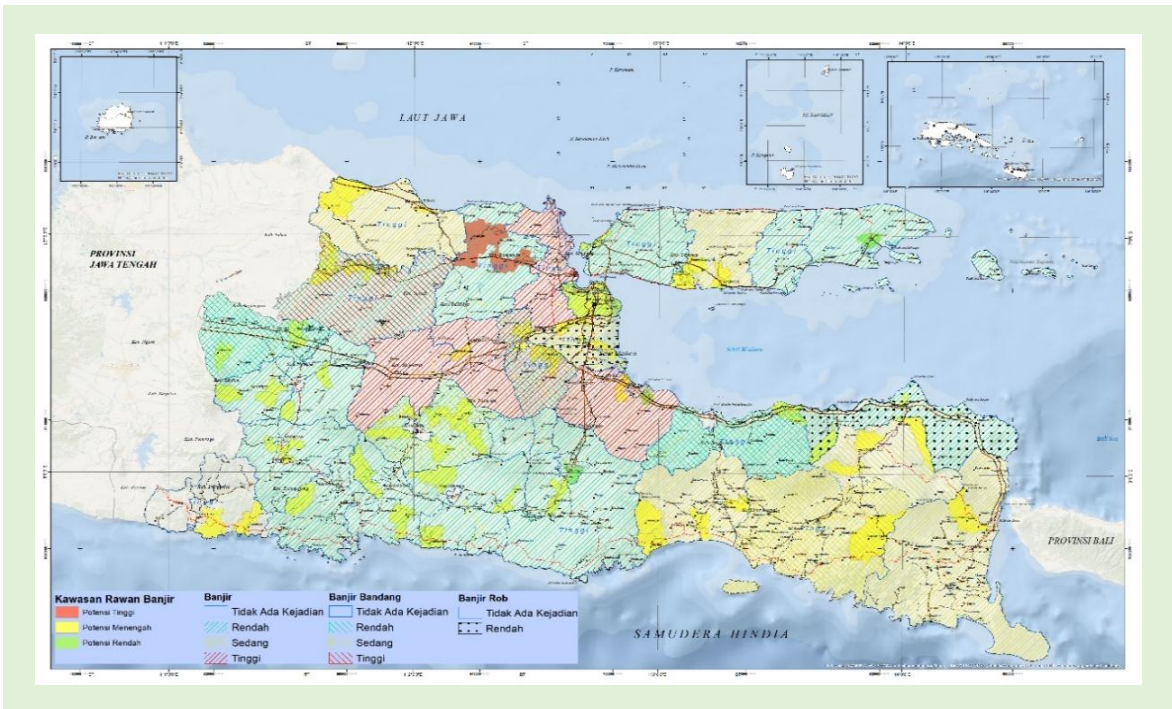
Gelombang pasang merupakan gelombang yang ditimbulkan oleh gaya tarik menarik antara bumi dengan planet-planet lain terutama dengan bulan dan matahari, gelombang ini mempunyai periode sekitar 12,4 jam dan 24 jam. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Provinsi Jawa Timur berada di kawasan sepanjang pantai di wilayah Jawa Timur baik yang berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Bali, Selat Madura, Samudera Hindia maupun di kawasan kepulauan.

#### II.1.3.3 Kawasan Rawan Bencana Banjir

Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Secara

detail lokasi terjadinya banjir beserta tingkat potensi bahaya tersaji dalam tabel berikut:

Gambar II.29 Peta Rawan Banjir di Provinsi Jawa Timur



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031; Buku III RPJMN Tahun 2015-2019; dan Tabel Kejadian Bencana Jawa Timur 2016-2017

II.1.3.4 Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Puting Beliung

Kebakaran hutan merupakan peristiwa dimana terbakarnya hutan atau adanya titik - titik api/panas yang rentan terbakar. Kebakaran hutan secara alami umumnya disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim, aliran magma/lava/lahar dari letusan gunung berapi di vegetasi hutan dan objek lainnya maupun pada lahan gambut. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan angin kencang di Jawa Timur umumnya terjadi pada kawasan Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Welirang dan Gunung Kelud dan kawasan - kawasan lainnya dengan potensi angin puting beliung.

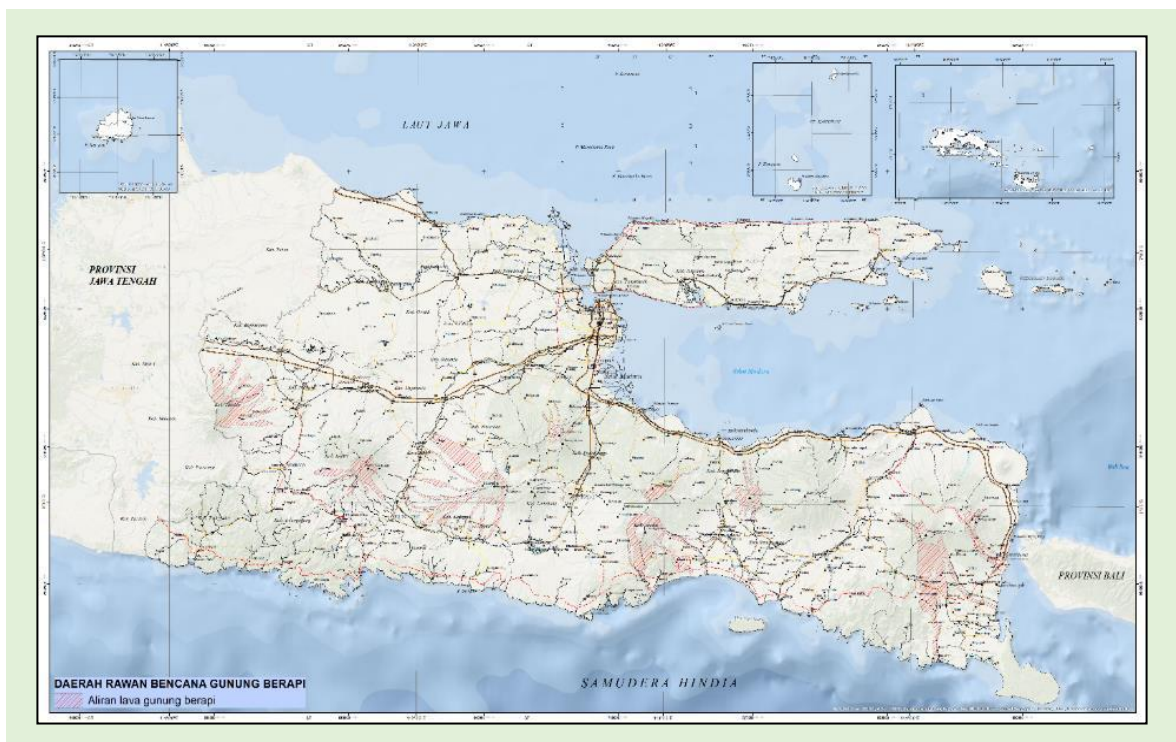
II.1.3.5 Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api

Kawasan rawan letusan gunung berapi merupakan kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi terancam bahaya letusan gunung api baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi daerah terlarang, daerah bahaya I, dan daerah bahaya II. Kawasan rawan letusan gunung berapi di Jawa Timur berada pada lereng



gunung berapi yang masih aktif. Terdapat 7 gunung api aktif di Jawa Timur serta lokasi yang merupakan wilayah rawan. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria penetapan kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi: Wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan Wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.

Gambar II.30 Peta Rawan Bencana Gunung Berapi



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

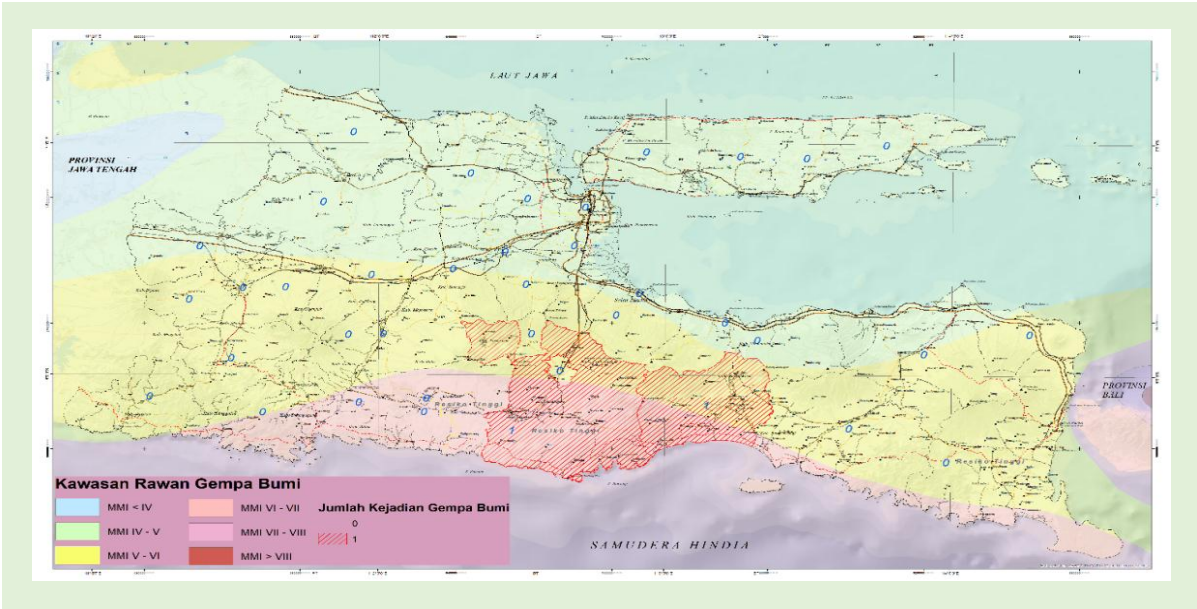
#### II.1.3.6 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Kawasan Rawan Gempa bumi merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi yang mengakibatkan berguncangnya bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan. Kekuatan gempa bumi akibat aktivitas gunung api dan runtuhnya batuan relatif kecil sehingga kita akan memusatkan pembahasan pada gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif. Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, tetapi umumnya berskala kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang besar melalui beberapa cara termasuk retakan pecah (fault rupture), getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan

muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau perlepasan bahan beracun.

Kriteria kawasan rawan gempa menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Kawasan rawan bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Timur berada di wilayah: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung.

Gambar II.31 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa



Timur

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

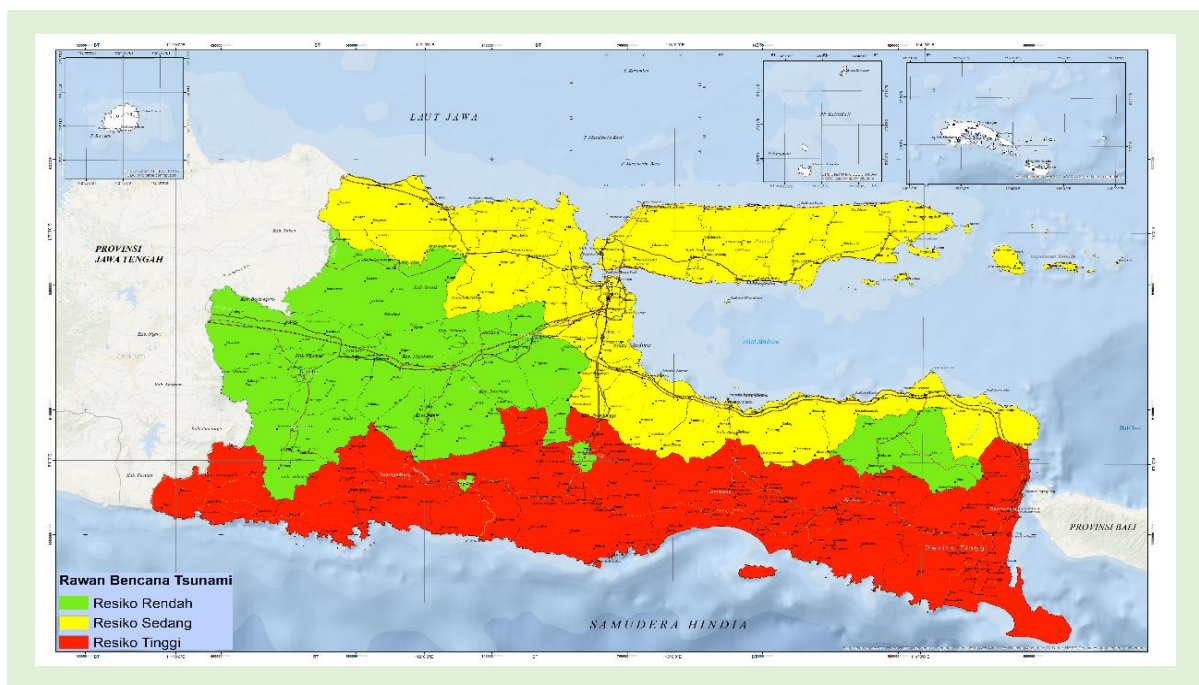
II.1.3.7 Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan pada angka kejadian di masa lalu serta keberadaan lempeng tektonik. Berdasarkan kondisi geologi, selain kaya akan sumberdaya alam wilayah selatan Jawa juga merupakan daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, seperti rawan gempa tektonik dan vulkanik disepanjang “ring of fire” yang melintasi Sumatra – Jawa – Bali – Nusa Tenggara – Banda – Maluku yang berdampak terhadap adanya bencana

tsunami. Tingkat resiko tsunami di Jawa timur diklasifikasikan menjadi:

- Resiko Tinggi tsunami, meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi.
- Resiko Sedang tsunami, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.
- Resiko Rendah tsunami, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Magetan, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bondowoso.

Gambar II.32Peta Rawan Bencana Tsunami



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, 2012

#### II.1.3.8 Kawasan Rawan Bencana Luapan Lumpur

Kawasan luapan lumpur meliputi area terdampak dari bahaya luapan lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah

(land subsidence) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Arahana pengelolaan kawasan luapan lumpur dibagi menjadi :

- 1) Penanganan luapan lumpur meliputi :
  - Peningkatan kapasitas tampungan kolam lumpur berfungsi melindungi permukiman dan infrastruktur vital;
  - Pemanfaatan debit Kali Porong yang cukup besar di musim hujan untuk melancarkan aliran endapan lumpur.
- 2) Penanganan infrastruktur sekitar semburan lumpur meliputi:
  - Penanganan sistem drainase dengan memperbaiki atau membuat saluran drainase baru;
  - Normalisasi saluran drainase utama;
  - Perbaikan jalan lingkungan untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Arteri Porong dan perbaikan sebagian ruas Jalan Arteri Porong.
  - Peningkatan jalan alternatif lainnya sepanjang  $\pm$  14 km untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Arteri Porong;
  - Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bebas hambatan Surabaya-Gempol;
  - konstruksi relokasi pipa air baku PDAM Kota Surabaya.
- 3) Pengamanan Kali Porong meliputi:
  - Penjagaan kapasitas pengaliran Kali Porong;
  - Penjagaan keamanan tanggul dan tebing sungai dengan memasang perlindungan tebing sungai/tanggul.
- 4) Penanganan dampak sosial masyarakat akibat luapan lumpur meliputi:
  - Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur maupun penurunan tanah;
  - Perlindungan sosial terhadap hak-hak masyarakat atas harta benda miliknya yang hilang atau berkurang karena dampak luapan lumpur;
  - Pemulihan sosial masyarakat yang terkena luapan lumpur.

#### II.1.3.9 Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

Kawasan Rawan Kekeringan merupakan kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan berhubungan dengan ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

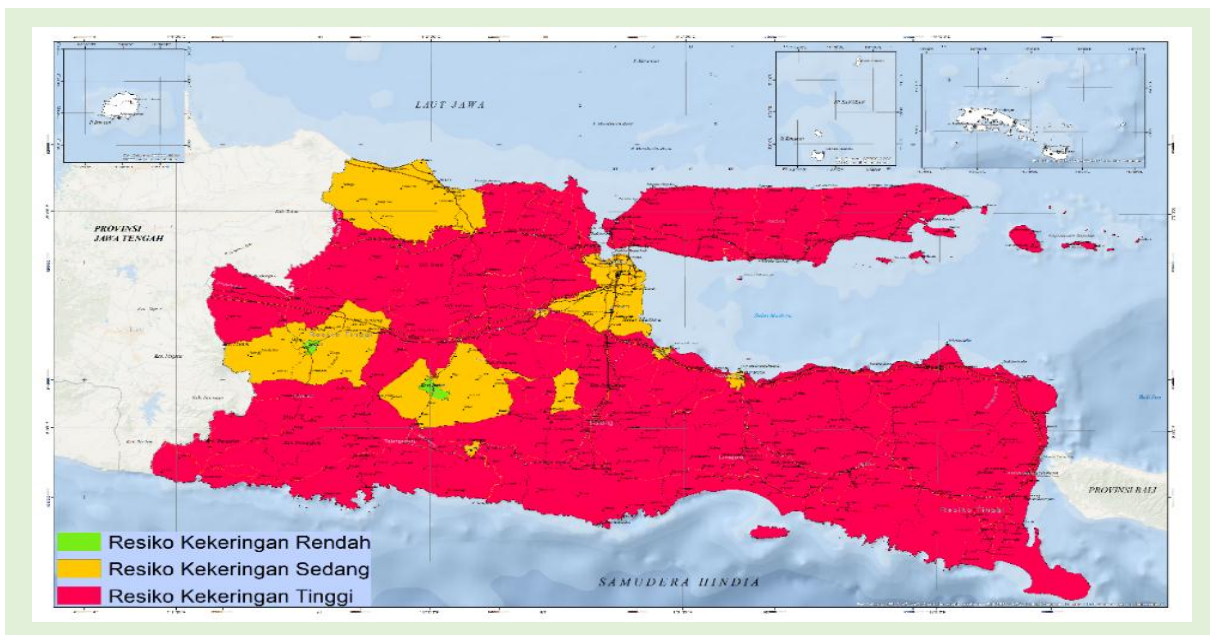


Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2012, tingkat resiko bencana kekeringan terbagi dalam:

- a. Resiko Kekeringan Rendah, meliputi Kota Madiun, dan Kota Kediri.
- b. Resiko Kekeringan Sedang, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Blitar, dan Kota Batu.
- c. Resiko Kekeringan Tinggi, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten/Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.

Lebih lanjut rinci, berdasarkan hasil pengamatan tim teknis Pemerintah Provinsi Jawa Timur, didapatkan informasi sebanyak 422 Desa termasuk daerah rawan kekeringan. Dari sebanyak itu, sebanyak 223 Desa termasuk daerah yang berpotensi air sedangkan sebanyak 199 Desa merupakan daerah yang tidak berpotensi air/benar-benar kering tidak ada airnya sama sekali

Gambar II.33 Peta Rawan Bencana Kekeringan



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, 2012

#### II.1.4 Aspek Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu

##### II.1.4.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Konsep penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan tujuan untuk menetap (BPS, 2014;102).

Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun demikian juga dapat menjadi hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini akan terjadi apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Komposisi penduduk timpang akan menyebabkan beban kerja pemerintah semakin berat, sementara masalah kepadatan penduduk dapat mengakibatkan masalah lingkungan karena daya dukung alam yang tidak memadai. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan agar dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir ( 2013–2017) jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami kenaikan. Akan tetapi laju pertumbuhan penduduk selalu menurun, dari 0,67 tahun 2013 menjadi 0,56 pada tahun 2017. Ini mengindikasikan bahwa program Keluarga Berencana/KB di Jawa Timur cukup terkendali. Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 39.293 juta jiwa, terdiri dari 19,4 juta laki-laki dan 19,9 juta jiwa perempuan. Sex ratio penduduk sebesar 97,50, artinya setiap per 100 orang perempuan terdapat laki-laki sebanyak 97,50 orang.

Rata-rata kepadatan penduduk Jawa Timur tahun 2017 meningkat 4 poin dibanding tahun 2016 mencapai 819 jiwa per km<sup>2</sup>. Sekitar 7,3 persen penduduk Jawa Timur tinggal di Kota Surabaya. Hal ini mengingat Kota Surabaya memiliki ketersediaan lapangan kerja

yang cukup menjanjikan. Kota Surabaya merupakan wilayah terpadat, dengan kepadatan 8.600 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan terendah tercatat di Banyuwangi dengan kepadatan 277 jiwa per km<sup>2</sup>. Umumnya daerah perkotaan mempunyai kepadatan lebih tinggi dibanding perdesaan.

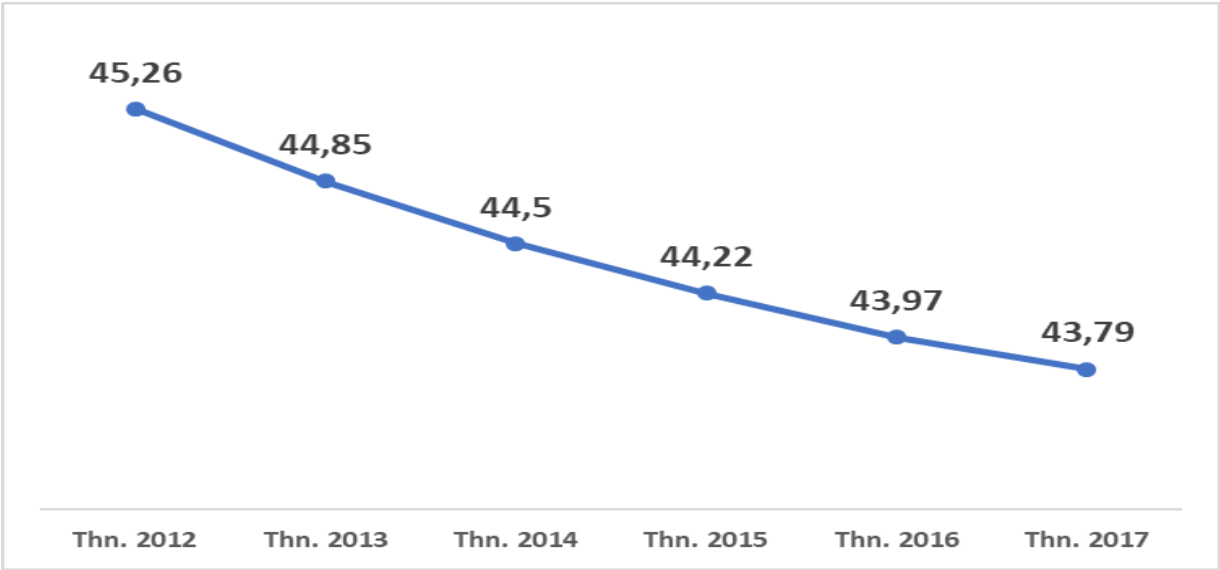
Tabel II.12 Indikator Kependudukan Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	38.363	38.610	38.847	39.075	39.293
2	Pertumbuhan Penduduk (%)	0,67	0,64	0,61	0,59	0,56
3	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	800	805	810	815	819
4	Sex Ratio (L/P) (%)	97,43	97,40	97,44	97,48	97,50
5	Jumlah Rumah Tanggal (000 ruta)	10.656	10.775	10.676	10.801	-
6	Rata-Rata ART (jiwa/ruta)	3,6	3,6	3,62	3,62	-
Menurut Kelompok Umur						
7	0 - 14 thn (%)	23,75	23,47	23,19	22,91	22,64
8	15 - 64 thn (%)	69,04	69,20	69,34	69,46	69,54
9	Di atas 65 thn (%)	7,21	7,33	7,47	7,63	7,82

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tahun 2017 distribusi penduduk usia muda tercatat sebesar 22,64 persen, usia produktif sebesar 69,54 persen dan usia tua sebesar 7,82 persen. Selama periode 2012 hingga tahun 2017 angka ketergantungan penduduk menunjukkan penurunan. Pada tahun 2012 angka ketergantungan tercatat 45,26 dan menurun menjadi 43,79 di tahun 2017. Capaian tahun 2017 menunjukkan bahwa setiap 100 orang berusia produktif menanggung sebanyak 43-44 orang usia tidak produktif. Keberhasilan Program KB di Jawa Timur merupakan salah satu penyebab menurunnya angka ketergantungan penduduk.

Gambar II.34 Grafik Angka Ketergantungan Penduduk Jawa Timur 2012-2017

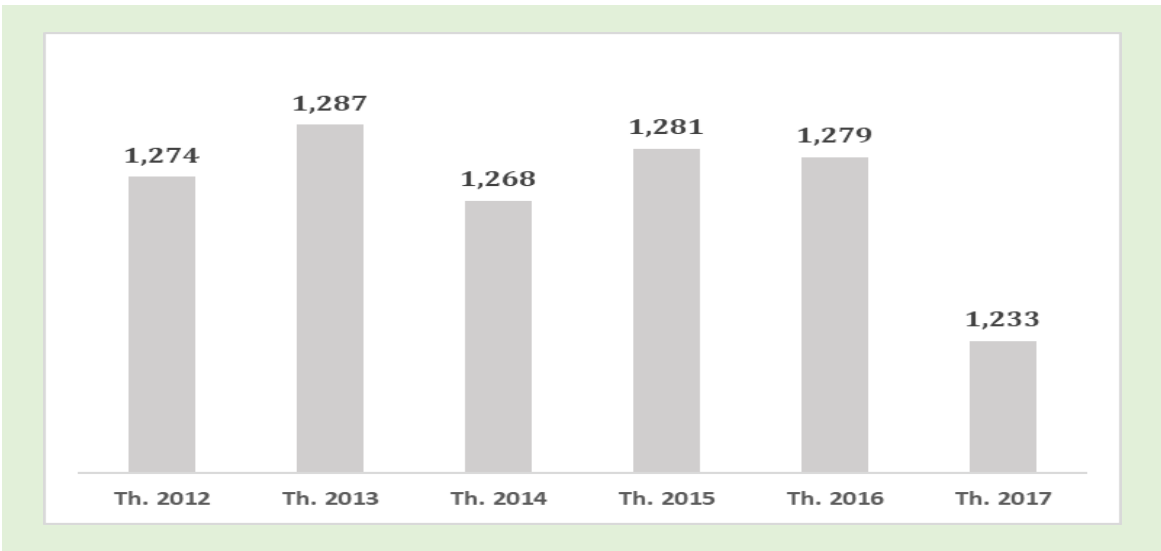


Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

II.1.4.2 Dinamika Penduduk

Dinamika penduduk adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang merupakan keseimbangan antara penyebab adanya pengurangan penduduk dan juga penambahan penduduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah faktor kelahiran. Rata rata jumlah anak per keluarga merupakan tolak ukur untuk mengetahui angka kelahiran.

Gambar II.35 Grafik Rata Rata Jumlah Anak Per Keluarga Jawa Timur 2012-2017



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Jawa Timur merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa Barat. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 38,36 juta jiwa dan terus meningkat menjadi 39,29 juta jiwa pada tahun 2017. Hal ini juga selaras dengan kepadatan penduduknya yang terus meningkat hingga 819 Jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2017. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), diketahui bahwa rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada periode 2012 – 2017 di Jawa Timur sekitar 1-2 orang. Jika pendekatan keluarga adalah rumah tangga, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata jumlah anak per keluarga di Jawa Timur sekitar 2 - 3 anak. Dengan rendahnya angka kelahiran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil melaksanakan program pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

II.1.4.3 Distribusi/Persebaran Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Secara administratif penduduk Jawa Timur tersebar di 38 Kabupaten Kota, dimana penduduk terpadat adalah Kota Surabaya dan yang terendah adalah Kota Mojokerto.

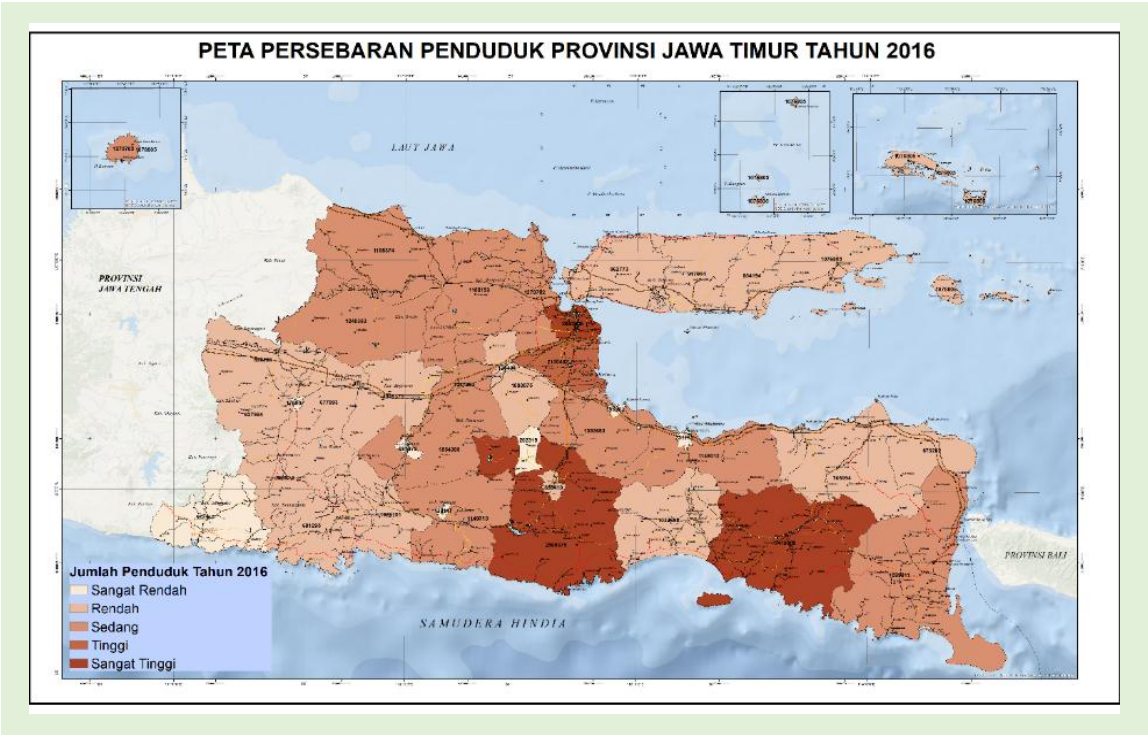
Tabel II.13 Perkembangan Pesebaran Penduduk Jawa Timur  
Berdasarkan  
Jenis Kelamin

Kabupaten/Kota		Perempuan			Laki-Laki		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten							
1	Pacitan	282.090	269.616	283.196	268.896	282.691	270.192
2	Ponorogo	433.889	434.302	435.101	433.504	434.512	434.793
3	Trenggalek	346.803	343.402	348.715	342.397	347.893	344.389
4	Tulungagung	523.492	500.191	528.274	497.698	525.910	502.516
5	Blitar	571.689	575.877	575.788	573.707	573.833	578.015
6	Kediri	770.671	780.097	777.803	776.212	774.288	783.589
7	Malang	1.265.804	1.286.867	1.281.579	1.278.511	1.273.808	1.295.017
8	Lumajang	527.273	504.682	530.604	502.920	529.016	506.219
9	Jember	1.224.298	1.188.866	1.235.689	1.182.817	1.230.134	1.194.496
10	Banyuwangi	801.065	795.976	806.306	793.018	803.835	798.591
11	Bondowoso	390.617	372.603	394.436	370.588	392.491	374.476
12	Situbondo	343.213	328.279	346.592	326.500	345.003	330.111
13	Probolinggo	584.179	559.999	591.503	556.301	588.013	563.711
14	Pasuruan	798.377	789.480	809.988	783.410	804.203	795.319
15	Sidoarjo	1.053.650	1.080.401	1.086.588	1.063.629	1.070.081	1.097.094
16	Mojokerto	540.776	544.475	550.327	539.613	545.600	549.177
17	Jombang	623.791	620.405	629.664	617.194	626.898	623.414
18	Nganjuk	524.004	519.717	527.411	517.712	525.658	521.388
19	Madiun	342.570	334.495	344.300	333.517	343.498	335.588
20	Magetan	321.927	305.791	322.497	305.486	322.193	306.112
21	Ngawi	423.670	405.480	424.103	405.113	424.000	405.796
22	Bojonegoro	625.294	613.207	628.910	611.313	627.176	614.996
23	Tuban	583.591	572.095	588.822	569.324	586.279	574.792
24	Lamongan	610.983	577.111	611.177	576.812	611.082	577.301
25	Gresik	633.489	630.017	647.923	622.824	640.685	637.095
26	Bangkalan	498.595	459.776	507.105	455.710	502.997	463.789
27	Sampang	480.407	461.790	491.162	456.394	485.824	466.920
28	Pamekasan	434.514	415.217	443.515	410.800	438.977	419.489
29	Sumenep	562.322	512.211	566.916	509.791	564.594	514.288
Kota							
30	Kediri	140.511	140503	142394	139.493	141475	141608
31	Blitar	69.507	69.001	70.584	68.401	70.116	69.411
32	Malang	431.585	422.276	436.603	419.713	434.134	424.811
33	Probolinggo	116.324	113.781	118.301	112.689	117.331	114.822
34	Pasuruan	98.217	97.183	99.701	96.598	99.019	97.995
35	Moickeno	63.890	62.196	64.692	61.816	64.208	62.587
36	Madiun	90.391	84.897	90.896	84.604	90.710	85.203
37	Surabaya	1.441.900	1.414.025	1.454.517	1.406.683	1.448.381	1.420.182
38	Batu	99.583	101.719	101.412	100.902	100.600	102.585
Jawa Timur		19.674.951	19.288.006	19.895.094	19.172.610	19.787.146	19.397.878

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



Gambar II.36 Peta Persebaran Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2016



Sumber : Jawa Timur Dalam Angka 2017

II.1.4.4 Komposisi Penduduk Dan Populasi Masyarakat

2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada tahun 2017 menunjukkan keadaan lebih baik dibandingkan tahun 2016. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan jumlah pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2017 dan bertambah sebanyak 48 ribu orang dibanding keadaan Pebruari 2017. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut otomatis berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat dari 66,14 persen pada Agustus 2016 menjadi 68,78 persen pada Agustus 2017 atau naik sebesar 3,84 persen poin.

Tabel II.14 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Jawa Timur

NO	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angkatan Kerja	Juta	20,23	20,43	20,14	20,27	19,95	20,94
	> Berkerja	Juta	19,41	19,55	19,30	19,36	19,11	20,10
	> Pengangguran	Juta	0,82	0,88	0,84	0,91	0,84	0,84
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,62	69,92	68,12	67,84	66,14	68,78

NO	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,09	4,30	4,19	4,47	4,21	4,00

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam menangani masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Jawa Timur pada Agustus 2017 sebesar 4,00 persen atau turun sebesar 0,21 persen poin dibandingkan keadaan Agustus 2016 sebesar 4,21 persen.

2.1.4.4.2 Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2014-2017, telah berhasil meningkatkan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual.

Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator keberhasilan pembangunan pendidikan. Angka Rata-rata Lama Sekolah terus meningkat dari 7,05 tahun 2014 menjadi 7,34 pada tahun 2017, selanjutnya untuk Harapan Lama Sekolah juga terus meningkat, yaitu masing-masing 12,45 tahun (2014); 12,66 tahun (2015); 12,98 tahun (2016); dan 13,09 tahun (2017).

2.1.4.4.3 Penduduk Menurut Agama

Agama merupakan salah satu hak asasi paling dasar dari manusia yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Hak untuk memilih dan menyakini sebuah doktrin keagamaan tersebut, lahir secara otomatis ketika tiap manusia menjalani kehidupannya baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas masyarakat tertentu. Berdasarkan data Kanwil Departemen Agama Jawa Timur, penduduk Jawa timur mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 39,657,788 orang (94,35%), diikuti Kristen Protestan 3,02 persen, Khatolik 1,17 persen, Hindu 0,93 persen, Budha 0,48 persen dan Konghucu 0,02 persen.

II.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

II.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

II.2.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan meminimalkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Pembangunan ekonomi berjalan efektif dan efisien manakala berpijak pada perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Ketersediaan indikator pembangunan ekonomi menjadi hal yang tidak bisa dihindari dalam perencanaan pembangunan, guna mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran. PDRB menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

Pembangunan ekonomi Jawa Timur semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung Atas Dasar Harga Berlaku, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2012 sebesar Rp. 1.248,77 triliun, kemudian terus meningkat hingga tahun 2016 menjadi Rp. 1.855,04 triliun. Pada tahun 2017 PDRB ADHB sebesar Rp. 2.019,20 triliun.

Apabila dihitung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2012 Rp. 1.124,46 triliun, selanjutnya terus meningkat pada tahun 2013-2015 yaitu masing-masing Rp. 1.192,79 triliun (2013), Rp. 1.262,70 triliun (2014), Rp. 1.331,39 triliun (2015), Rp. 1.405,23 triliun (2016), dan pada tahun 2017 menjadi Rp. 1.482,15 triliun.

Tabel II.15 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	1.248,77	1.382,50	1.539,79	1.692,90	1.855,04	2.019,20
PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	1.124,46	1.192,79	1.262,70	1.331,39	1.405,23	1.482,15
Pertumbuhan Ekonomi	6,64	6,08	5,86	5,44	5,55	5,45

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(%)						
Nasional (%)	6,03	5,56	5,02	4,79	5,02	5,07

*Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur*

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat dilihat dari besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Pada tahun 2012 perekonomian Jawa Timur tumbuh 6,64 persen, kemudian tiga tahun berikutnya terus melambat, masing-masing tumbuh 6,08 persen (2013), 5,86 persen (2014), dan 5,44 persen (2015). Pada tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,55 persen dan pada tahun 2017 menjadi 5,45 persen.

Ekonomi Jawa Timur Tahun 2015 bila dibanding Tahun 2014 tumbuh sebesar 5,44 persen, sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,86 persen. Perlambatan ini lebih dikarenakan faktor eksternal (ekonomi global) seperti menguatnya dolar, ketidakstabilan harga minyak mentah dunia, naiknya harga pangan dunia, dan krisis utang Yunani yang berimbas pada Uni Eropa hingga Amerika dan akhirnya berdampak pada seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di samping itu adanya perubahan asumsi makro ekonomi dan sosial berdampak pula terhadap perekonomian nasional dan Jawa Timur sehingga berpengaruh terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah. Terjadinya perubahan metodologi penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 yang memakai SNA (*System National Account*) 2008, maka cakupan sektor/kategori semakin luas, terbagi menjadi 19 sektor lapangan usaha, dan dampak dari perubahan ini capaian angka pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah.

Peningkatan pada besaran angka PDRB Jawa Timur tahun 2016 sebesar 5,55 persen mencerminkan bahwa perekonomian daerah Jawa Timur tumbuh positif walaupun ditengah lesunya perekonomian global dan nasional sekaligus menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah Jawa Timur memiliki kekuatan dan semakin kokoh.

Perekonomian Jawa Timur tahun 2017 tumbuh sebesar 5,45 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,91 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,47 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 6,92 persen. Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha

tahun 2017 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 29,03 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,80 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 18,18 persen.

Tabel II.136 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional

Kode	Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Pacitan	6,29	6,33	5,87	5,21	5,10	5,21
2	Kab. Ponorogo	5,70	5,98	5,14	5,21	5,24	5,29
3	Kab. Trenggalek	5,94	6,21	6,00	5,28	5,03	5,00
4	Kab. Tulungagung	6,37	6,47	6,13	5,46	4,99	5,02
5	Kab. Blitar	5,43	5,62	5,16	4,79	4,55	5,09
6	Kab. Kediri	6,32	6,37	5,82	5,32	4,88	5,02
7	Kab. Malang	6,65	6,77	5,30	6,01	5,27	5,30
8	Kab. Lumajang	6,20	6,00	5,58	5,32	4,62	4,70
9	Kab. Jember	5,49	5,83	6,06	6,20	5,33	5,21
10	Kab. Banyuwangi	6,95	7,24	6,71	5,70	6,01	5,38
11	Kab. Bondowoso	6,07	6,09	5,81	5,05	4,95	4,97
12	Kab. Situbondo	5,38	5,43	6,19	5,79	4,86	5,00
13	Kab. Probolinggo	5,88	6,44	5,15	4,90	4,76	4,77
14	Kab. Pasuruan	6,69	7,50	6,95	6,74	5,38	5,44
15	Kab. Sidoarjo	7,04	7,26	6,89	6,44	5,24	5,51
16	Kab. Mojokerto	6,61	7,26	6,56	6,45	5,65	5,41
17	Kab. Jombang	5,96	6,15	5,93	5,42	5,36	5,40
18	Kab. Nganjuk	5,75	5,85	5,40	5,10	5,18	5,29
19	Kab. Madiun	6,02	6,12	5,67	5,34	5,26	5,27
20	Kab. Magetan	5,64	5,79	5,85	5,10	5,17	5,31
21	Kab. Ngawi	6,11	6,63	5,50	5,82	5,08	5,21
22	Kab. Bojonegoro	10,39	3,77	2,37	2,29	17,42	21,95
23	Kab. Tuban	6,84	6,29	5,85	5,47	4,89	4,90
24	Kab. Lamongan	6,67	6,92	6,93	6,30	5,77	5,86
25	Kab. Gresik	6,48	6,92	6,05	7,04	6,58	5,50
26	Kab. Bangkalan	3,31	-1,42	0,19	7,19	-2,66	0,66
27	Kab. Sampang	2,50	5,77	6,53	0,08	2,08	6,17
28	Kab. Pamekasan	6,22	6,25	6,10	5,62	5,32	5,35
29	Kab. Sumenep	6,13	9,96	14,45	6,23	1,27	2,58
30	Kota Kediri	4,29	5,27	3,52	5,85	5,36	5,50
31	Kota Blitar	6,43	6,52	6,50	5,88	5,68	5,76
32	Kota Malang	6,04	6,26	6,20	5,80	5,61	5,61
33	Kota Probolinggo	5,95	6,49	6,47	5,93	5,86	5,88
34	Kota Pasuruan	6,28	6,31	6,51	5,70	5,53	5,46
35	Kota Mojokerto	5,97	6,09	6,20	5,83	5,74	5,77
36	Kota Madiun	6,79	6,83	7,68	6,62	6,15	5,90
37	Kota Surabaya	7,13	7,35	7,58	6,96	5,97	6,00
38	Kota Batu	7,13	7,26	7,29	6,90	6,69	6,61
	Jawa Timur	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	5,55

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.1.1.1.1 Laju Inflasi

Dalam perekonomian suatu negara atau daerah, inflasi memiliki peranan yang sangat penting baik dalam tataran ekonomi makro



maupun ekomoni mikro. Dalam ekomoni makro inflasi merupakan indiaktor untuk melihat kestabilan perekonomian yang tercermin melalui kestabilan harga yang terjadi di masyarakat, kalau inflasi tinggi maka suhu ekonomi tinggi menunjukkan adanya gangguan pada sistem ekonomi. Selain itu inflasi juga dapat dijadikan dasar untuk untuk perumusan kebijakan moneter (target inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar dan uang beredar) dan kebijakan fiskal (APBN/APBD).

Sedangkan dalam ekonomi mikro inflasi bisa digunakan sebagai deflator untuk memperoleh nilai upah riil, suku bunga dan juga dapat dipakai sebagai acuan oleh masyarakat untuk melakukan penyesuain pengeluaran dan penadapatan rumah tangganya.

Tabel II.17 Laju Inflasi Jawa Timur

Laju Inflasi	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jawa Timur	4,50	7,59	7,77	3,08	2,74	4,04
Nasional	4,30	8,37	8,36	3,35	3,02	3.61

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Sampai dengan Bulan Desember 2017 secara tahun kalender inflasi Jawa Timur mencapai 4,04 persen, Ini berarti lebih tinggi dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang tidak mencapai empat persen. Walaupun inflasi kalender tahun 2017 mengalami kenaikan, namun angka ini masih sejalan dengan target pemerintah yang mematok angka inflasi sebesar 4 plus minus 1 persen.

Selama tahun 2017 dari tujuh kelompok pengeluaran, seluruhnya mengalami inflasi. Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar sebesar 6,00 persen, diikuti kelompok Sandang sebesar 5,72 persen, kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 5,56 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga sebesar 4,09 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau sebesar 3,92 persen, kelompok Kesehatan sebesar 2,59 persen, dan kelompok Bahan Makanan sebesar 0,90 persen,

Komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi sepanjang tahun 2017 di Jawa Timur adalah tarif listrik, biaya perpanjangan STNK, beras, bensin, emas perhiasan, tarif

pulsa ponsel, telur ayam ras, sewa rumah, rokok kretek filter, dan wortel. Sedangkan komoditi utama yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya deflasi adalah bawang merah, bawang putih, cabai rawit, gula pasir, tarif angkutan udara, semen, cabai merah, telepon seluler, melon dan gipsum.

Tarif listrik memberikan sumbangan utama terjadinya inflasi di tahun 2017 disebabkan adanya pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan kategori 900 VA yang dianggap mampu, Pencabutan subsidi ini dilakukan bertahap mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017. Selain itu juga adanya kenaikan tarif listrik pasca bayar pada bulan Desember 2016 yang dampaknya baru dirasakan di pada bulan Januari 2017. Selain pencabutan subsidi listrik, pada bulan Januari 2017 juga terjadi kenaikan harga BBM, Terhitung mulai tanggal 5 Januari 2017 pemerintah telah menaikkan harga BBM non subsidi mulai dari jenis Pertalite hingga Pertamina Turbo dengan kenaikan rata-rata sebesar 300 rupiah per liter, selain itu mulai 6 Januari 2017 pemerintah juga juga menaikkan biaya pembuatan STNK dan BPKB dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang menggantikan PP Nomor 50 Tahun 2010 yang berisi tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Komoditas beras turut memberikan andil inflasi tahun 2017. Kenaikan beras terjadi di triwulan III tahun 2017, selain faktor cuaca yang mempengaruhi turunnya produksi beras serta juga pasokan beras yang sedikit tersendat, kenaikan harga beras juga dipengaruhi oleh adanya penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras oleh pemerintah pada tanggal 1 September 2017, Kenaikan beras ini terjadi sampai dengan akhir tahun 2017.

Selain beberapa komoditas yang mendorong terjadinya inflasi, beberapa komoditas lain justru mampu menahan laju inflasi selama tahun 2017. Harga bawang merah sepanjang tahun 2017 cenderung mengalami penurunan dikarenakan melimpahnya produksi. Berbeda halnya dengan bawang merah, harga bawang putih justru sempat melambung tinggi di awal tahun yang disebabkan kelangkaan produksi, mengingat sebagian besar bawang putih yang beredar di pasaran berasal dari impor. Harga bawang putih kembali normal setelah impor kembali dibuka dan dilakukan operasi pasar di beberapa titik pasar. Produksi cabai rawit yang cukup melimpah karena kondisi cuaca yang baik pada tahun 2017 membuat harganya relatif stabil. Harga cabai rawit mulai merangkak naik di akhir tahun 2017 akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung diawal musim penghujan. Sebaliknya harga gula pasir justru sempat naik di awal tahun, namun harganya segera normal kembali setelah adanya keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menetapkan Harga Eceran

Tertinggi (HET) gula pasir yang dijual di pasar ritel modern dan distributor gula sebesar Rp 12,500/kg pada bulan Mei 2017.

2.2.1.1.2 Indeks Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah manakala pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Peningkatan ini juga akan sejalan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Namun tentunya meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Ini menandakan bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial.

Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini Rasio. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

Tabel II.18 Gini Rasio Jawa Timur dan Nasional

Indeks Gini	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jawa Timur	0,36	0,36	0,37	0,40	0,40	0,41
Nasional	0,41	0,41	0,41	0,40	0,39	0,39

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan :

$G < 0,3$  = Ketimpangan rendah  
 $0,3 \leq G \leq 0,5$  = Ketimpangan sedang, dan  
 $G > 0,5$  = Ketimpangan tinggi

Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini Rasio. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

Bila mengacu pada nilai gini rasio, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur 2012-2017 masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3 – 0,5). Pada tahun 2012 gini rasio Jawa Timur mencapai 0,36 dan pada tahun 2013 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 0,36. Selanjutnya pada tahun 2014-2016 gini rasio Jawa Timur menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 0,37 (2014); 0,40 (2015); dan 0,40 (2016).

Pada tahun 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,41. Angka ini meningkat sebesar 0,01 poin jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 0,40. Sebenarnya dengan meningkatnya gini ratio ini tidak berarti kelompok ekonomi rendah tidak mengalami peningkatan pendapatan, sebenarnya mereka juga mengalami peningkatan pendapatan, namun peningkatannya masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan peningkatan pendapatan dari kelompok ekonomi menengah ke atas.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, dapat dijelaskan bahwa Angka gini rasio daerah perkotaan selalu menunjukkan lebih tinggi dibanding daerah perdesaan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa di daerah perkotaan ketimpangan kesejahteraan antar penduduk lebih terasa dibanding daerah perdesaan. Perkembangan Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Pada tahun 2015, gini rasio tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar 0,42 dan yang terendah adalah Kabupaten Sumenep sebesar 0,26.

Tabel II.19 Indeks Gini Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten					
01. Pacitan	0,34	0,31	0,33	0,31	0,33
02. Ponorogo	0,29	0,31	0,34	0,31	0,36
03. Trenggalek	0,34	0,32	0,35	0,31	0,37
04. Tulungagung	0,32	0,34	0,37	0,31	0,36
05. Blitar	0,33	0,36	0,33	0,30	0,33
06. Kediri	0,31	0,32	0,30	0,31	0,34
07. Malang	0,33	0,32	0,38	0,33	0,38
08. Lumajang	0,27	0,27	0,23	0,23	0,29
09. Jember	0,31	0,28	0,26	0,26	0,33
10. Banyuwangi	0,32	0,29	0,30	0,29	0,34
11. Bondowoso	0,29	0,30	0,28	0,27	0,32
12. Situbondo	0,26	0,27	0,28	0,29	0,33
13. Probolinggo	0,28	0,30	0,34	0,32	0,30
14. Pasuruan	0,28	0,30	0,28	0,28	0,32
15. Sidoarjo	0,31	0,33	0,30	0,30	0,35
16. Mojokerto	0,27	0,28	0,28	0,27	0,31
17.Jombang	0,37	0,30	0,28	0,32	0,32

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
18. Nganjuk	0,31	0,38	0,33	0.30	0,35
19. Madiun	0,29	0,34	0,30	0.28	0,32
20. Magetan	0,31	0,33	0,34	0.32	0,34
21. Ngawi	0,30	0,30	0,32	0.34	0,34
22. Bojonegoro	0,27	0,31	0,32	0.28	0,32
23. Tuban	0,28	0,27	0,30	0.24	0,29
24. Lamongan	0,29	0,27	0,31	0.27	0,30
25. Gresik	0,33	0,43	0,36	0.28	0,31
26. Bangkalan	0,30	0,28	0,28	0.33	0,32
27. Sampang	0,26	0,25	0,25	0.23	0,30
28. Pamekasan	0,28	0,24	0,25	0.26	0,34
29. Sumenep	0,27	0,30	0,29	0.25	0,26
Kota					
71. Kota Kediri	0,39	0,39	0,33	0.31	0,40
72. Kota Blitar	0,34	0,38	0,40	0.35	0,37
73. Kota Malang	0,36	0,48	0,38	0.37	0,38
74. Kota Probolinggo	0,33	0,28	0,38	0.33	0,36
75. Kota Pasuruan	0,37	0,37	0,32	0.31	0,39
76. Kota Mojokerto	0,36	0,30	0,30	0.31	0,36
77. Kota Madiun	0,33	0,35	0,43	0.34	0,38
78. Kota Surabaya	0,37	0,40	0,37	0.39	0,42
79. Kota Batu	0,32	0,32	0,31	0.29	0,36
35. Jawa Timur	0,37	0,36	0,36	0,37	0,40

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.1.1.3 Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia (<40%)

Seperti halnya gini ratio, pemerataan pendapat versi bank dunia juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan masyarakat guna mengetahui ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Bank Dunia mengukur pendistribusian kue ekonomi atau mengukur pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan persentase distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas.

Ketimpangan menurut Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Pengelompokkannya adalah sebagai berikut :

1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh



penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/ menengah.

3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Tabel II.20 Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk Jawa Timur

Tahun	40 % bawah	40 % menengah	20 % atas
2012	20,15	34,38	45,47
2013	19,82	34,55	45,63
2014	18,63	35,22	46,15
2015	16,61	34,52	48,87
2016	17,03	35,60	47,37
2017	16,49	35,06	48,45

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama tahun 2012-2016 penduduk yang masuk dalam kelompok 40 persen bawah persentase menunjukkan penurunan, yaitu 20,15 persen (2012); 19,82 persen (2013); 18,63 persen (2014); dan 16,61 persen (2015). Sedangkan pada tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan menjadi 17,03 persen dan pada tahun 2017 turun kembali menjadi 16,49 persen. Berdasarkan pengelompokan distribusi bank dunia, pada tahun 2016 Jawa Timur masuk dalam kategori ketimpangan sedang karena jumlah pendapatan dari penduduk pada kategori 40 persen terbawah terhadap total pendapatan seluruh penduduk di antara 12-17 persen.

2.2.1.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll

Tabel II.21 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional

Persentase	Tahun
------------	-------

Penduduk Miskin	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jawa Timur	13,08	12,73	12,28	12,28	11,85	11,20
Nasional	11,66	11,47	10,96	11,13	10,70	10,12

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Angka kemiskinan di Jawa Timur selama enam tahun terakhir (2012-2017) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2012 angka kemiskinan sebesar 13,08 persen dengan jumlah penduduk miskin 4.992,75 ribu jiwa, kemudian terus menurun hingga tahun 2017 menjadi 11,20 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.405,27 ribu jiwa. Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah daerah mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penanganan kemiskinan Jawa Timur yang antara lain Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Namun demikian angka kemiskinan Jawa Timur memang masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 10,12 persen.

Selama periode Maret-September 2017, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 211.740 jiwa atau 0,57 persen dari 4.617.010 jiwa (11,77 persen) pada Maret 2017 menjadi 4.405.270 jiwa (11,20 persen) pada September 2017. Penurunan periode ini signifikan daripada pada Periode sebelumnya September 2016 - Maret 2017 yang hanya 0,08 persen walaupun Garis Kemiskinan Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar Rp 18.210 atau 5,32 persen dari Rp 342.092 menjadi Rp 360.302.

Perkembangan persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 (Maret) persentase kemiskinan terendah adalah sebagian besar wilayah perkotaan diantaranya Kota Malang sebesar 4,17 persen dan kota Batu sebesar 4,31 persen sedangkan tertinggi ada di Kabupaten wilayah Madura dan Daerah Tapal Kuda, diantaranya Kabupaten Bangkalan 21,32 persen dan Kabupaten Sampang 23,56 persen.

Tabel II.142 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur

Kabupaten/ Kota	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015 (Maret)	2016 (Maret)	2017 (Maret)
Kabupaten							

Kabupaten/ Kota	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015 (Maret)	2016 (Maret)	2017 (Maret)
01. Pacitan	12,29	17,29	16,73	16,18	16,68	15,49	15,42
02. Ponorogo	14,9	11,76	11,92	11,53	11,91	11,75	11,39
03. Trenggalek	9,9	14,21	13,56	13,1	13,39	13,24	12,96
04. Tulungagung	11,29	9,4	9,07	8,75	8,57	8,23	8,04
05. Blitar	14,44	10,74	10,57	10,22	9,97	9,88	9,80
06. Kediri	11,67	13,71	13,23	12,77	12,91	12,72	12,25
07. Malang	13,01	11,04	11,48	11,07	11,53	11,49	11,04
08. Lumajang	12,44	12,4	12,14	11,75	11,52	11,22	10,87
09. Jember	10,47	11,81	11,68	11,28	11,22	10,97	11,00
10. Banyuwangi	16,66	9,97	9,61	9,29	9,17	8,79	8,64
11. Bondowoso	15,11	15,81	15,29	14,76	14,96	15	14,54
12. Situbondo	23,48	14,34	13,65	13,15	13,63	13,34	13,05
13. Probolinggo	12,26	22,22	21,21	20,44	20,82	20,98	20,52
14. Pasuruan	6,97	11,58	11,26	10,86	10,72	10,57	10,34
15. Sidoarjo	11,38	6,44	6,72	6,4	6,44	6,39	6,23
16. Mojokerto	12,88	10,71	10,99	10,56	10,57	10,61	10,19
17. Jombang	13,88	12,23	11,17	10,8	10,79	10,7	10,48
18. Nganjuk	14,37	13,22	13,6	13,14	12,69	12,25	11,98
19. Madiun	12,01	13,7	12,45	12,04	12,54	12,69	12,28
20. Magetan	16,74	11,5	12,19	11,8	11,35	11,03	10,48
21. Ngawi	17,47	15,99	15,45	14,88	15,61	15,27	14,91
22. Bojonegoro	18,78	16,66	16,02	15,48	15,71	14,6	14,34
23. Tuban	17,41	17,84	17,23	16,64	17,08	17,14	16,87
24. Lamongan	15,33	16,7	16,18	15,68	15,38	14,89	14,42
25. Gresik	26,22	14,35	13,94	13,41	13,63	13,19	12,80
26. Bangkalan	30,21	24,7	23,23	22,38	22,57	21,41	21,32
27. Sampang	20,94	27,97	27,08	25,8	25,69	24,11	23,56
28. Pamekasan	23,1	19,61	18,53	17,74	17,41	16,7	16,00
29. Sumenep	18,13	21,96	21,22	20,49	20,2	20,09	19,62
Kota							
71. Kota Kediri	8,63	8,14	8,23	7,95	8,51	8,4	8,49
72. Kota Blitar	7,12	6,75	7,42	7,15	7,29	7,18	8,03
73. Kota Malang	5,5	5,21	4,87	4,8	4,6	4,33	4,17
74. Kota Probolinggo	17,74	10,92	8,55	8,37	8,17	7,97	7,84
75. Kota Pasuruan	8,39	7,9	7,6	7,34	7,47	7,62	7,53
76. Kota Mojokerto	6,89	6,48	6,65	6,42	6,16	5,73	5,73
77. Kota Madiun	5,66	5,37	5,02	4,86	4,89	5,16	4,94
78. Kota Surabaya	6,58	6,25	6	5,79	5,82	5,63	5,39
79. Kota Batu	4,74	4,47	4,77	4,59	4,71	4,48	4,31
Jawa Timur	13,85	13,08	12,73	12,28	12,34	12,05	11,77

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.1.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada hakekatnya pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan yang hakiki tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tetapi secara holistik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dimaksud tidak

hanya terfokus pada pembangunan gedung sarana dan prasarana, tetapi berimplikasi pada perubahan kualitas manusia. Bisa dianalogkan, pembangunan yang pro kepada kualitas manusia itu bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam mewujudkan pembangunan yang hakiki, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah telah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas manusia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan upaya serius dengan program peningkatan kualitas manusia baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat merasa sejahtera, jika pembangunan memberikan implikasi tercapainya umur panjang dan sehat, masyarakat semakin berpengetahuan dan dapat hidup layak secara ekonomi. Potret implikasi pembangunan terhadap kualitas manusia dapat dilihat dari hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel II.23 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jawa Timur	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74	70,27
Nasional	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan ketentuan *United Nation Development Programe* (UNDP), penghitungan IPM untuk seluruh negara menggunakan metode baru. Hal ini dikarenakan IPM metode lama mempunyai kelemahan dan perlu diperbaharui. Pada metode baru ini, angka melek huruf sudah tidak dipakai lagi digantikan angka harapan sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan *geometric mean*. Dampak dari perubahan penghitungan ini, menyebabkan terjadi perubahan angka IPM menjadi lebih rendah dibanding metode lama. Tetapi perlu diingat bahwa hasil penghitungan metode baru tidak bisa dibandingkan lagi dengan metode lama, karena sudah berbeda metodologi. Selama enam tahun terakhir, pembangunan manusia di Jawa Timur yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan. Kondisi itu ditunjukkan oleh angka IPM pada tahun 2012 sebesar 66,74; kemudian terus meningkat pada tahun 2013-2017 yaitu masing-masing sebesar 67,55 (2013);

68,14 (2014); 68,95 (2015); 69,74 (2016); dan 70,27 (2017). Ini menunjukkan upaya pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi itu ditunjukkan dari meningkatkan predikat IPM Jawa Timur pada tahun 2017 menjadi IPM berkategori “tinggi” untuk pertama kalinya. Sebelumnya, dari tahun 2010 hingga tahun 2016 Jawa Timur masih berkategori “sedang”.

Perkembangan IPM pada tahun 2017, tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 81,07, yang sebelumnya berada di posisi kedua. Surabaya bersama Kota Malang dan Kota Madiun merupakan daerah dengan IPM berkategori “sangat tinggi”. Daerah dengan kategori IPM “tinggi” sebanyak 16 kabupaten/kota, sedangkan yang berkategori “sedang” sebanyak 18 kabupaten/kota. Sampang satu-satunya wilayah dengan IPM berkategori “rendah” atau mempunyai IPM sebesar 59,90.

Tabel II.24 Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota Se-Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten							
01. Pacitan	62,03	62,94	63,38	63,81	64,92	65,74	66,51
02. Ponorogo	65,28	66,16	67,03	67,40	68,16	68,93	69,26
03. Trenggalek	64,27	65,01	65,76	66,16	67,25	67,78	68,10
04. Tulungagung	67,76	68,29	69,30	69,49	70,07	70,82	71,24
05. Blitar	65,47	66,17	66,49	66,88	68,13	68,88	69,33
06. Kediri	66,84	67,29	68,01	68,44	68,91	69,87	70,47
07. Malang	63,97	64,71	65,20	65,59	66,63	67,51	68,47
08. Lumajang	60,72	61,31	61,87	62,33	63,02	63,74	64,23
09. Jember	60,64	61,31	62,43	62,64	63,04	64,01	64,96
10. Banyuwangi	65,48	66,12	66,74	67,31	68,08	69,00	69,64
11. Bondowoso	60,46	62,24	63,21	63,43	63,95	64,52	64,75
12. Situbondo	60,82	62,23	63,43	63,91	64,53	65,08	68,68
13. Probolinggo	60,30	61,33	62,61	63,04	63,83	64,12	64,28
14. Pasuruan	61,43	62,31	63,74	64,35	65,04	65,71	66,69
15. Sidoarjo	74,48	75,14	76,39	76,78	77,43	78,17	78,70
16. Mojokerto	68,71	69,17	69,84	70,22	70,85	71,38	72,36
17. Jombang	66,84	67,82	68,63	69,07	69,59	70,03	70,88
18. Nganjuk	66,58	68,07	68,98	69,59	69,90	70,50	70,69
19. Madiun	65,98	67,32	68,07	68,60	69,39	69,67	70,27
20. Magetan	68,52	69,56	69,86	70,29	71,39	71,94	72,60
21. Ngawi	65,84	66,72	67,25	67,78	68,32	68,96	69,27
22. Bojonegoro	63,22	64,20	64,85	65,27	66,17	66,73	67,28
23. Tuban	62,47	63,36	64,14	64,58	65,52	66,19	66,77
24. Lamongan	66,21	67,51	68,90	69,42	69,84	70,60	71,11
25. Gresik	71,11	72,12	72,47	72,84	73,57	74,46	74,84
26. Bangkalan	58,63	59,65	60,19	60,71	61,49	62,06	62,30
27. Sampang	55,17	55,78	56,45	56,98	58,18	59,09	59,90
28. Pamekasan	60,42	61,21	62,27	62,66	63,10	63,98	64,93
29. Sumenep	58,70	60,08	60,84	61,43	62,38	63,42	64,28
Kota							
71. Kota Kediri	72,93	73,66	74,18	74,62	75,67	76,33	77,13



Kabupaten/Kota	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
72. Kota Blitar	73,08	73,53	74,53	75,26	76,00	76,71	77,10
73. Kota Malang	77,36	78,04	78,44	78,96	80,05	80,46	80,65
74. Kota Probolinggo	68,14	68,93	70,05	70,49	71,01	71,50	72,09
75. Kota Pasuruan	70,41	72,01	72,89	73,23	73,78	74,11	74,39
76. Kota Mojokerto	73,47	74,20	74,91	75,04	75,54	76,38	76,77
77. Kota Madiun	76,48	77,21	78,41	78,81	79,48	80,01	80,13
78. Kota Surabaya	77,62	78,05	78,51	78,87	79,47	80,38	81,07
79. Kota Batu	69,76	70,62	71,55	71,89	72,62	73,57	74,26
Jawa Timur	66,06	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74	70,27

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.2.1.1.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki- laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki- laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata.

Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru. Sehingga angka yang sekarang digunakan menggantikan angka IPG yang pernah dipublish. Dengan berlakunya IPG menggunakan metode baru, maka angka yang disajikan tidak bisa dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya. Membandingkannya harus sesuai metode yang digunakan atau apple to apple. Hasil penghitungan IPG metode baru, tercatat bahwa IPG Jawa Timur mengikuti tren naik.

Tabel II.25 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017**)
Jawa Tmur	89,36	90,22	90,83	91,07	90,72	92,39
Nasional	90,07	90,19	90,34	91,03	90,82	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur  
Keterangan : \*\*) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2014, IPG mencapai 90,83 lebih baik dibanding 2013 yang mencapai 90,22 atau naik 0,68 persen. Kondisi ini semakin membaik pada tahun 2015 menjadi 91,07, kemudian mengalami penurunan menjadi 90,72 pada tahun 2016 dan meningkat kembali pada tahun 2017 (Angka Sangat Sementara) menjadi 92,39. Naiknya angka IPG Jawa Timur, mengindikasikan program pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Daerah cukup berhasil. Kenaikan IPG ini didukung meningkatnya AHH perempuan, angka harapan lama sekolah perempuan, angka rata-rata lama sekolah perempuan dan pengeluaran per kapita per tahun perempuan. Dengan demikian, SDM perempuan di Jawa Timur dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan. Daerah yang maju dan madani, selain ditopang dari peran SDM penduduk laki-lakinya, juga ditopang oleh peran perempuan. Pemerintah Jawa Timur sendiri berupaya terus agar peran perempuan semakin banyak muncul dalam kancah pembangunan sosial ekonomi. Sehingga disparitas SDM antar laki-laki dan perempuan dari waktu ke waktu semakin menyempit. Pada akhirnya, kinerja pembangunan Jawa Timur di segala bidang bisa dinikmati siapa saja baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi diantaranya adalah Kota Blitar, Probolinggo, dan Pasuruan. Sedangkan IPG yang terendah berada di Kabupaten Sumenep.

Tabel II.26 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Kabupaten				
01. Pacitan	79,84	82,12	83,76	84,19
02. Ponorogo	93,08	93,19	93,85	93,91
03. Trenggalek	90,83	91,04	92,58	92,22
04. Tulungagung	93,39	94,12	95,11	95,07
05. Blitar	90,04	91,14	92,81	92,96
06. Kediri	91,50	91,80	91,98	91,99

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
07. Malang	87,48	87,68	87,89	88,38
08. Lumajang	84,15	87,18	89,08	88,15
09. Jember	83,07	83,44	83,74	83,55
10. Banyuwangi	83,65	84,05	85,06	86,01
11. Bondowoso	87,59	88,58	88,79	89,59
12. Situbondo	83,86	84,08	86,64	87,16
13. Probolinggo	82,33	82,44	83,40	83,90
14. Pasuruan	87,92	89,88	89,95	90,11
15. Sidoarjo	92,21	93,53	94,20	94,28
16. Mojokerto	89,82	90,28	90,46	90,27
17. Jombang	87,92	88,47	89,35	89,42
18. Nganjuk	91,86	92,23	93,48	93,55
19. Madiun	90,93	90,99	91,53	91,57
20. Magetan	92,59	92,80	93,50	93,64
21. Ngawi	91,40	91,69	92,03	92,01
22. Bojonegoro	88,60	88,92	89,24	89,38
23. Tuban	87,13	87,65	87,78	87,83
24. Lamongan	84,78	85,62	87,21	87,58
25. Gresik	88,60	88,88	89,01	89,31
26. Bangkalan	83,55	84,96	85,52	86,52
27. Sampang	80,15	81,16	82,62	83,57
28. Pamekasan	82,72	83,43	84,68	85,26
29. Sumenep	75,71	77,14	78,63	78,70
Kota				
71. Kota Kediri	94,64	95,05	95,15	95,29
72. Kota Blitar	97,63	97,74	98,23	98,23
73. Kota Malang	94,51	94,98	94,99	95,73
74. Kota Probolinggo	95,71	96,27	96,74	96,65
75. Kota Pasuruan	95,42	95,46	96,30	96,32
76. Kota Mojokerto	92,97	93,05	93,27	93,67
77. Kota Madiun	91,84	92,15	92,81	92,95
78. Kota Surabaya	93,49	93,64	93,65	94,2
79. Kota Batu	86,74	87,25	89,22	89,47
35. Jawa Timur	89,36	90,22	90,83	91,07

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.2.1.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ). Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.

Tabel II.27 Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Jawa Timur	4,12	4,33	4,19	4,47	4,21	4,00
Nasional	6,13	6,17	5,94	6,18	5,61	5,50

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2012 sebesar 4,12 persen, kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi 4,33 persen dan pada tahun 2014 mengalami perbaikan menjadi 4,19 persen. Pada tahun 2015, pengangguran terbuka di Jawa Timur sedikit mengalami peningkatan menjadi 4,47 persen, selanjutnya pada tahun 2016-2017 kondisi ketenagakerjaan menunjukkan keadaan yang lebih baik sehingga terus mengalami penurunan yaitu 4,21 (2016) dan 4,00 (2017). Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada tahun 2017 bertambah sebanyak 984 ribu orang jika dibanding tahun 2016. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut otomatis berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat dari 66,14 persen pada tahun 2016 menjadi 68,78 persen pada tahun 2017 atau naik sebesar 2,64 poin persen.

Tabel II.15 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se-Jatim

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016 (Februari)	2017
Kabupaten						
01. Pacitan	1,02	0,99	1,08	0,97	1,00	0,85
02. Ponorogo	3,14	3,25	3,66	3,68	3,94	3,76
03. Trenggalek	2,98	4,04	4,20	2,46	3,07	3,48
04. Tulungagung	3,10	2,71	2,42	3,95	3,6	2,27
05. Blitar	2,82	3,64	3,08	2,79	2,92	2,99
06. Kediri	4,08	4,65	4,91	5,02	5,44	3,18
07. Malang	3,75	5,17	4,83	4,95	5,50	4,60
08. Lumajang	4,60	2,01	2,83	2,60	1,71	2,91
09. Jember	3,77	3,94	4,64	4,77	5,21	5,16
10. Banyuwangi	3,41	4,65	7,17	2,55	4,43	3,07
11. Bondowoso	3,60	2,04	3,72	1,75	1,81	2,09
12. Situbondo	3,33	3,01	4,15	3,57	3,98	1,49
13. Probolinggo	1,92	3,30	1,47	2,51	2,29	2,89
14. Pasuruan	6,38	4,34	4,43	6,41	5,44	4,97
15. Sidoarjo	5,37	4,12	3,88	6,30	5,56	4,97
16. Mojokerto	3,35	3,16	3,81	4,05	4,29	5,00
17. Jombang	6,72	5,59	4,39	6,11	4,95	5,14
18. Nganjuk	4,09	4,73	3,93	2,10	2,01	3,23
19. Madiun	3,99	4,63	3,38	6,99	6,69	3,19

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016 (Februari)	2017
20. Magetan	3,64	2,96	4,28	6,05	6,36	3,80
21. Ngawi	2,94	4,97	5,61	3,99	5,33	5,76
22. Bojonegoro	3,42	5,81	3,21	5,01	4,91	3,64
23. Tuban	4,13	4,30	3,63	3,03	2,78	3,39
24. Lamongan	4,75	4,93	4,30	4,10	3,88	4,12
25. Gresik	6,78	4,55	5,06	5,67	4,81	4,54
26. Bangkalan	5,13	6,78	5,68	5,00	5,28	4,48
27. Sampang	1,71	4,68	2,22	2,51	2,77	2,48
28. Pamekasan	2,29	2,17	2,14	4,26	4,19	3,91
29. Sumenep	1,14	2,56	1,01	2,07	2,00	1,83
Kota						
71. Kota Kediri	8,12	7,92	7,66	8,46	8,22	4,68
72. Kota Blitar	3,68	6,17	5,71	3,80	4,81	3,76
73. Kota Malang	7,96	7,73	7,22	7,28	6,91	7,22
74. Kota Probolinggo	5,26	4,48	5,16	4,01	3,96	3,42
75. Kota Pasuruan	4,54	5,41	6,09	5,57	6,35	4,64
76. Kota Mojokerto	7,52	5,73	4,42	4,88	3,33	3,61
77. Kota Madiun	6,89	6,57	6,93	5,10	5,12	4,26
78. Kota Surabaya	5,27	5,32	5,82	7,01	7,29	5,98
79. Kota Batu	3,51	2,30	2,43	4,29	3,75	2,26
35. Jawa Timur	4,09	4,30	4,19	4,47	4,14	4,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota berkisar antara 0,85 -7,22 persen. TPT terendah ada di Kabupaten Pacitan dan yang tertinggi adalah Kota Malang.

Dalam upaya mengatasi ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan landasan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan melalui 5 kebijakan program yaitu, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, serta Program Ketrasmigrasian.

#### 2.2.1.1.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan. Penetapan IKLHD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur berfungsi untuk memberikan



informasi kepada para pengambil keputusan Provinsi Jawa Timur tentang kondisi lingkungan di Jawa Timur sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Detail capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) di Jawa Timur tertera pada tabel berikut

Tabel II.16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	-	56,25	56,48	61,70	63,98	66,29

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

- 1. Unggul : >90
- 2. Sangat baik : 82 – 90
- 3. Baik : 74 - 82
- 4. Cukup : 66 – 74
- 5. Kurang : 58 - 66
- 6. Sangat Kurang: 50 – 58
- 7. Waspada : <50

Perkembangan IKLH Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan tiap tahunnya, yaitu dari 61,70 (Kategori Kurang) pada tahun 2015 menjadi 66,29 (Kategori Cukup) pada tahun 2017. Kedepannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus meningkatkan pencapaian target program-program di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur dan mencapai target IKLHD Provinsi Tahun 2019 sebesar 67,00-68,52 atau dengan kategori cukup

2.2.1.1.9 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat

dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimasukkan sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

Tabel II.30 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	79	80	81	81,33

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Jawa Timur pada tahun 2014-2017 terus menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 79 (Thn. 2014); 80 (Thn. 2015); 81 (Thn. 2016); dan 81,33 (Thn. 2017). Kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Jawa Timur lebih baik, efisien, dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

2.2.1.1.10 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparaturnya. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dimana uang tidak hanya efektif & efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut maka Indeks Reformasi Birokrasi dimasukkan sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

Tabel II.31 Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Reformasi	-	-	61,04	63,00	65,00	69,54

Birokrasi						
-----------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 63,00, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 65,00 dan tahun 2017 meningkat kembali menjadi 69,54. Peningkatan ini mencerminkan birokrasi pemerintah Jawa Timur semakin profesional dengan berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

2.2.1.1.11 Indeks Kesalehan Sosial

Secara konseptual, Kesalehan sosial adalah sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sikap kesalehan sosial tersebut meliputi:

- 1. Solidaritas social (al-takaful alijtima’i);
- 2. Toleransi (al-tasamuh);
- 3. Mutualitas/Kerjasama (al-ta’awun);
- 4. Tengah-tengah (al-I’tidal); dan
- 5. Stabilitas (al-stabat);

Sedangkan secara operasional, Kesalehan sosial adalah skor yang diperoleh dari sikap seseorang/responden yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat yang diukur dengan :

- 1. Solidaritas sosial;
- 2. Kerjasama/mutualitas;
- 3. Toleransi;
- 4. Adil; dan
- 5. Menjaga ketertiban umum.

Tabel II.32 Indeks Kesalehan Sosial

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017*)
Indeks Kesalehan Sosial	-	-	-	-	-	62,34

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur  
Ket : \*) Angka Sangat Sementara

Indeks Kesalehan Sosial merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, pada tahun 2017 (angka sangat sementara) capaiannya 62,34. Kedepannya Pemerintah

Provinsi Jawa Timur berupaya agar Indeks Kesalehan Sosial terus meningkat tiap tahunnya. Pemerintah perlu bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam peningkatan kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan sesuai yang diharapkan.

II.2.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.1.2.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia.

Tabel II.33 Angka Rata-rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Ke Atas di Jawa Timur

Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
25 Tahun Keatas	6,79	6,85	6,90	7,05	7,14	7,23	7,34

Sumber : BPS Prov Jatim

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Timur, selama 2011-2017 terjadi peningkatan kualitas pendidikan penduduk yaitu dari 6,79 tahun ditahun 2011 meningkat menjadi 7,34 tahun pada tahun 2017.

II.2.1.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni dan Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Total grup kesenian pada tahun 2017 sebanyak 5.695 sanggar/grup, sedangkan yang paling banyak adalah grup kesenian musik dan yang terendah adalah grup kesenian pedalangan. Berikut jumlah sanggar/grup kesenian di Jawa Timur tahun 2016-2017 :

Tabel II.17 Jumlah Sanggar/Grup Kesenian di Jawa Timur Tahun 2016-2017

SANGGAR/GRUP	2016	2017
Tari	746	746
Pedalangan	65	65
Rupa	166	166
Musik	4.170	4.170
Teater	548	548
Jumlah Total Grup Kesenian	5.695	5.695

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan Nasional terus meningkat hingga tahun 2017 sebesar 26 penghargaan. Hal ini mencerminkan karya seni budaya di Jawa Timur berkembang dengan pesat.

Tabel II.185 Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional	-	-	13	11	16	22	26

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Selain karya seni budaya, peninggalan cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan. Pada tahun 2017, Persentase cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara/ dilestarikan di Jawa Timur sebesar 96,30 persen.

Tabel II.196 Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang Dipelihara/Dilestarikan



Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang Dipelihara/ Dilestarikan	-	-	-	-	-	94,50	96,30

*Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur*

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Jumlah atlet berprestasi di Jawa Timur tahun 2017 sebesar 1.088 orang. Kedepannya pemerintah terus berupaya agar atlet-atlet Jawa Timur terus berprestasi dikancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit-bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana.

Pada tahun 2014 jumlah club olahraga di Provinsi Jawa Timur adalah 12.291 klub, jumlah tersebut terus meningkat menjadi 12.835 pada tahun 2017. Berikut jumlah club olahraga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017.

Tabel II.207 Jumlah Club Olahraga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016	2017
Jumlah Club Olahraga	12.291	12.835	12.835	12.835

*Sumber: KONI Prov jatim dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur*

Pembibitan olahragawan adalah upaya mencari dan menemukan individu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga di kemudian hari, sebagai langkah atau tahap lanjutan dari pemassalan olahraga. Pada tahun 2016, pembibitan olahragawan berbakat sebesar 13,73 persen dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 23,73 persen

Tabel II.218 Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat

Indikator	Tahun
-----------	-------

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat	-	-	16,07	37,96	8,64	13,73	23,73

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

II.2.2 Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib

II.2.2.1 Pendidikan Menengah

2.2.2.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 – 18 Tahun

Seperti halnya pada pendidikan dasar, dalam melihat seberapa besar tingkat partisipasi penduduk usia 16-18 tahun dalam kegiatan belajar/ sekolah dapat dilihat dari besaran Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS usia 16 – 18 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan 16-18 tahun.

Tabel II.39 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun di Jawa Timur

Jenjang Pendidikan	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
APS (Usia 16-18 tahun)	59,65	62,51	65,95	71,23	72,14	72,76	73,38

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Angka partisipasi sekolah usia 16 – 18 tahun di Jawa Timur dalam tujuh tahun terakhir (tahun 2011-2017) menunjukkan nilai yang semakin meningkat. Meningkatnya APS usia 16 – 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi terutama jenjang SMA/SMK/MA. Pada tahun 2011 APS sebesar 59,65 persen dan terus meningkat hingga pada tahun 2017 menjadi 73,73 persen. Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari banyaknya program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu dengan adanya program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) maupun Program Indonesia Pintar.

2.2.2.1.2 Angka Putus Sekolah - SMA/MA/SMK

Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah.

Tabel II.40 Angka Putus Sekolah - SMA/MA/SMK di Jawa Timur

Jenjang Pendidikan	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,84	0,80	0,68	0,65	0,62	0,58	0,54

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Jenjang pendidikan setingkat SMA/MA/SMK, dalam tujuh tahun terakhir Angka Putus Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2011 sebesar 0,84 persen kemudian tahun 2017 menurun menjadi sebesar 0,54 persen. Pada tahun 2016 dalam tiap 1.000 anak usia 16-18 tahun sekitar 5 anak yang putus sekolah.

**2.2.2.1.3**    Angka kelulusan sekolah SMA/SMK

Salah satu syarat kelulusan setiap siswa dari suatu jenjang pendidikan adalah mengikuti Ujian Akhir Nasional (UNAS). Namun UNAS bukanlah satu satunya syarat seorang siswa dinyatakan lulus. Unas disyaratkan bagi murid yang telah menduduki kelas tertinggi, untuk kelas reguler kelas 6 untuk SD sederajat & kelas 3 untuk SLTP dan SLTA sederajat, sedangkan untuk kelas akselerasi adalah menduduki kelas akhir. Besaran angka kelulusan mencerminkan tingkat kualitas jenjang pendidikan, suatu sekolah banyak siswa yang lulus tentunya sekolah tersebut mempunyai kualitas yang baik dibanding dengan sekolah yang siswanya sedikit lulus.

Tabel II.41 Angka Kelulusan Sekolah - SMA/MA/SMK di Jawa Timur

Jenjang Pendidikan	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kelulusan Sekolah	97,73	98,14	98,27	98,52	98,57	98,63	98,68

SMA/MA/SMK							
------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Angka kelulusan sekolah setingkat SMA/MA/SMK dalam tujuh tahun terakhir terus meningkat mulai 97,73 persen tahun 2011, meningkat menjadi 98,68 persen pada tahun 2017. Hal ini memberikan gambaran adanya peningkatan kualitas jenjang pendidikan, karena secara umum sekolah setingkat SD hingga setingkat SLTA angka kelulusan meningkat mendekati angka sempurna yaitu 100 persen.

**2.2.2.1.4 Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4**

Keberadaan guru tidak hanya diperlukan dari sisi jumlahnya saja, tetapi juga kualitasnya. Kualitas seorang guru secara umum ditentukan dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seorang guru akan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mengajar murid, semakin tinggi pendidikan maka dia akan mempunyai kemampuan yang lebih dibanding yang pendidikannya rendah. Dengan tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Tabel II.222 Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4 di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jenjang SMA, SMK dan PK-PLK berkualifikasi min D4/S1	87,46	91,93	92,36	94,84	96,55	98,78	98,80

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4 di Jawa Timur selama tujuh tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 87,46 persen pada tahun 2011 menjadi 98,80 persen tahun 2017. Hal ini merupakan suatu tuntutan dan juga dengan adanya pemberian tunjangan sertifikasi guru sehingga mau tidak mau seorang guru harus meningkatkan tingkat pendidikannya.

**2.2.2.1.5 Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/MA/SMK**

APM adalah perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu pula sesuai dengan peruntukannya. Dengan kata lain APM dapat digunakan untuk

mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalannya. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (Key Development Milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan (Renstra Kemdiknas 2010-2014).

Tabel II.233 Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/MA/SMK di Jawa Timur

Angka Partisipasi Murni (APM)	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
APM SMA/MA/SMK	54,97	55,94	59,78	65,78	65,83	68,21	68,65

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2011-2017, APM SMA/MA/SMK mengalami peningkatan, yaitu sekitar 54-68 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Peningkatan APM SMA/MA/SMK ini memberikan gambaran adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah.

2.2.2.1.6 Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Indeks pembangunan manusia, yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2011 indeks pendidikan mencapai 0,55 kemudian di tahun 2015 capaiannya meningkat menjadi 0,59 dan tahun 2017 menjadi 0,61. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, semakin besar pula kontribusinya terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

Tabel II.244 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Pendidikan	0,55	0,55	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61

Sumber : BPS Prov Jatim

2.2.2.1.7 Angka Rata-rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Ke Atas



Angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya.

Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah.

Tabel II.45 Angka Rata-rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Ke Atas di Jawa Timur

Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
25 Tahun Keatas	6,79	6,85	6,90	7,05	7,14	7,23	7,34

Sumber : BPS Prov Jatim

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Timur, selama 2011-2016 terjadi peningkatan kualitas pendidikan penduduk yaitu dari 6,79 tahun ditahun 2011 meningkat menjadi 7,34 tahun pada tahun 2017.

**2.2.2.1.8**    Angka Partisipasi Kasar (APK) - SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid penduduk yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Tabel II.425 Angka Partisipasi Kasar (APK)-SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi	Tahun
-------------------	-------

Kasar (APK)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
APK SMA/MA/SMK	73,78	74,21	78,21	78,23	79,14	81,42	82,80

Sumber : Dinas Pendidikan Prov Jatim

Pada tahun 2011-2017, APK SMA/MA/SMK mengalami peningkatan, yaitu dari 73,78 persen pada tahun 2011 menjadi 82,80 persen tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolahnya di jenjang pendidikan tertentu.

II.2.2.2 Kesehatan

2.2.2.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas). Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel II.267 Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Bayi (AKB)	29,24	25,50	25,00	24,50	24,00	23,60	23,10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan angka kematian bayi selama enam tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2011 angkanya mencapai 29,24, selanjutnya terus menurun hingga tahun 2017

menjadi 23,10. Terjadinya penurunan AKB merupakan dampak positif dari naiknya angka persalinan dengan bantuan tenaga medis dan meningkatnya proporsi tingkat pendidikan perempuan secara umum, khususnya para ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi.

Meskipun tidak cukup signifikan secara nilai absolut, akan tetapi tingkat penurunan ini menunjukkan bahwa upaya keras semua pihak, khususnya pemerintah untuk menekan angka kematian bayi membuahkan hasil. Hal tersebut terkait dengan adanya peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, keberhasilan program KB, serta semakin baiknya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Secara perlahan namun pasti AKB mengalami penurunan, artinya kesehatan bayi menjadi prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan. Dalam usaha meminimalkan AKB diperlukan penanganan yang intensif baik dari faktor eksternal maupun internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan yang mumpuni dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang cukup serta pemberian ASI dan imunisasi.

**2.2.2.2.2    Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Tabel II.278 Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Angka Kematian Ibu (AKI)	104,3	97,43	97,39	93,52	89,60	91,00	91,92
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Secara umum selama tahun 2011-2015 AKI di Jawa Timur terus menunjukkan penurunan, yaitu masing-masing 104 (tahun 2011) 97,43 (tahun 2012) 97,39 (tahun 2013), 93,52 (tahun 2014), dan 89,60 (tahun 2015) per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan menjadi 91 dan tahun 2017 menjadi 91,92. Faktor penyebab terbesar kematian ibu hamil saat melahirkan diantaranya karena pendarahan. Untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan diantaranya pendampingan dan sosialisasi kepada ibu hamil serta kader kesehatan, agar ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak pelatihan, gerakan senam ibu hamil, dan mengintensifkan koordinasi dengan bidan dan memanfaatkan sarana kesehatan yang terdekat. Pemberian tablet penambah darah melalui puskesmas atau pada saat pendampingan diharapkan akan mengurangi angka kematian ibu.

**2.2.2.2.3    Angka Usia Harapan Hidup**

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk suatu Negara atau wilayah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mencapai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Definisi Angka Harapan Hidup (AHH) pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di

suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel II.28 Angka Harapan Hidup (AHH) di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (AHH)	70,02	70,14	70,34	70,45	70,68	70,74	70,80

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Dari hasil penghitungan proyeksi yang dilakukan oleh BPS RI, rata-rata AHH di Jawa Timur selama tujuh tahun terakhir (2011–2017) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 70,02 (Thn.2011) menjadi 70,80 (Thn.2017). Pada umumnya kabupaten di wilayah “tapal kuda” seperti Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Jember, Situbondo, Bondowoso, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep memiliki usia harapan hidup yang rendah dibanding daerah “kulonan atau mataraman” (Jawa Timur sebelah barat). AHH pada wilayah “tapal kuda” berkisar 64 hingga 66 tahun untuk perempuan dan 60 hingga 63 tahun untuk laki-laki. Sementara wilayah mataraman yang memiliki usia harapan hidup cukup tinggi adalah Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Tulungagung, dan Kota Blitar, dengan 74 – 75 tahun untuk perempuan dan 71 – 73 tahun untuk laki-laki

**2.2.2.2.4 Persentase Stunting**

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang,



sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Prevalensi balita stunting mengalami penurunan tiap tahun, yaitu dari 29,2 persen pada tahun 2013 menjadi 26,01 persen di tahun 2016. Sementara itu pada tahun 2017, persentasenya meningkat menjadi 26,70 persen.

Tabel II.29 Persentase Stunting di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase stunting	-	30,01	29,2	29	27,1	26,01	26,70

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

2.2.2.2.5 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. Berdasarkan Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi wajib bagi semua rumah sakit baik rumah sakit publik/pemerintah maupun rumah sakit privat/swasta/BUMN. Rumah Sakit di Jawa Timur telah melakukan akreditasi sejak tahun 2013.

Tabel II.301 Persentase Rumah Sakit terakreditasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Rumah Sakit terakreditasi	-	-	88	90,63	65,00	67,00	74,50

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Secara umum selama tahun 2013-2014 prosentase Rumah Sakit di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 88,00 persen (tahun 2013) dan 90,63 persen (tahun 2014). Pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 65 persen dan tahun 2016 sedikit meningkat kembali menjadi 67 persen. Sementara itu pada tahun 2017, persentasenya meningkat menjadi 74,05 persen. Peningkatan prosentase rumah sakit yang terakreditasi terjadi mulai

tahun 2014 yaitu bersamaan dengan adanya kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Akreditasi rumah sakit merupakan salah satu persyaratan supaya rumah sakit bisa bekerjasama dengan BPJS.

Rumah Sakit yang telah terakreditasi akan mendapatkan pengakuan dari Pemerintah karena telah memenuhi standar pelayanan dan manajemen yang ditetapkan. Peningkatan ini merupakan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

**2.2.2.2.6 Persentase RFT Rate Kusta**

Pengobatan kusta menggunakan *Multi Drug Therapy (MDT)* sudah digunakan secara global sejak tahun 1985 sampai sekarang dan telah menyembuhkan > 140.000 penderita kusta yang ada di Jawa Timur. Faktor yang memegang peranan dalam keberhasilan pengobatan adalah stigma yang ada dimasyarakat dan motivasi yang kuat dari penderita untuk menyelesaikan pengobatan kusta karena MDT harus diminum setiap hari selama 6 atau 12 bulan tergantung dari tipe kustanya. Selain itu MDT juga mempunyai efek samping kulit jadi hitam. Hal tersebut diatas yang menyebabkan keberhasilan pengobatan MDT tidak bisa maksimal atau terjadinya putus pengobatan.

Tabel II.312 Persentase RFT Rate Kusta di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase RFT Rate Kusta	90	89	87	90	91	90	90

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Pencapaian prosentase RFT rate kusta pada tahun 2015 sebesar 91 persen dan menurun pada tahun 2017 sebesar 90 persen. Perlu upaya secara kofrehensif untuk keberhasilan pengobatan mulai dari penemuan kasus baru secara dini, penjelasan dan motivasi saat akan mulai pengobatan, pembinaan pengobatan, sosialisasi pada masyarakat terutama yang ada di daerah endemis kusta yang melibatkan sektor-sektor lain selain kesehatan.

**2.2.2.2.7 Persentase Penderita HIV Yang Mendapatkan ARV**

*Antiretrovirals (ARV)* telah diakui dunia sebagai obat yang bisa digunakan untuk mengobati HIV/AIDS. Namun, ARV belum mampu

menyembuhkan HIV secara menyeluruh. ARV berguna untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus (viral load) dalam darah sampai tidak terdeteksi.

Tabel II.323 Persentase Penderita HIV Yang Mendapatkan ARV di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penderita HIV Yang Mendapatkan ARV	-	-	72,00	75,00	77,00	79,8	80,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV di Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 72 persen dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 79,8 persen. Sementara itu pada tahun 2017, persentasenya meningkat menjadi 80,00 persen. Meskipun belum mampu menyembuhkan HIV secara menyeluruh, tapi sejauh ini terapi ARV dipercaya bisa menurunkan angka kematian dan rasa sakit, meningkatkan kualitas hidup ODHA, dan meningkatkan harapan masyarakat.

2.2.2.2.8 Persentase Keberhasilan Pengobatan TB

Berdasarkan WHO melalui *Global Tuberculosis Report* Tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai penyumbang penderita TBC terbanyak setelah India. Diperkirakan kasus TBC baru (insidensi) di Indonesia adalah 395 per 100.000 penduduk (total kasus TB 1.020.000). Program Penanggulangan TBC selain melakukan kegiatan promosi aktif dan pencegahan, juga melakukan kegiatan deteksi dini dimana dilakukan penemuan penderita TBC secara intensif, aktif dan masif berbasis keluarga dan masyarakat serta pemberian pengobatan sampai sembuh. Gerakan 115 merupakan inovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menemukan penderita TBC sedini mungkin dan mendapatkan pengobatan secepat mungkin, dimana 1 (satu) penderita TBC akan dicatat dan dicari 15 (lima belas) kontak erat penderita TBC tersebut baik oleh petugas, kader maupun tokoh masyarakat serta dipastikan status TBC nya. Program penanggulangan TBC juga harus mendapat dukungan komitmen dari Para Stakeholder.

Tabel II.334 Persentase Keberhasilan Pengobatan TB di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	-	-	90,00	91,00	91,00	89,91	90,10

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dengan target success rate > 90%, diharapkan bisa menggambarkan semakin banyak masyarakat yang menderita TBC yang menyelesaikan pengobatan sampai tuntas sehingga dapat memutus rantai penularan. Mayoritas penderita TBC adalah usia produktif, dengan pengobatan TBC yang sesuai standar sampai sembuh berarti produktifitas mereka diharapkan bisa pulih kembali dan lebih meningkat. Maka dampaknya adalah masyarakat Jawa Timur terbebas dari resiko sakit TBC dan masalah-masalah sosial ekonomi yang diakibatkan karena penyakit TBC.

II.2.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.2.3.1 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap

Kriterianya adalah jalan provinsi yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Nilai maksimum IRI adalah 8 atau RCI minimum nilainya sedang. Menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Tabel II.345 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/ Mantap	-	85,73	88,40	87,68	89,43	88,87	90,31

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Kewenangan penyelenggaraan jalan di Jawa Timur mengalami perubahan sejak terbitnya SK Menteri PUPR no: 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional tanggal 5 Mei 2015 dan SK Gubernur Jawa Timur No:

188/128/KPTS/013/2016 tentang Penetapan ruas – ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan provinsi tanggal 12 Februari 2016. Perubahan itu terkait adanya perubahan status beberapa ruas jalan di Jawa Timur yang berubah dari status jalan provinsi menjadi jalan nasional ataupun kabupaten/ kota dan status jalan kabupaten/ kota menjadi jalan provinsi atau jalan nasional.

Kewenangan Pemerintah Provinsi Jatim dalam menyelenggarakan Jalan provinsi di Jawa Timur sejak diterbitkannya SK tersebut menjadi 1.421 Km. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2015 adalah sebesar 89,43 persen dan pada tahun 2016 adalah sebesar 88,87 persen mengalami penurunan kemantapan sebesar 0,56 persen dan pada tahun 2017 persentasenya menjadi 90,31 persen.

#### 2.2.2.3.2 Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat pusat kegiatan sebagai berikut:

1. Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan;
2. Menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Tabel II.56 Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer	-	-	54,14	55,15	56,89	57,90	59,16

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur



Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer pada tahun 2016 adalah sebesar 57,90 persen dan pada tahun 2017 adalah sebesar 59,16 persen mengalami peningkatan sebesar 1,26 persen. Peningkatan capaian sasaran tersebut dikarenakan ada rekonstruksi dan peningkatan jalan sepanjang 72,08 km.

#### 2.2.2.3.3 Persentase Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan kawasan potensial adalah kawasan yang memiliki sumberdaya alam atau sumberdaya manusia baik yang telah di mobilisir maupun yang belum yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu kawasan.

Tabel II.57 Persentase Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial	-	-	40,63	40,63	44,50	47,36	47,36

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial pada tahun 2016 adalah sebesar 47,36 persen dan pada tahun 2017 adalah sebesar 47,36 persen. Tidak ada peningkatan dalam pembangunan jalan menuju kawasan potensial, karena fokus terhadap pemenuhan jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer

#### 2.2.2.3.4 Persentase Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Baku

Air baku adalah air yang dijadikan sebagai sumber untuk pengolahan air bersih. Air baku dapat berasal dari berbagai macam sumberdaya air. Pengertian air bersih adalah air yang terbebas dari zat-zat terlarut dan telah memenuhi syarat kualitas sehingga dapat dikonsumsi sebagai air minum. Ketersediaan air baku merupakan kemampuan suatu sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan air baik

secara kuantitas maupun kualitas dalam suatu wilayah. Ketersediaan air baku dapat diperoleh dari beberapa sumber air yang ada di bumi.

Tabel II.35 Persentase Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Baku

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Baku	-	-	-	-	-	87,89	87,84

*Sumber : Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur*

Tahun 2016 ketersediaan dan kebutuhan air baku di Jawa Timur sebesar 87,89 persen, kemudian meningkat menjadi 87,84 persen pada tahun 2017. Penurunan ketersediaan air baku disebabkan belum terselesaikan pembangunan beberapa waduk dan tampungan air baku lainnya serta penurunan kapasitas sumber air permukaan eksisting yang disebabkan tingginya sedimentasi, sedangkan disisi lain kebutuhan air baku relatif stabil, bahkan cenderung meningkat. Upaya untuk meningkatkan ketersediaan air baku melalui fasilitasi percepatan pembangunan waduk dan tampungan air baku skala besar lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan normalisasi sumber air permukaan.

#### 2.2.2.3.5 Persentase Pelayanan Air Untuk Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Pelayanan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal. Dalam hal tertentu, pelayanan air irigasi dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Pada tahun 2013, persentase pelayanan air untuk irigrasi di Jawa Timur sebesar 68,00 persen kemudian meningkat menjadi 100,09 persen pada tahun 2017. Kondisi ini berdampak pada peningkatan ketersediaan air sehingga meningkatkan produktifitas pertanian.

Tabel II.59 Persentase Pelayanan Air Untuk Irigasi

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pelayanan Air	-	-	68,00	69,00	70,00	82,20	100,09

Untuk Irigrasi							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.2.3.6 Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan oprasi dan mempertahankan kelestariannya.

Tabel II.360 Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	-	-	-	-	68,30	68,50	69,32

Sumber : Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur

Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik pada tahun 2017 sebesar 69,32 persen, mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 68,30 persen. Kenaikan tersebut berdampak pada meningkatnya penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian.

#### 2.2.2.3.7 Persentase Penanganan Luas Daerah Genangan Banjir

Banjir adalah keadaan aliran air dan atau elevasi muka air dalam sungai atau kali atau kanal yang lebih besar atau lebih tinggi dari normal. Genangan yang timbul di daerah rendah sebagai akibat yang ditimbulkannya juga termasuk dalam pengertian ini. Penanggulangan banjir harus dilakukan oleh berbagai pihak antara pemerintah dan masyarakat. Mulai dari tata kota dan saluran air yang baik, serta perilaku masyarakat yang bijak terhadap lingkungan.

Tabel II.371 Persentase Penanganan Luas Daerah Genangan Banjir

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penanganan Luas Daerah Genangan Banjir	-	-	-	-	-	52,29	67,62

Sumber : Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur

Persentase penanganan luas daerah genangan banjir di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 52,29 persen dan pada tahun 2017sebesar 67,62 persen. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan luas genangan banjir adalah melalui operasi pemeliharaan dan rehabilitasi sungai.

#### 2.2.2.3.8 Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya Sesuai Dengan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel II.62 Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya Sesuai Dengan RTRW

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya Sesuai Dengan RTRW	-	-	-	-	45,00	47,90	48,00

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW pada tahun 2015 sebesar 45 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 48 persen. Semakin meningkatnya persentase luas kawasan peruntukannya sesuai dengan RTRW maka kesenjangan antar wilayah bisa teratasi, disamping itu meratanya pengembangan infrastruktur wilayah memberikan dampak distribusi ekonomi dan investasi menjadi lebih optimal.

#### II.2.2.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

##### 2.2.2.4.1 Persentase capaian infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Rumah dan fasilitas perumahan yang memadai

merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya.

Di beberapa negara sedang berkembang, masalah kualitas perumahan dan fasilitas pemukiman di kota-kota besar sangat terasa. Hal ini disebabkan oleh pertambahan penduduk kota dan terbatasnya lahan yang diperuntukkan bagi perumahan yang memadai. Dalam dasar-dasar perencanaan perumahan harus memperhatikan standar sarana dan prasarana lingkungan perumahan. Sarana perumahan meliputi sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sedangkan prasarana perumahan adalah drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, listrik, telepon, dan jalan.

Tabel II.383 Presentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Presentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	32,91	51,55	61,29

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Provinsi Jatim

Persentase capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 32,91 persen, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 61,29 persen. Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Pembangunan sarana prasarana yang sesuai diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global.

Tabel II.394 Capaian Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Kawasan Kumuh Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Air Minum layak (%)	58,08	59,69	60,96	62,35	71,24	72,06	73,44
Sanitasi Layak (%)	62,71	63,12	63,2	63,7	63,38	65,31	65,95
Pengurangan Kawasan Kumuh Perkotaan (ha)	-	-	-	-	3.185,40	2.730,10	1.530,84



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Provinsi Jawa Timur

Backlog rumah di Jawa Timur pada tahun 2010 sebanyak 530.000 unit, terdiri dari 212.000 unit di perkotaan dan 218.000 unit di perdesaan yang dipenuhi melalui pembangunan Rumah Susun Sederhana dan Sewa (RUSUNAWA) dan pembangunan rumah tapak melalui REI dan APERSI sebesar 25.000 unit rumah/tahun.

Tabel II.405 Realisasi Pembangunan RUSUNAWA Provinsi Jawa Timur

Nama Rusun	TB	Pelaksana	Peruntukkan
Rusunawa Siwalankerto	5 TB	Perumnas, Pemprov, APBN	MBR
Rusunawa Jemundo (PUSPA AGRO)	2 TB	Pemprov Jatim	Sementara Untuk Pengungsi Sampang
Rusunawa Gunungsari	3 TB	Pemprov Jatim	Warga Stren Kali Jagir
Rusunawa Uripsumoharjo	2 TB	Pemprov Jatim	MBR
Rusunawa SIER	1 TB	Pemprov Jatim	Pekerja/Buruh SIER
Rusunawa Gunung Anyar	3 TB	Pemprov Jatim, APBN	MBR
Rusunawa Sumur Welut	5,5 TB	Pemprov Jatim, APBN	MBR

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Provinsi Jawa Timur

Di sisi lain jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Timur mencapai 324.000 unit yang bekerjasama dengan KODAM V/Brawijaya dan LANTAMAL V.

Tabel II.416 Realisasi Renovasi RTLH Kerjasama Dengan KODAM V/Brawijaya

Tahun	Biaya	Target	Realisasi	Lokasi
	(Rp. Milyar)			(Kab/Kota
2009-2014	420	78.460	79.279	29 Kabupaten dan 1 Kota di Jawa Timur
APBD 2015	90	12.100	12.141	Kab. Malang, Pasuruan, Lamongan, Bondowoso, Situbondo, Jombang, Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Kota Surabaya, Kab. Probolinggo & Kab. Mojokerto.
APBD 2016	60	8.725	8.772	Kab. Jember, Bondowoso, Pacitan, Lumajang, Madiun, Ngawi, Tuban, Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Blitar

Tahun	Biaya	Target	Realisasi	Lokasi
	(Rp. Milyar)			(Kab/Kota
APBD 2017	65	8.725	8.759	Kab. Pamekasan, Sampang, Probolinggo, Trenggalek, Pacitan, Banyuwangi, Pasuruan, Jombang, Ponorogo, Bojonegoro, Gresik, Mojokerto
TOTAL	635	108.010	108.951	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Provinsi Jawa Timur

Tabel II.427 Realisasi Renovasi RTLH Kerjasama Dengan LANTAMAL V

Tahun	Biaya	Target	Realisasi	Lokasi
	(Rp. Milyar)			(Kab/Kota
2015	15	1.600	1.600	Lanal Batuporon (500) ; Lanal Malang (200) ; Banyuwangi (550) & Dispotmar Lantamal V (350)
2016	10	1.025	1.025	Lanal Batuporon (250) ; Lanal Malang (300) ; Banyuwangi (275) & Dispotmar Lantamal V (200)
2017	20	1.825	1.825	Lanal Probolinggo, Pasuruan, Lamongan dan Tuban (350), Lanal Malang (500), Lanal Banyuwangi, Jember (650) dan Lanal Batuporon (325)
TOTAL	45	4.450	4.450	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Provinsi Jawa Timur

II.2.2.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2.2.2.5.1 Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman yang Diselesaikan

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan satu kesatuan frase yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan didaerah secara berkesinambungan. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat atau kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai

upaya membangun kesadaran yang baik. terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.

Tabel II.438      Persentase      Penanganan      Kasus      Pelanggaran  
Ketertiban Umum dan Ketentraman yang Diselesaikan

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	83,33

Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur

Pada Tahun 2017 persentase penanganan kasus pelanggaran tramtibus dan ketentraman yang diselesaikan sebesar 83,33 persen. Kedepan pemerintah terus berupaya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga tercipta kondisi, aman, nyaman dan tentram.

2.2.2.5.2 Persentase pertumbuhan anggota Satlinmas dan Masyarakat yang Bersertifikat dalam Pelaksanaan Tugas PAM Swakarsa, Penanggulangan Bencana, dan Pemadam Kebakaran

Satlinmas merupakan kekuatan utama dalam upaya perlindungan masyarakat pada saat terjadi bencana, pengungsi, lamtibmas dan sosial kemasyarakatan. Tugas dari Satlinmas adalah melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan. Perkembangan persentase pertumbuhan anggota Satlinmas yang terlatih atau bersertifikat pada tahun 2017 sebesar 100 persen.

Tabel II.69 Persentase      Pertumbuhan      Anggota      Satlinmas      dan  
Masyarakat Yang Bersertifikat dalam Pelaksanaan Tugas  
PAM Swakarsa, Penanggulangan Bencana, dan Pemadam  
Kebakaran

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase pertumbuhan anggota Satlinmas dan masyarakat yang bersertifikat dalam pelaksanaan tugas PAM Swakarsa, penanggulangan bencana, dan pemadam kebakaran	-	-	-	-	-	-	100

*Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur*

#### 2.2.2.6 Sosial

##### 2.2.2.6.1 Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk mencegah, menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Tabel II.440 Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	-	-	11,48	15,07	13,05	13,51	15,35

*Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur*

Pada tahun 2015, persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebesar 13,05 persen, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2016 menjadi 13,51 persen. Dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun 2017 semakin mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 15,35 persen dengan total Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sejumlah 2.454 PSKS dan populasi sebesar 16.033 PSKS. Meningkatnya pembinaan terhadap PSKS maka pembangunan bidang

kesejahteraan sosial akan berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

#### 2.2.2.6.2 Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Tabel II.451 Persentase PMKS Penerima Manfaat Program Sosial Yang Meningkatkan Kemampuannya Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Minimalnya Dan Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase PMKS Penerima Manfaat Program Sosial Yang Meningkatkan Kemampuannya Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Minimalnya Dan Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya	-	-	1,67	1,32	1,08	1,38	1,27

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Persentase PMKS penerima manfaat program sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya pada tahun 2013 sebesar 1,67 persen dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1,38 persen. Dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun 2017 mengalami penurunan secara signifikan menjadi 1,27 persen. Dengan adanya program sosial ini diharapkan penyandang PMKS dapat hidup mandiri dan meningkatkan fungsi sosialnya.

#### 2.2.3 Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

##### 2.2.3.1 Ketenagakerjaan

##### 2.2.3.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Selain TPT, indikator lain dalam ketenagakerjaan adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan, Makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya. Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Agustus 2017 menunjukkan keadaan terus menjadi lebih baik dibandingkan Pebruari 2017 dan Agustus 2016. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah amgkatan kerja dan penurunan jumlah pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2017 sebesar 30,44 juta mengalami peningkatan jika dibanding Pebruari 2017 yaitu 30,31 juta jiwa.

Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut otomatis berpengaruh terhadap TPAK, dimana berdasarkan data BPS Pebruari 2017 (hasil Sakernas 2017), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur. Pada Agustus 2015, TPAK Jawa Timur tercatat mencapai angka 67,84 persen dan pada Agustus 2017 naik menjadi 68,78 persen

Tabel II.462 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,49	69,62	69,78	68,12	67,84	66,14	68,78

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 68,93 persen penduduk Jawa Timur yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 31,07 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia). Kondisi kesehatan di Jawa Timur yang relatif semakin baik membuat angka harapan hidup di Jawa Timur semakin meningkat dan membuat jumlah lansia semakin bertambah. Di sisi lain, peningkatan pemahaman masyarakat akan perlunya pendidikan juga mempengaruhi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk memilih melanjutkan pendidikan dan menunda peran aktifnya di pasar kerja. Apalagi fenomena tersebut dibarengi dengan semakin didorongnya program wajib belajar dan biaya pendidikan gratis yang ikut menjadi faktor penunda bagi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk terjun ke pasar kerja.

2.2.3.1.2 Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan



Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 62,00 persen (Tahun 2015); 67,23 persen (Tahun 2016) dan 68,56 persen (Tahun 2017). Dengan meningkatnya persentase pencari kerja yang ditempatkan maka secara tidak langsung akan menurunkan angka pengangguran.

Tabel II.473 Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	-	-	-	54,99	62,00	67,23	68,56

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

### 2.2.3.1.3 Persentase Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Di Jatim

Kesejahteraan merupakan suatu bentuk usaha yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan semangat pada pekerja. Pelayanan kesejahteraan merupakan rangkaian pemberian tunjangan dan fasilitas-fasilitas dalam bentuk tertentu kepada karyawan diluar gaji, biasanya berupa transportasi, uang lembur, cuti, kantin, asuransi, jamsostek dan sebagainya.

Tabel II.484 Persentase Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Di Jatim	-	-	-	-	-	11,75	8,25

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Persentase Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Di Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 8,25 persen dari seluruh pekerja di Jawa Timur, menurun dibanding tahun 2016 sebesar 11,75 persen. Adapun jumlah Penduduk yang Bekerja Tahun 2017 di Provinsi Jawa Timur menurut SAKERNAS 2017 yaitu sebanyak 20.099.220 jiwa dengan klasifikasi 7 jenis pekerjaan, 7 Status Pekerjaan Utama, dan 9 lapangan usaha. Dengan semakin tingginya kesejahteraan pekerja maka menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang bagus di Jawa Timur karena akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal pekerja terhadap perusahaan.

### 2.2.3.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### 2.2.3.2.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari Indeks Pemberdayaan Gender mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen;

Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Tabel II.495 Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*)
Indeks Pemberdayaan Gender	68,62	69,29	70,77	68,17	68,41	69,06	71,62

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim

Ket : \*) Angka Sementara

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2011 sebesar 68,62 dan tahun 2012 sebesar 69,29 kemudian tahun 2013 sebesar 70,77, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 68,17 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 68,41. Pada tahun 2016, Indeks Pemberdayaan Gender kembali meningkat menjadi 69,06 dan pada tahun 2017 capaiannya menjadi 71,62 (Angka Sementara). Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen terus berupaya agar pemberdayaan gender selalu meningkat, diantaranya adalah melibatkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi.

Masalah utama yang dihadapi dalam capaian IDG Jawa Timur adalah keterwakilan perempuan dalam parlemen. Capaian keterlibatan perempuan di parlemen tidak berubah kondisinya dari tahun 2014 hingga tahun 2015 yaitu sebesar 15%. Suara perempuan dalam parlemen di Provinsi Jawa Timur yang hanya 15% dirasakan masih sangat terbatas, sehingga untuk menyuarakan kepentingan perempuan juga masih sangat kurang

#### 2.2.3.2.2 Persentase Penurunan Kasus Tindak Kekerasan dan Trafiking di Jawa Timur

Tindak kekerasan dan trafiking merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia sebagai obyek sekaligus sebagai subyek.

Selain masalah utama Kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan.

Tabel II.506 Persentase Penurunan Kasus Tindak Kekerasan dan Trafiking

di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking	-	-	-	-	-6,88	12,50	30,51

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim

Pada tahun 2015, Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jawa Timur sebesar (-6,88) persen dan pada tahun 2016 persentasenya menjadi 12,50 persen. Sedangkan tahun 2017 persentase menjadi 30,51 persen, hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil dalam upaya Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan Trafficking melalui Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Trafficking di Kabupaten/Kota.

2.2.3.3 Ketahanan Pangan

**2.2.3.3.1 Ketersediaan Pangan**

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi penyangga pangan Nasional. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Provinsi lainnya di Indonesia, disamping untuk stok/cadangan pangan Nasional. Sebagai Provinsi lumbung pangan, Jawa Timur masih perlu melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan ditingkat wilayah dan rumah tangga.

Tabel II.517 Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Strategis Di Jawa Timur

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
a. Beras (Ton)	7.407.895	7.497.051	7.370.434	7.975.352
b. Jagung (Ton)	5.075.010	5.425.180	6.441.652	5.638.374
c. Kedelai (Ton)	325.964	316.390	464.861	268.142

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Ketersediaan beras di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 7.497.051 ton, selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2017

menjadi 7.975.352 ton. Kondisi yang sama juga terjadi pada komoditas jagung dan kedelai, dimana ketersediaanya terus meningkat tiap tahunnya. Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan.

#### 2.2.3.3.2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Tabel II.528 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,6	80	80,5	81,6	82,7	83,4	84,8

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2011 Pola Pangan Harapan (PPH) di Jawa Timur sebesar 79,60, selanjutnya mengalami peningkatan terus tiap tahun hingga menjadi 84,8 pada tahun 2017. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat, namun demikian perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan pengenaan keanekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan.

#### 2.2.3.4 Lingkungan Hidup

##### 2.2.3.4.1 Indeks Kualitas Air

Sungai memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, diantaranya sebagai air bersih untuk rumah tangga, air baku untuk industri, pertanian, pembangkit listrik, dan sebagainya. Di Jawa Timur terdapat 2 (dua) sumber air sungai utama, yaitu DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo yang memegang peranan sangat penting sebagai sumber air baku namun di sisi lain juga sangat rentan terhadap adanya pencemaran kualitas air oleh limbah domestik dan industri. Penurunan kualitas air sungai akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya serta produktivitas dari sektor – sektor perekonomian. Oleh karena itu, kualitas air sungai merupakan salah satu indikator pembangunan Jawa Timur untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Penilaian terhadap kualitas air sungai dapat dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya yang terangkum dalam Indeks Kualitas Air (IKA).

Tabel II.79 Indeks Kualitas Air

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Kualitas Air (IKA)	-	-	49,11	49,11	50,33	52,00	52,77

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur*

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2017 sehingga IKA Provinsi Jawa Timur masih berada dalam kategori sangat kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tahun 2017 terjadi penurunan kualitas air sungai di Jawa Timur yang disebabkan karena adanya pencemaran air yang berasal dari aktivitas domestik dan terjadinya alih fungsi lahan, terutama di wilayah tangkapan air yang menyebabkan debit air yang masuk kebeberapa sungai berkurang.

##### 2.2.3.4.2 Indeks Kualitas Udara



Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari 2 (dua) polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.

Tabel II.530 Indeks Kualitas Udara

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	-	72,45	73,10	89,21	89,25	85,49

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan diatas dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2016 namun kembali menurun pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2017 terjadi penurunan kualitas udara di Jawa Timur yang disebabkan karena adanya pencemaran udara yang berasal dengan pemakaian energi, terutama dari sektor industri dan transportasi yang sebagian besar masih sangat tergantung kepada bahan bakar fosil, seperti minyak bumi dan batubara. Di lain pihak, meski mengalami penurunan, nilai IKU Provinsi Jawa Timur masih termasuk dalam kategori sangat baik, yaitu 85,49.

2.2.3.4.3 Indeks Tutupan Lahan

Hutan dan lahan merupakan salah satu media lingkungan yang juga tidak terlepas dari permasalahan lingkungan. Beberapa permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh hutan dan lahan mencakup deforestasi, kebakaran, dan lahan kritis. Perhitungan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dilakukan melalui perbandingan jumlah luas tutupan ber-hutan dibagi dengan jumlah luas wilayah provinsi. Secara detail, nilai dari ITL Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013 sampai 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.541 Indeks Tutupan Lahan

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Tutupan Lahan	-	-	49,47	49,47	49,59	54,00	62,02

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel diatas Indeks Tutupan Lahan (ITL) di Jawa Timur tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan peningkatan, yaitu dari 49,47 pada tahun 2013 menjadi 62,02 pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju penurunan luasan hutan di Jawa Timur cenderung berkurang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil melakukan reforestasi dalam rentang waktu 2013 hingga 2017.

#### 2.2.3.5 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

##### 2.2.3.5.1 Persentase penduduk ber KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka sejak tahun 2013 di Provinsi Jawa Timur penerapan e-KTP sudah meliputi 38 Kabupaten/Kota. Berdasarkan data yang dihimpun dari dinas/instansi terkait realisasi perekaman data e-KTP tahun 2013 sebesar 84,27 persen dan pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan dalam perekaman data e-KTP yaitu menjadi 89,62 persen. Pada Tahun 2015 hasil perekaman KTP elektronik di 38 Kabupaten/Kota terus menunjukkan peningkatan menjadi 92,09 persen dan pada tahun 2016 sebesar 92,82 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 98,36 persen. Persentase Penduduk Ber KTP adalah indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

Tabel II.552 Persentase Penduduk Ber-KTP Di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penduduk Ber-KTP (%)	76,87	76,86	84,27	89,62	92,09	92,82	98,36

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim*

Peningkatan kepemilikan e-KTP selama tujuh tahun terakhir menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan e-KTP hal ini ditandai dengan meningkatnya perekaman jumlah e-KTP dari tahun ke tahun. Selain itu, pada saat ini pelayanan e-KTP maupun Kartu Keluarga (KK) sudah dipermudah, karena penduduk dapat mengurusnya di kantor kecamatan setempat. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan masih terdapat permasalahan terkait belum optimalnya pelaksanaan e-KTP.

#### 2.2.3.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

##### 2.2.3.6.1 Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel

Wilayah pedesaan selalu dicirikan dengan rendahnya tingkat produktivitas kerja, tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas hidup dan pemukiman. Pedesaan dianggap sebagai daerah yang tertinggal, miskin, dan pembangunannya lambat karena jauh dari pusat pemerintahan. Padahal sebenarnya kawasan pedesaan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, hanya saja belum dimanfaatkan dengan maksimal. Persentase tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

Tabel II.563 Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel	-	-	-	-	-	-	56

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur*

Pada tahun 2017 capaian Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel sebesar 56 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat desa/kel secara tidak langsung akan berdampak pada kesejahteraannya yang semakin membaik sehingga terbebas dari keterbelakangan dan/atau kemiskinan. Bentuk kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi dalam rangka

Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Miskin, antara lain melalui Program Pemberdayaan dari OPD Pelaksana seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas-Dinas sektor Ekonomi.

#### 2.2.3.6.2 Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel. Yang Aktif (%)

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Aktif adalah indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pada tahun 2015, Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kel. yang aktif sebesar 60 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 75 persen. Semakin meningkatnya lembaga kemasyarakatan Desa/Kel. yang aktif diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Tabel II.574 Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel. Yang Aktif (%)

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel. Yg Aktif	-	-	-	-	60,00	70,00	75,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.3.7 Pengendalian Penduduk dan KB

##### 2.2.3.7.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang

dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi).

Tabel II.585 Laju Pertumbuhan Penduduk Di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,73	0,70	0,67	0,64	0,61	0,59	0,56

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami kenaikan tiap tahun. Tahun 2014 jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 38,61 juta jiwa, meningkat hingga mencapai 39,29 juta jiwa pada tahun 2017. Sedangkan pertumbuhan penduduknya cenderung melambat, yaitu dari 0,64 persen pada tahun 2014 menjadi 0,56 persen tahun 2017.

#### 2.2.3.7.2 Cakupan KB Aktif/CPR (%)

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Tujuan Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Tabel II.596 Cakupan KB Aktif/CPR (%) Di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan KB Aktif/CPR (%)	-	-	-	-	75.70	76.83	76,21

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim

Persentase Cakupan KB aktif di Jawa Timur pada tahun 2015 adalah sebesar 75,70 persen dan pada tahun 2016 sebesar 76,83 persen, mengalami peningkatan sebesar 1.49 persen dan di tahun 2017

cakupan KB Aktif sebesar 76,21 persen, hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program KB.

#### 2.2.3.8 Perhubungan

##### 2.2.3.8.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sector transportasi oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.

Tabel II.607 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan	-	-	82,06	85,88	74,41	77,91	71,53

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan 9 (124actor124c) unsur 124actor124c penilaian terdiri dari Persyaratan Pelayanan (U1), Prosedur Pelayanan (U2), Waktu Pelayanan (U3), Biaya/Tarif Pelayanan (U4), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Maklumat Pelayanan (U8), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9). Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 77,91, dan menurun pada tahun 2017 sebesar 71,53. Terkait implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor atau jembatan timbang yang semula dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2017 dikelola oleh Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat pelimpahan kewenangan pengelolaan Terminal Tipe B dari kabupaten/kota di Jawa Timur sejumlah 26 Terminal Tipe B. Sehingga menyebabkan rendahnya capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut, karena penilaian dilakukan pada saat yang sama ketika Terminal Tipe B baru diserahkan kepada



Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga kondisi Terminal Tipe B adalah kondisi sebelum mendapatkan perhatian dan penanganan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.2.3.8.2 Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Tabel II.618 Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB Di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB	1,76%	1,84%	1,97%	2,11%	2,19%	2,27%	2.29%

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Kategori sub sektor transportasi mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain. Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2011 persentasenya sebesar 1,76 persen dan meningkat menjadi 2,27 persen pada tahun 2016. Sementara itu pada tahun 2017 persentasenya menjadi 2,29 persen.

2.2.3.9 Komunikasi dan Informasi

2.2.3.9.1 Hasil evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Good governance akan terlaksana dengan baik apabila ada pengawasan publik, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Tabel II.89 Hasil Evaluasi Terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*)
Hasil Evaluasi Terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	-	94	85,11

Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur

Ket : \*) Angka Sementara

Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika, Dinas Kominfo terus berupaya meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan transparansi. Selain itu pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun strategi yang dijalankan adalah meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi. Pada tahun 2016 Hasil evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Jawa Timur sebesar 94,50 persen, sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi sebesar 85,11 persen (angka sementara).

Semakin tingginya implementasi keterbukaan informasi publik mengindikasikan keterbukaan atau transparansi yang diberikan badan public kepada masyarakat berjalan dengan baik. Hal tersebut nantinya akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik.

Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance.

#### 2.2.3.10 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

##### 2.2.3.10.1 Persentase pertumbuhan omzet koperasi dan UKM

Melihat kontribusi sektor riil di Jawa Timur selama kurun waktu 5 tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri bahwa peran koperasi dan UMKM di Jawa Timur cukup signifikan bagi perekonomian daerah khususnya kontribusinya bagi pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur. Di samping perannya bagi perekonomian daerah, koperasi dan UMKM juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung, selain juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Berdasarkan indikator kinerja daerah capaian kinerja dan target urusan koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

Tabel II.620 Target dan Capaian Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi UKM

Indikator	2017	
	Target	Capaian
Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi UKM	8.20	8,97 %

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Capaian persentase pertumbuhan omzet koperasi dan UKM yang melebihi target yang ditentukan tidak lepas dari kinerja koperasi dan UKM selama kurun waktu 2017 yang antara lain ditunjukkan melalui capaian indikator-indikator yang rata-rata melebihi target sebagai berikut :

No	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1	Koperasi Aktif	4	4,09
2	Jumlah Produk Koperasi UKM yang terstandarisasi	5	5

No	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
3	Persentase Pengajuan Pembiayaan yang Lulus Verifikasi	50	61
4	Kenaikan Volume Penjualan KUKM yang difasilitasi Pemasarannya	5	40,19

#### 2.2.3.11 Penanaman Modal

##### 2.2.3.11.1 Nilai Izin Prinsip Investasi

Izin Prinsip adalah perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak memulai investasi di Indonesia. Untuk investor baru, diharuskan mengurus Izin Prinsip untuk memulai usaha baru dalam ruang lingkup penanaman modal PMDN atau PMA. Beberapa hal yang termasuk di dalamnya adalah pembuatan izin investasi, pemesanan nama perusahaan, pembuatan akta, pembuatan NPWP perusahaan, tanda daftar perusahaan, izin mengerjakan tenaga asing, dan lain-lain.

Tabel II.631 Izin Prinsip Investasi (Trilyun Rp.) di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Izin Prinsip Investasi	70,91	76,71	113,6	110,6	172,5	61,43	328,15

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Timur

Capaian izin prinsip investasi di Jawa Timur tahun 2011-2015 terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari Rp. 70,91 triliyun pada tahun 2011 menjadi Rp. 172,5 triliyun pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp. 61,43 triliyun dan tahun 2017 meningkat kembali menjadi Rp. 328,15 triliyun. Kenaikan signifikan tersebut disebabkan oleh adanya 1 IP Mega Proyek dari PT. Pertamina Rosneft Pengolahan Dan Petrokimia, kedepannya pemerintah akan terus berupaya agar izin prinsip investasi di Jawa Timur terus meningkat diantaranya dengan peningkatan SDM serta sarana prasarana infrastruktur penunjang investasi.

##### 2.2.3.11.2 Nilai Realisasi Investasi

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber

Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan.

Tabel II.642 Realisasi Investasi (Trilyun Rp.) di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Realisasi Investasi	110,47	133,43	145,03	145,03	163,68	155,04	152,39

*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Timur*

Capaian realisasi investasi di Jawa Timur tahun 2015-2016 terus menunjukkan penurunan, yaitu dari Rp. 163,68 triliyun pada tahun 2015 menjadi Rp. 155,04 triliyun pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 turun kembali menjadi Rp. 152,39. Penurunan ini dikarenakan terbatasnya lahan untuk kawasan industri dan regulasi perizinan yang masih terlalu panjang. Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya untuk menyediakan kawasan industry di tiap-tiap daerah serta mengoptimalkan regulasi perizinan agar prosesnya tidak terlalu panjang.

#### 2.2.3.12Kepemudaan dan Olahraga

##### 2.2.3.12.1 Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi Dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepadanilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

Tabel II.653 Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi Dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi Dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan	-	-	16,62	26,13	29,52	20,73	14,43
--	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2017, persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan sebesar 14,43 persen ini diukur dari prosentase pemuda kader tingkat provinsi Jawa Timur yang berperan aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dibidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan. Penurunan persentase dari Tahun 2016 dikarenakan adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja sesuai dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berakibat bergantinya formulasi perhitungan yaitu jumlah pemuda kader tingkat Provinsi dibagi jumlah pemuda yang aktif berorganisasi tingkat Provinsi.

#### 2.2.3.12.2 Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat

Pembibitan olahragawan adalah upaya mencari dan menemukan indi-vidu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olah-raga di kemudian hari, sebagai langkah atau tahap lanjutan dari pemassalan olahraga. Pembibian dapat dilakukan dengan melaksanakan identifikasi bakat (Talent Identification), kemudian dilanjutkan dengan tahap pengembangan bakat (Talent Development). Dengan cara demi-kian, maka proses pembibitan diharapkan akan lebih baik. Pada tahun 2016, pembibitan olahragawan berbakat sebesar 13,73 persen dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 23,73 persen. Pencapaian nilai realisasi sebesar 23,73 persen dihasilkan dari prosenstase atlet pelajar Jawa Timur yang berprestasi ditingkat Nasional (POPNAS) dan diukur dari jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga massal (rekreasi) dengan formulasi perhitungan Jumlah atlet pelajar Jatim yang meraih Prestasi Nasional dibagi jumlah atlet pelajar yang dibina Peningkatan persentase pembibitan olahragawan berbakat ini diharapkan akan mampu menghasilkan prestasi olahraga.

Tabel II.664 Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat

Indikator	Tahun
-----------	-------



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat	-	-	16,07	37,96	8,64	13,73	23,73

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

2.2.3.12.3 Jumlah Atlet Yang Berprestasi

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu olahraga seharusnya dilakukan oleh umat manusia, dan pemerintah harus berperan untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut dengan prestasi olahraga. Jumlah atlet berprestasi di Jawa Timur tahun 2017 sebesar 1.261 orang. Kedepannya pemerintah terus berupaya agar atlet-atlet Jawa Timur terus berprestasi dikancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit-bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana.

Tabel II.675 Jumlah Atlet Yang Berprestasi

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Atlet Yang Berprestasi	-	-	-	-	-	1.121	1.261

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

2.2.3.13 Statistik

2.2.3.13.1 Persentase release data statistik akurat yang tepat

Data ialah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Data statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan, baik itu instansi pemerintah maupun swasta/ investor. Persentase release data statistik akurat yang tepat waktu merupakan indikator baru dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, sehingga belum ada angka capaiannya sampai dengan tahun 2017.

Tabel II.686 Persentase Release Data Statistik Akurat Yang Tepat Waktu

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Release Data Statistik Akurat Yang Tepat Waktu	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.3.14 Persandian

##### 2.2.3.14.1 Persentase informasi persandian yang diamankan

Persandian memang identik dengan kerahasiaan, karena informasi yang disampaikan perlu diamankan dan harus sampai pada tujuan, sehingga jangan sampai gagal. Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik, bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, akan tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara. Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi berklasifikasi. Salah satu misi dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur adalah meningkatkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Ini merupakan suatu harapan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan TIK, menyediakan hosting dan colocation, membangun data center dalam rangka meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK di era keterbukaan informasi. Selain itu Dinas Kominfo meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dalam pengamanan informasi. Berdasarkan data dari Dinas Kominfo, persentase informasi persandian yang diamankan di Jawa Timur adalah 100,00 persen. Adapun Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Informasi Persandian Yang Diamankan baru dimulai pada tahun 2017.

Tabel II.697 Persentasi Informasi Persandian Yang Diamankan

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentasi informasi persandian yang diamankan	-	-	-	-	-	-	100

*Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur*

#### 2.2.3.15Kebudayaan

##### 2.2.3.15.1 Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional

Seni Budaya adalah suatu segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan Nasional terus meningkat hingga tahun 2016 sebesar 26 penghargaan. Hal ini mencerminkan karya seni budaya di Jawa Timur berkembang dengan pesat.

Tabel II.708 Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional	-	-	13	11	16	22	26

*Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur*

##### 2.2.3.15.2 Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) Yang Dipelihara/Dilestarikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan melalui proses penetapan. Keberadaan benda, situs dan kawasan cagar budaya perlu mendapat perhatian baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu kepedulian terhadap cagar budaya senantiasa dikembangkan agar rasa memiliki dan memelihara keberadaannya dapat memberikan kontribusi bagi kelestarian cagar budaya itu sendiri. Pada tahun 2017, Persentase cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang

dipelihara/ dilestarikan di Jawa Timur sebesar 96,30 persen. Kedepannya pemerintah daerah diharapkan terus memperhatikan cagar budaya agar kelestariannya dapat terjaga dengan baik.

Tabel II.71 Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang Dipelihara/Dilestarikan

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang Dipelihara/ Dilestarikan	-	-	-	-	-	94,50	96,30

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.3.16 Perpustakaan

##### 2.2.3.16.1 Indeks Minat Baca

Minat baca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media baca. Ditinjau dari segi pengamatan global tentang minat baca masyarakat, secara kasar sebenarnya masyarakat Jawa Timur minat bacanya cukup tinggi, Hal ini bisa dilihat dari antusias masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan, taman bacaan, sudut baca, rumah baca dan sejenisnya selalu ramai dikunjungi masyarakat. Indeks Minat dan Budaya Baca sejak pertama kali dilakukan penelitian pada tahun 2006 senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 penelitian dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dengan hasil sebesar 42 persen.

Tabel II.720 Indeks Minat Baca

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Minat Baca	-	-	-	-	65,25	69,75	72

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Perembangan Indeks Minta Baca dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) indeksnya terus mengalami peningkatan yaitu masing-masing 62,25 (tahun 2015); 69,75 (tahun 2016); dan 72 (tahun 2017). Peningkatan Indeks Minat Budaya Baca dikarenakan adanya upaya

mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan melalui program perpustakaan PKK desa/kelurahan dan bekerjasama dengan PKK sebagai tenaga penyuluh gemar membaca.

#### **2.2.3.16.2 Persentase penerbit dan Perusahaan Rekaman yang Menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam**

Karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila. Karena itu penerbit dan perusahaan rekaman wajib menyerahkan hasil budaya bangsa kepada pemerintah untuk disimpan, dipelihara, dan dilestarikan di suatu tempat tertentu sebagai koleksi nasional. Hal ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

**Tabel II.731 Persentase Penerbit dan Perusahaan Rekaman yang Menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam**

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase penerbit dan Perusahaan Rekaman yang Menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam	-	-	-	-	-	48	50

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur*

Persentase penerbit dan perusahaan rekaman yang menyerahkan karya cetak dan karya rekam di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 48,00 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 50 persen. Masih rendahnya Persentase Penerbit dan Perusahaan Rekaman yang menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam dikarenakan masih lemahnya penegakan ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990. Kedepanya persentase akan terus ditingkatkan karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi.

### 2.2.3.17 Kearsipan

#### 2.2.3.17.1 Persentase Arsip yang Terselamatkan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip sangatlah penting karena berfungsi untuk penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Persentase arsip yang terselamatkan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, sehingga belum ada angka capaiannya sampai dengan tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, capainnya sebesar 25 persen.

Tabel II.742 Persentase Arsip yang Terselamatkan

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase arsip yang terselamatkan	-	-	-	-	-	-	25

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur*

#### 2.2.3.17.2 Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tertib Arsip

Pengelolaan arsip secara profesional sangatlah penting di era globalisasi yang teknologi kian pesat perkembangannya. Sebagai perpanjangan tangan masyarakat yang berwenang serta bertanggung jawab atas pengelolaan arsip, pemerintah dituntut untuk mengelolanya secara baik. Penanganan yang paling mendasar dari pengelolaan arsip adalah ketepatan dalam menggunakan kode klarifikasi surat. Karena tanpa menggunakan kode klarifikasi yang tepat, tentu arsipnya akan kacau. Sehingga jika diperlukan sebagai bahan informasi akan sulit ditemukan. Karena itu, sangat penting bagi organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tertib arsip.

Tabel II.753 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tertib Arsip

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase organisasi perangkat daerah yang	-	-	-	-	-	20,41	21,28



melaksanakan tertib arsip							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2016, Persentase organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tertib arsip di Jawa Timur 20,41 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 21,28 persen. Persentase tersebut diharapkan terus meningkat tiap tahunnya agar untuk memudahkan layanan akses secara cepat dan tetap serta meningkatkan mutu pelayanan kearsipan bagi masyarakat.

#### 2.2.4 Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

##### 2.2.4.1 Kelautan dan Perikanan

###### 2.2.4.1.1 Persentase pertumbuhan sub kategori perikanan terhadap PDRB

Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB tahun 2014 sebesar 6,87 persen, kemudian menurun menjadi 5,06 persen pada tahun 2016. Sementara itu, pada tahun 2017 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB menjadi 4,82 persen.

Tabel II.764 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	-	-	-	6,87	5,71	5,06	4,82

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

##### 2.2.4.2 Pariwisata

###### 2.2.4.2.1 Persentase Kontribusi pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB

Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pariwisata

dianggap menjadi sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya.

Tabel II.775 Target dan Capaian Kontribusi Sektor Pariwisata Thdp PDRB (%)

Indikator	2015		2016		2017	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Presentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	5,00	5,48	5,53	5,73	5,58	5,82

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Kinerja positif dari sektor pariwisata ini nampak dari persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Jawa Timur yang menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, yaitu dari 4,98 persen tahun 2013, kemudian menjadi 5,48 persen pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 5,73 persen pada tahun 2016 serta hingga tahun 2017 mencapai 5,82 persen. Peningkatan ini dikarenakan kunjungan wisman wisnus yang meningkat berdampak pada konsumsi, kebutuhan jasa dan produksi industri pariwisata yang menggeser komponen-komponen yang lainnya, pariwisata saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan pada pilar pariwisata yang dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat dan swasta sudah berjalan.

#### 2.2.4.3 Pertanian

##### 2.2.4.3.1 Persentase Pertumbuhan Sub Kategori Tanaman Pangan Thdp PDRB

Sub kategori tanaman pangan meliputi komoditi: padi dan palawija (jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedele, ubi kayu, ubi jalar, dan palawija lainnya). Pertumbuhan Sub sektor ini terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, yaitu masing-masing 1,38 persen (2013); 2,98 persen (2014); dan 3,13 persen (2015). Sementara itu, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1,76 persen dan tahun 2017 menjadi (-2,18) persen.

Tabel II.786 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB

Indikator	Tahun
-----------	-------

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pertumbuhan sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB	-	-	1,38	2,98	3,13	1,76	- 2,18

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.4.3.2 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB

Tanaman perkebunan terbagi menjadi tanaman perkebunan rakyat dan tanaman perkebunan besar. Tanaman perkebunan rakyat mencakup hasil tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti jambu mete, kelapa, kopi, kapok, kapas, tebu, tembakau, cengkeh, dan tanaman perkebunan lainnya. Sedangkan perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar seperti karet, teh, kopi, coklat, tebu, rami, serat manila dan tanaman lainnya. Pada tahun 2013, pertumbuhan sub sektor perkebunan terhadap PDRB sebesar 1,81 persen, kemudian meningkat pada tahun 2014 sebesar 4,97 persen dan turun kembali pada tahun 2016 menjadi (-0,74) persen. Selanjutnya pada tahun 2017 (triwulan III) mengalami kenaikan menjadi 2,43 persen.

Tabel II.797 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pertumbuhan sub sektor perkebunan terhadap PDRB	-	-	1,81	4,97	1,25	-0,74	1.36

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2013, pertumbuhan sub sektor perkebunan terhadap PDRB sebesar 1,81 persen, kemudian meningkat pada tahun 2014 sebesar 4,97 persen dan turun kembali pada tahun 2016 menjadi (-0,74) persen. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 1,36 persen.

#### 2.2.4.3.3 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan Thdp PDRB

Pertumbuhan sub kategori peternakan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 1,07 persen menjadi 1,15 persen pada tahun 2014, selanjutnya pada tahun 2015 terjadi akselerasi percepatan menjadi 2,01 persen dan meningkat menjadi 3,48 persen pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 3,89 persen.

Tabel II.808 Kontribusi dan Pertumbuhan Sub Kategori Peternakan Terhadap PDRB

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertumbuhan Sub Kategori Peternakan Terhadap PDRB	-	-	1,07	1,15	2,01	3,48	3,89

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.4.4 Kehutanan

##### 2.2.4.4.1 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB

Subkategori kehutanan dan penebangan kayu meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun, getah, dan akar, termasuk jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Tabel II.819 Persentase Pertumbuhan Sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pertumbuhan Sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB	-	-	0,53	0,13	3,34	-8,75	7,23

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan Sub sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB pada tahun 2013 sebesar 0,53 persen, selanjutnya turun pada tahun 2014 menjadi 0,13 persen dan meningkat menjadi 3,34 persen pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 menurun drastis menjadi (-8,75) persen dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 7,23 persen.

##### 2.2.4.4.2 Indeks Tutupan Hutan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim , dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Indeks Tutupan Hutan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, pada tahun 2016 indeksnya sebesar 54,83 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 62,01.

Tabel II.820 Indeks Tutupan Hutan

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Tutupan Hutan	-	-	-	-	54,83	62,01

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.4.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

##### 2.2.4.5.1 Rasio elektrifikasi

Ketersediaan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor perekonomian (industri, perdagangan, dan sebagainya). Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah teraliri listrik dengan total rumah tangga. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Rasio Elektrifikasi (RE) sebagai indikator dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai mana termuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.

Tabel II.831 Rasio Elektrifikasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Elektrifikasi	-	-	0,80	0,83	0,85	0,87	0,91

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 hingga tahun 2017 cenderung meningkat, yaitu dari 0,85 pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,91 pada tahun 2017 atau sebanyak 9.995.842

Rumah Tangga (RT) yang sudah teraliri listrik PLN dari 10.914.722 RT di Jawa Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pula jumlah pelanggan, yang dapat menikmati pasokan listrik untuk memenuhi sehari – harinya yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh pada capaian kinerja dari masing-masing pelanggan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Melalui capaian RE tahun 2017 sebesar 0,91, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada pelayanan urusan ESDM pada Tahun 2019 masih memiliki tugas untuk terus membantu meningkatkan dan melakukan pemerataan pasokan listrik ke seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur termasuk wilayah kepulauan.

#### 2.2.4.6 Perdagangan

##### 2.2.4.6.1 Persentase share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan

Persentase share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. pada tahun 2015 capaiannya sebesar 5,30 persen, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi -0,5 persen, dan meningkat kembali pada tahun 2015-2017 yaitu masing-masing 1,63 persen (2015); 4,06 persen (2016); dan 4,67 persen pada tahun 2017.

Tabel II.842 Persentase Share Net Ekspor pada PDRB menurut Penggunaan

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan	-	-	1,7	-0,5	1,63	4,06	4,67

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.4.7 Perindustrian

##### 2.2.4.7.1 Persentase pertumbuhan industri pengolahan

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Setiap wilayah memiliki potensi dan keunggulan sektoral yang menjadi basis perekonomian dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Tak terkecuali Provinsi Jawa Timur yang menjadikan industri pengolahan sebagai basis pertumbuhan ekonomi.



Tabel II.853 Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan	-	-	-	7,67	5,60	4,51	5,69

*Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Timur*

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mendorong pengembangan wilayah wilayah tertentu sebagai pusat pertumbuhan kegiatan industri. Pengembangan wilayah wilayah tersebut diharapkan selain dapat sebagai kegiatan ekonomi utama (prime mover) juga dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap tumbuhnya sektor sektor yang lain. Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 5,60 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 4,51 persen. Sementara itu pada tahun 2017 menjadi 5,69 persen. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan karena akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran.

#### 2.2.4.8 Transmigrasi

##### **2.2.4.8.1** Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya

Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala Keluarga) adalah merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala Keluarga) tahun 2015 sebesar 82,00 persen dan pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan menjadi 81,65 persen.

Sementara itu pada tahun 2017 persentasenya menurun menjadi 72 persen. Untuk meningkatkan persentase transmigrasi dibutuhkan peran pemerintah, diantaranya pemerataan penduduk ke daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar tetapi belum dimanfaatkan dengan maksimal & memberikan pelatihan serta keterampilan penduduk transmigrasi agar memanfaatkan potensi sumberdaya alam sekitar untuk meningkatkan perekonomiannya.

Tabel II.864 Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf

Ekonomi dan Sosialnya (Kepala Keluarga)

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosialnya	-	-	-	-	82,00	81,65	72.00

*Sumber : Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur*

## **2.2.5 Aspek Pelayanan Umum Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

### **2.2.5.1 Perencanaan**

#### **2.2.5.1.1.1 Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodasi dalam Dokumen Perencanaan**

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut diwadahi dalam sebuah mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional yang dilaksanakan setiap Tahun untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah untuk Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi/Kab/Kota . Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, terdapat tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan, antara lain:

1. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan bermuara pada Program Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Penyusunan RKPD sebagai proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Persiapan penyusunan RKPD
  - b. Penyusunan rancangan awal RKPD
  - c. Penyusunan Rancangan RKPD
  - d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

- e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan RKPD

Tabel II.875 Persentase Usulan Musrenbang Yang Diakomodasi Dalam Dokumen Perencanaan

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase usulan musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	-	-	-	-	-	-	42

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur

Indikator persentase usulan musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan baru diakomodir pada dokumen RKPD Tahun 2017 ini, indikator ini tercantum dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada lampiran Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sehingga pada tahun 2015 dan 2016 belum terdapat angka capaiannya. Sedangkan pada tahun 2017 mencapai sebesar 42 persen.

#### 2.2.5.1.1.2 Persentase Jumlah Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 180 dijelaskan

bahwa Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan
- b. Hasil rencana pembangunan daerah;
- c. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
- d. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
- e. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- f. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel II.886 Persentase Jumlah Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD	-	-	-	-	-	100	100

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur

Pada indikator Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsistensi kesesuaian nomenklatur program antara yang terdapat pada dokumen RPJMD dan RKPD sehingga diharapkan jumlah program yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan menjadi program yang sama yang diturunkan dalam RKPD dalam bentuk target tahunan. Pada Dokumen RKPD Tahun 2019 ini, indikator Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD merupakan indikator baru yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tercantum pada lampiran Perda Jatim No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sehingga belum terdapat angka capaiannya sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2017, didapatkan hasil dari Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebesar 100 persen.

2.2.5.2 Keuangan

2.2.5.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2011, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 8,89 trilyun, dan meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp. 15,90 trilyun. Sementara itu pada tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 17,33 trilyun. Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Tabel II.897 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp. Juta)

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pendapatan Asli Daerah / PAD (Rp. trilyun)	8,89	9,58	11,57	14,44	15,40	15,90	17,33

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.5.2.2 Nilai Opini BPK

Provinsi Jawa Timur memantapkan komitmennya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pencapaian hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.908 Nilai Opini BPK

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai Opini BPK	-	-	WTP	WDP	WTP	WTP	-

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selanjutnya pada tahun 2014 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),

Hal ini dikarenakan masih ditemukan kelemahan yang harus diperbaiki sehingga tidak ada lagi temuan yang masih berulang pada Temuan Sistem Pengendalian Intern serta Temuan Kepatuhan Perundangan – Undangan dalam pengelolaan keuangan di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk opini BPK Tahun 2015-2016

Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan pencapaian ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan putusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

Sedangkan untuk opini BPK Tahun 2017 belum dapat disampaikan karena masih dalam proses pemeriksaan sampai dengan bulan mei tahun 2017. Sebagaimana pada tahun sebelumnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK juga disampaikan di hadapan DPRD Provinsi Jawa Timur pada bulan Juni.

#### 2.2.5.3 Kepegawaian

##### **2.2.5.3.1** Persentase Penataan Pegawai ASN sesuai Formasi Kebutuhan dan Kompetensi.

Kompetensi merupakan salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja organisasi dan penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya, karena kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer).

Tabel II.9119 Persentase Penataan Pegawai ASN sesuai Formasi Kebutuhan dan Kompetensi

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi	-	-	75,30	87,70	96,20	96,80	84,22

Sumber : BKD Provinsi Jawa Timur

Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi di Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 75,30 persen, kemudian terus meningkat hingga tahun 2016 menjadi 96,80 persen. untuk kondisi tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 84,22 persen atau 12,58 % dengan rincian sebagai berikut untuk total seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Jawa Timur sebanyak 52,617



pegawai yang sudah tertata sebanyak 44.319 pegawai terdiri dari Jabatan Struktural (Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas) sebanyak 2.840 pegawai dan Jabatan fungsional (Medis, Paramedis, Non Medis) sebanyak 21.220 pegawai dan fungsional guru sebanyak 14.639 pegawai dan jabatan pelaksana sebanyak 5.620 pegawai hal ini disebabkan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana turunan Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Upaya Badan Kepegawaian Daerah Jatim di Tahun 2018 dengan merevisi Pergub Nomor 76 Tahun 2015 menjadi Pergub 82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana dan Fungsional dan pengembangan kompetensi melalui diklat teknis, Ujian Dinas, dan Penyesuaian Ijazah (PI) serta pendistribusian pegawai sesuai syarat jabatan sehingga menciptakan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negeri (ASN) yang profesional dan berkualitas.

**2.2.5.3.2**Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)

Profesionalitas dalam birokrasi adalah sesuatu hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena dengan profesional, birokrasi dapat ciptakan kinerja yg efektif dan efisiensi menuju layanan pemerintahan yg semakin berkualitas. Indeks Pengukuran Profesionalitas (IPP) ASN yang saat ini digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian adalah dengan metode composite index. Indikator yang digunakan, antara lain: kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja. Adapun premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan pegawai yang semakin bersih. Data-data yang digunakan harus bersinggungan dengan individu karena profesionalitas dihitung berdasarkan individu. Penyusunan indeks profesionalitas ASN adalah suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui potensi setiap ASN dalam pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis dan kepemimpinannya agar disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas.

Tabel II.920 Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	-	-	73,00	73,50	75,00	75,73	81,11

Sumber : BKD Provinsi Jawa Timur

Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) di Jawa Timur selama lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 73,00 (2013);73,50 (2014); 75,00 (2015); , 75,73 (2016) dan 81,11 (2017). Perhitungan IP ASN Tahun 2017 dilaksanakan untuk Pejabat Struktural ( Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas) dan untuk tahun 2018 IP ASN dilaksanakan untuk Jabatan Pelaksana, Peningkatan ini mencerminkan indikator kualitas PNS di Jawa Timur lebih terukur, memiliki kredibilitas dan reliabilitas sehingga potensi tiap-tiap PNS disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas.

#### 2.2.5.4 Pendidikan dan pelatihan

##### **2.2.5.4.1** Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)

Tujuan penyelenggaraan diklat adalah membentuk aparatur sipil negeri (ASN) yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas sebagai pelayan masyarakat. Pada tahun 2013, Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90) sebesar 86,14 persen selanjutnya terus meningkat hingga menjadi 93,00 pada tahun 2017. Kondisi tersebut mencerminkan jumlah aparatur sipil negeri (ASN) di Jawa Timur yang professional dan berkualitas serta memiliki pengetahuan dan berwawasan luas sebagai pelayan masyarakat dari tahun ketahun semakin meningkat.

Tabel II.931 Persentase Peserta Diklat Yang Memperoleh Sertifikat Kompetensi (Certificate Of Competence) dengan Kualifikasi Kelulusan Minimal memuaskan (Skor 80,1-90)

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)	-	-	86,14	90,70	91,00	92.50	93,00

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.5.5 Urusan penelitian dan pengembangan

##### 2.2.5.5.1 Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang di gunakan untuk mengembangkan serta memvalidasi suatu produk tertentu yang di pakai dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan sebagainya. Hasil penelitian dan pengembangan nanti hendaknya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk kemakmuran masyarakat. Pada tahun 2015, Persentase hasil penelitian dan pengembangan hasil penelitian yang dimanfaatkan sebesar 26 persen. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 24.00 persen, dan pada tahun 2017 menurun menjadi sebesar 26.25 persen.

Tabel II.942 Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Hasil Penelitian yang dimanfaatkan	-	-	-	15	26	24	26,25

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

##### 2.2.5.5.2 Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki Kegiatan Mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Pada tahun 2016, Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki kegiatan mendukung sistem inovasi daerah Jawa Timur sebesar 6 persen. Kedepannya persentase ini akan terus ditingkatkan agar daya saing ekonomi di tiap-tiap daerah melalui inovasi terus berkembang.

Tabel II.953 Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki Kegiatan Mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki Kegiatan Mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur	-	-	-	-	-	6	7

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.5.6 Kesatuan Bangsa dan Politik

##### 2.2.5.6.1 Indeks Demokrasi Indonesia

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Tabel II.964 Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Demokrasi Indonesia	-	54,99	59,32	70,36	76,90	72,24	-

Sumber : BPS Pusat

IDI Jawa Timur tahun 2016 sebesar 72,24 dalam skala 0 sampai 100, turun sebesar 4,66 poin dibandingkan dengan angka IDI Jawa Timur 2015 sebesar 76,90. Meskipun demikian angka IDI Jawa Timur masih lebih tinggi dibandingkan angka IDI nasional (70,09). Capaian kinerja demokrasi Jawa Timur tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Sementara itu untuk capaian tahun 2017, masih menunggu rilis dari BPS Pusat sekitar bulan September tahun 2018.

##### 2.2.5.6.2 Persentase Kejadian Terkait Poleksosbud Di Jawa Timur

Poleksosbud (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya) adalah sebuah kesatuan dari beberapa aspek yang bisa menjadi sebuah potensi besar bagi Bangsa Indonesia. Peran dan efektifitas pemantauan perkembangan situasi terkait Poleksosbud harus terus dijaga yaitu dengan melakukan langkah perbaikan yang konkrit serta efektif demi perbaikan kualitas bangsa secara menyeluruh. Persentase kejadian terkait Poleksosbud di Jawa Timur merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur dan capaiannya pada tahun 2017 sebesar 100 persen.

Tabel II.975 Persentase Kejadian Terkait Poleksosbud Di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Kejadian Terkait Poleksosbud Di Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

2.2.5.7 Penanggulangan Bencana Daerah

2.2.5.7.1 Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi

Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) adalah serangkaian sistem yang berfungsi untuk memberitahukan akan terjadinya kejadian alam, Sistem peringatan dini ini akan memberitahukan terkait bencana yang akan terjadi atau kejadian alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan dan lain sebagainya.

Membunyikan sirine saat akan terjadi sesuatu merupakan langkah untuk mengantarkan informasi kepada masyarakat, harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat (dugaan) datangnya bencana. Kondisi kritis, waktu sempit, bencana besar dan penyelamatan penduduk merupakan faktor-faktor yang membutuhkan peringatan dini.

Tabel II.986 Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi	-	-	-	-	100	100	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2015-2017, persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi sebesar 100 persen, kondisi ini memberikan rasa aman pada masyarakat yang tinggal di kawasan bencana dalam beraktifitas sebab peringatan dini akan terjadinya bencana sudah bisa di ketahui, sehingga masyarakat juga bisa melakukan pencegahan untuk menyelamatkan diri saat terjadinya bencana alam.

#### 2.2.5.7.2 Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Korban bencana adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban meliputi korban meninggal, hilang, luka/sakit, menderita, dan mengungsi. Pada tahun 2015-2016 persentase korban terdampak bencana yang tertangani mencapai 100 persen. Hal ini perlu dipertahankan karena dengan tertanganinya korban terdampak maka akan meminimalkan kondisi terburuk setelah terjadinya bencana.

Tabel II.997 Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani	-	-	-	-	100	100	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.5.8 Koordinasi Pelaksanaan Urusan Badan Penghubung

##### 2.2.5.8.1 Persentase Pelayanan Keprotokolan



Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan di dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan / atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

Tabel II.1008 Persentase Pelayanan Keprotokolan

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pelayanan Keprotokolan	-	-	91	91	92	100	99,94

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur

Selama lima tahun terakhir persentase pelayanan keprotokolan menunjukkan peningkatan, yaitu dari 91 persen pada tahun 2013 menjadi 99,94 persen pada tahun 2017. Kondisi ini memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional

#### 2.2.5.8.2 Persentase Promosi Potensi Daerah di Jabodetabek

Potensi daerah adalah segala kemampuan yang ada pada suatu daerah yang dapat dikembangkan menjadi bentuk yang lebih cerah. Persentase promosi potensi daerah di Jabodetabek selama dua tahun terakhir tidak mengalami perubahan, yaitu 100 persen pada tahun 2015-2017. Kegiatan promosi potensi daerah sangat diperlukan dan diharapkan terus meningkat tiap tahun karena untuk menarik wisatawan dan investor.

Tabel II.10129 Persentase Kegiatan Promosi Potensi Daerah

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Kegiatan Promosi Potensi Daerah	-	-	-	-	100	100	96,64

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.5.9 Pengawasan

##### 2.2.5.9.1 Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, sebenarnya pada titik akhirnya adalah kepentingan masyarakat. Untuk itu, aspirasi dan kepentingan masyarakat harus diakomodasikan dalam setiap peraturan perundang-undangan. Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur pada tahun 2015-2016 sebesar 70 persen, sedangkan pada tahun 2017 di triwulan II capaiannya adalah 50 persen.

Tabel II.1020 Persentase Ketaatan Terhadap Perundang-Undangan Daerah Oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota Di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Ketaatan Terhadap Perundang-Undangan Daerah Oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Kab/Kota Di Jawa Timur	-	-	-	-	70	70	50

Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.5.10Keseekretarian Daerah

##### 2.2.5.10.1 Nilai SAKIP

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (OUTCOME). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada tahun 2011 nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur adalah C, kemudian pada tahun 2017 nilainya meningkat menjadi A. Hal ini menandakan akuntabilitas kinerja di Provinsi Jawa Timur sudah semakin baik.

Tabel II.1031 Nilai SAKIP

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Nilai LAKIP	C	C	B	B+	A	A	A
-------------	---	---	---	----	---	---	---

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

2.2.5.10.2 Peringkat Hasil Evaluasi LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing. Selama empat tahun terakhir (2013-2016), nilai LPPD Provinsi Jawa Timur adalah sangat tinggi artinya pembangunan di Jawa Timur benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan untuk capaian tahun 2017 masih menunggu rilis dari pemerintah pusat pada April 2018.

Tabel II.1042 Peringkat LPPD

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Peringkat LPPD	-	-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

2.2.5.10.3 Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Undang-Undang Yang Lebih Tinggi, Kesusulaan Dan Kepentingan Umum

Sebagai sebuah negara, Indonesia tentunya memiliki tujuan-tujuan dalam hal bernegara, tujuan dari berdirinya negara Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-IV (empat). Dalam alenia ke-IV itu disebutkan bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Melihat tujuan yang diemban oleh negara (pemerintah), maka Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan produk-produk hukum yang baik, yaitu produk-produk hukum yang mampu diterapkan dan diterima di Negara Indonesia.

Tabel II.1053 Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Undang-Undang Yang Lebih Tinggi, Kesusilaan Dan Kepentingan Umum

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum	-	-	-	-	-	-	100

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Dalam hal pembuatan produk hukum yang dilakukan pemerintah, terdapat dua produk hukum yang lahir yaitu keputusan dan peraturan. Keputusan merupakan penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara, mendasarkan diri pada Undang-Undang yang lebih tinggi, bersifat konkrit, individual dan final. Sedangkan peraturan adalah produk hukum tertulis yang substansinya atau isinya punya daya ikat terhadap seluruh atau sebagian penduduk wilayah negara, peraturan lebih ditekankan kepada isi. Capaian pada tahun 2017, Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum adalah 100 %.

#### 2.2.5.10.4 Persentase Penegakan Supremasi Hukum dan HAM di Jawa Timur

Supremasi hukum memiliki pengertian menempatkan hukum/aturan pada kedudukan tertinggi, aturan dijadikan sebagai pedoman hidup manusia dalam menjalani segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Supremasi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakkan hak asasi manusia. Meskipun dalam pengertiannya bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan hingga lahir dan hidup di dunia. Dengan menjadikan supermasi hukum berada dalam kedudukan tertinggi maka hak asasi manusia dapat ditegakkan dan terjaga dengan baik. Persentase penegakan supremasi hukum dan HAM di Jawa Timur merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, sehingga belum ada angka capaiannya sampai dengan tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2017 belum ada capaiannya karena pengukuranya dilakukan pada tahun 2018.

Tabel II.1064 Persentase penegakan supremasi hukum dan HAM di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*)
Persentase penegakan supremasi hukum dan HAM di Jawa Timur	-	-	-	-	-		-

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Ket : \*) Pengukuran dilakukan tahun 2018

#### 2.2.5.11 Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan

##### 2.2.5.11.1 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti

Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti adalah Hasil Kegiatan Koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berupa Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Bakorwil, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait. Pada tahun 2015 persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti mencapai 60 persen, pada tahun meningkat 2016 menjadi 80 persen kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 93 persen. Peningkatan ini mengindikasikan koordinasi yang dilaksanakan sudah terfokus dan terarah serta bersinergi dengan program kegiatan kabupaten/kota.

Tabel II.1075 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	60	80	93

Sumber : Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan

#### 2.2.5.12 Kesekretariatan DPRD

##### 2.2.5.12.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD selama tiga tahun terakhir (2014-2016) terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 70,00 (2014); 71,23 (2015); 75,89 (2016) dan 76,04 (2017). Hal ini menggambarkan semakin membaiknya dan efektif pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada masyarakat

Tabel II.1086 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	-	70,00	71,23	76,04	76,95

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

## 2.2.6 Aspek Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### 2.2.6.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 2.2.6.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat diartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunyai pendapatan yang besar pula.

Tabel II.1097 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah	479.490	524.225	586.407	674.580	830.472	870.412	938.801



Tangga Per Kapita							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata rata pengeluaran per kapita penduduk Jawa Timur tahun 2011-2017 terus mengalami peningkatan. Rp. 479.490 per kapita sebulan di tahun 2011 menjadi Rp 938.801 per kapita sebulan di tahun 2017. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya peningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adalah adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, yang pada akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.2.6.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Secara umum manusia selalu akan memenuhi kebutuhan hidupnya akan barang dan jasa. Kebutuhan untuk kelangsungan hidup tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu, kelompok makanan dan non makanan. Dalam memenuhi kebutuhan makan terdapat batas tertentu kebutuhan manusia, namun sebaliknya untuk kebutuhan manusia akan barang non makanan tidak ada batasnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan akan menurun, sebaliknya proporsi untuk non makanan semakin meningkat.

Kalau kita perhatikan komposisi persentase antara makanan dan non makanan penduduk Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir ini (2014-2016) sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan. Kondisi ini memberikan gambaran adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya perbaikan ekonomi, maka pengeluaran untuk bukan makanan akan semakin tinggi dibanding pengeluaran untuk makanan.

Tabel II.1108 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	49,36	50,52	49,46	50,50	54,12	50,92	49,21

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2011 proporsi pengeluaran penduduk Jawa Timur untuk non makanan sebesar 49,36 persen dan meningkat hingga menjadi 52,5 persen pada tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2017, mengalami penurunan menjadi 49,21 persen. Jika kita perhatikan menurut wilayah perdesaan dan perkotaan, terlihat bahwa untuk daerah perdesaan pengeluaran penduduknya masih banyak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Fakta ini sedikit banyak menjelaskan kalau kesejahteraan penduduk daerah perdesaan masih dibawah penduduk daerah perkotaan.

**2.2.6.1.3** Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibanding dengan barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Rata-rata Nilai Tukar Petani Jawa Timur tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,50 persen dibanding tahun 2016 yaitu dari 104,62 menjadi 104,10. Penurunan tersebut disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (2,58 persen) lebih kecil dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (3,09 persen). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2017, secara umum masih lebih rendah dibanding kondisi tahun 2016.

Tabel II.11139 Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai Tukar Petani (NTP)	101,65	103,83	104,59	104,75	104,83	104,62	104,10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama tahun 2017, NTP Jawa Timur secara umum lebih rendah dibanding dengan bulan yang sama tahun 2016, kecuali untuk bulan Agustus lebih tinggi 0,63 persen, September sebesar 0,54 persen, Oktober sebesar 1,86 persen, November sebesar 2,61 persen, dan Desember sebesar

2,39 persen. Jika dilihat besarnya perubahan di tahun 2017, kenaikan NTP tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 1,43 persen karena indeks harga yang diterima petani pada bulan yang sama mengalami kenaikan sebesar 1,12 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami penurunan sebesar 0,31 persen. Penurunan NTP terbesar terjadi pada bulan Februari sebesar 1,27 persen karena indeks yang diterima petani turun sebesar 0,68 persen sedangkan indeks yang dibayar petani naik 0,59 persen.

**2.2.6.1.4 Nilai Tukar Nelayan (NTN)**

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan periode tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan.

Tabel II.1120 Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	148,46	99,79	103,16	106,54	106,69	111,84	121,77

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Rata-rata NTN Jawa Timur tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 9,93 persen dibanding tahun 2016 yaitu dari 111,84 menjadi 121,77. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan rata-rata indeks harga yang diterima nelayan (16,69 persen) lebih besar dari kenaikan rata-rata indeks harga yang dibayar nelayan (3,49 persen). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk perikanan tangkap terhadap barang konsumsi rumah tangga nelayan dan biaya produksi tahun 2017 secara umum masih lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2016.

Pada tahun 2017 NTN Jawa Timur lebih tinggi dibanding kondisi pada tahun 2016. Jika dilihat besarnya perubahan di tahun 2017, kenaikan NTN terbesar terjadi pada Bulan Juni sebesar 1,84 persen, karena indeks harga yang diterima nelayan pada bulan yang sama mengalami kenaikan sebesar 1,75 persen sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan mengalami penurunan sebesar 0,08 persen. Penurunan NTN terbesar terjadi pada bulan April sebesar 0,45 persen, karena indeks harga yang diterima



*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Timur*

Penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh aktor dalam sebuah wilayah atau daerah. Meski demikian, peran pemerintah daerah masih dominan terkait dengan penyediaan pelayanan publik. Pada dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan barang, jasa dan administratif. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), berupaya meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan di semua sektor pelayanan publik, terutama dalam kegiatan pelayanan perizinan. Upaya untuk meminimalisir permasalahan perizinan yang berdampak buruk terhadap kurang optimalnya investasi di Jawa Timur adalah dengan membentuk model Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). Secara umum penyelesaian proses perizinan di Unit P2T Provinsi Jawa Timur memerlukan waktu 1 (satu) hari, hanya beberapa jenis perizinan yang memerlukan penyelesaian maksimal dalam 17 hari.

#### **2.2.6.4 Fokus Sumber Daya Manusia**

##### **2.2.6.4.1 Rasio Lulusan S1/S2/S3**

Tahun 2015 merupakan awal diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Dalam menghadapi tantangan ini tentunya Sumber Daya Manusia harus disiapkan supaya tidak kalah dengan SDM dari negara Asean lainnya. Jawa Timur tentunya juga tidak mau kalah dalam menyiapkan SDM yang ada. Salah satu mengukur potensi SDM di suatu wilayah adalah melihat dengan tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas SDM yang ada. Tingkat pendidikan penduduk yang digunakan sebagai ukuran adalah Sarjana (D4/S1 keatas), hal ini dikarenakan tingkat pendidikan D4/S1 ke atas merupakan tingkatan tertinggi dari jenjang pendidikan.

Tabel II.1153      Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Jawa Timur

Indikator	Tahun
-----------	-------

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Lulusan S1/S2/S3	315	341	323	356	386	406

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dalam enam tahun terakhir (2011-2016) proporsi penduduk di Jawa Timur yang berpendidikan D4/S1 ke atas semakin meningkat dari 315 per sepuluh ribu penduduk pada tahun 2011 menjadi 406 per sepuluh ribu penduduk di tahun 2016. Bila dilihat sex rasionya maka penduduk laki-laki yang berpendidikan tinggi proporsinya lebih banyak dibanding perempuan.

#### 2.2.6.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Tabel II.1164 Rasio Ketergantungan di Jawa Timur

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Ketergantungan	45,69	45,26	44,85	44,50	44,22	44,10	43,80

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2016, angka dependency ratio untuk Jawa Timur sebesar 43,80 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43-44 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka dependency ratio menunjukkan penurunan, yang berarti bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



### 2.2.7 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2017, adalah sebagaimana disajikan pada Tabel Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Buku 2 Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

## 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi daerah, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain masih terdapat permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

### 1.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Belum optimalnya kualitas pendidikan menengah dan PK-PLK
2. Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan dan penyediaan sarana prasarana
3. Tingginya angka kematian ibu dan anak
4. Belum optimalnya produktivitas ketenagakerjaan dan rendahnya “Link and Match” antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi angkatan kerja
5. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh
6. Minimnya konektivitas darat, laut dan udara untuk mendukung kawasan potensial ekonomi
7. Belum optimalnya pengembangan dan Pengelolaan Telekomunikasi dan Informatika
8. Rendahnya nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan bagi masyarakat
9. Rendahnya nilai tambah agroindustri, agromaritim
10. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata
11. Rendahnya produktifitas tenaga kerja
12. Rendahnya penggunaan ekonomi digital dalam industrialisasi
13. Belum optimalnya produktivitas pangan
14. Belum optimalnya pengelolaan ketahanan energi dan pengelolaan potensi sumber daya mineral
15. Belum optimalnya tata kelola sumber daya air dan pengendalian banjir

16. Belum optimalnya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
17. Rawan ketenteraman dan ketertiban dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba

### 1.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

#### 1.3.2.1 Pendidikan

1. Kurangnya layanan dan sarana prasarana Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus (PK) & Pendidikan Layanan Khusus (PLK), Salah satu yang mempengaruhi kenyamanan proses belajar mengajar adalah ruang kelas belajar. Pada tahun 2017 Ruang Kelas Belajar di Jawa Timur yang mengalami rusak sebanyak 2.924 ruang kelas. Hal ini perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap proses belajar mengajar siswa.
2. Masih Rendahnya RLS (Rata-rata Lama Sekolah) serta Rendahnya APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni),
3. Belum terpenuhinya rasio SMA: SMK (Kurangnya Lembaga Pendidikan Menengah kejuruan). Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai kebijakan jumlah SMK lebih banyak yaitu 70% dibandingkan jumlah SMA sebanyak 30 %. Pada tahun 2017, Rasio SMA : SMK adalah 41,91 : 58,09, yang berarti capaian tersebut masih belum memenuhi target sebesar 30%:70%.
4. Lulusan sekolah terutama sekolah kejuruan masih belum terserap di dunia kerja, Sesuai data BPS Agustus tahun 2017, Pengangguran terbanyak dilihat dari Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah pengangguran dengan pendidikan menengah kejuruan dengan TPT sebesar 9,01 persen sedang yang terendah adalah pengangguran dengan pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 1,66 persen.
5. Belum memadainya SDM tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dari segi kualitas (sertifikasi, kompetensi, pendidikan S-1/D-4, lifeskill) maupun kuantitas (jumlah guru kurang).
6. Rendahnya kesejahteraan GTT dan PTT
7. Masih Banyak lembaga yang belum terakreditasi, Tahun 2017 jumlah lembaga SMA/SMK/PK-PLK yang terakreditasi yaitu Akreditasi A sebanyak 3.043 lembaga, akreditasi B sebanyak 2.459 lembaga, Akreditasi C sebanyak 413 lembaga, dan yang tidak terakreditasi sebanyak 23 lembaga. Melihat masih terdapat lembaga yang terakreditasi C dan belum terakreditasi masih menjadi

pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan.

#### 1.3.2.2 Kesehatan

1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 534 Ibu
2. Belum optimalnya penurunan kasus stunting di masyarakat, dari Target penurunan kasus 25 % dan baru mencapai 26,7 %
3. Masih Tingginya penyakit menular seperti HIV sebanyak 7.468 AIDS sebanyak 6.079, TB sebanyak 46.370 kasus dan Kusta sebanyak 3.064 kasus cenderung meningkat;
4. Masih Tingginya Angka kesakitan penyakit tidak menular (diabetes sebanyak 347.711 kasus, Jantung dan pembuluh darah (hipertensi) sebanyak 1.022.194 kasus, kanker sebanyak 8.617 kasus,);
5. Masih Banyak Masyarakat yang tidak terkover BPJS Kesehatan (sebagai Penerima Peserta Bantuan Iuran) seperti Balita Gizi Buruk, bayi dari keluarga miskin, Pasung, PMKS;
6. Masih Terdapat Rumah Tangga yang belum mempunyai akses berkelanjutan terhadap air minum dan sanitasi layak, desa yang sudah mencapai status ODF (Open defecation free) mencapai 2005 desa (25,96 %) dari 7724 desa (profil kesehatan 2016) di Jawa Timur.

#### 1.3.2.3 Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

1. Belum optimalnya layanan irigasi karena tingginya kerusakan jaringan irigasi. Berdasarkan data kondisi jaringan irigasi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 - 2017 diketahui persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik cenderung meningkat dari 68,30 persen (2015) menjadi 69,32 persen (2017) namun masih menyisakan jaringan irigasi dengan kondisi rusak sebesar 30,69 persen. Pada tahun 2019, persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik tersebut harus terus ditingkatkan dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur.
2. Turunnya daya dukung area resapan air, tingginya surface run off, tingginya erosi dan sedimentasi pada sumber air hal ini disebabkan meningkatnya lahan kritis pada hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Luas lahan kritis mengalami peningkatan 1,5% dari 294.613,24 ha menjadi 299.019 ha pada tahun 2016, dengan rincian 65,32% atau 195.540 ha berupa lahan kritis dan 34,68% atau berupa lahan sangat kritis 202.730,59 ha. Hal tersebut secara tidak langsung menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung resapan air,

tingginya surface run off, tingginya erosi dan sedimentasi pada sumber air sehingga kapasitas tampungan sumber air menurun menjadi 80% dan menimbulkan peningkatan volume limpasan air pada musim hujan.

3. Kurang mantapnya kondisi infrastruktur jalan provinsi, hal ini dapat dilihat pada tahun 2017, kemantapan jalan provinsi hanya mencapai sebesar 88,90%, sehingga 11,10% jalan provinsi masih memiliki kondisi yang tidak mantap (kondisi jalan provinsi yang rusak ringan dan rusak berat).
4. Belum terpenuhinya jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer. Pada tahun 2017, jalan provinsi di Provinsi Jawa Timur yang telah memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer sebesar 59,16%, sehingga 40,84% jalan provinsi belum memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer.
5. Volume kendaraan yang melintasi jalan provinsi melebihi kapasitas lajur jalan yang tersedia karena beberapa ruas jalan dengan kondisi kapasitas lalu-lintas  $> 1$  ( $VCR > 1$ ). Hal tersebut menandakan kondisi pelayanan buruk, dimana kendaraan berjalan sangat lamban dan cenderung macet, banyak kendaraan akan berjalan pada bahu jalan.

#### 1.3.2.4 Pengairan

1. Pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan masih sangat terbatas sebagian besar masih berada di kawasan perkotaan dengan target capaian air minum aman sebesar 100 %;
2. Belum optimalnya fasilitasi pengelolaan air minum melalui sistem penyediaan air minum (SPAM) secara lintas kabupaten/kota (regional) Umbulan dan Mojokerto-Lamongan.
3. Masih adanya desa rawan kekeringan di Jawa Timur sebanyak 422 desa karena belum optimalnya pemanfaatan kapasitas air baku sebagai sumber air bersih.
4. Rendahnya cakupan pelayanan sanitasi layak dalam rangka mendukung target akses 100 %, karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

#### 1.3.2.5 Penataan Ruang

1. Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan TPA Lintas Kabupaten/Kota (Regional).

2. Rendahnya cakupan pelayanan IPAL dan IPLT terpusat skala kota serta terbatasnya kondisi TPA dengan pertumbuhan sampah dari penduduk perkotaan.
3. Rendahnya akses permukiman yang memiliki akses menuju sistem penanganan limpasan air hujan (berupa saluran drainase) dengan kondisi yang baik.
4. Belum terfasilitasinya pengelolaan sanitasi secara lintas Kabupaten/Kota (regional)

#### 1.3.2.6 Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1. Pertumbuhan jumlah penduduk di perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dengan target capaian sebesar 78,14 % pada tahun 2019;
2. Masih banyaknya penduduk miskin yang tinggal di perdesaan dengan kondisi rumah tidak layak huni sebanyak 210.599 unit;
3. Masih banyaknya permukiman kumuh di perkotaan seluas 1.530,84 ha yang ditunjukkan dengan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman.

#### 1.3.2.7 Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

1. Masyarakat rentan terhadap isu-isu berpotensi konflik, masyarakat yang multikultural tidak hanya dari suku, agama, bahasa dan ras tetapi kehidupan politik dan perekonomian juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Jawa Timur sehingga berpotensi terjadinya konflik sosial. Pada tahun 2016 terdapat 268 kejadian, dan tahun 2017 terdapat 262 kejadian
2. Kurangnya koordinasi dalam meminimalisir radikalisme hal ini dapat dilihat potensi radikalisme yang terjadi (data sementara) tahun 2017 di Jawa Timur terdapat 82 orang napi teroris, 38 orang masih proses deradikalisasi, 37 orang merupakan Deportasi ISIS, dan 13 orang masih radikal.
3. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik, serta kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, hal ini dapat dilihat dari hasil Pilpres dan Pileg pada tahun 2014, untuk Pilpres terdapat Daftar Pemilih Tetap sejumlah 30.933.642, sedangkan jumlah hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22.184.407 orang atau Tingkat partisipasinya sebesar 71,72%. Sedangkan pada pelaksanaan Pileg 2014, jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 30.430.945 orang, dengan jumlah kehadiran di TPS sebanyak 22.965.808 DPT, atau tingkat partisipasinya sebesar 75,47%.

4. Banyaknya pelanggaran keamanan dan ketertiban umum di masyarakat seperti kriminalitas dan unjuk rasa yang berlebihan.
5. Masih terjadi tindakan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan Narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah bukan lagi merupakan fenomena baru yang bukan hanya mengancam generasi muda tetapi juga pada semua umur dan semua kalangan.
6. Belum optimalnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing dan ormas asing. Terkait dengan Tenaga Kerja Asing di Jawa Timur pada tahun 2016 terdapat 1.574 orang, dan 7 ormas asing yang sebaran lokasi sasaran kerja mereka ada di Surabaya, Sidoarjo, kabupaten Mojokerto, Kabupaten malang, kabupaten Blitar, Tulungagung, Ponorogo, Trenggalek, pacitan, Lumajang, Situbondo, Pamekasan, dan Sumenep.

#### 1.3.2.8 Sosial

1. Revitalisasi fisik UPT Dinas Sosial dan Peningkatan Skill atau kualitas Klien di 29 (dua puluh sembilan) UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
2. Belum optimalnya penanganan korban pasung, termasuk pasca pasung, menurut Data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada Januari 2018 sebanyak 2.507 jiwa yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota dengan rincian 199 jiwa meninggal, 605 jiwa dalam perawatan, 1.232 bebas pasung dan sebanyak 471 jiwa masih dipasung
3. Masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba, data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2016 jumlah korban penyalahgunaan NAPZA di Jawa Timur sebanyak 4.191 jiwa. Sedangkan tahun 2017, perkara narkoba mencapai 851 perkara.
4. Kurangnya sosialisasi Program perlindungan sosial yang meliputi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), bentuk program perlindungan sosial bagi keluarga miskin telah diluncurkan Pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2017 menjangkau 1.821.494 siswa, Kartu Indonesia Sehat (KIS-PBI) tahun 2017 menjangkau 14.896.769 peserta dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tahun 2017 menjangkau sebanyak 1.122.100 KPM (Data Kemensos RI) di 664 Kecamatan se Jawa Timur.
5. Masih banyak masyarakat miskin yang belum terkover BPJS kesehatan (sebagai Penerima PBI) seperti Balita Gizi Buruk, Balita dari Keluarga Miskin, Pasung, PMKS khususnya di luar UPT Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota karena terkendala masalah



Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebanyak 650.873 jiwa adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pemerintah sesuai fungsinya harus menyediakan jaminan kesehatan bagi mereka termasuk PMKS diluar UPT Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota. Data populasi PMKS menyebutkan Klien telah dilayani dalam UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebanyak 4.880 jiwa, sedangkan Klien sebanyak 645.993 jiwa memerlukan jaminan kesehatan.

6. Masyarakat dengan kategori hampir miskin lebih mudah jatuh miskin ketika terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti Sakit, PHK, bencana dan lain-lain. Data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Tahun 2017), untuk jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebanyak 118.786 jiwa.
7. Belum optimalnya verifikasi dan validasi data masyarakat miskin di daerah, terhitung September 2017 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 4.405,27 juta atau 11,20 %, mengalami penurunan sebesar 0,57 % dibandingkan pada bulan Maret 2017 sebesar 4.617,01 juta atau 11,77 %. Agar penanganan kemiskinan di Jawa Timur dapat dilakukan secara efektif maka verifikasi dan validasi data masyarakat miskin harus dilakukan secara optimal, namun justru di Jawa Timur belum optimal.
8. Terbatasnya daya tampung, kapasitas UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur termasuk kondisi fisik Sarana dan Prasarana, data Dinas Sosial mengenai PMKS di tahun 2017 sebanyak 650.873 jiwa, sedangkan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur baru dapat menjangkau sebanyak 4.880 jiwa. Hal ini disebabkan terbatasnya daya tampung UPT serta kondisi sarana prasarana UPT yang memerlukan rehab dan pengembangan, sehingga diharapkan dapat menambah daya jangkauan UPT.

#### 1.3.2.9 Ketenagakerjaan

1. Lambatnya Penurunan Angka Pengangguran, ditandai dengan melambatnya angka TPT dari tahun 2015 s/d 2017 antara lain, 4,47, jumlah penganggur 910.000 jiwa, di tahun 2015 selanjutnya 4,21 dan 4,00 di tahun 2016 dan 2017 dengan jumlah penganggur 840.000 jiwa.
2. Pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan Pertambahan lapangan Kerja, berdasarkan data dari Disnakertrans, pada tahun 2017 terdapat Penambahan Angkatan kerja baru sekitar 326.000 jiwa dengan Pengangguran Terdaftar kisaran 670.730 jiwa. Adapun Data Jumlah Pengangguran menurut BPS adalah 840.000 Orang dengan TPT 4,00, sedangkan Total Penempatan Tenaga Kerja

tahun 2017 kisaran 459.916 Orang,

3. Rendahnya Kualitas Dan Kompetensi Angkatan Kerja, antara lain disebabkan karena Sarana Dan Prasarana Pelatihan serta Instruktur Belum Sesuai Dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Sarana Dan Prasarana Pelatihan serta Instruktur belum sesuai dengan kebutuhan Unit Pelatihan Teknis Pelatihan Kerja (UPT-PK) Disnkaertrans dalam rangka memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
4. Kurang Relevansinya Program Pelatihan dengan kebutuhan industri sehingga terjadi Miss Match antara kebutuhan industrial perusahaan dengan kompetensi angkatan kerja. Hal ini disebabkan selain karena belum sesuai standarnya sarana dan prasarana pelatihan serta Instruktur, juga karena perkembangan IPTEK, jenis keterampilan dan metodologi yang berubah secara dinamis di Dunia Usaha dan Dunia Industri.

5. Masih banyaknya tenaga yang bekerja di sektor informal. Angkatan kerja yang bekerja sejumlah 20,94 Juta jiwa, dari jumlah tersebut yg bekerja dalam hubungan kerja sebanyak sekitar 9 juta jiwa, sedangkan sisanya bekerja di luar hubungan kerja.
6. Rendahnya penempatan di sektor formal bagi pekerja migran Indonesia. Dari jumlah penempatan buruh migran di luar negeri tahun 2017 sebanyak 63.498 orang dengan rincian sektor formal kisaran 15.823 orang atau 24.82 % dan sektor informal sekitar 47.581 orang atau 75,98 persen. Adapun TKI non prosedural yang dideportasi dari Malaysia semakin tahun semakin berkurang, dari tahun 2015 s/d 2017 sebanyak 6.121 orang, 5.117 orang dan 4.249 orang,
7. Banyaknya Perusahaan yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK yang meningkat setiap tahunnya, hal ini berpotensi terjadi PHK karyawan. UMK yang meningkat setiap tahun ini selaras dengan adanya Unjuk Rasa (Demo). Pada tahun 2017 terdapat 9 Demo di Grahadi, adapun kejadian PHK terjadi pada sekitar 2.975 Pekerja.
8. Masih rendahnya perusahaan yang membentuk LKS (Lembaga Kerjasama) Bipartit, yaitu hanya 1.373 Perusahaan dari 38.000 perusahaan yang membentuk LKS,
9. Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (perusahaan, dan pekerja), termasuk banyaknya pelanggaran norma ketenagakerjaan dengan jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2017 sebanyak 398 Kasus,
10. Angka kecelakaan kerja masih tinggi, serta kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan yang masih rendah. Berdasar Data Disnakertrans, Kasus Kecelakaan kerja dalam perusahaan terdapat 14.552 Kasus dengan rincian Cacat 768, Masih Pengobatan 3.329, Meninggal 101 dan Sembuh 10.354. Adapun Data Tenaga Kerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan yaitu 1.629.286 Tenaga Kerja dari 3.325.073 Tenaga Kerja Aktif Sektor Formal dengan jumlah Perusahaan aktif 57.984 unit.

#### 1.3.2.10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum setaranya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Data IDG Jawa Timur Tahun 2016 sebesar 69,06 lebih rendah dari IDG Nasional sebesar 71,39. Hal ini dikarenakan dari komponen keterlibatan perempuan di parlemen dimana Nasional yaitu sebesar 17,32% lebih tinggi 2,32 poin dari Provinsi Jawa Timur sebesar 15%.

2. Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak.

#### 1.3.2.11 Ketahanan Pangan

1. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras (88,6 Kg/kapita/tahun), pola konsumsi masyarakat belum berimbang (skor PPH 79)
2. Fluktuasi harga bahan pangan
3. Masih adanya daerah/desa rawan pangan, dan masih adanya bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

#### 1.3.2.12 Lingkungan Hidup

1. Terjadinya Penurunan Kualitas Air dan Udara, berdasarkan data IKA dan IKU Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2017 diketahui bahwa terjadi penurunan nilai kualitas air dan udara di Jawa Timur sehingga kondisi kualitas air saat ini masih sangat kurang (50,29) sedangkan terkait kualitas udara meskipun mengalami penurunan nilai IKU namun kondisi saat ini masih sangat baik (85,49). Pada tahun 2019, nilai IKU dan IKA harus terus ditingkatkan mengingat kedua komponen tersebut merupakan unsur penentu dalam perhitungan IKLH Provinsi Tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 67,00-68,52.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan persampahan dan pengelolaan limbah B3. Pada tahun 2017, Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang ada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 terdiri dari 223 TPST 3R, 3981 Bank Sampah, dan 49 TPA sedangkan untuk TPST Regional, TPA Regional, dan pengelolaan limbah B3 masih belum tersedia. Prasarana dan sarana persampahan dan pengelolaan limbah B3 tersebut perlu ditingkatkan agar mampu mengelola potensi timbulan sampah yang pada tahun 2017 sudah mencapai 17.498,17 ton/hari dengan target persentase sampah yang dikelola di TPST sebesar 15% dan potensi jumlah limbah B3 yang terakomodir pada tahun 2017 yang sudah mencapai 136.575.510 ton/tahun (tidak termasuk limbah B3 dari PLTU) dan selama dikirim ke PPLI Cileungsi, Kabupaten Bogor untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan atau dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan. Berdasarkan data pengaduan tentang pencemaran lingkungan yang diterima oleh DLH Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 terdapat 49 kasus pengaduan. Dari

47 kasus pengaduan pencemaran lingkungan terdapat 7 kasus yang telah ditindaklanjuti oleh DLH Provinsi sesuai dengan kewenangan sedangkan sisanya telah difasilitasi atau disampaikan pada stakeholder terkait sesuai kewenangan masing-masing. Berdasarkan jumlah pengaduan menurut media yang tercemar dapat diketahui bahwa media tanah (30 kasus) paling banyak mengalami pencemaran diikuti oleh media air (16 kasus), dan media udara (12 kasus). Adanya pengaduan terhadap kasus pencemaran lingkungan tersebut menandakan bahwa masih terdapat masyarakat dan/atau dunia usaha yang belum memiliki kesadaran terhadap pelestarian lingkungan.

#### 1.3.2.13 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Belum optimalnya pelaksanaan KTP-El. Persentase Data Kependudukan yang Akurat Tahun 2017 sebesar 99,39%. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP-El Tahun 2017 sebesar 98,36%. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Akta Kelahiran Tahun 2017 sebesar 83,89%. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Akta Kematian Tahun 2017 sebesar 50,66%.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan

#### 1.3.2.14 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1. Belum Optimalnya Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dengan sasaran Rumah Tangga Miskin di perdesaan, sehingga banyak yang masih belum berdaya dan sejahtera, Tingkat kemiskinan Jawa Timur per September 2017 adalah 11,2 persen dengan jumlah penduduk 4.405.010 jiwa, sedangkan Target penurunan angka kemiskinan s/d tahun 2019 adalah 10,19 - 9,69 persen. Adapun kemiskinan perdesaan Jawa Timur sebesar 15,82 persen lebih besar daripada perkotaan.
2. Masih terdapat Daerah Tertinggal dan Desa Tertinggal di Jawa Timur berdasarkan pengukuran Pemerintah Pusat. Menurut Peraturan Presiden No 131 tahun 2015 masih terdapat 4 kabupaten daerah tertinggal di Jatim yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Situbondo dan Bondowoso.
3. Sedangkan berdasarkan Indeks Desa Mandiri dari Kementerian Desa dengan klasifikasi Desa Maju, Mandiri, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal, di Jatim terdapat 2.301 Desa

Tertinggal dengan rincian 2.262 Desa Tertinggal serta 39 Desa Sangat Tertinggal yang tersebar di 15 kabupaten.

4. Belum optimalnya peran LPMD/K (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan) serta KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) dalam mengawal pembangunan di desa, Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun 2017, Lembaga Kemasyarakatan yang aktif relatif kecil yaitu kurang dari 80 persen dengan jumlah 12.756 lembaga, sedangkan Persentase KPM yang aktif masih 12,6 persen.
5. Kompetensi SDM Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih belum optimal, termasuk terkait pelaksanaan UU Desa, Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun 2017, Persentase desa yang telah menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang tepat waktu masih di bawah 20 persen, begitupula Persentase desa yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahunan.
6. Belum adanya Pengaturan terhadap Pengelolaan Aset Desa, dan Sumber Daya lain. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun 2017, jumlah desa yang telah melaksanakan tertib administrasi (desa) dan penataan aset desa masih kurang dari 30 desa.
7. Masih banyak Kerjasama Desa yang belum memiliki Legal Standing. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun 2017, Jumlah kerjasama desa di Jatim dalam pembangunan kawasan perdesaaan sekitar 18 kerjasama, dalam hal pendayagunaan sarana prasarana desa sekitar 12 kerjasama, selanjutnya dalam hal pemanfaatan dan pendayagunaan TTG (Teknologi Tepat Guna) ada sekitar 6 kerjasama.

#### 1.3.2.15 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1. Rendahnya minat akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Cakupan KB Aktif Jawa Timur Tahun 2017 = 76,21%, lebih rendah 0,62 poin dari Tahun 2016 = 76,83%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2017 = 7.922.341 dari Tahun 2016 = 7.884.510.
2. Lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan KB yang responsive gender
3. Masih banyak usia remaja (sekolah) di Jawa Timur yang belum mendapatkan fasilitasi pengembangan kualitas diri melalui wadah/forum PIK R dan BKR



#### 1.3.2.16 Perhubungan

1. Masih tingginya tingkat kejadian kecelakaan khususnya pada transportasi jalan dan transportasi perkeretaapian. Pada tahun 2017 jumlah kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur mencapai 24.563 kejadian, meningkat 7% dibandingkan tahun 2016. Pada sector perkeretaapian, jumlah kecelakaan yang melibatkan perkeretaapian selama tahun 2017 sebanyak 54 kejadian, meningkat 74% dibandingkan tahun 2016 yang hanya 31 kejadian. Jumlah perlintasan perkeretaapian di Jawa Timur sebanyak 1.465 perlintasan dengan jumlah perlintasan resmi tidak dijaga sebanyak 911 perlintasan atau sebanyak 62% dari jumlah perlintasan yang ada.
2. Masih tingginya kesenjangan antar daerah dan minimnya konektifitas transportasi khususnya wilayah kepulauan. Terdapat ± 126 pulau di wilayah Kepulauan Jawa Timur khususnya wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep dimana satu satunya moda transportasi yang saat ini digunakan oleh masyarakat sekitar dalam beraktifitas adalah transportasi laut. Ketika terjadi musim cuaca buruk dan tinggi gelombang mencapai lebih dari 2 meter, maka wilayah kepulauan akan terisolir karena transportasi laut tidak dapat digunakan karena alasan keselamatan. Wilayah Kabupaten Sumenep Kepulauan saat ini di layani oleh kapal perintis dengan rute Surabaya - Masalembo - Keramaian - Masalembo - Kalianget - Sapudi - Kangean - Pagerungan Besar - Sapeken - Tanjung Wangi yang terdiri dari 2 unit kapal perintis masing-masing dengan kode trayek R16 dengan homebase Surabaya dan R19 dengan home base Banyuwangi. Lama perjalanan yang dibutuhkan kapal perintis tersebut adalah 14 hari pelayaran sehingga masing masing pulau di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep disinggahi oleh kapal perintis setiap 7 hari sekali.
3. Perlunya peningkatan koordinasi teknis antar pemerintah pusat, daerah beserta stakeholders terkait sektor transportasi. Permasalahan sector transportasi merupakan permasalahan multisektoral dimana melibatkan berbagai sector dan cakupan wilayah yang luas, oleh karena itu penyelesaian permasalahan sektor transportasi ataupun penyusunan rancana pembangunan dan pengembangan sektor transportasi harus melibatkan banyak pihak baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Stakeholders sektor transportasi, juga melibatkan sector lain semisal telekomunikasi, sosial, perdangangan, investasi dan lain sebagainya.

4. Perlunya peningkatan kompetensi SDM sektor transportasi. Untuk memberikan pelayanan yang optimal di bidang transportasi diperlukan SDM sektor transportasi yang berkompeten. kompetensi SDM sektor transportasi harus di jaga dan diasah dari waktu ke waktu sehingga pelayanan prima transportasi dapat di pertahankan ataupun bahkan ditingkatkan.
5. Perlunya peningkatan kinerja pelayanan sektor transportasi. Kinerja transportasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus senantiasa di evaluasi dan di tingkatkan. kinerja tersebut tidak hanya terbatas pada kinerja sarana prasarana simpul transportasi namun juga termasuk kinerja lembaga atau dinas yang berfungsi sebagai regulator dalam sector transportasi. Berdasarkan hasil kajian indeks kepuasan masyarakat, rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sector transportasi di Jawa timur adalah 71,53 pada tahun 2017. obyek pengukuran adalah kinerja pelayanan terminal tipe B dan pelayanan bus AKDP di Jawa Timur.

#### 1.3.2.17 Komunikasi Dan Informatika

1. Masih terjadinya kesenjangan (*digital device*) dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, karena media massa tidak menjangkau sampai pelosok desa (terpencil) khususnya wilayah miskin (*blank spot*) teknologi informasi komunikasi (TIK).
2. Belum optimalnya kabupaten/kota dalam pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Jawa Timur sebagai fungsi penyebarluasan informasi di wilayahnya secara mandiri.
3. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana monitoring isi siaran di media televisi dan radio.

#### 1.3.2.18 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Rendahnya daya saing Koperasi dan UKM. Kurang dari 10.000 Koperasi dan UMKM yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk (data Kemenkop UKM RI)
2. Minimnya ketersediaan bahan baku
3. Rendahnya produktivitas koperasi dan UKM
4. Lemahnya SDM koperasi dan uKM. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UKM khususnya dalam penerapan regulasi perkoperasian yang diindikasikan oleh

besarnya koperasi tidak aktif yaitu sebesar 4.386 unit (data keragaan 2017)

5. Rendahnya akurasi data koperasi dan UKM. Jumlah koperasi seluruh Jawa Timur adalah 32.284 Unit (Online Data System Koperasi per tanggal 22 Maret 2018), namun baru 6.595 unit yang memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
6. Lemahnya kelembagaan koperasi
7. Lemahnya akses pembiayaan bagi koperasi dan UKM. Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang informal dan memiliki aset dan akses ke pembiayaan serta produktivitas yang terbatas. Hal ini ditunjukkan oleh data BPS yang menunjukkan bahwa 95,72% Usaha Mikro (6.533.694 unit) dari 6.825.931 unit merupakan usaha mikro informal (sensus UMKM 2012)
8. Minimnya akses pemasaran bagi koperasi dan UKM

#### 1.3.2.19 Penanaman Modal

1. Masih adanya disparitas terhadap penyebaran pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah (Kabupaten/Kota). Di tahun 2017 dari 84,5% realisasi PMA dan 76,2% realisasi PMDN masih di wilayah Surabaya, Gresik, Pasuruan, Sidoarjo dan Mojokerto sebagai tempat favorit investasi di Jawa Timur.
2. Masih kurangnya realisasi terhadap izin prinsip yang telah diterbitkan. Sampai dengan tahun 2017, realisasi Investasi mencapai 124,53 trilyun rupiah. Sementara itu, realisasi investasi selama 3 tahun terakhir (2015 s/d 2017) mengalami kontraksi sebesar 23,9%, yaitu mencapai 163,68 trilyun rupiah pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2015 mencapai 124,53 trilyun rupiah.
3. Strategi promosi belum diterapkan secara maksimal karena keterbatasan anggaran dan SDM. Promosi Investasi yang efektif melalui digital multimedia (EJISC) di tahun 2017 menghasilkan minat investasi PMA sebesar Rp. 269,87 Triyun dan PMDN sebesar Rp. 58,28 Trilyun.
4. Masih terbatasnya penyediaan lahan dikawasan industri dalam rangka menampung baralhnya perusahaan diluar Kawasan Industri dan Perusahaan baru (Industri). Sampai dengan tahun 2017 masih 5 kawasan industri yang ada di Jawa Timur, antara lain: Ngoro Industrial Park, PIER, SIER, Tuban Industrial Estate, Gresik Industrial Estate dan JIPE.

#### 1.3.2.20 Kepemudaan Dan Olah Raga

1. Rendahnya daya saing pemuda dibidang Wirausaha. Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2016 sekitar 39,08 juta jiwa

(Tabel 3.1), dan sekitar 22,80 persennya (8,91 juta jiwa) adalah penduduk berusia 16-30 tahun (Proyeksi Penduduk Jawa Timur, (2010-2020). Jumlah ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki sumber daya manusia pemuda yang cukup besar sebagai penggerak pembangunan. Daya saing pemuda di Jawa Timur tidak lepas dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pemuda. Sesuai data statistik BPS Provinsi Jawa Timur, Sakernas 2016 terlihat bahwa sebagian besar pemuda yang bekerja sebagai profesional, kepemimpinan dan TU merupakan lulusan perguruan tinggi (59,51 persen). Sedangkan pada tenaga usaha dan jasa, pemuda dengan lulusan SMA/ sederajat menempati persentase terbanyak (48,11 persen). Demikian pula pada tenaga operator dan pekerja kasar, di dominasi oleh pemuda lulusan SMA/ sederajat (41,65 persen) dan lulusan SMP/ sederajat (36,27 persen).

2. Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih rendah. Peran organisasi kepemudaan belum optimal dalam pelayanan kepemudaan. Sebagian besar organisasi kepemudaan fokus di bidang politik, sedangkan bidang lain belum banyak digarap, antara lain; kewirausahaan, kepedulian dan kepeloporan. Disamping itu banyak organisasi kepemudaan yang belum mencukupi syarat legalitas sesuai dengan UU No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Menurut data Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur jumlah Organisasi Kepemudaan di Jawa Timur yang terdaftar hanya 40-50 Organisasi.
3. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (sekolah khusus olahraga, PPLP/PPLM, PRIMA, Puslatnas, atau Puslatda) dalam pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi. Prasarana dan sarana olahraga memiliki arti penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga perlu memperhatikan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Prasarana dan sarana keolahragaan yang belum sepenuhnya memadai, lengkap dan terstandarisasi menjadi persoalan dalam peningkatan prestasi olahraga. Jumlah organisasi olahraga tingkat Provinsi Jawa Timur sebanyak 123 lembaga, sedangkan jumlah atlet pelajar di Jawa Timur sejumlah 67.898 orang.

#### 1.3.2.21 Kebudayaan

1. Kurang optimalnya, inovasi cipta karya seni yang kurang mengangkat budaya khas,
2. Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan budaya daerah.

#### 1.3.2.22 Perpustakaan

1. Masih rendahnya budaya minat baca
2. Minimnya kelembagaan perpustakaan desa/kelurahan. Sampai dengan tahun 2017 jumlah perpustakaan desa 3.341 lembaga, sedangkan jumlah desa di Provinsi Jawa Timur adalah 8.501 desa, sehingga 61 % desa/kelurahan belum memiliki perpustakaan.
3. Terbatasnya kuantitas tenaga pustakawan. Pada tahun 2017 jumlah pustakawan di Jawa Timur berjumlah 306 sebarannya di sekolah ada 8 orang, di PD sejumlah 29 orang, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 27 orang, di kabupaten/kota sebanyak 57 orang. Idealnya, pustakawan yang tersebar di setiap perpustakaan sebanyak 2 orang.

#### 1.3.2.23 Kearsipan

1. Minimnya sarana & prasarana pendukung Arsip. Sampai dengan tahun 2017, lembaga kearsipan daerah yang memiliki Depo Arsip sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2000 hanya terdapat 24 Lembaga Kearsipan Daerah dari 38 lembaga kearsipan daerah.
2. Penyimpanan arsip berbasis teknologi atau yang dikenal dengan e arsip, di Jawa Timur sampai dengan tahun 2017 masih ada 2 Lembaga Kearsipan Daerah. Diharapkan tiap tahun Lembaga Kearsipan Daerah yang memakai e arsip meningkat.
3. Terbatasnya kuantitas SDM Tenaga Arsiparis. Arsiparis di Jawa Timur sebanyak 113 orang sampai dengan tahun 2017 sedangkan jumlah kebutuhan tenaga arsiparis di Jawa timur minimal sebanyak 161 orang. Idealnya setiap Perangkat Daerah ada 1 orang arsiparis, setiap UPT ada 1 orang arsiparis dan LKD kabupaten/Kota ada 3 orang arsiparis.
4. Masih kurangnya kesadaran/tertib terhadap pentingnya pengelolaan arsip/dokumen.

#### 1.3.2.24 Kelautan dan Perikanan

1. Ketersediaan stok sumber daya ikan (SDI) yang semakin menurun.
2. Biaya pakan yang tinggi masih menjadi kendala bagi pembudidaya, pemberian paket hibah berupa mesin pelet masih belum menjangkau ke semua pembudidaya ikan air tawar.
3. Alih fungsi lahan perikanan budidaya untuk kegiatan non - perikanan.

4. Masih adanya pelanggaran beberapa armada penangkapan ikan terhadap jalur penangkapan dan terjadinya perebutan fishing ground yang memicu terjadinya konflik nelayan di kabupaten/kota, antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. Demikian juga pelanggaran penggunaan alat tangkap yang dilarang dan bahan peledak yang merusak lingkungan.
5. Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan masih belum berimbang dengan tingkat kerusakan yang ada di Jawa Timur karena dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi relatif besar.
6. Produktivitas garam belum optimal.
7. Keterbatasan bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan industri pengolahan ikan di Jawa Timur.

#### 1.3.2.25 Pariwisata

##### 1. Pemasaran Pariwisata

- a. Rendahnya tingkat promosi pariwisata daerah pada event-event di tingkat Propinsi, Nasional, Regional dan Internasional.
- b. Rendahnya daya saing obyek wisata milik Pemda, Pemdes maupun stakeholders pelaku wisata di daerah.
- c. Belum optimalnya kemitraan pariwisata.
- d. Kurangnya sinergi dengan pihak - pihak terkait di Jawa Timur, menjadikan tumpang tindih dengan instansi yang lain.

##### 2. Destinasi Pariwisata

- a. Belum terpetakannya tempat wisata yang strategis.
- b. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata berupa sarana prasarana dan aksesibilitas.
- c. Penataan kawasan belum maksimal.
- d. Sampai saat ini belum ada pembinaan yang terstruktur kepada pokdarwis -pokdarwis yang ada di Daerah.

##### 3. Pelatihan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

- a. Rendahnya kualitas SDM Pariwisata (aparatur, Pokdarwis, pemandu wisata, pelaku usaha pariwisata) sehingga Industri Pariwisata kurang berkembang.
- b. Minimnya pembinaan kepada seniman dan kelompok seni budaya lokal.



- c. Rendahnya tingkat pemahaman pengelola usaha jasa dan sarana wisata.
- d. Belum adanya pembinaan tentang kepariwisataan/pelayanan kepada staf pariwisata, PKL, PHRI, Biro Travel, Pramuwisata.
- e. Belum adanya fasilitasi bagi Pramuwisata (Tour Leader) untuk mendapatkan lisensi (ijin pariwisata).
- f. Belum ada pelatihan dan Pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten karena tidak terdani dalam APBD Kabupaten.

#### 4. Industri Pariwisata

- a. Kurang berkembangnya industri pariwisata yang dapat menunjang perkembangan destinasi pariwisata daerah.
- b. Belum sinerginya bidang kepariwisataan dengan bidang yang mendukung pariwisata, sehingga berpengaruh pada kunjungan wisata yang masih belum maksimal.
- c. Belum berkembangnya pariwisata yang ada, tidak ada laporan-laporan tentang obyek wisata yang ada, sehingga kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB belum maksimal, (mulai dari obyek wisata berbasis alam, berbasis ekonomi kreatif, berbasis sejarah, wisata kuliner, wisata berbasis pendidikan/kebangsaan dan atau wisata ilmiah
- d. Belum optimalnya Duta Wisata yang dimiliki sehingga belum optimal dalam mendukung keberhasilan sektor pariwisata (baik dari sisi peningkatan peran serta masyarakat, maupun dari aksesibilitas informasi potensi wisata yang ada).
- e. Belum optimalnya pemanfaatan Pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan pembangunan infrastruktur khususnya dibidang Pariwisata.
- f. Belum ada layanan informasi bagi pengunjung di tingkat Daerah.
- g. Belum terukurnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pariwisata yang sudah ada.
- h. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan obyek wisata lokal

#### 1.3.2.26 Pertanian

Trend peningkatan konsumsi perkapita daging sapi 2,6 kg/kap/th → Demand Meningkat → Supply Tidak Mencukupi → Harga daging sapi meningkat

1. Populasi sapi potong sebagai pendukung produksi daging sapi masih belum memenuhi target pertumbuhan 6,26% per tahun.
2. Kebutuhan Susu Segar untuk Industri di Jawa Timur : 2.000 ton/hari → Produksi susu segar 1.200 ton/hari → kekurangan 800 ton/hari (setara 60.000 ekor )
3. terjadi over supply telur dan daging ayam secara nasional → kebijakan Nasional perlu Rasionalisasi DOC yang beredar
4. Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakit-penyakit hewan yang baru muncul dan yang muncul kembali (emerging and re-emerging animal diseases) yang dapat menular ke manusia (zoonosis). Wabah Zoonosis dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, atau pertahanan dan keamanan. Diperlukan pengendalian penyakit hewan menular yang lebih intensif.

#### 1.3.2.27 Kehutanan

1. Belum optimalnya pelayanan publik di bidang Kehutanan, sehingga belum mampu menarik investasi dan menjabarkan kebijakan kehutanan menjadi inovasi dalam operasi pengelolaan hutan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan;
2. Belum optimalnya dukungan infrastruktur dalam pengelolaan kawasan hutan;
3. Belum optimalnya Daya Saing komoditi produk kehutanan.

#### 1.3.2.28 Energi Dan Sumber Daya Mineral

1. Masih belum meratanya pasokan energi listrik di Jawa Timur
2. Rasio elektrifikasi Jawa Timur pada Tahun 2017 telah mencapai 90,02% namun capaian rasio elektrifikasi tersebut belum merata terutama pada wilayah Kepulauan Madura serta Kabupaten Situbondo dan Bondowoso yang masih memiliki rasio di bawah 80%. Hal tersebut diperkuat dengan masih adanya data desa yang belum berlistrik, yaitu sebanyak 22 Desa yang sebagian besar desa-desa tersebut terletak di Kabupaten Sumenep.
3. Masih dominannya penggunaan energi fosil dalam pemenuhan kebutuhan energi di Jawa Timur

Berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019, prakiraan bauran energi primer di Provinsi Jawa Timur masih didominasi oleh energi fosil, yaitu minyak bumi (40,63%) dan batubara (31,75%), sedangkan pemanfaatan energi yang bersumber

dari EBT masih berada pada kisaran 3,5%. Penggunaan energi primer tersebut didominasi oleh sektor transportasi, industri dan rumah tangga.

4. Masih adanya wilayah dengan potensi pertambangan yang belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan

Berdasarkan data dari Dinas ESDM, pada tahun 2016 masih terdapat perkiraan luas terduga PETI (Pertambangan Tanpa Izin) sebesar 1.116 ha yang tersebar pada 26 Kabupaten (Kecuali Kab. Bondowoso, Sidoarjo, dan Lumajang) di Jawa Timur dengan potensi PETI terbesar terdapat di wilayah Kepulauan Madura terutama Kabupaten Bangkalan sebesar 158 ha. Keberadaan PETI yang belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan akan berpotensi merusak lingkungan karena tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pertambangan tersebut.

5. Meningkatnya jumlah pemanfaatan air tanah terutama pada wilayah padat industri

Berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2016 volume pengambilan air tanah mencapai 128.903.830 m<sup>3</sup> dengan jumlah Rekomtek untuk permohonan Izin Pengambilan Air Tanah di Provinsi Jawa Timur tahun 2016 mencapai 74 SIP (Surat Izin Pengeboran) dan 864 SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah). Volume pengambilan air tanah dan rekomtek perizinan air tanah tersebut akan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dan pengembangan berbagai sektor perekonomian termasuk pengembangan kawasan industri.

#### 1.3.2.29 Perdagangan

Kurang optimalnya intensitas perdagangan dalam dan luar negeri. Kinerja perdagangan barang dan jasa Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 dengan total net ekspor-impor sebesar Rp. 94,26 Triliun, lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 75,26 Triliun. Untuk net ekspor Dalam Negeri Jawa Timur mencatat surplus sebesar Rp. 162,49 Triliun, sedangkan untuk Net Ekspor Luar Negeri Jawa Timur Masih Mengalami Defisit sebesar Rp. 68,23 Triliun.

#### 1.3.2.30 Perindustrian

1. Industri Jawa Timur yang menerapkan standarisasi masih terbatas. Sampai akhir tahun 2017 hanya sekitar 10,3% industri di Jawa Timur yang sudah berstandarisasi.
2. Masih Tingginya Bahan Baku Impor yang digunakan oleh Industri

di Jawa Timur. Impor bahan baku penolong pada tahun 2016 sebesar 80,17% dan pada tahun 2017 sebesar 79,45 %. Meskipun mengalami penurunan persentase impor bahan baku penolong, namun nilai tersebut masih besar untuk penggunaan bahan baku impor.

#### 1.3.2.31 Ketransmigrasian

1. Ketidakseimbangan antara pendaftar dengan alokasi penempatan oleh Pemerintah Pusat, pada tahun 2017 dari banyaknya peminat transmigrasi (lebih dari 3.000 Kepala Keluarga (KK), Realisasi hanya sekitar 80 KK atau 241 Jiwa, sedangkan Alokasi Penempatan Transmigrasi tahun 2018 hanya 65 KK,
2. Terbatasnya pendanaan APBN dalam pelaksanaan program Ketransmigrasian, Anggaran pemerintah pusat terutama Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Direktorat Jenderal yang menangani Ketransmigrasian Tidak sebesar Direktorat Jenderal lain yang menangani Desa dan Kawasan Perdesaan.

#### 1.3.2.32 Kesekretariatan Daerah

1. Belum seluruh PD Provinsi dan kab/kota memiliki Kelompok Budaya Kinerja, sampai dengan saat ini baru 55 KBK perangkat daerah, sedangkan Kabupaten/Kota baru 110 KBK, idealnya masing-masing perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/ kota memiliki 1 KBK
2. Belum semua Perangkat Daerah Pemprov Jatim yang menerapkan Standar secara maksimal seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal), SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik)
3. Minimnya instansi yang mendapatkan penilaian SAKIP kategori A, dari 38 kabupaten/kota di Jatim, yang mendapatkan hanya satu (Kabupaten Banyuwangi), dari 71 Perangkat Daerah (PD) Pemprov Jatim, yang mendapatkan baru 42 PD,
4. Masih Terbatasnya jumlah produk informasi, penayangan/dokumentasi tentang kegiatan Gubernur, Wagub, dan Sekda di lingkup pemerintah pusat maupun daerah,
5. Masih belum maksimalnya sosialisasi terkait kebijakan maupun kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemprov Jatim kepada masyarakat,
6. Masih adanya kesepakatan bersama antara pemerintahan daerah lainnya baik di dalam maupun luar negeri yang ditanda tangani

namun belum ada tindak lanjutnya,

7. Minimnya kabupaten/kota yang mendapatkan skor kinerja LPPD “Sangat Tinggi”, dari 38 kab/kota di Jatim, baru 18 kab/kota yang mendapatkan,
8. Minimnya kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dari 38 kab/kota di Jatim, baru 16 Kab/Kota yang menerapkan,
9. Minimnya kabupaten/kota yang mempunyai PERBUP/PERWALI terkait kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, dari 29 kab. Dan 1 kota di Jatim, baru, baru 15 Kabupaten yang punya.

#### 1.3.2.33 Pengawasan

Kompetensi Sumber Daya Aparat Pengawasan terbatas dan belum ada peningkatan yang signifikan. Di sisi lain ASN yang memiliki keahlian pemeriksaan bidang keuangan memasuki masa purna tugas sedangkan SDM yang ada lebih banyak merupakan tenaga administratif yang masih memerlukan pembinaan secara komprehensif untuk menjadi auditor yang kompeten dibidangnya.

#### 1.3.2.34 Perencanaan

1. Belum optimalnya implementasi integrasi perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian target indikator kinerja program/kegiatan;
2. Belum optimalnya hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan akibat masih adanya ketidakselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan data secara terpadu sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah melalui aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan;
4. Belum tersedianya infratraktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan.
5. Berkurangnya sumberdaya perencana yang kompeten sebagai akibat promosi jabatan dan aparatur purna tugas.

#### 1.3.2.35 Kepegawaian

1. Redistribusi pegawai sesuai dengan formasi dan kebutuhan. Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan

kompetensi di Jawa Timur pada tahun 2017 dengan target sebesar 97 % (52,617 pegawai) dan terealisasi sebesar 84,22 % (44.319 pegawai) terdiri dari Jabatan Struktural (Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas) sebanyak (2.840 pegawai) dan Jabatan fungsional (Medis, Paramedis, Non Medis) sebanyak (21.220 pegawai) dan fungsional guru sebanyak (14.639 pegawai) dan jabatan pelaksana sebanyak (5.620 pegawai) dan yang masih belum tertata pada jabatan pelaksana sebanyak (8.298 pegawai) hal ini disebabkan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana turunan Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (SOTK Baru)

2. Penerapan E- KINERJA berbasis system untuk pengukuran kinerja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih belum ada. Sampai saat ini pengukuran kinerja pegawai ASN yang berjumlah (52,617 pegawai) masih menggunakan formulir SKP (Sasaran Kerja Pegawai) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan turunannya Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 jadi belum berbasis sistem.

#### 1.3.2.36 Penanggulangan Bencana

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bencana, hal ini disebabkan masih banyak masyarakat di perdesaan yang belum memahami lebih jauh mengenai apa itu bencana, apa penyebab bencana dan seberapa jauh dampak yang ditimbulkan oleh bencana terhadap alam, lingkungan dan manusia. Kejadian bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten/Kota dominan terjadi karena disebabkan oleh ulah/perilaku manusia sendiri. Identifikasi terhadap kejadian bencana di Jawa Timur lebih besar disebabkan oleh perilaku manusia terhadap alam (penebangan pohon di hutan secara liar/tanpa ijin dan pembuangan sampah ke sungai oleh masyarakat di berbagai daerah telah menyebabkan tingginya pendangkalan. Data Pusdalops PB. BPBD Provinsi menunjukkan adanya peningkatan kejadian bencana secara keseluruhan, tahun 2016 sebanyak 386 kejadian bencana dan pada tahun 2017 naik menjadi 413 kejadian bencana.
2. Belum semua pihak terlibat dalam kondisi darurat bencana, hal ini disebabkan pihak-pihak diluar pemerintahan perannya dalam penanggulangan bencana sangat rendah karena keterlibatannya lebih mempertimbangkan keuntungan, sehingga penanganan bencana yang sifatnya sosial/sukarela kurang menarik minat para



pihak dalam penanggulangan bencana. Hal ini terlihat dari peran serta dan partisipasi pihak-pihak terkait secara material baik Dunia Usaha, Swasta maupun Lembaga-lembaga lainnya yang turut langsung dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten/Kota masih sangat kecil, sehingga penanganan darurat yang berupa fisik oleh Pemerintah Daerah sifatnya sangat sementara. Hasil identifikasi menunjukkan keterlibatan pihak lain terhadap kondisi darurat bencana masih sekitar 25 persen dan 75 persen oleh instansi terkait.

3. Belum semua Kabupaten/Kota mampu mengkaji kebutuhan biaya pemulihan pasca bencana, hal ini disebabkan rata-rata secara keseluruhan tingkat kemampuan aparat pemerintah daerah di Kabupaten/Kota masih kurang dalam melakukan pengkajian dan menghitung kerusakan dan biaya kebutuhan pembangunan fisik pasca bencana sehingga sulit mengestimasi besarnya nilai kerusakan dan kebutuhan biaya fisik bangunan yang akan dibangun kembali. Sebelum tahun 2015 di Jawa Timur hanya 9 daerah (23,58 persen) yang bisa melakukan pengkajian dan penghitungan pasca bencana yaitu Kabupaten Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Situbondo, Malang, Madiun, Ponorogo, Pacitan dan Sampang.
4. Belum semua Kabupaten/Kota mampu memperbaiki kerusakan infrastruktur dan sosial ekonomi pasca bencana, hal ini disebabkan kemampuan APBD yang terbatas sehingga rata-rata alokasi dana APBD untuk penanganan bencana masih sangat kecil dari 38 Kabupaten/Kota secara keseluruhan mengalokasikan untuk penanggulangan bencana dibawah Rp.5 Milyar (dibawah 5 persen dari total APBD Kabupaten/Kota). Hal ini apabila dibandingkan dengan besarnya nilai kerusakan infrastruktur akibat bencana tentunya masih sangat minim.



### BAB III

#### KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

##### III.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu dipahami pokok pokok kebijakan pembangunan umum Nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan UMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.
- b) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar-sektor dan antar -wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.
- c) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan

mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

- d) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim. Arah kebijakan peningkatankualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

- e) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.

Landasanpembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

- f) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdayamanusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

- g) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi

dan otonomi daerah.

Sedangkan landasan dalam pembangunan di Jawa Timur berpijak pada 3 (tiga) strategi umum sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Jawa Timur 2014-2019. Tiga strategi umum ini juga menjadi landasan arah kebijakan ekonomi Jawa Timur 2014-2019. Tiga strategi umum tersebut adalah:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*).
2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth*, dan *pro-environment*.
3. Pengarusutamaan gender (*pro-gender*).

Ketiga strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Jawa Timur 2014-2019, termasuk didalamnya menjadi arah bagi kebijakan ekonomi, sebagai kelanjutan dari pembangunan periode 2009-2014, dengan penegasan mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), bahwa pembangunan Jawa Timur adalah pembangunan untuk semua, tanpa kecuali, yang secara implisit di dalamnya mengandung makna pembangunan yang berkeadilan, dan merata.

#### Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

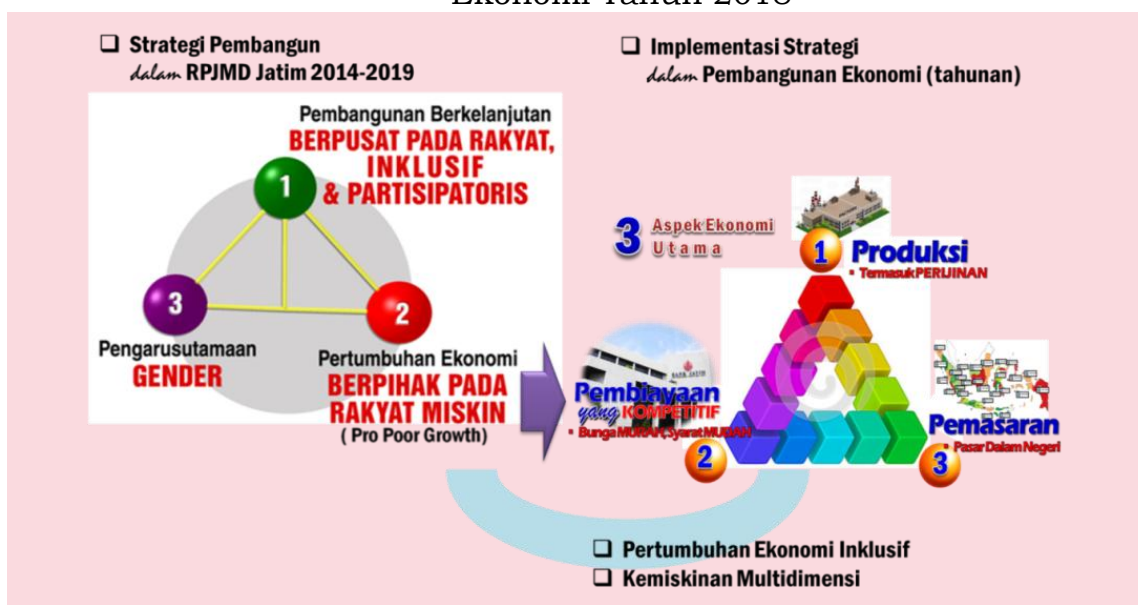
Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif serangkaian kebijakan makro maupun mikro ekonomi telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain melaluiderivasi strategi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2014-2019 kedalam tiga (3) aspek ekonomi utama, yaitu:

1. Aspek Produksi UMKM dan Besar, pada prinsipnya adalah bagaimana peran Pemerintahan Jawa Timur dalam mendesain aspek peningkatan produksi pada berbagai komoditas dalam skala usaha UMKM dan Besar menghasilkan produk yang berdaya saing lebih tinggi serta terjaga baik dari aspek harga yang kompetitif, kualitas serta kecepatan pengiriman.
2. Aspek pembiayaan yang kompetitif dan efisien, pada prinsipnya adalah peran Pemerintahan Jawa Timur dalam mendesain kebijakan fiskal kedalam sistem perbankan untuk pembiayaan yang kompetitif dan efisien khususnya bagi UMKM serta sektor riil lainnya, sehingga menghasilkan produk yang kompetitif dan lebih

efisien yang dengan demikian akan memiliki daya saing yang lebih baik. Hal ini dilakukan melalui upaya antara lain :

- a. Mendorong perbankan untuk mengoptimalkan skema-skema kredit yang kompetitif untuk sektor riil;
  - b. Skema kredit dari kebijakan Pemerintah Provinsi melalui fasilitasi pembiayaan usaha mikro kecil baik dengan skema pinjaman bunga murah 6%, Apex bank Jatim & BPR di Jawa Timur, Penjaminan Kredit oleh PT Jamkrida, Pembiayaan sektor pertanian melalui penempatan modal di PT Bank UMKM, serta *loan agreement* Pemprov Jatim dan Bank Jatim serta *Linkage Program* dengan BPR Kab/Kota dalam pengembangan Industri Primer;
  - c. Mengoptimalkan pola-pola kerjasama pemerintah-swasta;
  - d. Mendorong peran Perseroan maupun BUMN dalam mengalokasikan pemanfaatan CSR/PKBL untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil.
3. Aspek Pemasaran, pada prinsipnya adalah peran pemerintahan Jawa Timur dalam mendesain pemasaran yang kompetitif serta skala pasar yang lebih luas yang memungkinkan produk UMKM khususnya dan usaha besar memiliki kepastian tujuan pasar. Optimalisasi peran 26 Kantor Perwakilan Dagang Provinsi Jawa Timur di Provinsi Mitra serta peningkatan kapasitas 6 Etalase Perdagangan Jawa Timur di 5 Negara menjadi pendorong dan bentuk fasilitasi yang lebih riil pada pengembangan aspek pemasaran untuk utamanya menguasai pasar domestik dan juga pasar global.

Gambar III.1 Derivasi  
Strategi Umum RPJMD 2014-2019 pada Kebijakan Pembangunan  
Ekonomi Tahun 2018



Disamping itu perlu juga dukungan pengembangan infrastruktur, terutama melalui :

- 1) Bidang Transportasi, melakukan percepatan pembangunan moda transportasi darat, laut dan udara untuk mengoptimalkan konektivitas baik di internal maupun Jawa Timur dengan kawasan eksternal untuk efektivitas mobilisasi barang dan jasa.
- 2) Bidang Kebinamargaan, melakukan koordinasi untuk percepatan pembangunan ruas-ruas trans tol Jawa, pemeliharaan dan peningkatan jalan arteri dan jembatan nasional, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan provinsi, serta stimulasi melalui kemampuan keuangan daerah terhadap peningkatan jalan-jalan kabupaten/kota.
- 3) Bidang Pengairan, diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan waduk dan bendungan untuk peningkatan Indeks Pertanaman dari 1,86 menjadi 2,3 sehingga akan terdapat tambahan areal tanam dalam jangka panjang sebesar 345.775 Ha.
- 4) Bidang Energi, melalui koordinasi dengan Pemerintah, untuk tetap menjaga surplus pasokan listrik baik untuk peningkatan elektrifikasi maupun untuk kebutuhan industri, maupun mempercepat realisasi proses eksplorasi Pembangkit-pembangkit Listrik tenaga panas bumi, maupun dari sumber-sumber energi yang terbarukan lainnya seperti mikro hidro dan sebagainya.

Infrastruktur Regulasi diarahkan untuk efektivitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam menerbitkan kebijakan lokal (perda/peraturan kepala daerah) untuk stimulus kinerja pembangunan ekonomi.

### III.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017

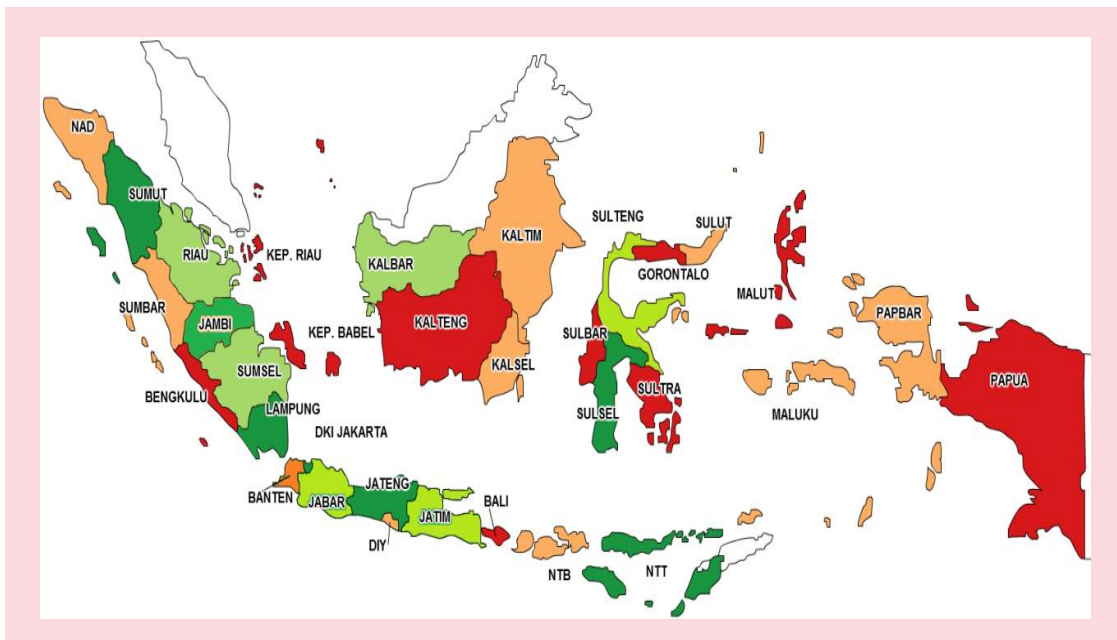
Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2017 (sampai dengan triwulan III) tumbuh 5,21%, lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,03%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2017 ini masih mengindikasikan terjadinya fase kontraksi yang ditandai dengan melambatnya kinerja ekonomi sejak tahun 2012 yang tumbuh 6,64%, tahun 2013 tumbuh 6,08% dan tahun 2014 tumbuh 5,86%. Dalam perekonomian terbuka (perekonomian empat sektor) faktor eksternal akan mempengaruhi kinerja ekonomi, salah satunya adalah dinamika global di berbagai belahan dunia, antara lain Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang, yang berdampak pada kinerja ekspor Nasional dan Jawa Timur. Disamping itu melemahnya kurs rupiah terhadap US



Dollar di tahun 2017 turut mempengaruhi kinerja sektor riil, sehingga faktor tersebut yang pada akhirnya berdampak pada melambannya kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Meski pertumbuhan ekonominya melamban, namun kinerja daya saing Jawa Timur dibanding Provinsi-provinsi lain di Indonesia berdasarkan publikasi *Asia Competitiveness Institute – Singapore* tahun 2017, Jawa Timur menempati peringkat kedua. Sementara peringkat pertama ditempati oleh DKI Jakarta dan peringkat ketiga ditempati oleh Kalimantan Timur (mencakup Kalimantan Utara). Posisi Jawa Timur ini naik dua peringkat dibanding tahun 2015.

Gambar III.2 Daya Saing Ekonomi Wilayah di Indonesia



Sumber: *Asia Competitiveness Institute*

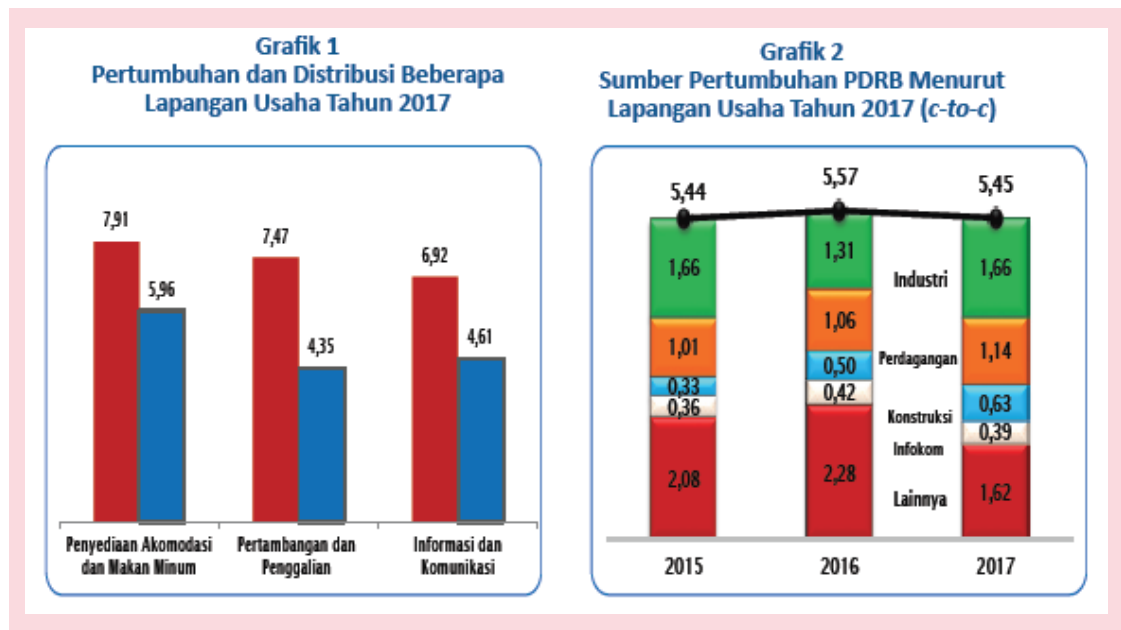
Kinerja daya saing tersebut diukur dengan 103 Indikator yang dikelompokkan dalam 4 aspek yaitu (1) stabilitas ekonomi makro, (2) perencanaan pemerintah dan institusi, (3) kondisi finansial, bisnis & tenaga kerja, dan (4) kualitas hidup & pembangunan infrastruktur. Guna lebih memperjelas kondisi ekonomi daerah di tahun 2017 berikut disampaikan beberapa sub-sub Bab yang ada keterkaitannya substansi perekonomian di Jawa Timur.

#### III.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Jawa Timur tahun 2017 tumbuh sebesar 5,45 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh lapangan usaha.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,91 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,47 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 6,92 persen.

Gambar III.3 Daya Saing Ekonomi Wilayah di Indonesia



Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha tahun 2017 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 29,03 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,80 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 18,18 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2017, Lapangan Usaha Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,66 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,14 persen; Konstruksi 0,63 persen; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,41 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,17 persen.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh melambat dari 2,41 persen pada tahun 2016 menjadi 1,48 persen pada tahun 2017. Curah hujan tinggi dan serangan hama di beberapa wilayah menyebabkan turunnya produksi tanaman pangan terutama padi. Faktor tersebut yang mengakibatkan Sub Kategori Tanaman Pangan berkontraksi sebesar -2,18 persen. Sedangkan pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan tumbuh meningkat dari 4,44 persen pada tahun 2016 menjadi 5,69 persen pada tahun 2017.

### III.1.1.2 Kinerja Perdagangan

Ekspor Jawa Timur sampai dengan tahun 2017 (sampai dengan semester I) mencapai 456,67 triliun rupiah, sedangkan impor Jawa Timur mencapai 359.66 triliun rupiah.

Perdagangan dalam negeri antar provinsi masih menjadi andalan dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran. Total net ekspor perdagangan antar daerah tahun 2017 (sampai dengan semester I) tercatat surplus sebesar 79,96 trilyun rupiah.

Kondisi di atas tercermin dari data PDRB menurut penggunaan tahun 2017 (sampai dengan semester I) yang disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel III.1                      Kinerja Perdagangan Jawa Timur 2012 -  
2016 (Miliar Rupiah)

Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017 SEM I
Ekspor	585,520	664,960	696,960	808,690	456.666
Luar Negeri	239,500	249,080	244,760	272,780	132,419
Antar Daerah	346,020	415,880	452,200	535,910	324,247
Impor	531,780	593,930	669,410	733,420	359.662
Luar Negeri	256,180	268,380	317,040	298,080	115,374
Antar Daerah	275,600	325,550	352,370	435,340	244,288
Total Ekspor Impor	1.117,300	1.258,890	1.366,370	435,340	816.328
Nett Eks-Imp LN	-16,680	-19,300	-72,280	-25,300	17.045
Nett Eks-Imp DN	70,420	90,330	99,830	100,570	79.959
Total Nett Ekspor - Impor	53,740	71,030	27,550	75,270	97.004

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

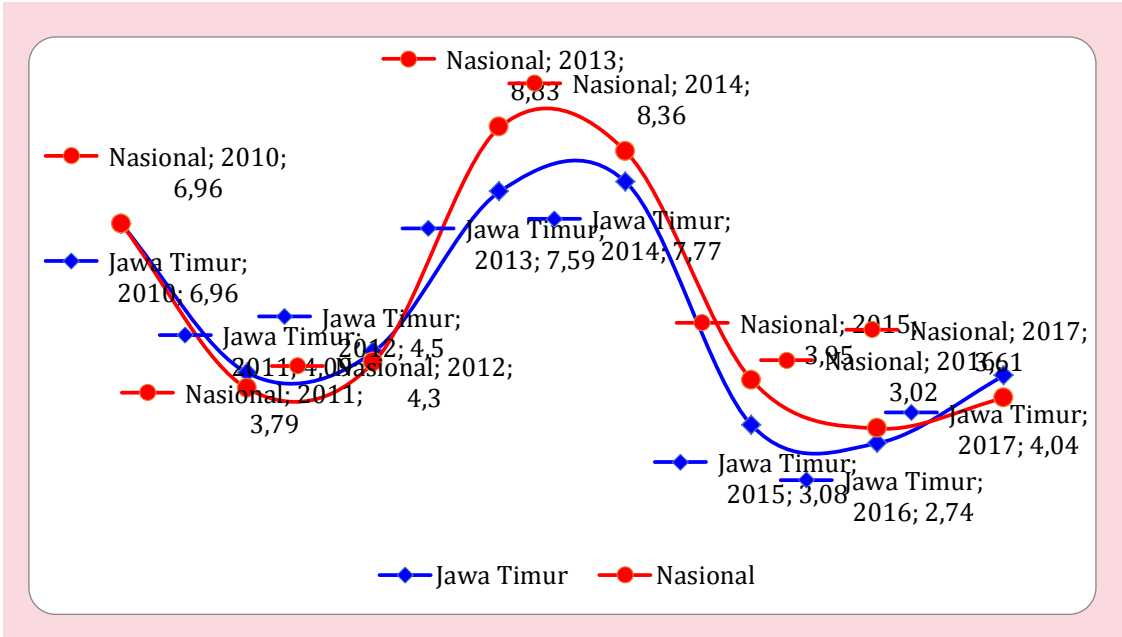
Surplus net ekspor terjadi dari besarnya kenaikan perdagangan antar daerah/pulau. Hal ini sejalan dengan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ketika pasar internasional sedang mengalami kelesuan, maka upaya menopang net ekspor adalah penguasaan pasar domestic melalui penguatan 26 Kantor Perwakilan Dagang di 26 Provinsi mitra se-Indonesia

### III.1.1.3 Kinerja Investasi

Sampai dengan tahun 2017, realisasi Investasi mencapai 124,53 trilyun rupiah. Sementara itu, realisasi investasi selama 3 tahun terakhir (2015 s/d 2017) mengalami kontraksi sebesar 23,9%, yaitu mencapai 163,68 trilyun rupiah pada tahun 2017 sedangkan pada

tahun 2015 mencapai 124,53 trilyun rupiah. Realisasi investasi PMA pada tahun 2017 mencapai 15,14 trilyun rupiah, sedangkan PMDN mencapai 38,27 trilyun rupiah, disisi lain realisasi investasi non fasilitas mencapai 71,12 trilyun rupiah.

Gambar III.4 Realisasi Investasi Jawa Timur Tahun 2010-2017

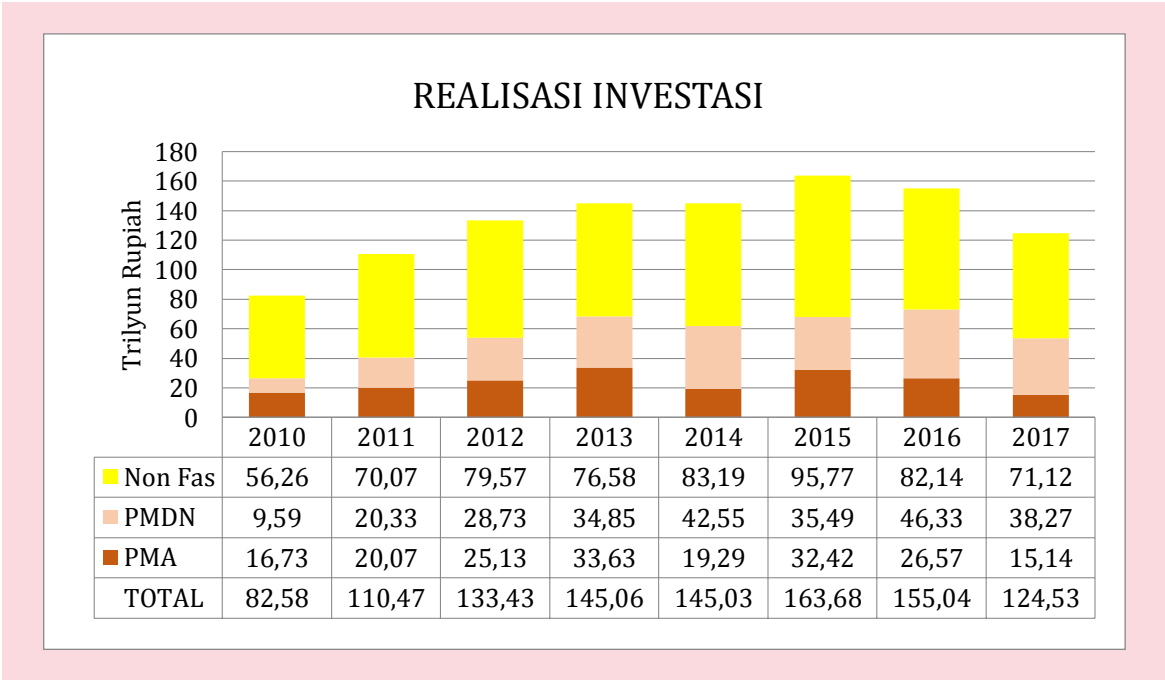


Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Timur

III.1.1.4 Tingkat Inflasi

Inflasi Jawa Timur pada bulan Desember 2017 sebesar 0,71 %, dimana tingkat inflasi ini sama dengan nasional. Sedangkan laju inflasi tahun kalender (Desember 2017 terhadap Desember 2016), nasional sebesar 3,61 %, sedangkan Jawa Timur sebesar 4,04 %. Selama Januari sampai Desember tahun 2017, inflasi tertinggi terjadi di bulan Januari sebesar 1,52 %. Perkembangan Inflasi Jawa Timur selama kurun waktu 2010–2017 (sampai dengan TW III 2017) disajikan pada Gambar 3.5.

Gambar III.5 Perkembangan Inflasi Jawa Timur Tahun 2010–2017  
(sampai dengan TW III tahun 2017)



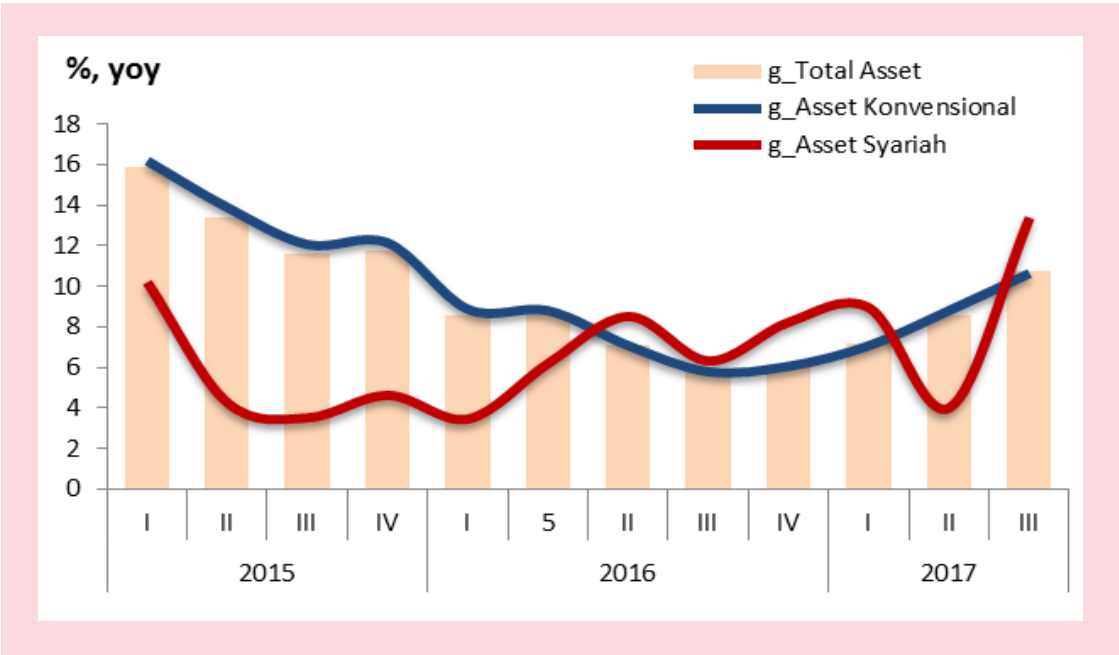
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

III.1.1.5 Kinerja Perbankan

Berdasarkan laporan kinerja perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur triwulan III-2017 Kinerja industri perbankan di Jawa Timur terus menunjukkan perbaikan sebagaimana yang diperlihatkan pada indikator volume usaha (total aset), penghimpunan dana dan penyaluran kredit atau pembiayaan. Perkembangan yang lebih pesat terjadi pada kelompok bank umum syariah. Sementara itu indikator risiko perbankan masih terjaga pada level yang aman.

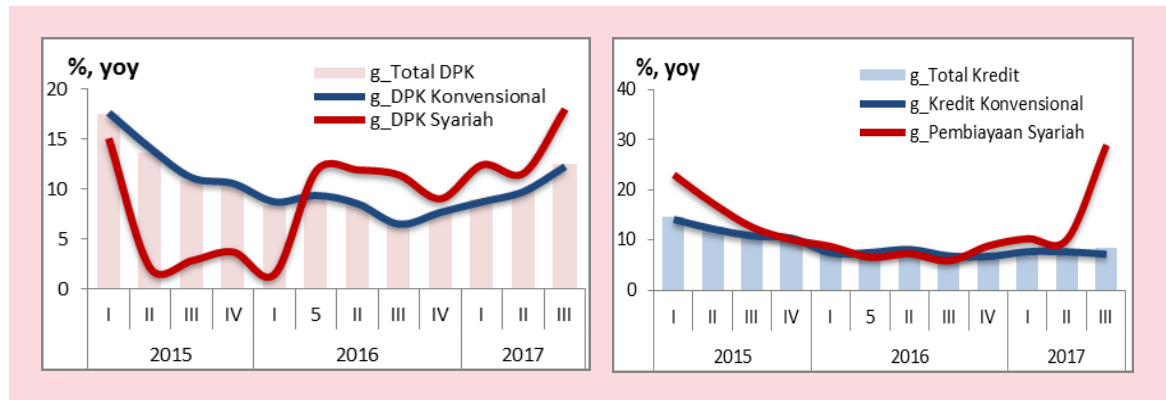
Pada triwulan III 2017 aset bank umum Jawa Timur telah mencapai Rp608,35 triliun, meningkat dibandingkan triwulan II 2017 yang tercatat sebesar Rp583,60 triliun. Secara tahunan aset bank umum pada periode tersebut tumbuh 10,76% (yoy), mencatat akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,56% (yoy). Pertumbuhan aset kelompok bank umum syariah melaju lebih pesat dibandingkan kelompok bank umum konvensional. Aset kelompok bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam tersebut melonjak dari Rp27,14 triliun menjadi Rp29,35 triliun pada triwulan laporan dan mencatat pertumbuhan 13,41% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2017 yang hanya membukukan laju 4,03% (yoy).

Gambar III.6 Grafiik *Pertumbuhan Aset Bank Umum di Jawa Timur Menurut Kelompok Bank*



Sumber: *Laporan Bank Umum (diolah)*

Sementara itu aset kelompok bank umum konvensional meningkat sebesar 10,63% (yoy), dari Rp556,46 triliun menjadi Rp579,10 triliun di triwulan III 2017. Pertumbuhan tersebut juga



melaju dari triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan 8,80% (yoy). Meskipun tetap dominan, pertumbuhan aset kelompok bank umum syariah yang lebih pesat dibandingkan bank umum konvensional telah sedikit mengurangi dominasi bank umum konvensional terhadap industri bank umum dari 95,27% pada triwulan II 2017 menjadi 95,19% di triwulan III 2017. Peningkatan pertumbuhan aset bank umum juga diikuti oleh dana pihak ketiga (DPK) pada kelompok bank umum konvensional maupun syariah. Sementara itu pertumbuhan kredit kelompok bank umum konvensional sedikit melambat di tengah laju peningkatan pembiayaan bank umum syariah.

Sumber : Laporan Bank Umum  
(diolah)  
Gambar III.7 Grafik Pertumbuhan  
DPK Bank Umum Jawa Timur

Sumber : Laporan Bank Umum  
(diolah)  
Gambar III.8 Pertumbuhan Kredit  
Bank Umum Jawa Timur

Penghimpunan DPK bank umum secara keseluruhan tumbuh 12,57% (yoy) menjadi Rp494,59 triliun, meningkat dibandingkan triwulan II 2017 yang membukukan DPK sebesar Rp475,92 triliun dengan laju sebesar 9,88% (yoy). DPK kelompok bank umum konvensional tumbuh sebesar 12,31% (yoy) di triwulan III 2017, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 9,81% (yoy). Sementara itu DPK kelompok bank umum syariah tumbuh lebih pesat, yakni mencapai 23,48% (yoy) di triwulan III 2017 yang juga lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat laju sebesar 21,17% (yoy).

Secara keseluruhan penyaluran kredit/pembiayaan bank umum pada triwulan III 2017 mencapai Rp487,83 triliun atau tumbuh sebesar 8,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang membukukan kredit sebesar Rp476,39 triliun dengan laju 7,84% (yoy). Dalam periode yang sama, pertumbuhan kredit kelompok bank umum



konvensional tercatat sebesar 7,24% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang mencapai 7,71% (yoy). Sementara laju pertumbuhan pembiayaan bank umum syariah mencapai 28,89% (yoy) di triwulan III 2017, melonjak dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,14% (yoy).

Laju pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan kredit/pembiayaan menyebabkan loan to deposit ratio (LDR) bank umum Jawa Timur sedikit menyusut, dari 100,10% di triwulan II 2017 menjadi 98,63% di triwulan III 2017. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh LDR kelompok bank umum konvensional yang mencatat penurunan LDR dari 99,06% menjadi 97,11%, sedangkan financing to deposit ratio (FDR) kelompok bank umum syariah dalam periode yang sama meningkat dari 122,49% menjadi 129,21%. Sementara itu risiko kredit/ pembiayaan yang tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) keseluruhan bank umum masih terjaga pada level 3,26% sehingga mampu mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan di Jawa Timur.

Tabel III.2 Perkembangan Indikator Bank Umum di Jawa Timur

INDIKATOR	2015		2016				2017		
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Kinerja (Miliar Rp)	519.16 3	530.68 0	525.07 8	537.56 1	549.24 8	563.32 5	562.61 9	583.59 9	608.34 5
Total Asset	249.38	255.22	252.25	260.00	272.75	275.88	275.91	290.88	302.46
- Bank Pemerintah	5	3	6	7	2	7	7	4	7
- Bank Swasta	242.14 8	248.63 2	246.19 1	252.49 9	251.02 7	261.05 1	260.41 7	270.28 3	279.06 8
- Bank Asing	27.629	26.825	26.631	25.055	25.470	26.387	26.286	22.432	26.810
Dana Pihak Ketiga	411.57 9	422.65 7	423.75 7	433.10 9	439.36 1	455.59 4	461.65 7	475.92 1	494.58 7
- Giro	74.197	69.070	74.483	72.598	75.536	73.090	81.080	80.293	86.700
- Tabungan	164.67 8	178.74 1	171.10 7	180.68 0	182.71 9	199.24 5	189.35 2	193.95 9	199.15 6
- Deposito	172.70 5	174.84 5	178.16 8	179.83 2	181.10 6	183.25 8	191.22 5	201.66 9	208.73 1
Kredit Lokasi Bank (LB)	362.24 9	375.45 3	366.28 3	382.41 5	386.83 1	400.54 4	387.93 0	402.96 3	416.35 3
- Kredit Modal Kerja	215.79 6	224.73 0	214.16 5	224.33 5	226.67 3	235.65 5	217.71 0	228.00 1	237.59 4
- Kredit Investasi	50.508	52.553	52.987	55.926	56.391	56.955	60.298	60.306	61.839
- Kredit Konsumsi	95.945	98.171	99.131	102.15 4	103.76 8	107.93 4	109.92 1	114.65 6	116.91 9
Kredit Lokasi Proyek (LP)	421.42 4	436.51 4	424.87 0	441.75 0	450.14 9	466.59 5	458.38 6	476.39 2	487.82 5
- Kredit Modal Kerja	243.55 1	252.94 6	239.89 8	249.14 6	253.67 1	260.74 2	245.89 2	257.22 3	265.07 9
- Kredit Investasi	65.556	68.099	68.565	72.954	74.025	78.854	83.063	84.011	85.608
- Kredit Konsumsi	112.31 7	115.46 9	116.40 6	119.65 0	122.45 2	126.99 9	129.43 1	135.15 8	137.13 7
Kredit LB ke Sektor Ekonomi Utama	211.37 2	223.25 7	215.31 7	225.60 7	227.21 2	236.54 1	221.05 6	229.69 3	238.38 5
- Kredit Sektor Industri Pengolahan	107.73 2	113.69 7	108.02 6	111.78 0	112.27 6	110.54 1	102.70 5	107.43 0	113.58 8
- Kredit Sektor Perdagangan	93.869	99.790	97.886	103.40 1	104.66 8	114.88 9	106.95 1	109.75 0	111.88 3
- Kredit Sektor Pertanian	9.770	9.770	9.406	10.425	10.268	11.112	11.399	12.514	12.914
Pertumbuhan (% , YOY)									
Total Asset	11,62	11,73	8,58	7,13	5,80	6,15	7,15	8,56	10,76
- Bank Pemerintah	13,67	15,31	10,57	8,04	9,37	8,10	9,38	11,88	10,89
- Bank Swasta	9,99	9,29	7,97	8,40	3,67	4,99	5,78	7,04	11,17
- Bank Asing	8,03	2,69	-2,82	-11,19	-7,81	-1,63	-1,30	-10,47	5,26
Dana Pihak Ketiga	10,80	10,27	8,42	8,72	6,75	7,79	8,94	9,88	12,57

INDIKATOR	2015		2016				2017		
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
- Giro	19,37	12,40	9,37	-0,40	1,81	5,82	8,86	10,60	14,78
- Tabungan	7,35	9,83	11,42	16,68	10,96	11,47	10,66	7,35	9,00
- Deposito	10,78	9,90	5,32	5,39	4,86	4,81	7,33	12,14	15,25
Kredit Lokasi Bank (LB)	10,76	9,01	7,40	8,06	6,79	6,68	5,91	5,37	7,63
- Kredit Modal Kerja	11,91	7,94	5,80	6,35	5,04	4,86	1,66	1,63	4,82
- Kredit Investasi	5,38	11,26	9,59	12,97	11,65	8,38	13,80	7,83	9,66
- Kredit Konsumsi	11,18	10,32	9,82	9,33	8,15	9,94	10,88	12,24	12,67
Kredit Lokasi Proyek (LP)	10,98	10,41	7,54	8,12	6,82	6,89	7,89	7,84	8,37
- Kredit Modal Kerja	10,33	9,20	5,51	5,86	4,16	3,08	2,50	3,24	4,50
- Kredit Investasi	13,63	14,81	11,38	14,28	12,92	15,79	21,14	15,16	15,65
- Kredit Konsumsi	10,88	10,59	9,65	9,40	9,02	9,99	11,19	12,96	11,99
Kredit LB ke Sektor Ekonomi Utama	11,74	10,45	8,05	9,20	7,49	5,95	2,67	1,81	4,92
- Kredit Sektor Industri Pengolahan	14,45	9,42	5,76	5,45	4,22	-2,78	-4,93	-3,89	1,17
- Kredit Sektor Perdagangan	10,58	13,22	11,05	13,44	11,50	15,13	9,26	6,14	6,89
- Kredit Sektor Pertanian	-3,62	-3,09	4,66	10,47	5,09	13,73	21,20	20,04	25,77
Rasio Keuangan (%)									
NPL Lokasi Bank	2,19	1,82	2,32	2,32	2,46	2,64	2,97	3,01	3,08
- NPL Kredit Modal Kerja	2,43	2,03	2,76	2,78	2,99	3,33	3,91	3,80	3,92
- NPL Kredit Investasi	2,68	2,25	2,56	2,45	2,43	2,64	2,76	3,24	2,97
- NPL Kredit Konsumsi	1,37	1,11	1,25	1,25	1,33	1,14	1,21	1,33	1,43
NPL Lokasi Proyek	2,43	2,14	2,37	2,50	2,68	2,86	3,14	3,14	3,26
LDR Lokasi Bank	88,01	88,83	86,44	88,30	88,04	87,92	84,03	84,67	84,18
LDR Lokasi Proyek	102,39	103,28	100,26	102,00	102,46	102,41	99,29	100,10	98,63

Sumber : Bank Indonesia, 2017

### III.1.2 Perkiraan Makro Ekonomi Jawa Timur Tahun 2018

Berdasarkan perkembangan terkini kondisi perekonomian global dan domestik serta sinkronisasinya dengan penerapan kebijakan pemerintah maka beberapa proyeksi makro ekonomi Jawa Timur tahun 2018 diperkirakan akan mengalami deviasi yang cukup signifikan dibandingkan dengan rencana jangka menengah yang sudah ditetapkan.

Dari sisi permintaan, di sepanjang tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan mencapai 5,2-5,6% (yoy), membaik dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 5,0-5,4 (yoy). Perbaikan permintaan domestik yang bersumber dari konsumsi swasta dan pemerintah, diperkirakan menjadi penopang utama perbaikan pertumbuhan ekonomi tersebut. Lebih lanjut, ekonomi dunia yang semakin kuat serta perluasan pasar ekspor yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur sejak 2017 diperkirakan mampu menopang perbaikan kinerja ekspor luar negeri Jawa Timur di 2018.

Konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan. Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang berlangsung pada triwulan II 2018 diperkirakan meningkatkan konsumsi swasta, khususnya konsumsi LNPRT, serta konsumsi pemerintah. Positifnya kinerja konsumsi swasta di tahun 2018 juga ditopang oleh terjaganya daya beli masyarakat sejalan

dengan perkiraan stabilnya tingkat inflasi di target yang diterapkan yakni  $3,5\% \pm 1\%$  (yoy) serta kebijakan moneter akomodatif yang telah berlangsung sejak 2017. Adapun kebijakan moneter akomodatif tersebut antara lain penurunan suku bunga kebijakan serta pelonggaran kebijakan Loan To Value (LTV) yang bertujuan menstimulus kinerja sektor riil. Penguatan konsumsi swasta di tahun 2018 terindikasi dari peningkatan consumer confidence. Sampai dengan awal triwulan IV 2017, consumer confidence tercatat masih tinggi. Hal itu diharapkan dapat menopang kinerja konsumsi di sepanjang tahun 2018. Dari sisi pemerintah, konsumsi pemerintah diperkirakan juga mengalami akselerasi sejalan dengan berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah. Meskipun demikian, adanya potensi shortfall pajak menjadi downside risk bagi kinerja konsumsi pemerintah.

Sejalan dengan prospek ekonomi global yang semakin menguat serta perluasan pasar ekspor yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Timur, kinerja ekspor luar negeri Jawa Timur diperkirakan mengalami peningkatan pada 2018. Berdasarkan World Economic Outlook Oktober 2017, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan meningkat dari 3,6% (yoy) di tahun 2017 menjadi 3,7% (yoy) di 2018. Perbaikan prospek perekonomian negara maju seperti Amerika Serikat merupakan pendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia. Peningkatan prospek ekonomi negara tersebut diperkirakan akan menopang peningkatan ekspor Jawa Timur pada tahun 2018. Lebih lanjut, peningkatan ekspor terutama diperkirakan terjadi untuk komoditas ekspor unggulan Jawa Timur, antara lain kayu dan barang dari kayu dan pengolahan ikan dan biota laut. Peraturan Menteri Perdagangan No. 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yg diundangkan pada 12 Juni 2017, yang salah satu isinya memuat ketentuan penghapusan biaya verifikasi produk furnitur berbahan baku rotan untuk ekspor, ditengarai menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan kinerja ekspor kayu dan produk dari kayu di Jawa Timur pada tahun 2018. Lebih lanjut, hasil liaison dan Focus Group Discussion (FGD) KPw BI Provinsi Jawa Timur dengan beberapa perusahaan berskala internasional yang bergerak di industri pengolahan ikan dan biota laut optimistis akan perkembangan ekspor komoditas tersebut.

Tabel III.3 Prospek Perekonomian Dunia – World Economic Outlook

Prospek Perekonomian Dunia	Satuan	Realisasi	Proyeksi IMF	
			Okt-17	
		2016	2017p	2018p
Dunia	%yoy	3,2	3,6	3,7
Negara maju	%yoy	1,7	2,2	2,0

Prospek Perekonomian Dunia	Satuan	Realisasi	Proyeksi IMF	
			Okt-17	
		2016	2017p	2018p
Arerika Serikat	%yoy	1,6	2,2	2,3
Kawasan Eropa	%yoy	1,8	2,3	1,9
Jepang	%yoy	1,0	1,5	0,7
Negara Berkembang	%yoy	4,3	4,6	4,9
Rusia	%yoy	-0,2	1,8	1,6
Tiongkok	%yoy	6,7	6,8	6,5
India	%yoy	7,1	6,7	7,4
Brasil	%yoy	-3,6	1,2	1,9
ASEAN-5	%yoy	4,9	5,2	5,2
Volume Perdagangan (Barang dan Jasa)	%yoy	2,3	4,2	4,0
Impor				
Negara maju	%yoy	2,7	4,0	3,8
Negara Berkembang	%yoy	2,0	4,4	4,9
Ekspor				
Negara maju	%yoy	2,2	4,8	3,9
Negara Berkembang	%yoy	2,5	4,8	4,5
Lebih tinggi dibandingkan 2017p				
Lebih rendah dibandingkan 2017p				

Sumber : WEO IMF

Dari sisi penawaran, kinerja sisi penawaran diperkirakan ditopang oleh peningkatan kinerja industri pengolahan Jawa Timur. Kinerja lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan permintaan domestik dan eksternal di sisi permintaan pada tahun 2018.

Peningkatan pertumbuhan permintaan domestik, terutama konsumsi swasta di sepanjang tahun 2018 diperkirakan turut mendorong akselerasi lapangan usaha industri pengolahan. Prospek terjaganya volatilitas nilai tukar di sepanjang tahun 2018 meminimalisir tekanan biaya bahan baku bagi industri yang masih tergantung pada bahan baku impor. Disamping itu, upaya-upaya substitusi bahan baku impor yang telah dilakukan dunia usaha juga akan membantu kinerja industri pengolahan. Pemilihan Kepala Daerah serentak yang diadakan pada tahun 2018 diperkirakan turut meningkatkan kinerja lapangan usaha industri pengolahan. Meskipun demikian, peningkatan cukai rokok di tahun 2018 diperkirakan terus memberikan tekanan bagi perusahaan rokok di Jawa TImur. Kinerja ekonomi Tiongkok yang diperkirakan mengalami rebalancing di tahun 2018 juga berpotensi menghambat kinerja ekspor yang sebagian besar didominasi oleh komoditas industri pengolahan.

Tabel III.4    Perkiraan Arah Pertumbuhan PDRB Sisi Permintaan 2017 (%yoy)

Komponen	2015	2016	2017p *)	2018p *)
Konsumsi Swasta	3,4	4,6	↑	↑
Konsumsi Pemerintah	2,3	-7,0	↑	↑
Ekspor Luar Negeri	-2,4	12,8	↓	↑
PDRB	5,4	5,5	↓	↑

\*) dibandingkan tahun sebelumnya  
Sumber : BPS, proyeksi Bank Indonesia

Dibandingkan tahun sebelumnya, tekanan inflasi Jawa Timur di tahun 2018 diperkirakan berada dalam sasaran inflasi 3,5+1% (yoy), yakni di kisaran 3,1% - 3,5%. Peningkatan terbesar diperkirakan didorong oleh kelompok volatile food, sementara inflasi kelompok administered prices dan core inflation relatif terjaga.

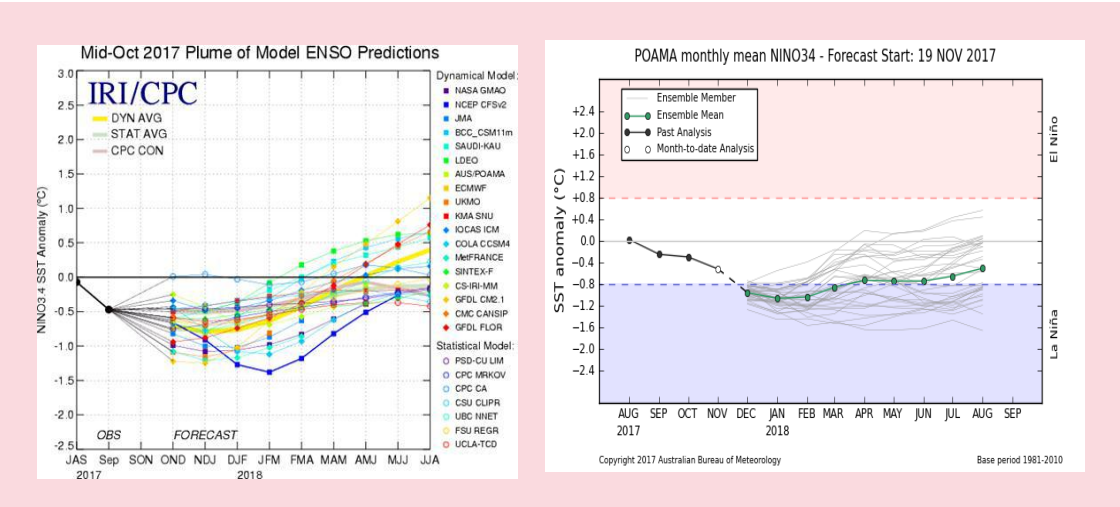
Tabel III.5 Perkiraan Arah Inflasi Tahun 2017 (%yoy)

Inflasi	2015	2016	2017p *)	2018p *)
Inflasi (IHK)	3,08	2,74	↑	↓
Core Inflation	3,94	3,83	↔	↔
Volatile Food	3,86	2,89	↓	↑
Administered Prices	-0,42	-1,13	↑	↓

Sumber : BPS, proyeksi Bank Indonesia

1) Volatile food

Tekanan inflasi kelompok volatile food tahun 2018 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2017. Hal ini didorong oleh kembali normalnya periode panen komoditas pangan dan hortikultura sejak 2017, sehingga moderasi inflasi volatile food yang terjadi sepanjang tahun 2017 (base effect) akibat perubahan pola tanam dan panen pada periode sebelumnya diperkirakan tidak terjadi di tahun 2018.



*Sumber: IRI/CPC, November 2017 (diolah)*  
*Gambar III.9 Proyeksi Terjadinya*  
*El Nino/ La Nina - NOAA*

*Sumber: BOM, November 2017 (diolah)*  
*Gambar III.10 Proyeksi Terjadinya*  
*El Nino/ La Nina-BOM*

Lebih lanjut, masih terdapat potensi risiko yang dapat mendorong inflasi kelompok ini lebih tinggi. Adanya perkiraan terjadinya La Nina pada triwulan I dan II 2018 oleh Badan Klimatologi dan Geofisika Amerika Serikat dan Australia berpotensi mengganggu produksi tanaman pangan<sup>94</sup>. Dari sisi tata niaga, panjangnya rantai distribusi beberapa komoditas bahan pangan strategis dapat mendorong peningkatan harga.

Untuk meminimalkan berbagai potensi risiko tersebut, berbagai upaya pengendalian inflasi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui TPID Jawa Timur telah dilakukan. Upaya tersebut antara lain Operasi Pasar dan Bantuan Ongkos Angkut, gerakan menanam hortikultura rumah tangga, serta menggalakan pembangunan gerai stabilisasi harga pangan seperti Rumah Pangan Kita (RPK), Toko Tani, dan Kios Pangan Operasi Pasar (KIPPAS). Lebih lanjut, adanya berbagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur berpotensi mendorong peningkatan produksi pertanian (antara lain waduk dan irigasi) turut menahan eskalasi peningkatan inflasi di kelompok ini.

## 2) Administered prices

Inflasi kelompok administered prices pada tahun 2018 diperkirakan melambat dibandingkan tahun 2017. Perlambatan tersebut terutama didorong oleh berakhirnya penyesuaian tarif listrik non subsidi dengan daya 900VA di tahun 2017 serta stabilnya biaya perpanjangan STNK sepanjang 2017-2018 pasca kenaikan di kisaran sebesar 100% di awal 2017.

Tekanan inflasi administered prices di 2018 bersumber dari kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10,04% oleh Pemerintah serta potensi kenaikan tarif listrik dan BBM non subsidi sejalan dengan prospek kenaikan harga minyak dunia. Dalam publikasinya, World Bank memaparkan bahwa terdapat potensi kenaikan harga minyak

dunia di 2018, yakni dari rata-rata US\$53 per barel di 2017 menjadi US\$57 per barel di 2018. Lebih lanjut, harga.

Meskipun demikian, downside risk dari kenaikan harga energi bersumber dari kenaikan subsidi energi sebesar 15% dibandingkan APBN 2017.95 Kenaikan subsidi energi tersebut mengindikasikan Pemerintah masih memiliki ruang untuk tidak mentransmisikan seluruh kenaikan harga energi kepada konsumen. Lebih lanjut, usulan Pemerintah terkait pengendalian harga LPG 3 kg dititikberatkan pada upaya monitoring dan diversifikasi produk, bukan penyesuaian harga sesuai dengan keekonomiannya.

Selain faktor-faktor di atas, juga terdapat potensi risiko yang bersifat berkala seperti kenaikan tarif transportasi menjelang perayaan hari besar keagamaan dan hari libur.

### 3) Core Inflation

Inflasi inti pada tahun 2018 diperkirakan relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi domestik, tekanan utama inflasi kelompok ini diperkirakan bersumber dari peningkatan permintaan masyarakat sejalan dengan momen Pemilihan Kepala Daerah. Meskipun demikian, peningkatan tersebut diperkirakan tidak serta merta ditransmisikan pada peningkatan permintaan secara signifikan. Tekanan pada kelompok administered prices juga berpotensi berdampak lanjutan kepada komoditas inti, seperti penyesuaian tarif listrik terhadap biaya sewa dan kontrak rumah, serta peningkatan harga BBM terhadap tarif angkutan.

Dari sisi eksternal, potensi meningkatnya Fed Fund Rate sepanjang 2018 serta normalisasi neraca Bank Sentral Amerika Serikat dapat memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Selain itu, perbaikan kondisi ekonomi global cenderung berdampak pada peningkatan harga komoditas internasional. Kedua faktor eksternal di atas diperkirakan dapat meningkatkan tekanan imported inflation kepada inflasi inti. Di lain pihak, upaya aktif TPID dalam pengendalian ekspektasi masyarakat melalui komunikasi masif dan intensif diperkirakan dapat membantu menahan eskalasi inflasi lebih lanjut.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam memperkirakan kondisi makro ekonomi Jawa Timur adalah pada strategi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 dimaksud yang pada amanahnya menggariskan tiga strategi umum, sebagai berikut :

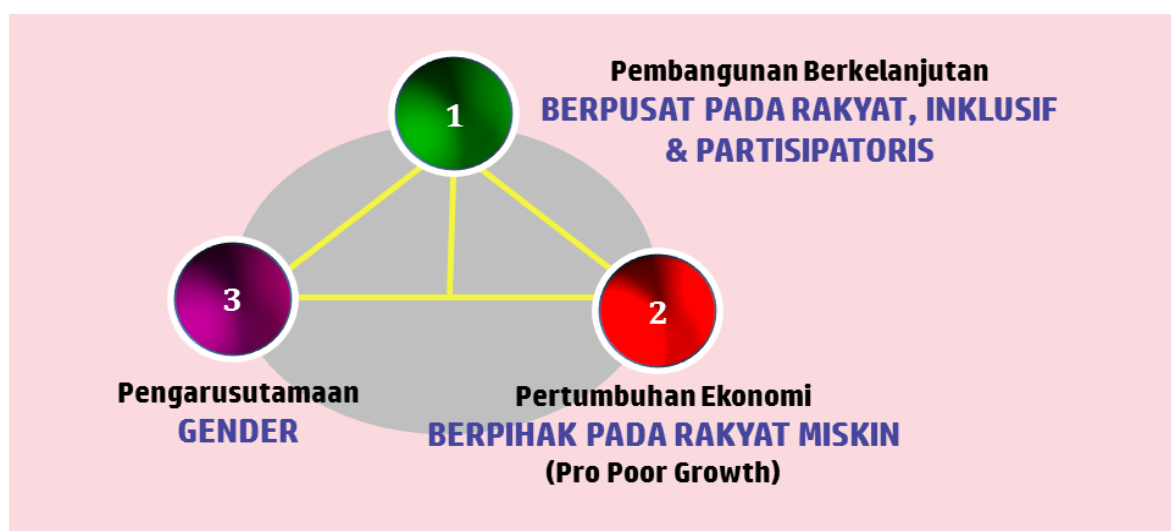
- 1) Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*).



- 2) Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro - poor growth*), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi *pro - poor*, *pro job*, *pro - growth*, dan *pro - environment*.
- 3) Pengarusutamaan gender (*pro - gender*).

Hubungan keterkaitan ketiga strategi adalah sebagai berikut:

Gambar III.11 Keterkaitan antar Tiga Strategi Umum Pembangunan Jawa Timur 2014-2019



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

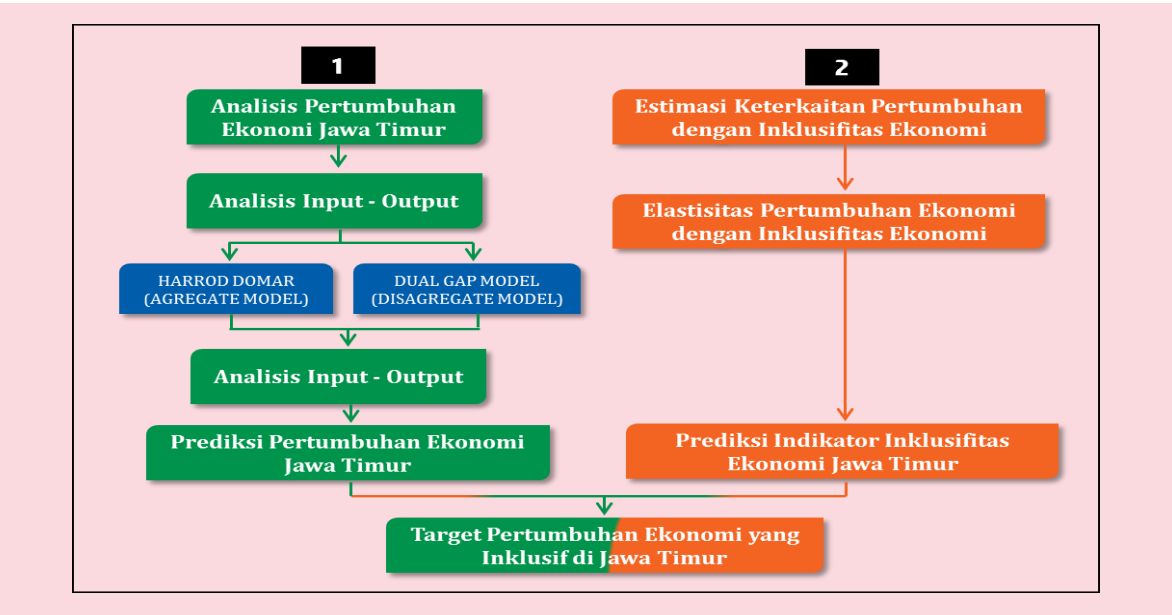
Dengan strategi tersebut, maka dalam memprediksi dan merencanakan target pertumbuhan ekonomi yang Inklusif serta berpihak pada rakyat miskin harus mempertimbangkan capaian kinerja tidak saja dari capaian kinerja pertumbuhan ekonomi itu sendiri namun juga harus mempertimbangkan capaian kinerja dari beberapa indikator kinerja utama pembangunan lainnya. Capaian kinerja dimaksud adalah sebagai berikut.

Gambar III.12 Capaian Kinerja Beberapa Indikator Kinerja Utama Jawa Timur



Data *time series* indikator kinerja utama yang terdiri dari kinerja Pertumbuhan Ekonomi, %tase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Gender dianalisa keterkaitannya pula dengan data Input Output (I-O Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 dan Tahun 2010) mempergunakan pola pemikiran sebagaimana gambar berikut.

Gambar III.13 Pola Pemikiran Derivasi Prediksi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur



Analisis lengkap Pola Pikir dan pertimbangan-pertimbangan lain tersaji pada dokumen Studi Perencanaan Kebijakan Ekonomi Makro dalam mengaselerasikan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur tahun 2017-2019 (kerjasama antara Bappeda Jawa Timur dengan FEB Universitas Brawijaya Malang tahun 2016). Dari hasil studi tersebut direkomendasikan hubungan keterkaitan kinerja antara pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dengan beberapa indikator kinerja lain disarikan pada Tabel *loading factor* di bawah ini.

Tabel III.6 Perkembangan Indikator Bank Umum di Jawa Tim *Loading Factor* Keterkaitan Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Kinerja Utama Lainnya Tahun 2009 – 2014

Loading Faktor	TPT	IPM	IGR
Dampak target kemiskinan terhadap TPT, IPM dan IGR	0.15	-0.41	0.15
Dampak target TPT, IPM dan IGR terhadap Pertumbuhan PDRB	-3.66	0.67	-1.10

Sumber: Studi Perencanaan Kebijakan Ekonomi Makro dalam mengaselerasikan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur tahun 2017-2019, Bappeda Prov Jatim, 2016.

Dengan *loading factor* tersebut di atas, maka dapat diperkirakan pertumbuhan ekonomi inklusif berdasar asumsi dari penurunan target kemiskinan (derivasi konkrit dari strategi berpihak pada rakyat miskin) 0,5 % per tahun sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.7                                      Prediksi                      Makro                      Ekonomi                      dan  
Keterkaitannya Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Lain  
(Inklusif) Jawa Timur 2016 - 2020

Tahun	Target Kemiskinan	Prediksi Capain TPT	Prediksi Capain IPM	Prediksi Capain IGR	Prediksi Pertumbuhan PDRB
2015	12.28	4.47	68.14	0.37	5.44
2016	12.00	4.39	68.28	0.36	5.45
2017	11.50	4.25	68.52	0.34	5.47
2018	11.00	4.10	68.78	0.32	5.50
2019	10.50	3.93	69.05	0.30	5.52

Sumber : Studi Perencanaan Kebijakan Ekonomi Makro dalam mengaselerasikan Kualitas pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur tahun 2017-2019, Bappeda Prov Jatim, 2016.

Prediksi tersebut diatas, diperoleh dari perhitungan kuantitatif tren kinerja dari analisa tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Di sisi lain sebagaimana Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2016 adalah 7,20% – 7,49%. Berdasarkan kondisi perekonomian terkini dan pertimbangan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif dengan berpihak kepada rakyat miskin yang direalisasikan dari asumsi penurunan 0,5 % prediksi %tase kemiskinan tahun 2016 maka target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 ditetapkan pada kisaran 5,45-5,47%.

Kondisi tersebut akan tercapai apabila sektor-sektor yang memberikan sumber pertumbuhan tinggi mampu berakselerasi lebih cepat dari capaian di tahun 2016. *Tiga leading* sektor yang diharapkan dapat memicu percepatan pertumbuhan ekonomi adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi, mobil dan sepeda motor serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan lapangan usaha, sektor industri pengolahan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pengembangan kawasan industri diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di Jawa Timur. Kebijakan di bidang perijinan yang lebih atraktif juga diharapkan mampu menarik investasi di Jawa Timur.

Kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi, mobil dan sepeda motor yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan yang pada tahun 2015 memberikan sumber pertumbuhan tertinggi kedua juga diproyeksikan akan lebih cepat pada tahun 2016. Membaiknya kemampuan daya beli masyarakat diharapkan mampu mendukung pertumbuhan sektor ini. Ekspor luar negeri yang mengalami kontraksi di tahun 2015 diharapkan dapat meningkat kembali pada tahun 2016. Berbagai terobosan untuk lebih selektif dalam memilih pasar luar negeri yang secara umum saat ini sedang mengalami kelesuan dilakukan untuk meningkatkan kinerja ekspor Jawa Timur. Nilai impor ditargetkan untuk menurun seiring dengan kebijakan pengembangan substitusi impor. Menguatnya nilai tukar rupiah juga diharapkan mampu menekan nilai impor Jawa Timur.

Net ekspor antar daerah ditargetkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Nilai net ekspor antar daerah terus mengalami peningkatan, pada tahun 2014 nilai net ekspor antar daerah mencapai 90,328 triliun rupiah dan pada tahun 2015 nilai surplusnya meningkat menjadi 99,832 triliun rupiah. Analisis terhadap kondisi eksternal yang masih belum stabil, maka memperkuat fungsi Kantor Perwakilan Dagang (KPD) merupakan strategi penting untuk mampu mendukung kinerja perdagangan domestik dan pertumbuhan ekonomi, ketika kontribusi pengeluaran konsumsi masyarakat masih cukup potensial mendorong sektor produksi.

Kontributor pertumbuhan terbesar berikutnya adalah pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Produksi dan produktivitas pada kategori yang juga dominan menjadi mata pencaharian masyarakat Jawa Timur ini diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan implementasi dua aspek ekonomi utama lainnya (pemasaran dan pembiayaan). Hal lain yang menjadi faktor pendorong adalah pembangunan infrastruktur.

Arus investasi pada tahun 2016 ditargetkan mengalami peningkatan. Kinerja realisasi PMA pada tahun 2015 memberikan optimisme terjadinya peningkatan realisasi investasi di 2016. Jaminan terhadap ketersediaan energi listrik, gas untuk industri, tenaga kerja yang demokratis, lahan dengan harga yang terjangkau, ketersediaan kawasan industri, pelayanan perijinan yang lebih transparan dan akuntabel, perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur merupakan faktor-faktor yang diharapkan mampu meningkatkan daya tarik investasi di Jawa Timur. Upaya-upaya promosi dan penyediaan prospektus investasi yang *reliable* juga dilaksanakan untuk menarik investor. Kondisi lalu-lintas di Jabodetabek yang semakin macet

memberikan peluang tersendiri bagi Jawa Timur untuk menerima investor yang akan melakukan ekspansi usahanya.

Tingkat inflasi pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar  $4,5 \pm 1$ , mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Peran aktif Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus ditingkatkan untuk melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi secara terbatas di Provinsi Jawa Timur.

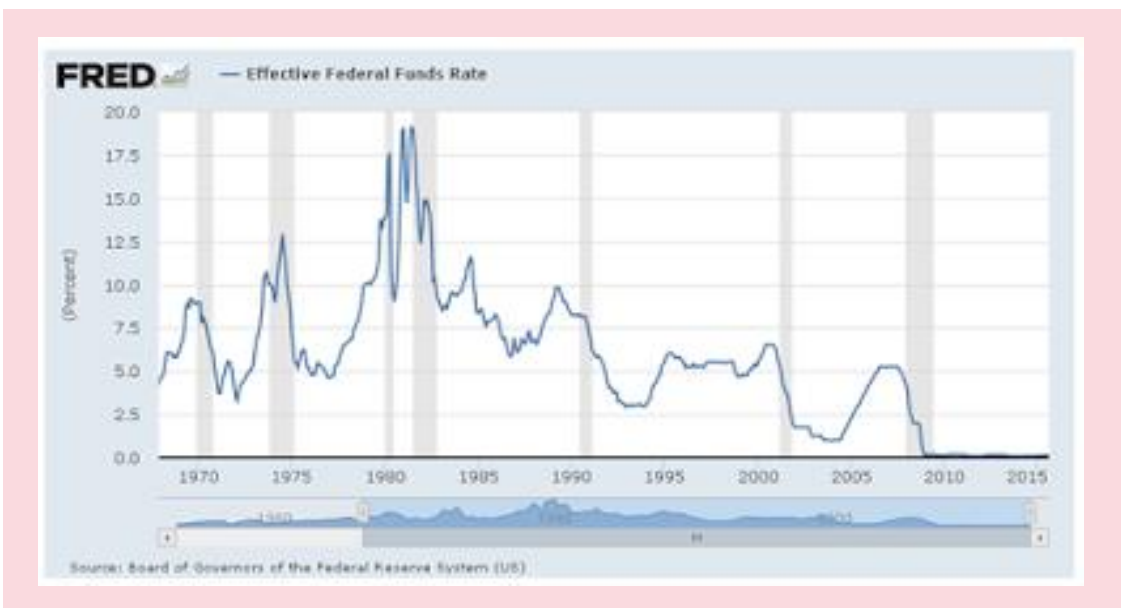
Proyeksi-proyeksi tersebut akan tercapai selama asumsi-asumsi kondisi eksternal (global) dan internal, baik nasional maupun regional berikut terjadi. Asumsi-asumsi tersebut meliputi:

1) Lingkungan eksternal (Global)

*Pertama, pengaruh rencana kenaikan suku bunga secara gradual oleh Bank Sentral Amerika The Fed (Fed Fun Rate).*

Kebijakan moneter AS ini nampaknya menjadi potensi masalah baru, meskipun secara umum kebijakan ini telah memberikan kepastian bagi negara-negara lain. Langkah terbaru The Fed ini berpotensi untuk membuat nilai tukardolar ASterhadap sejumlah mata uang di dunia menguat. Akibatnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan dolar AS di negara berkembang akan menemui kendala di sisi keuangannya, sehingga turut menekan perekonomian nasional. Namun demikian, ketidakpastian di pasar keuangan global mereda setelah kenaikan *The Federal Fund Rate* (FFR).

Gambar III.14 Grafik Trend Fluktuasi Suku Bunga The Fed Tahun 1970 – 2015



Hingga Triwulan I – 2016 ini pemulihan ekonomi Amerika Serikat masih belum solid, yang diindikasikan oleh melemahnya konsumsi dan beberapa indikator ketenagakerjaan, serta masih rendahnya inflasi. Kondisi ini diperkirakan akan mendorong The Fed untuk tetap berhati-hati dalam melakukan penyesuaian Fed Fund Rate (FFR).

*Kedua, Pertumbuhan ekonomi dunia*

Pemulihan ekonomi Eropa masih terbatas dan dibayangi oleh isu kemungkinan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit), dimana jika ini terjadi maka dalam kondisi tersebut, yang terjadi adalah kemungkinan menguatnya perdagangan dan hubungan bilateral antara Inggris dengan negara-negara di Asia, termasuk ASEAN, tanpa perlu Uni Eropa turut campur. Hal ini tentu sangat menguntungkan perjanjian perdagangan yang telah dirintis oleh Inggris ke China, India, dan Amerika Serikat, dan juga ASEAN. Beberapa kasus lambannya perdagangan Uni Eropa-ASEAN antara lain disebabkan beberapa pasal yang terkait dengan situasi di Myanmar. Inggris misalnya dapat membuat kesepakatan dagang dengan Indonesia soal sawit dengan standarnya sendiri yang mungkin lebih longgar dibandingkan dengan Uni Eropa. Namun demikian, juga timbul kerugian. Selama ini perdagangan dengan Eropa diuntungkan dengan pasar tunggalnya. Namun bila Inggris tidak terikat lagi secara hukum dengan Uni Eropa, investasi yang dilakukan di Inggris akan menjadi berat apabila berharap masuk ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Dengan kata lain, hubungan kita dengan Inggris tidak lagi dapat menjadi batu loncatan untuk masuk ke satu pasar Eropa.

Sementara perekonomian Jepang juga masih berada pada kondisi terus tertekan. Konsumsi belum mengalami perbaikan, tercermin dari konsumsi rumah tangga yang melambat. Ekonomi Tiongkok mulai membaik meskipun masih beresiko, ditopang oleh sector konstruksi dan real estate.

*Ketiga, Harga komoditas dunia terutama minyak mentah terus mengalami penurunan drastis.*

Membanjirnya pasokan minyak mentah secara global, terus menekan nilai dari minyak mentah ini. Sementara itu, konflik geopolitik yang terus memanas, dinilai tidak akan terlalu mampu mengerek harga komoditas tersebut (sumber : bisnis.com). Turunnya harga minyak dunia memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dampak negatif di

antaranya penurunan kinerja ekspor migas, perubahan asumsi makro Indonesia Crude Price (ICP) yang terdapat dalam APBN, serta penurunan realisasi dalam APBN terkait pajak penghasilan minyak dan gas. Dampak positif di antaranya menurunnya biaya energi dan transportasi sehingga dapat meningkatkan ekspor manufaktur dan nonmigas menjadi lebih kompetitif. Bagi Jawa Timur momentum ini lebih berdampak negative mengingat sebagai daerah pengeksport Migas, bagi hasil pendapatan dari Migas ini dari Pemerintah menjadi berkurang dan berdampak pada kebijakan efisiensi anggaran. Menjadi negative juga disebabkan oleh pangsa pasar ekspor juga belum bergairah dan cenderung melemah. Ke depan seiring dengan kenaikan Indeks Tendensi Konsumen dan pertumbuhan perdagangan yang melebihi pertumbuhan PDRBnya diharapkan menjadi momen positif untuk optimisme tercapainya target akselerasi kembali pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Gambar III.15 Trend Fluktuasi Penurunan Harga Minyak Dunia Tahun 2010 – Maret 2016



Sumber : Nasdaq, 2016

#### Keempat, Implementasi penuh MEA

Implementasi penuh kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 31 Desember 2015 sebagai pasar tunggal/pasar bersama masyarakat ASEAN diharapkan mampu menjadi peluang untuk meningkatkan kapasitas perdagangan serta dampak di sektor produksi domestik. Sehingga dengan potensi barang dan jasa yang dimiliki, Indonesia menjadikan ASEAN sebagai prioritas utama memposisikan dirinya menjadi pemain global sekaligus untuk meningkatkan daya saingnya sebagai bagian dari perekonomian dunia. Optimisme pengaruh positif implementasi MEA adalah dari kinerja Perdagangan dengan negara-negara ASEAN yang menunjukkan surplus pada hampir semua wilayah kecuali Thailand, seperti tersaji pada Tabel 3.8.



Tabel III.8 Kinerja Perdagangan antara Jatim dan Negara-negara ASEAN (Jan-Maret 2016)

No.	Negara	Ekspor	Impor	Neraca
1	Malaysia	248.755.206	157.267.937	91.487.269
2	Singapore	430.690.822	310.604.744	120.086.078
3	Thailand	125.738.283	309.272.052	-183.533.769
4	Vietnam	134.932.645	131.192.052	3.740.593
5	Philippines	56.002.011	13.321.060	42.680.951
6	Myanmar	11.318.526	1.022.540	10.295.986
7	Cambodia	2.023.392	261.198	1.762.194
8	Brunai Darusalam	2.056.150	1.050	2.055.100
9	Lao People's Dem. Rep.	579.502	135.199	444.303
	<b>TOTAL</b>	<b>1.012.096.537</b>	<b>923.077.832</b>	<b>89.018.705</b>
	MIGAS	47.107.453	215.776.785	-168.669.332
	NON MIGAS	964.989.084	707.301.047	257.688.037

Sumber : BPS Jawa Timur, 2016

*Pertama* Proyeksi ekonomi global tahun 2018 di Eropa dan Amerika Serikat

PDB sebesar 2,5%, dengan tingkat pengangguran turun menjadi 3,9%. Inflasi sebesar 1,9% dan bunga The Fed sebesar 2% serta penurunan harga minyak. \$57/barrel. Sedangkan di negara Eropa mengalami pertumbuhan sebesar 2,1% dengan tingkat pengangguran turun menjadi 1,2%. Terdapat isu peningkatan ketimpangan antar negara di Uni Eropa (pendidikan, kesehatan, mobilitas sosial).

*Kedua*, Proyeksi ekonomi di wilayah Asia Pasifik

Diprediksi di wilayah Cina akan mengalami perlambatan sekitar 6,3%, sehingga negara lain juga terkena dampak perlambatan tersebut. Diluar keterlibatan cina, negara-negara Asia lainnya tetap mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi karena ekspor komoditas mulai stabil, meredanya dampak konsolidasi kebijakan fiskal, khususnya di Indonesia.

## 2) Lingkungan Internal (Nasional)

*Pertama, Membaiknya Kondisi ekonomi nasional dan stimulus Paket regulasi ekonomi.*

Pertumbuhan ekonomi nasional nampaknya menunjukkan kecenderungan ke arah pemulihan ekonomi setelah mengalami perlambatan. Kondisi ini dijelaskan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV/2015 mencapai 5,04%, meningkat cukup tinggi jika dibanding kuartal III yang mencapai 4,73%, kuartal II

sebesar 4,67% dan kuartal I tumbuh 4,7%. Secara year on year (yoy), pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79%, meningkat cukup tinggi karena beberapa faktor yang memengaruhi, yaitu *Pertama*, jasa keuangan asuransi yang meningkat 12,52%, karena peningkatan pendapatan jasa keuangan. *Kedua*, lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tumbuh 9,74%, karena penggunaan 4G LTE yang meningkat. *Ketiga*, konstruksi yang tumbuh 8,24%, sebagai dampak dari peningkatan pembangunan infrastruktur kuartal IV yang terjadi percepatan. Kondisi ini memberikan momentum bagi perekonomian nasional dan Jawa Timur untuk terus tumbuh seiring dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi dalam rangka percepatan pembangunan melalui peningkatan daya saing, keterbukaan iklim investasi, menggairahkan sektor investasi, dan pemberian perlindungan kepada pelaku usaha di dalam negeri. Bagi Jawa Timur melalui langkah-langkah jangka pendek ini diharapkan mampu berdampak ke perbaikan ekonomi yang tak hanya menyentuh sisi suplai dan kesinambungan dunia usaha, tetapi juga sisi permintaan, daya beli masyarakat dan lapangan kerja. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Nasional 2016 diprediksi meningkat dengan didorong oleh stimulus fiskal, khususnya realisasi pembangunan proyek infrastruktur yang semakin cepat. Pertumbuhan ekonomi Nasional setelah BI rate turun maka ekonomi diproyeksi tumbuh sekitar 5,3 % (Sumber: Kemenkeu RI, Tw I – 2016)

Tabel III.9 Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional Tahun 2016-2028

INDIKATOR	2016 *	2017**	2018**
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,3	6,0 - 7,2	6,2 - 7,8
Inflasi Ekonomi (% , yoy)	4,7	3,5 - 5,0	2,5
Tingkat Suku Bunga SPN 2 Bulan (%)	5,5	4,0 - 5,0	3,5 - 4,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.900	13,300 - 13,700	13,400 - 13,800
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	50	60 - 90	60 - 90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	830	750 - 780	700 - 730
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.155	1,100 - 1.200	1,100 - 1,300

Sumber :       \*) Asumsi dasar ekonomi makro APBN 2016, Kementerian Keuangan RI

                  \*\*) Dokumen Nota Keuangan beserta APBN TA 2016, Kementerian Keuangan RI

*Kedua, Optimisme asumsi makro ekonomi nasional Tahun 2016*

Beberapa indikator makro ekonomi nasional dalam APBN 2016 menunjukkan hal yang optimis ditengah kondisi global yang masih belum stabil. Beberapa indikator ekonomi tahun 2016 yang diharapkan sesuai dengan prediksi antara lain pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 %, inflasi mencapai 4,7 %, suku bunga acuan (SPN 3 bulan) pada kisaran 5,5 %, nilai tukar Rupiah sebesar Rp 13.900, lifting minyak mencapai 830 ribu barel per hari, Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari) mencapai 1.155 dan lifting harga minyak mentah 60 US Dollar per barel.

*Ketiga, Kebijakan moneter dan fiskal.*

Di bidang kebijakan moneter, BI rate semenjak ditetapkan mulai akhir tahun 2014 dari 7,0 % kemudian sempat berada diposisi 7,5% dan akhirnya pada Triwulan I-2016 diturunkan kembali pada level 6,75 %. Ini pertanda baik, bahwa kebijakan uang ketat sudah mulai bergeser untuk memacu kinerja sektor riil. Pemanfaatan ruang pelonggaran moneter dilakukan secara terukur dengan tetap konsisten menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan akan didukung oleh upaya untuk menjaga nilai tukar yang sesuai fundamentalnya, memperkuat kecukupan cadangan devisa, dan mengelola aliran modal asing.

Gambar III.16 Trend Kebijakan BI Rate Tahun 2006 - Tw I- 2016



Di bidang makroprudensial, kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan terus dilanjutkan dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan, dan terus mendorong pendalaman pasar keuangan. Sementara itu, di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk mengembangkan industri sistem pembayaran domestik yang lebih efisien, termasuk melalui perluasan elektronifikasi sistem pembayaran. Berbagai kebijakan tersebut akan disertai dengan

peningkatan koordinasi dengan Pemerintah dan institusi terkait sehingga stabilitas makroekonomi tetap terjaga, dengan struktur perekonomian yang lebih kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya memperkuat stimulus fiskal akan ditempuh melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, peningkatan ruang fiskal, peningkatan belanja produktif, peningkatan peran swasta, BUMN dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, serta melakukan inovasi pada instrumen pembiayaan. Selanjutnya, upaya memperkuat daya tahan fiskal akan dilakukan dengan memperkuat bantalan fiskal, dan meningkatkan fleksibilitas anggaran dengan penguatan payung hukum, sedangkan upaya menjaga kesinambungan fiskal akan dilakukan melalui pengendalian defisit anggaran terhadap PDB, pengendalian rasio utang terhadap PDB, penurunan net penambahan utang dan pengendalian keseimbangan primer.

*Pertama*, kondisi perekonomian nasional tahun 2018 diproyeksikan bisa tumbuh positif dengan mendorong investasi dan ekspor melalui kebijakan fiskal yang berkeadilan. Agar stabilitas ekonomi terus terjaga juga bisa diupayakan melalui peningkatan daya beli masyarakat. Di sisi lain, sektor industri dituntut harus lebih inovatif dan kreatif untuk meningkatkan produksi, sehingga proyeksi tahun 2018 pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 5,4%.

Hal-hal yang harus diperhatikan pada tahun 2018 yaitu mewaspadai pengaruh dari luar negeri. seperti : harga minyak dunia, pengaruh suku bunga The Fed. peningkatan persiapan untuk ekonomi digital, menekan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan, menekan Angka pengangguran, 100% penduduk menikmati sanitasi dan air bersih, merealisasikan investasi asing yang akan berdampak langsung pada investasi domestic.

### 3) Lingkungan Internal (Provinsi)

*Pertama*, Kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sejak tahun 2011 sebesar 7,22% terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 5,44 %. Namun demikian, meskipun mengalami perlambatan ekonomi pada tahun 2015, masih lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 4,79 %. Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas pada tahun 2015 akibat kondisi ekonomi global dan

nasional, maka kebijakan pemerintah untuk fokus pada belanja di sektor yang lebih produktif diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kebijakan dimaksud diperkuat dengan strategi pembangunan ekonomi Jawa Timur dalam tiga aspek/aktivitas ekonomi utama yang mampu menghadapi tantangan perdagangan bebas, mengoptimalkan perdagangan dalam negeri maupun dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu (1) Aspek Produksi dari segmen UMKM dan segmen Besar, (2) Aspek Pembiayaan yang Kompetitif, (3) Aspek Pemasaran.

*Kedua*, reorientasi manajemen pembangunan dan menjaga stabilitas pemerintahan (pusat dan daerah) serta legislator (DPR dan DPR RI) melalui penataan ulang regulasi (re-regulasi) dan memposisikan undang-undang sebagai alat untuk mengakselerasi pembangunan diharapkan menjadi pemicu untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi di bidang kinerja perdagangan dan investasi, maupun kinerja sosial dalam hal pelayanan kebutuhan dasar masyarakat baik di bidang pendidikan maupun kesehatan.

Proyeksi tahun 2018 di Jawa Timur meliputi: target kemiskinan 9,96%, Menstabilkan inflasi di pedesaan, *digital economy*, *agro maritime* dan peningkatan kreatifitas dan inovasi di berbagai sektor

### III.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

#### III.1.3.1 Tantangan Perekonomian 2018 dan 2019

Secara umum masih banyak tantangan yang mempengaruhi perekonomian Jawa Timur untuk tahun 2018 dan 2019. Di tingkat regional Jawa Timur, tantangan global yang dihadapi meliputi: masih tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor, belum kuatnya permintaan ekspor negara mitra dagang utama, serta diversifikasi dan daya saing produk ekspor yang masih harus ditingkatkan.

Disamping itu, tantangan domestik Jawa Timur yang perlu mendapat perhatian adalah konsumsi rumah tangga sebagai salah satu kontributor utama ekonomi Jawa Timur masih belum sekuat pola normalnya. Dari sisi sektoral, kontribusi dan daya dukung sektor pertanian terhadap perekonomian juga mengalami perlambatan. Pada tahun 2011 sektor pertanian mampu tumbuh 4% s/d 5% (yoy), pada tahun 2017 secara kumulatif hanya tumbuh 1,65%. Hal ini berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur yang mayoritas tenaga kerjanya masih di sektor pertanian tumbuh terbatas. Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai penopang utama

ekonomi Jawa Timur juga cenderung melambat. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat Jawa Timur yang masih didominasi oleh pendidikan dasar berpotensi menahan daya saing Jawa Timur dan meningkatkan disparitas kesejahteraan secara spasial.

### III.1.3.2 Prospek Ekonomi Tahun 2018 dan Tahun 2019

Meskipun perekonomian nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan di tahun 2018, diperkirakan kondisi perekonomian Indonesia masih kondusif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2017 diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan yang tinggi untuk tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan kondisi perekonomian terkini maka target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 5,4 % – 5,6 % dan pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar 5,6 % - 6,0 %. Sedangkan inflasi diperkirakan masih terkendali di kisaran 3,5% ± 1 sejalan dengan sinergi berbagai pihak dalam mengendalikan inflasi Jawa Timur.

Sementara itu, faktor-faktor eksternal dan domestik yang lebih kondusif akan menjadi pendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan semakin membaik sebagaimana diperkirakan oleh IMF akan tumbuh 3,7 % pada tahun 2018 dan disertai peningkatan volume perdagangan berdampak pada membaiknya neraca perdagangan Jawa Timur. Dari sisi domestik, perlu dilakukan upaya antisipasi yang untuk menjawab tantangan perekonomian yang ada berupa optimalisasi potensi dan memperkuat momentum pemulihan perekonomian. Disamping itu, upaya pendukung akselerasi perekonomian juga perlu ditekankan yang meliputi penguatan “modal fisik” melalui akselerasi proyek infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, serta upaya melipatgandakan nilai tambah produk melalui peningkatan produktivitas.

Optimisme pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2018 ditopang oleh konsumsi swasta yang diperkirakan tumbuh meningkat secara gradual, meskipun belum sekuat pola historisnya. Disisi lain, konsumsi pemerintah diproyeksikan akan tumbuh positif, seiring pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 serta masih berlangsungnya proyek infrastruktur Pemerintah. Investasi akan tetap tumbuh tinggi, didukung oleh pembangunan proyek infrastruktur, seperti jalan tol Trans Jawa maupun non Trans Jawa, disamping pembangunan bandara dan pelabuhan pelabuhan searah dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, kinerja investasi non bangunan diperkirakan stabil.

Kinerja ekspor luar negeri diperkirakan terakselerasi sejalan dengan perbaikan kondisi global.

### III.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Jawa Timur yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang merupakan tahun terakhir, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur.

#### III.2.1 royeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan



fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana bagi hasil, dan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Estimasi pemasaran industri otomotif nasional yang diperkirakan masuk ke wilayah Jawa Timur; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Apabila melihat dari tahun ke tahun pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur selalu mengalami peningkatan, hal tersebut terlihat dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelompok dana perimbangan juga menunjukkan peningkatan hal ini berkaitan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengamanatkan adanya pengalihan beberapa kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi ke pusat, dan sebaliknya. Adapun urusan yang mengalami perubahan antara lain Urusan Pendidikan terkait dengan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Dan Muatan Lokal Pendidikan Khusus sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami

kenaikan yang sangat signifikan dikarenakan pada DAK terdapat penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru, dana tersebut berasal dari pusat ditempatkan pada posting DAK non Fisik. Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengacu kepada peningkatan asumsi efektivitas KBM yang melakukan pembayaran PKB, sehingga diestimasi pada akhir tahun akan terealisasi cukup signifikan.

Berdasarkan kondisi di atas, perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2015 -2017 dan target pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu Tahun 2018-2020, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel III.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020

NO.	URAIAN	REALISASI APBD 2015	REALISASI APBD 2016	REALISASI APBD 2017*)	TARGET RKPD 2018	TARGET APBD 2018	TARGET RKPD 2019	TARGET RKPD 2020 **)
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.402.647.674.502,60	15.885.900.258.130,20	17.326.483.824.756,20	16.682.181.687.534,90	15.675.894.291.960,00	15.715.339.000.000,00	15.715.339.000.000,00
1.1	Pajak Daerah	12.497.148.704.551,00	12.772.227.117.584,80	14.350.601.626.318,70	13.823.507.423.770,60	12.728.000.000.000,00	12.633.000.000.000,00	12.633.000.000.000,00
1.2	Retribusi Daerah	176.559.902.959,33	133.587.973.919,68	131.444.291.907,25	114.095.747.014,46	76.451.501.000,00	121.928.000.000,00	121.928.000.000,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	352.223.333.471,28	364.325.988.476,00	374.274.618.110,19	380.253.549.404,19	380.115.629.760,00	413.623.000.000,00	413.623.000.000,00
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.376.715.733.520,97	2.615.759.178.149,76	2.470.163.288.420,04	2.364.324.967.345,69	2.491.327.161.200,00	2.546.788.000.000,00	2.546.788.000.000,00
2.	DANA PERIMBANGAN	3.115.619.118.152,00	9.039.003.358.881,00	12.494.048.645.633,00	3.569.888.938.544,09	13.270.911.941.800,00	13.200.968.000.000,00	13.200.968.000.000,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.462.318.221.152,00	1.849.884.362.367,00	1.634.524.587.316,00	1.863.552.883.936,06	2.306.650.360.800,00	1.516.912.000.000,00	1.516.912.000.000,00
2.2	Dana Alokasi Umum	1.587.261.707.000,00	1.672.878.372.000,00	3.803.428.371.000,00	1.706.336.054.608,03	3.813.411.928.000,00	5.035.959.000.000,00	5.035.959.000.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	66.039.190.000,00	5.516.240.624.514,00	7.056.095.687.317,00	-	7.150.849.653.000,00	6.648.097.000.000,00	6.648.097.000.000,00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.710.183.435.319,87	105.324.093.391,56	58.631.733.552,69	3.746.733.678.844,18	77.500.000.000,00	0,00	0,00
3.1	Pendapatan Hibah	40.499.137.959,00	42.958.979.806,00	38.179.701.449,00	36.294.080.000,00	-	-	-
3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	3.669.684.297.360,87	62.365.113.585,56	20.452.032.103,69	3.710.439.598.844,18	77.500.000.000,00	-	-
	PENDAPATAN DAERAH	22.228.450.227.974,40	25.030.227.710.402,80	29.879.164.203.941,90	23.998.804.304.923,20	29.024.306.233.760,00	28.916.307.000.000,00	28.916.307.000.000,00

### III.2.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, namun demikian peningkatan tersebut masih belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Untuk itu Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah serta optimalisasi kontribusi BUMD.

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup: a). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, b). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, c). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/sekelompok usaha masyarakat. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek pendapatan yang terdiri dari : a). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, b). Jasa giro, c). Pendapatan bunga, d). Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, e). Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah, f). Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, g). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, h). Pendapatan denda pajak, i). Pendapatan denda retribusi, j). Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, k). Pendapatan dari pengembalian, l). Fasilitas sosial dan fasilitas umum, m). Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, n). Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Peningkatan penerimaan PAD khususnya Pajak Daerah, dilakukan melalui upaya memaksimalkan (intensifikasi) potensi penerimaan yang sudah ada, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dimana jenis pungutan

Pajak Daerah Provinsi bersifat closed list. Sedangkan untuk sektor Retribusi Daerah penggalan sumber penerimaan baru dilakukan melalui upaya ekstensifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Mengingat kontribusi sektor Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar, maka upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi target penerimaan pendapatan daerah, lebih diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan intensifikasi sektor pungutan Pajak Daerah utamanya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kesadaran masyarakat merupakan kunci penting dalam penerimaan PKB, sehingga fokus kegiatan yang dilaksanakan adalah mengintensifkan sosialisasi kebijakan Pajak Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan sarana/prasarana layanan serta pengembangan sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi, dengan harapan pelayanan yang diberikan akan semakin mudah, cepat, sederhana dan dekat kepada masyarakat. Beberapa model pelayanan yang telah dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya antara lain: Samsat Link, Samsat Drive Thru, Samsat Corner, Samsat Payment Point, Samsat Mobil Keliling, e-samsat, Anjungan Transaksi Mesin (ATM) Samsat, serta Samsat Pos, buah kerjasama dengan pihak swasta (BUMN) untuk menyelenggarakan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di seluruh cabang Kantor Pos di Jawa Timur.

Sektor Retribusi Daerah memiliki potensi pengembangan pada masa mendatang, hal ini disebabkan masih banyak jenis-jenis pungutan dan struktur tarif yang bisa dikembangkan sesuai dengan pemberian jasa layanan kepada masyarakat dan tentunya hal ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, manfaat langsung kepada masyarakat. Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, masih dimungkinkan peluang untuk pengembangannya (ekstensifikasi) seiring dengan kebutuhan akan jasa layanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya Retribusi Jasa Usaha. Pengembangan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada jenis-jenis Retribusi yang memberikan jasa berupa manfaat timbal balik kepada masyarakat, sehingga pengenaan Retribusi tersebut tidak membebani masyarakat, bahkan sebaliknya masyarakat memperoleh

manfaat langsung dari fasilitas yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Disamping itu, telah dilakukan upaya penggalan penerimaan dari potensi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diantaranya dari penerimaan Kontribusi Parkir Berlangganan yang merupakan bentuk kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan memanfaatkan database kendaraan bermotor yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu melaksanakan pemungutan parkir berlangganan yang secara langsung juga membantu peningkatan penerimaan PAD pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Penerimaan bagian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2), Provisi Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29.

Prediksi penerimaan Dana Perimbangan dilakukan berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat melalui alokasi pembagian sementara dan definitif untuk Pemerintah Provinsi oleh Kementerian Keuangan, sehingga penetapan target hanya bersifat koordinatif dan konfirmasi, sedangkan untuk pemetaan potensi obyek pajak tetap dalam kendali Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi hanya melaksanakan fungsi rekonsiliasi / pencocokan kas antara besaran alokasi Pemerintah Pusat dan besaran penerimaan bagian Pemerintah Provinsi. Kondisi ini berlaku pula pada sektor bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam, sehingga diperlukan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan terkait data bagi hasil penerimaan.

### III.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung upaya – upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak melalui program sosialisasi kebijakan dan pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk menciptakan masyarakat Jawa Timur yang taat membayar pajak (*sustainable compliance*);
- b. Mewujudkan pelayanan publik yang baik (*excellent service*), terpercaya dan transparan. Rencana ini dilaksanakan melalui

program: pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware dan software*) sebagai pendukung utama kelembagaan, pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;

- c. Mencetak Sumber Daya Aparatur yang potensial, berintegritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. Rencana ini dilaksanakan melalui program: penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggungjawab, peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, program Rekrutmen Sumber Daya Aparatur berbasis Kompetensi;
- d. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, salah satunya dengan melakukan fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kabupaten/Kota terkait;
- e. Mendukung kebijakan nasional tentang Gerakan Non Tunai dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dengan menyediakan pilihan pembayaran Pajak Daerah via EDC Machine, sms Bank Jatim dan Internet Banking;
- f. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- g. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan;
- h. Memanfaatkan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus idle dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah; dan
- i. Mengembangkan pola kemitraan (*public private partnership*) untuk menyelenggarakan pelayanan publik / pembayaran pajak dengan pihak swasta.

#### III.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah



yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap PD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada Tahun 2017 pemerintah telah merubah prinsip money follow function menjadi money follow programme, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini dilakukan untuk mencapai manfaat yang lebih jelas, sehingga menjadi pedoman kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2019.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal daerah Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

- b. Pengelolaan belanja daerah dapat memenuhi aturan earmarking untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10%.
- c. Belanja daerah yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- d. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (Specific Grant: DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, dll) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- f. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2019 dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.11 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020

NO. URUT	URAIAN	REALISASI APBD 2015	REALISASI APBD 2016	REALISASI APBD 2017*)	TARGET RKPD 2018	TARGET APBD 2018	TARGET RKPD 2019	TARGET RKPD 2020 **)
02.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.074.834.724.769,40	16.380.714.233.611,30	19.418.898.256.701,00	16.150.305.308.930,80	20.747.811.244.657,00	20.429.174.000.000,00	20.429.174.000.000,00
02.01.01	BELANJA PEGAWAI	1.805.820.309.242,20	2.327.052.984.097,00	5.677.525.981.400,51	3.816.742.871.197,15	6.503.706.183.043,00	7.386.485.000.000,00	7.386.485.000.000,00
02.01.02	BELANJA BUNGA	2.761.251.967,51	1.753.220.486,24	872.130.814,87	-	4.506.000.000,00	-	-
02.01.03	BELANJA SUBSIDI	-	-	29.655.626.000,00	-	87.000.000.000,00	-	-
02.01.04	BELANJA HIBAH	5.412.737.368.852,31	7.220.422.954.899,00	6.424.967.007.189,05	5.120.847.053.725,83	7.539.047.245.139,00	6.539.189.000.000,00	6.539.189.000.000,00
02.01.05	BELANJA BANTUAN SOSIAL	8.130.227.000,00	8.747.792.000,00	5.004.632.440,56	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
02.01.06	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH/PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	4.667.452.412.362,00	5.015.881.820.822,00	6.073.122.184.703,00	5.682.798.022.526,52	5.421.870.038.025,00	5.355.500.000.000,00	5.355.500.000.000,00
02.01.07	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA	3.149.506.610.015,00	1.787.383.313.823,00	1.155.579.574.823,00	1.419.917.361.481,28	1.086.681.778.450,00	1.033.000.000.000,00	1.033.000.000.000,00
02.01.08	BELANJA TIDAK TERDUGA	28.426.545.330,39	19.472.147.484,07	52.171.119.330,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
02.02	BELANJA LANGSUNG	7.871.472.844.976,34	7.479.239.692.506,77	9.474.359.113.002,35	9.577.378.479.863,60	10.014.244.739.169,00	9.087.133.000.000,00	9.087.133.000.000,00
02.02.01	BELANJA PEGAWAI	662.267.948.780,00	562.836.333.383,00	594.491.324.565,00	782.001.428.483,21	914.052.926.515,00	829.430.549.000,00	829.430.549.000,00
02.02.02	BELANJA BARANG DAN JASA	4.950.884.824.534,74	4.765.809.248.080,77	5.789.812.104.683,45	6.001.303.398.679,93	6.253.344.468.572,00	5.674.414.233.000,00	5.674.414.233.000,00
02.02.03	BELANJA MODAL	2.258.320.071.661,60	2.150.594.111.043,00	3.090.055.683.753,90	2.794.073.652.700,46	2.846.847.344.082,00	2.583.288.218.000,00	2.583.288.218.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	22.946.307.569.745,70	23.859.953.926.118,10	28.893.257.369.703,30	25.727.683.788.794,40	30.762.055.983.826,00	29.516.307.000.000,00	29.516.307.000.000,00

### III.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam dua (2) tahun, proyeksi/target tahun rencana serta satu (1) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020

NO. URUT	URAIAN	REALISASI APBD 2015	REALISASI APBD 2016	REALISASI APBD 2017*)	TARGET RKPD 2018	TARGET APBD 2018	TARGET RKPD 2019	TARGET RKPD 2020 **)
03.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.450.199.381.449,2 <sub>3</sub>	1.497.008.706.344,5 <sub>7</sub>	1.947.402.666.595,9 <sub>9</sub>	1.828.879.483.871,2 <sub>3</sub>	1.669.280.750.066,0 <sub>0</sub>	800.000.000.000,0 <sub>0</sub>	800.000.000.000,0 <sub>0</sub>
03.01.01	SISA LEBIH PERH. ANGG. TA SEBELUMNYA (SILPA)	2.450.199.381.449,2 <sub>3</sub>	1.497.008.706.344,5 <sub>7</sub>	1.858.949.157.295,9 <sub>9</sub>	1.228.879.483.871,2 <sub>3</sub>	1.157.734.259.366,0 <sub>0</sub>	800.000.000.000,0 <sub>0</sub>	800.000.000.000,0 <sub>0</sub>
03.01.02	PENCAIRAN DANA CADANGAN	-	-	88.453.509.300,00	600.000.000.000,00	511.546.490.700,00	-	-
03.01.03	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	-	-	38.547.107.216,00	-	75.000.000.000,00	-	-
03.01.04	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	-	-	1.438.566.666,72	-	-	-	-
03.01.05	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	-	-	-	-	-	-	-
03.02	PENGELUARAAN PEMBIAYAAN DAERAH	235.333.333.333,36	408.333.333.333,36	208.333.333.333,36	100.000.000.000,00	6.531.000.000,00	200.000.000.000,0 <sub>0</sub>	200.000.000.000,0 <sub>0</sub>
03.02.01	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	-	400.000.000.000,00	200.000.000.000,00	-	-	-	-
03.02.02	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	225.000.000.000,00	-	-	100.000.000.000,00	-	200.000.000.000,0 <sub>0</sub>	200.000.000.000,0 <sub>0</sub>
03.02.03	PEMBAYARAN POKOK UTANG	10.333.333.333,36	8.333.333.333,36	8.333.333.333,36	-	6.531.000.000,00	-	-
03.02.04	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	-	400.000.000.000,00	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	2.214.866.048.115,8 <sub>7</sub>	1.088.675.373.011,2 <sub>1</sub>	1.739.069.333.262,6 <sub>3</sub>	1.728.879.483.871,2 <sub>3</sub>	1.662.749.750.066,0 <sub>0</sub>	600.000.000.000,0 <sub>0</sub>	600.000.000.000,0 <sub>0</sub>

### III.2.6 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Pencapaian target kinerja pembangunan daerah dari tahun ketahun diharapkan terus mengalami peningkatan dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di Daerah, sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, untuk mengatasi hal tersebut maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan pendekatan (1) *Fiscal Engineering* yaitu dengan adanya keterbatasan pendapatan pemerintah maka pembiayaan pembangunan diarahkan untuk mampu membangun kemandirian fiskal dengan konsep *expenditure reform* melalui perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan *cost recovery*. Sedangkan untuk sektor produktif, skema *loan agreement* diharapkan bisa menjadi bentuk keberpihakan Negara dalam memberikan rasa adil sekaligus menjadi stimulus bagi UKM untuk mengembangkan diri. Kemudian Skema *Agro Maritim Financing* diarahkan untuk dapat menggeser nilai tambah yang semula berada di industri *off farm* di perkotaan bergeser ke petani di pedesaan. (2) *Creative Financing* yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektor *private* dalam rangka penyediaan layanan berupa barang dan jasa *public* melalui beberapa skema yaitu pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui sinergi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional. Dalam upaya merealisasikan kebijakan pengembangan pembiayaan pembangunan daerah diarahkan pada :

1. Kemitraan Pembiayaan Daerah yang dilakukan antara Pemerintah dan Swasta maupun dengan Dunia Usaha, melalui :
  - a. Mendorong peningkatan keterlibatan swasta dalam mendukung program-program pemerintah daerah. hal ini dapat dilakukan kerjasama pemerintah swasta (KPS) / *Public Private Partnership* (PPP) atau telah diregulasi dengan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU), dan sebagai penjabaran pelaksanaan dari Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 telah diterbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Pelibatan sector *private* dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui berbagai skema kerjasama antara lain *build operate and*

*transfer (BOT), build transfer operate (BTO), leases, concessions* diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas layanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.

- b. Kinerja pembangunan yang telah dicapai tidak terlepas dari dukungan semua pihak, termasuk Dunia Usaha melalui pelaksanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Peran Pemerintah daerah dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah memberikan data-data pembangunan pada bidang-bidang yang dapat menjadi item pilihan swasta untuk menyalurkan dana PKBL dan CSR-nya, sehingga pelaksanaan CSR/PKBL akan sangat membantu dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran tim fasilitasi CSR/PKBL harus lebih ditingkatkan, baik pada level provinsi maupun Kabupaten/kota.

Gambar III.17 Sinergitas Program CSR/PKBL



Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, bahwa program Tanggungjawab Sosial Perusahaan meliputi Bina Lingkungan dan Sosial, Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dan Program Langsung pada masyarakat, yang dalam pelaksanaannya meliputi Bidang Pendidikan, Kesehatan,



Lingkungan, Penanganan Bencana Alam, Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan lain-lain.

Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP), sebagai salah satu bentuk kontribusi dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena kontribusi ini lebih didasarkan kepada kesukarelaan dan fasilitasi yang di berikan oleh pemerintah daerah diarahkan untuk memperluas dan mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah melalui penyediaan data base, sinergi dan sinkronisasi program, joint monitoring, dan pembinaan teknis.

2. Arah Kebijakan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah, melalui kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 13 dan 363-367 tersirat adanya regulasi kerja sama daerah antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah Kab/Kota dan Lembaga baik dalam provinsi maupun luar provinsi.

Kerjasama daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar-daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sedangkan kerja sama sukarela dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah, kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerja sama daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi kerja sama daerah, provinsi akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan daerah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi.

Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini, mengingat perannya dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah, dan melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi terutama daerah yang wilayahnya berbatasan secara administratif dengan daerah yang lain bahkan mitra luar negeri dan lembaga/pihak. Untuk itu sangat diperlukan sebuah kerjasama daerah dengan memperhatikan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip-prinsip yang menuntun

keberhasilan kerjasama tersebut. Terlebih ketika didalamnya adalah pelaksanaan kerjasama yang melibatkan mitra bukan saja antar pemerintah daerah dalam negeri, namun mitra dari luar negeri maupun pihak ketiga.

Isu dan gejala-gejala negatif termasuk egosentris daerah tersebut, tentunya patut mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah baik ditingkat provinsi maupun pusat. Guna melihat kepentingan yang lebih luas bahwa kerjasama daerah bertujuan untuk perekat bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melihat letak dan kondisi geografis Indonesia khususnya Jawa Timur serta perbedaan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik seperti sekarang ini maka hubungan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain patut mendapat perhatian serius.

3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

Kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta maupun kemitraan dengan lembaga non pemerintah merupakan terobosan yang bisa dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Selain itu, pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance* yang dewasa ini telah menjadi trend atau kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tata pemerintahan yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan adanya keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat (*civil society*).

Mendorong keterlibatan lembaga donor internasional dalam pembangunan daerah. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga donor internasional diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, perlu pendataan secara akurat terkait lembaga donor internasional yang beraktivitas di wilayah Jawa Timur sehingga program-program dari lembaga donor internasional dapat disinergikan dengan prioritas pembangunan di masing-masing daerah.

Sementara ini lembaga non pemerintah atau lembaga donor dan NGO yang mempunyai program dan kegiatan yang tercatat di Provinsi Jawa Timur sekitar 22 lembaga non pemerintah atau lembaga donor, namun sesuai catatan dari Kementerian Dalam Negeri sekitar 54 lembaga yang ada di Jawa Timur, sehingga diperlukan kebijakan agar semua lembaga non pemerintah atau NGO yang melakukan kegiatan di Jawa Timur tercatat dan mematuhi peraturan sesuai Petunjuk Umum bagi lembaga Internasional yang akan melakukan kegiatan di Provinsi Jawa Timur, serta melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 bahwa untuk mendukung pencapaian target kinerja pembangunan dapat dilaksanakan kerjasama daerah dengan lembaga non pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, potensi daerah dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah. Sesuai surat Kemendagri nomor 135/8898/SJ tanggal 20 Desember 2014 bahwa daerah agar membentuk Forum Koordinasi Mitra Pembangunan diwilayah dengan surat keputusan Gubernur, sedangkan tugas dan fungsinya sepenuhnya diserahkan ke masing-masing provinsi lokasi program, dengan dasar surat tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/272/KPTS/013/2015 tentang Forum Koordinasi Kemitraan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, isinya menugaskan kepada anggota tim forum koordinasi kemitraan pembangunan, diantaranya melaksanakan sosialisasi forum koordinasi mitra pembangunan, dan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dan Integrasi program / kegiatan pembangunan, dan memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan atau rencana tindak lanjut lembaga internasional / lembaga non pemerintah atau NGO di Jawa Timur.

4. Arah Kebijakan Pengembangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri  
Kebijakan pengembangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri diarahkan untuk digunakan pada bidang-bidang yang mempunyai *derajad certainty* yang tinggi utamanya untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah. Dalam mendorong kesiapan daerah untuk dapat melakukan pinjaman daerah, misalnya melalui obligasi daerah, dimana peruntukannya digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan fasilitas yang bersifat cost recovery. Misalnya, pinjaman daerah untuk membangun infrastruktur bandara, rumah sakit dan jalan tol.
5. Arah kebijakan pengembangan pembiayaan Non Pemerintah khususnya pada Bidang-bidang yang tidak sekedar mempunyai kemampuan Cost Recovery, namun juga mempunyai kemampuan menghasilkan profit untuk didorong agar mampu mandiri dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan prospek pengembangan pelayanan sebagai guarantee atas pinjaman maupun obligasi yang diterbitkan berupa *Corporate Bond*. dengan penerbitan *Corporate Bond* diharapkan mampu menjadi pemicu dalam peningkatan tata kelolanya.

Arah kebijakan pembiayaan non pemerintah juga ditujukan untuk pengembangan pembiayaan yang berbasis modal sosial (religi) masyarakat Jawa Timur yaitu pengembangan ekonomi syariah. Dengan basis modal sosial yang kuat, konsep ekonomi syariah diharapkan mampu menjalankan fungsi intermediasi seperti pada industri jasa keuangan konvensional.

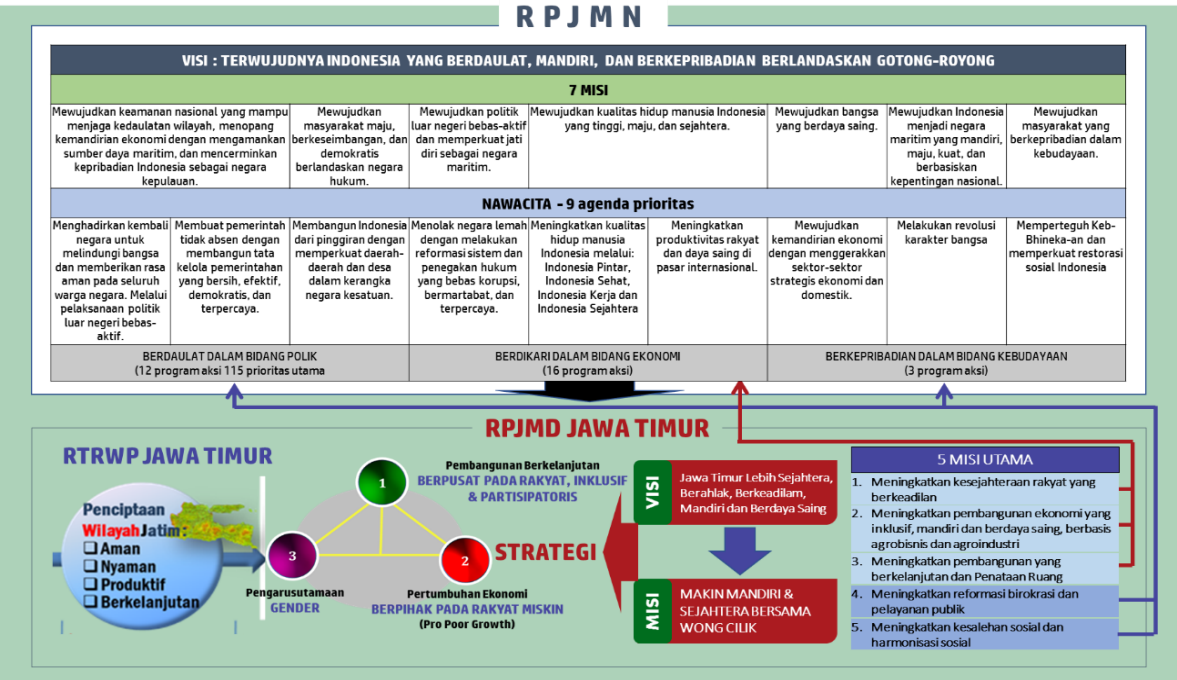
BAB IV  
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke-lima RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dilakukan dalam rangka mencapai visi Pemerintah Provinsi Tahun 2014-2019 yang mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang didalamnya telah memuat keselarasan antara Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dengan RPJMN 2015-2019, yang selanjutnya menjadi acuan pendekatan pelaksanaan pembangunan daerah.

Gambar IV.1 Keselarasan RPJMN 2015 – 2019 dan RPJMD 2014 - 2019



#### IV.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 berpedoman pada misi pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 pada tahun kelima.

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 adalah "*JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN BERAKHLAK*", maka dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Jawa Timur yang terangkai dalam slogan "*Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik*". Lima misi pembangunan Provinsi Jawa Timur terdiri dari:

I. Misi Pertama, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

II. Misi Kedua, yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, Dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri, dan Industrialisasi.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor

perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat

III. Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan Pembangunan yang Berkelanjutan, dan Penataan Ruang

Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan.

IV. Misi Keempat, yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme pelayanan publik.

V. Misi Kelima, yaitu Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial,dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Uraian Misi berikut strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja yang direncanakan adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1 Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 1

MISI 1: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan perluasan	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan kualitas, produktivitas, kompetensi tenaga kerja, dan	Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja,

MISI 1: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
lapangan kerja serta Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan		memperluas kesempatan kerja.	program AYO KERJA (bursa kerja online) , job fair, magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
			Pengembangan usaha produktif melalui kewirausahaan untuk menciptakan tenaga kerja mandiri (NAKERMAN) dan Desa Migran Produktif
			Optimalisasi dan pengembangan kapasitas dan pendayagunaan UPT Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) menuju standar internasional, serta perluasan skala pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berkualitas berbasis kompetensi serta penempatan alumni siswa UPT BLK melalui Bursa Kerja Khusus.
			Strategi untuk menarik pekerja ke sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi serta mendukung "link and match" antara calon pekerja dan perusahaan dalam rangka melakukan perluasan dan penempatan tenaga kerja
			Peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, untuk melakukan usaha produktif
			Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang akan, dan sedang bekerja di luar negeri melalui pembinaan, perlindungan dan pengawasan terpadu serta melakukan fasilitasi dan pembinaan di sektor Penempatan TKI formal maupun informal
			Peningkatan dan pengembangan kerja sama program transmigrasi dengan provinsi/kabupaten



MISI 1: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Meningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	di luar Jawa
			Peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi untuk menciptakan kesempatan kerja baru
	Meningkatnya akses pendidikan menengah yang berkualitas	Meningkatkan akses sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang bermutu dan terjangkau, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependudukan serta kualitas layanan pendidikan.	Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif
			Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
			Penurunan/penghilangan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan, dan sekolah khusus
			Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah
			Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah.
			Peningkatan dan pengembangan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi
	Meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan minat baca masyarakat	Peningkatan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu

MISI 1: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta kualitas layanan pendidikan	Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata
			Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas
			Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi
			Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta
	Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita	Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" di setiap desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).
	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya	Peningkatan standarisasi pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya secara merata
		Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif yang lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengenyampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif
	Meningkatnya Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Meningkatkan akses cakupan terhadap layanan air minum, dan sanitasi yang layak serta ketersediaan perumahan	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi yang layak
			Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
	Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan

MISI 1: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		berbasis komunitas	kepemudaan
		Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi muda	Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS
		Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event	Peningkatan prestasi olahraga
	Menurunnya presentase penduduk miskin	Meningkatkan keterpaduan antar kelompok program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dengan fokus dan lokus tertentu, berbasis perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan akses, jangkauan dan fasilitas infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.	Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di organisasi pemerintah daerah (OPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program
			Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin
			Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin
			Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah
			Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah
			Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya yang menghubungkan

MISI 1: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin
			Peningkatan infrastruktur fisik seperti energi, terminal, pelabuhan, dan lainnya dalam rangka meningkatkan akses dan memudahkan jangkauan perekonomian masyarakat miskin maupun rentan
			Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah
			Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin
			Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, salah satu upaya yang dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil
			Peningkatan kapasitas lembaga - lembaga kemasyarakatan di desa dalam rangka menumbuhkan keberdayaan masyarakat desa.
			Peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan desa terutama dalam hal administrasi dan keuangan melalui pembinaan, fasilitasi dan pengawasan oleh pemerintah daerah
			Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, satu upaya yang dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui peningkatan perekonomian desa dan kawasan

MISI 1: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			perdesaan baik melalui pengembangan ekonomi yang sudah ada maupun dari potensi ekonomi desa yang ada.
	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS	Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan	Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan

Tabel IV.2 Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 2

MISI 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan penanganan ketahanan pangan	Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal
			Pengembangan pengawasan keamanan pangan
			Perbaikan dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan
			Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat
			Peningkatan peran pasar induk dalam distribusi pangan
			Pengendalian harga pangan pokok, dan pengembangan sistem informasi pasar (pasokan, harga dan akses)
	Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kinerja sektor-sektor unggulan	Perluasan jaringan akses permodalan UKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada UKM untuk kelancaran pembiayaan usaha
			Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UKM melalui pemanfaatan idle money
			Peningkatan perluasan jaringan Bank UKM dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UKM
			Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UKM

MISI 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran
			Optimalisasi peran UKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi
			Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional
			Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai
			Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil
			Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk Kopwan dan Koppontren.
			Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non-perbankan
			Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan
			Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan
			Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan
			Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu, dan ikan, untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri)
			Penetapan dan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
			Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan
			Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di kawasan hutan
			Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar

MISI 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindutri, dan industrialisas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang
			Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional
			Revitalisasi Puspa Agro menjadi trading house produk pertanian Jawa Timur
			Perluasan dan peningkatan substansi pameran dagang produk UKM di pasar domestik maupun internasional
			Peningkatan performa standarisasi Industri
			Peningkatan fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki backward dan forward linkage yang tinggi
			Peningkatan fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil
			Peningkatan fasilitasi penumbuhkembangan industri pengolahan agro dan non-agro
			Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor
			Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan
			Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional
			Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata
			Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing
			Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat
			Peningkatan fasilitasi kemitraan UKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar
			Peningkatan penyelenggaraan festival seni budaya lokal pada event nasional dan internasional
			Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya lokal
			Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan



MISI 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			peninggalan bawah air
			Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA
			Pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan
			Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan
			Peningkatan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, nasional, dan internasional
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis	Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis	Peningkatan, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas ekonomi
			Pembangunan jaringan jalan baru untuk menunjang aktivitas ekonomi
			Peningkatan pelayanan perhubungan dan keselamatan transportasi
			Pemenuhan sarana prasarana perhubungan dan peran serta masyarakat dan swasta
			Percepatan pembangunan infrastruktur sumber air, mela-lui penyelesaian hambatan perijinan, pembiayaan, penyediaan lahan dan penang-gulangan masalah sosial.
			Perbaiki sistem monitoring hidrologis dan kualitas air serta sistem informasi sumber daya air.
			Peningkatan pengelolaan infrastruktur sumber air, melalui operasional & pemeliharaan infrastruktur sumber air guna mengembalikan fungsi & kapasitas tampungannya.
			Pengembangan metode pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan.
			Peningkatan layanan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)
			Percepatan pembangunan & rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum dan kawasan produktif
			Peningkatan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan
			Peningkatan koordinasi kegiatan pertambangan/SD Mineral dan Migas
			Peningkatan pemeliharaan dan pemanfaatan air tanah

MISI 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan aneka energi baru terbarukan

Tabel IV.3 Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 3

MISI 3: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang			
Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, serta kelestarian Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Fungsi Lingkungan Hidup	Meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan	Penguatan mekanisme pemantauan & sistem informasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penyelesaian peraturan, sengketa, kasus, tindak pidana serta perdata lingkungan secara tuntas.
			Peningkatan kualitas air & kualitas udara
			Peningkatan tutupan lahan/hutan, melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan, rehabilitasi lahan kritis/terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem dan pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3 serta kawasan pesisir dan laut.
			Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3)
	Terwujudnya Kepastian Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi	Percepatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang Fasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang

Tabel IV.4 Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 4

MISI 4: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN

MISI 4: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik	Meningkatnya pemanfaatan TIK dan layanan informasi publik	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif	Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan terkini
	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengamanan informasi	Meningkatkan kualitas pengamanan informasi secara tepat dan akurat	Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengamanan informasi
	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Meningkatkan kualitas data dan informasi	Peningkatan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan
	Meningkatnya masyarakat serta pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pro-gram serta kegiatan pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas OPD	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas OPD
	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola pemerintah yang baik secara konsisten	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat
			Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
			Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu

MISI 4: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan efesiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik
	Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah	Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional	Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi , sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya
	Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Menguatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)	Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis tata kelola pemerintahan, responsif, transparan dan akuntabel.
			Menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana
			Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam
			Pemenuhan kebutuhan pada saat status darurat bencana yang pendanaannya dialokasikan khusus untuk BPBD yang dititipkan melalui dana BTT (BPKAD) dan pencairannya melalui SK Status Keadaan Darurat Bencana
	Meningkatnya peran DPRD sesuai fungsinya	Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya	Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan

Tabel IV.5 Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 5

MISI 5: Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menjamin terciptanya iklim demokrasi yang kondusif	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan	Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM, penguatan	Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum
			Peningkatan peran serta masyarakat

MISI 5: Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	hak politik dan penanganan konflik sosial.	koordinasi antar pemangku kepentingan serta mengoptimalkan edukasi politik terhadap masyarakat	dalam penciptaan keamanan dan ketertiban melalui mekanisme <i>community policing</i>
	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang taat hukum	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum	Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, terma-suk mencegah tumbuhnya per-masalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba, serta terorisme
			Optimalisasi pencegahan terhadap pelanggaran Perda melalui peningkatan pengetahuan masyarakat serta penguatan aparaturnegakan perda
	Meningkatnya pelestarian seni budaya	Meningkatkan kualitas seni dan budaya	meningkatkan pengembangan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal

IV.2 Isu Strategis Pembangunan Tahun 2019

IV.2.1 Isu Strategis Pembangunan Provinsi yang berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Nasional

IV.2.1.1 Isu Strategis Pembangunan Provinsi yang berhubungan dengan Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, yaitu:

1. Peningkatan kualitas vokasional dan keahlian khusus
2. Peningkatan kualitas pendidikan menengah, dan PK-PLK
3. Peningkatan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stanting, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih
4. Peningkatan kualitas dan produktivitas ketenagakerjaan serta “Link and Match” antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh

IV.2.1.2 Isu Strategis Pembangunan Provinsi yang berhubungan dengan Prioritas Nasional 2: Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, yaitu:

1. Penguatan konektivitas darat, laut dan udara untuk mendukung kawasan potensial ekonomi dan Pembangunan Desa
2. Pengembangan dan Pengelolaan Telekomunikasi dan Informatika

IV.2.1.3 Isu Strategis Pembangunan Provinsi yang berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Nasional 3 : Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif, yaitu:

1. Peningkatan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
2. Peningkatan Nilai Tambah Agroindustri , Agromaritim dan Daya Saing Koperasi dan UKM
3. Akselerasi Kepariwisata
4. Peningkatan Produktifitas Sumber Daya Manusia Pertanian, Industri dan Pariwisata
5. Pengembangan Industrialisasi Berbasis Ekonomi Digital

IV.2.1.4 Isu Strategis Pembangunan Provinsi yang berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Nasional 4 : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, yaitu:

1. Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi, Stabilisasi Harga Pangan, Penganeka-ragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan
2. Peningkatan Ketahanan Energi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Mineral
3. Peningkatan Tata Kelola Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir
4. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

IV.2.1.5 Isu Strategis Pembangunan Provinsi yang berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Nasional 5 : Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilu, yaitu:

1. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban terhadap issue potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba
2. Kesuksesan Pemilu Serentak

#### IV.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah

##### IV.2.2.1 Pendidikan

1. Peningkatan layanan dan sarana prasarana Pendidikan Menengah serta Pendidikan khusus dan pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)
2. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Kasar Angka dan Partisipasi Murni
3. Peningkatan SDM guru maupun tenaga kependidikan
4. Pemenuhan kesejahteraan GTT dan PTT

##### IV.2.2.2 Kesehatan

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Penurunan kasus stunting di masyarakat
3. Pencegahan penyakit menular dan tidak menular
4. Penyediaan akses terhadap air minum dan sanitasi layak

##### IV.2.2.3 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1. Belum optimalnya pelayanan air untuk irigasi dengan kondisi saat ini masih mencapai 82,82%
2. Masih luasnya Daerah Genangan Banjir dengan kondisi yang tertangani saat ini masih mencapai 67,62%
3. Kurang mantapnya infrastruktur jalan provinsi
4. Peningkatan daya dukung area resapan air

##### IV.2.2.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Penyediaan infrastruktur perumahan dan permukiman perkotaan
2. Penyediaan rumah tidak layak huni di perdesaan;
3. Penanganan Permukiman kumuh di perkotaan

##### IV.2.2.5 Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

1. Penanganan konflik di masyarakat dan radikalisme
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang politik, serta kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi
3. Pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan Narkoba
4. Peningkatan pengawasan terhadap tenaga kerja asing dan ormas asing



#### IV.2.2.6 Sosial

1. Penanganan korban pasung dan pasca pasung
2. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyalahgunaan NAPZA
3. Peningkatan sosialisasi program perlindungan sosial
4. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin
5. Peningkatan sarana prasarana dan daya tampung PMKS

#### IV.2.2.7 Ketenagakerjaan

1. Penyediaan lapangan kerja sebagai upaya penurunan angka pengangguran
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi angkatan kerja
3. Link & Match antara kebutuhan industrial perusahaan dengan kompetensi angkatan kerja
4. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan

#### IV.2.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Akhiri kesenjangan Ekonomi, Politik dan Pengambilan Keputusan Perempuan
2. Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
3. Akhiri perdagangan orang

#### IV.2.2.9 Pangan

1. Berkurangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan
2. Pengembangan teknologi tepat guna
3. Peningkatan komoditi pangan non beras

#### IV.2.2.10 Lingkungan Hidup

1. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi capaian IKLHD Provinsi Jawa Timur saat ini sebesar 65,54
2. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan persampahan dan pengelolaan limbah B3.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat dan atau dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan.

#### IV.2.2.11 Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan

#### IV.2.2.12 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dengan sasaran Rumah Tangga Miskin di pedesaan
2. Pembangunan daerah tertinggal
3. Peningkatan peran LPMD/K (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan) serta KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)
4. Peningkatan kompetensi SDM Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

#### IV.2.2.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2. Bonus Demografi
3. Peningkatan koordinasi lintas program dalam mewujudkan KB yang responsive gender
4. Fasilitasi pengembangan kualitas diri usia remaja (sekolah) melalui wadah/forum PIK R dan BKR

#### IV.2.2.14 Perhubungan

1. Tingginya angka kejadian kecelakaan transportasi transportasi darat, laut, dan udara
2. Rendahnya peran transportasi dalam menyediakan konektivitas dan meningkatkan daya saing wilayah khususnya pada wilayah Jawa Timur Kepulauan
3. Belum terwujudnya perencanaan, dan pembangunan sektor transportasi yang sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah
4. Perlunya menjaga kualitas kompetensi SDM sektor transportasi
5. Masih rendahnya kinerja pelayanan transportasi yang dirasakan oleh masyarakat

#### IV.2.2.15 Komunikasi dan Informatika

1. Peningkatan kesenjangan (digital device) dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal pedesaan dan perkotaan
2. Peningkatan pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Penyediaan sarana dan prasarana monitoring isi siaran di media televisi dan radio

#### IV.2.2.16 Koperasi, usaha kecil, dan menengah

1. Standarisasi bagi produk UKM dan Koperasi yang memiliki daya saing
2. Kemudahan akses ketersediaan bahan baku
3. Penguatan jaringan produksi yang mendukung peningkatan produktivitas koperasi dan UKM
4. Peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM
5. Updating data koperasi dan UKM
6. Penguatan kelembagaan koperasi
7. Dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UKM, khususnya bagi yang feasible tapi tidak bankable
8. Perluasan dan pendalaman pasar koperasi dan UKM

#### IV.2.2.17 Penanaman Modal

1. Penyebaran pelaksanaan Penanaman Modal di daerah;
2. Peningkatan realisasi investasi terhadap izin prinsip yang diterbitkan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
4. Penyiapan lahan untuk kawasan industri bagi perusahaan PMA/PMDN baru;

#### IV.2.2.18 Kepemudaan dan Olah Raga

1. Peningkatan Daya saing tenaga kerja pemuda di pasaran dan dunia kerja
2. Advokasi terhadap organisasi kepemudaan
3. Standarisasi sentra olahraga

#### IV.2.2.19 Kebudayaan

1. Peningkatan inovasi cipta karya seni dalam mengangkat budaya khas daerah
2. Peningkatan minat generasi muda terhadap kesenian dan budaya.

#### IV.2.2.20 Perpustakaan

1. Peningkatan budaya minat baca
2. Peningkatan kelembagaan perpustakaan desa/kelurahan
3. Penambahan jumlah tenaga pustakawan

#### IV.2.2.21 Kearsipan

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung arsip
2. Peningkatan penyimpanan arsip berbasis teknologi/e arsip

3. Penambahan jumlah Tenaga Arsiparis
4. Peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan arsip/dokumen.

#### IV.2.2.22 Kelautan dan Perikanan

1. Peningkatan stok sumber daya ikan (SDI)
2. Pengendalian biaya pakan
3. Pencegahan alih fungsi lahan perikanan budidaya untuk kegiatan non - perikanan.
4. Pencegahan pelanggaran armada penangkapan ikan pada jalur penangkapan
5. Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang
6. Optimalisasi oproduktivitas garam
7. Peningkatan kapasitas bahan baku ikan untuk kebutuhan industri pengolahan ikan

#### IV.2.2.23 Pariwisata

1. Optimalisasi pemasaran pariwisata
2. Pengembangan industri pariwisata dan destinasi wisata

#### IV.2.2.24 Pertanian

1. Kebutuhan Daging Sapi Nasional
2. Penyelamatan Betina Produktif
3. Kebutuhan Susu Segar
4. Fluktuasi harga telur dan daging ayam
5. Penyebaran Penyakit Hewan Menular Strategis

#### IV.2.2.25 Kehutanan

1. Penyediaan infrastruktur pengelolaan kawasan hutan;
2. Peningkatan daya saing komoditi produk kehutanan.

#### IV.2.2.26 Energi dan Sumberdaya Mineral

1. Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi terbarukan dalam pemenuhan pasokan kebutuhan listrik di Jawa Timur yang ditandai dengan masih adanya Kabupaten yang memiliki rasio elektrifikasi di bawah 80% dan 22 desa belum berlistrik
2. Masih adanya wilayah dengan potensi pertambangan yang belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan

#### IV.2.2.27 Perdagangan

1. Peningkatan perdagangan dalam negeri terutama perdagangan antar provinsi dan peningkatan perdagangan luar negeri melalui promosi dan mini dagang

#### IV.2.2.28 Perindustrian

1. Substitusi Bahan Baku Impor melalui diversifikasi produk
2. Peningkatan daya saing industri melalui peningkatan mutu dan standarisasi produk

#### IV.2.2.29 Ketransmigrasian

1. Optimalisasi penempatan peminat transmigrasi
2. Optimalisasi pelaksanaan program ketransmigrasian

#### IV.2.2.30 Kesekretariatan Daerah

1. Optimalisasi pembentukan Kelompok Budaya Kinerja
2. Penerapan Standar secara maksimal seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal), SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik),
3. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen SAKIP
4. Peningkatan produk informasi, penayangan/dokumentasi kegiatan Gubernur, Wagub, dan Sekda di lingkup pemerintah pusat maupun daerah,
5. Sosialisasi kebijakan maupun kegiatan pemerintah kepada masyarakat
6. Optimalisasi tindak lanjut kesepakatan bersama yang ditandatangani
7. Pembinaan kinerja LPPD

#### IV.2.2.31 Pengawasan

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparat Pengawasan

#### IV.2.2.32 Perencanaan

1. Optimalisasi integrasi dokumen perencanaan dan penganggaran melalui pengintegrasian ePlanning dan eBudgeting;
2. Optimalisasi pelaksanaan evaluasi dan pengendalian program/kegiatan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan.

#### IV.2.2.33 Kepegawaian

1. Penataan SDM aparatur yang belum terdistribusi sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi
2. Evaluasi Kinerja pegawai ASN Pemprov Jatim belum berlandaskan pada Sistem Penilaian kinerja berbasis Sistem.

#### IV.2.2.34 Penanggulangan Bencana

1. Peningkatan sosialisasi kesadaran masyarakat terhadap bencana
2. Peningkatan koordinasi penanggulangan bencana
3. Optimalisasi penanganan infrastruktur dan sosial ekonomi pasca bencana

#### IV.2.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2019, disajikan pada tabel, sebagai berikut;

RUMUSAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN  
HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
1.	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.						
a.	Membuka akses informasi dalam setiap penyusunan kebijakan, anggaran maupun program pembangunan dalam tata laksana organisasi, SDM Aparatur, dan akuntabilitas pemerintahan.	Program Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kab/ kota Jatim dengan predikat AKIP minimal BB	19 Kab/Kota		Biro Organisasi	√
			Jumlah Perangkat Daerah Prov. Jatim dengan predikat AKIP minimal A	67 OPD		Biro Organisasi	
			Jumlah Kelompok Budaya Kinerja (KBK) aktif di Perangkat Daerah Prov. Jatim dan Kab/ kota se Jatim	220 KBK		Biro Organisasi	
			Persentase ASN Setda. Prov. Jatim yang meningkat kompetensinya	30 %		Biro Organisasi	
		Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/ Kota yang diasistensi dalam penyusunan dokumen AKIP	105 PD dan Kab/Kota	Jawa Timur	Biro Organisasi	
		<i>Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN</i>	<i>Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan</i>	<i>100 %</i>		BKD	√
		Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	Persentase database kepegawaian yang lengkap dan akurat	100 %	Se Jawa Timur	BKD	√
b.	Open government partnership telah menjadi agenda pemerintahan yang perlu ditindaklanjuti dengan mekanisme partisipasi rakyat dalam setiap tahapan pembangunan daerah: pembentukan perda, penyusunan APBD, dan pelayanan publik.	Program Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur	Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub Penjabaran tentang APBD dan PAPBD	4 Dokumen		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	√
		Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD Subbidang Anggaran I	Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perubahan APBD	2 dokumen	Kota Surabaya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD Subbidang Anggaran II	Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perubahan APBD	2 dokumen	Kota Surabaya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD Subbidang Anggaran III	Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perubahan APBD	2 dokumen	Kota Surabaya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Jumlah perangkat daerah Prov dan kab/ kota yang telah menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan	93 PD		Biro Organisasi	
			Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pelayanan Prima (SKPD Prov dan Kab/ Kota)	90 PD		Biro Organisasi	



No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Pembinaan dan evaluasi penerapan peraturan ketatalaksanaan pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah Prov. dan Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi terkait tata naskah dinas	93 PD dan Kab/Kota	Jawa Timur	Biro Organisasi	
			Jumlah Perangkat Daerah Prov. dan Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi terkait Pakaian Dinas sesuai pedoman	93 PD dan Kab/Kota		Biro Organisasi	
			Jumlah Perangkat Daerah Prov. yang melaksanakan tata hubungan kerja sesuai pedoman	93 PD dan Kab/Kota		Biro Organisasi	
			Jumlah Perangkat Daerah Prov dan Kab/Kota yang melaksanakan standarisasi sarana prasarana kedinasan	93 PD dan Kab/Kota		Biro Organisasi	
			Jumlah Perangkat Daerah Prov. dan Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi dalam penyusunan SOP sesuai pedoman	93 PD dan Kab/Kota		Biro Organisasi	
		Pembinaan dan evaluasi dalam rangka serta pelaksanaan standarisasi pelayanan	Jumlah Unit Pelayanan Prov. dan Kab/Kota yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan SPP	108 PD dan Kab/Kota	Jawa Timur	Biro Organisasi	
			Jumlah Perangkat Daerah Prov. dan Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi dalam penyusunan SPM	44 PD dan Kab/Kota		Biro Organisasi	
			Jumlah Perangkat Daerah Prov. dan Kab/Kota yang telah menyusun SKM sesuai pedoman	65 PD dan Kab/Kota		Biro Organisasi	
		Replikasi inovasi pelayanan publik	Jumlah unit pelayanan yang difasilitasi dalam rangka mengembangkan inovasi pelayanan publik	90 %	Jawa Timur	Biro Organisasi	
		<i>Program Layanan Persidangan</i>	<i>Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi persidangan</i>	<i>78, 50 %</i>	Kota Surabaya	Sekretariat DPRD	√
		Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	85 kali	Kota Surabaya	Sekretariat DPRD	√
c.	Pusat pengaduan masyarakat dan call center yang berkaitan dengan setiap bentuk pelayanan publik di Jawa Timur, sehingga rakyat merasa dekat dan memiliki pemerintahan yang sangat mengayomi warganya.	Program Informasi Publik	Jumlah layanan informasi dan saluran media		10 jenis	Dinas Komunikasi dan Informatika	√
d.	Percanaan berbasis virtual (e-Government) dan pelayanan berbasis informasi dan teknologi komunikasi untuk seluruh layanan publik di birokrasi Jawa Timur.	Layanan Informasi Publik	Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat	100 %	Jawa Timur	Dinas Komunikasi dan Informatika	√
		Pengelolaan Informasi Publik	Jumlah Pengelolaan Informasi Publik	4 bimbingan teknis	Jawa Timur	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Penyebaran Informasi melalui Media Publik	Jumlah penyebaran informasi	10 jenis	Jawa Timur	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Program Komunikasi Publik	Jumlah lembaga komunikasi dan informasi yang diberdayakan	290 Lembaga	290 Lembaga	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Manajemen Opini Publik	Jumlah Dokumen Isu Aktual	54 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Kemitraan Lembaga Kehumasan Pemerintah	Jumlah partisipasi aktif lembaga	80 kelompok	Jawa Timur	Dinas Komunikasi	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			kehumasan pemerintah dalam kegiatan kemitraan komunikasi publik			dan Informatika	
e.	Memperpendek mata rantai pelayanan perizinan dengan penguatan pelayanan terpadu.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100 %	Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kab Jember, Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	√
		Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT P2T	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT P2T	80 %	Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kab Jember, Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Jumlah persetujuan/perizinan yang diterbitkan	7.000 Dokumen	Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kab Jember, Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan dan Pengaduan Masyarakat	Jumlah rekomendasi / non izin yang dikeluarkan	21.000 Dokumen	Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kab Jember, Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kab Jember, Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
f.	Pusat pengaduan masyarakat dalam kerang membangun Rumah Layanan Publik.						X
g.	Melakukan Penataan Daerah dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 35, dimana terdapat 5 (lima) Kota yang jumlah kecamatannya sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yakni Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Madiun, dan Kota Batu. Disamping itu terdapat 6 (enam) Kabupaten yang perlu mendapat prioritas untuk dilakukan penataan daerah yaitu Kab. Malang, Kab. Jember, Kab. Sidoarjo, Kab. Bojonegoro, dan Kab. Sumenep.						X
h.	Mendorong Pemerintah Provinsi untuk lebih maksimal melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil Pemerintah Pusat, khususnya dalam hal koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, dan Desa serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	40 %	Jawa Timur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	Jumlah Dokumen	3 dokumen	Jawa Timur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
i.	Memperkuat peran dan fungsi Bakorwil sebagai wakil Pemerintah Provinsi, dengan tugas dan wewenang yang memungkinkan Bakorwil dapat melakukan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi serta pengawasan dan evaluasi atas semua perencanaan dan pelaksanaan di wilayah kerjanya.						
j.	Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada camat untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.						X
k.	Mendorong Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan dan memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara tidak menambah beban kepada rakyat.						
l.	Program peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal;						
m.	Program peningkatan efisiensi dan efektifitas katatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan public;						
n.	Program peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas OPD;						
o.	Program optmalisasi pengelolaan keuangan dan asset daerah secara terpadu;						
p.	Program peningkatan Kapasitas Anggota Legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan;						
q.	Program pengembangan reformasi birokrasi untuk menghasilkan pelayanan public yang lebih jelas tolok ukurnya						
2.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI						
a.	Program pendidikan politik masyarakat.	<i>Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi</i>	<i>Persentase Peran Ormas/LSM</i>	8 %	Jawa Timur	Bakesbangpol	√
		Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Di Jawa Timur	Jumlah kegiatan Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di Jawa Timur	1 kegiatan	Jawa Timur	Bakesbangpol	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		<i>Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik</i>	<i>Persentase Peran serta Pemilih Pemula dalam Pengembangan Etika dan Budaya Politik</i>	0, 08 %	Jawa Timur	Bakesbangpol	
			<i>Persentase Pemahaman Peserta Kegiatan Pengembangan Etika dan Budaya Politik</i>	90 %	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Pemantapan Etika Politik bagi Generasi Muda	Jumlah Pelajar setingkat SMA yang mengikuti kegiatan Pemantapan Etika Politik	450 pelajar	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penerapan budaya politik yang demokratis	Jumlah Tokoh Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penerapan Budaya Politik yang Demokratis	390 tokoh	Jawa Timur	Bakesbangpol	
b.	Program pengembangan wawasan kebangsaan bagi pelajar	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	<i>Persentase Pemahaman Peserta Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	90 Persen	Jawa Timur	Bakesbangpol	√
			<i>Jumlah Kelembagaan yang melaksanakan Penguatan 4 Konsensus Nasional</i>	80 lembaga	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Pengembangan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental	3 kegiatan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Revitalisasi dan aktualisasi Ideologi nilai-nilai Pancasila	Jumlah kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Ideologi nilai-nilai Pancasila.	3 kegiatan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Penguatan Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah fasilitasi Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kab./Kota	6 Kegiatan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Pembentukan dan Penguatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Kader Bela Negara	1 Kegiatan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Jambore generasi muda antar umat beragama	Jumlah pemuda lintas agama yang mengikuti Jambore	150 Orang	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah kegiatan pemberdayaan kerukunan umat beragama	2 Kegiatan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
c.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	<i>Persentase Pemahaman Peserta Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	90 Persen	Jawa Timur	Bakesbangpol	√
			<i>Jumlah Kelembagaan yang melaksanakan Penguatan 4 Konsensus Nasional</i>	80 lembaga	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Pengembangan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental	3 kegiatan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Revitalisasi dan aktualisasi Ideologi nilai-nilai Pancasila	Jumlah kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Ideologi nilai-nilai Pancasila.	3 kegiatan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Penguatan Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah fasilitasi Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kab./Kota	6 Kegiatan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Pembentukan dan Penguatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Kader Bela Negara	1 Kegiatan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Jambore generasi muda antar umat beragama	Jumlah pemuda lintas agama yang mengikuti Jambore	150 Orang	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah kegiatan pemberdayaan kerukunan umat beragama	2 Kegiatan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
d.	Program kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat terhadap kebangsaan	<i>Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Jumlah Kejadian terkait Konflik Sosial</i>	50 jumlah kejadian	Jawa Timur	Bakesbangpol	√
			<i>Jumlah laporan Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Konflik</i>	25 laporan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
			<i>Persentase Pemahaman Peserta Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika</i>	75 %	Jawa Timur	Bakesbangpol	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jatim	Jumlah Laporan Pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas di Jatim	12 Laporan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur	Jumlah Laporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial	3 Laporan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial di Masyarakat	Jumlah laporan Penguatan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial di Masyarakat	4 Laporan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
e.	Penataan dan pengaturan komunitas kos - kosan / pemonudukan pelajar dan						X
f.	mahasiswa secara terintegrasi dengan Kabupaten/Kota agar terhindar dari						X
g.	budaya negatif pergaulan bebas.	<i>Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Jumlah Kejadian terkait Konflik Sosial</i>	<i>50 jumlah kejadian</i>	Jawa Timur	Bakesbangpol	√
			<i>Jumlah laporan Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Konflik</i>	<i>25 laporan</i>	Jawa Timur	Bakesbangpol	
			<i>Persentase Pemahaman Peserta Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika</i>	<i>75 %</i>	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Pencegahan gangguan penyakit masyarakat khususnya pencegahan penyalahgunaan narkotika	Jumlah kegiatan Pencegahan gangguan penyakit masyarakat khususnya pencegahan penyalahgunaan narkotika	3 kegiatan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
h.	Program peningkatan kapasitas personil Satpol PP, peningkatan	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah anggota Satlinmas dan masyarakat yang sigap dan tanggap dalam Pamswakarsa dan penanggulangan bencana	900 orang			√
		Pemberdayaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana	Jumlah Satuan Linmas dan masyarakat yang telah mengikuti pelatihan / simulasi penanggulangan bencana	200 Orang	Madiun, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Nganjuk, Tulungagung, Magetan, Kota Malang, Bondowoso, Lumajang, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, Kota Mojokerto, Sampang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Probolinggo	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Pemberdayaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa (Community Policing)	Jumlah Satuan Linmas dan masyarakat yang telah mengikuti pelatihan / simulasi pengamanan swakarsa (Community Policing)	200 Orang	Madiun, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Nganjuk, Tulungagung, Magetan, Kota Malang, Bondowoso, Lumajang, Jombang, Bojonegoro,	Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Pamekasan, Kota Mojokerto, Sampang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Probolinggo		
		Pemberdayaan Satlinmas, masyarakat dan Anggota Pemadam Kebakaran.	Jumlah Satlinmas, masyarakat dan anggota pemadam kebakaran yang telah mengikuti pelatihan / simulasi pemadam kebakaran	200 Orang	Madiun, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Nganjuk, Tulungagung, Magetan, Kota Malang, Bondowoso, Lumajang, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, Kota Mojokerto, Sampang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Probolinggo	Satuan Polisi Pamong Praja	
i.	Eselonisasi, dan Peningkatan fungsi Pol PP dan Linmas dalam menegakkan	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Penegakan Perda	Persentase Penegakan Perda yang ditangani	5%			√
		Penegakkan Peraturan Daerah	Jumlah operasi penertiban pada masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda	19 kali	Madiun, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Nganjuk, Tulungagung, Magetan, Kota Malang, Bondowoso, Lumajang, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, Kota Mojokerto, Sampang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Probolinggo	Satuan Polisi Pamong Praja	
j.	peraturan - peraturan di daerah dan melindungi masyarakat	Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum	Prosentase Penanganan Masalah Hukum		85 %	Biro Hukum	√
		Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	Jumlah Pemberian Saran/ Pertimbangan Hukum	Kota Surabaya	100 Masalah Hukum	Biro Hukum	
			Jumlah Pemberian Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin		65 Kasus	Biro Hukum	
k.	Fasilitasi kualitas penyelenggaraan keamanan kepada TNI dan Polri, termasuk fasilitasi keberadaan kegiatan TNI dan Polri	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kejadian terkait Konflik Sosial	50 jumlah kejadian	Jawa Timur	Bakesbangpol	√
			Jumlah laporan Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Konflik	25 laporan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
			Persentase Pemahaman Peserta Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan	75 %	Jawa Timur	Bakesbangpol	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			<i>Narkotika</i>				
		Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jatim	Jumlah Laporan Pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas di Jatim	12 Laporan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur	Jumlah Laporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial	3 Laporan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
m.	Memperkuat stabilitas kawasan dengan sinergitas kebijakan nasional dan lokal yang terbangun melalui komunikasi politik harmoni dengan :	<i>Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik</i>	<i>Persentase Peran serta Pemilih Pemula dalam Pengembangan Etika dan Budaya Politik</i>	0, 08 %	Jawa Timur	Bakesbangpol	√
a)	Menjaga stabilitas politik secara internal dan eksternal.		<i>Persentase Pemahaman Peserta Kegiatan Pengembangan Etika dan Budaya Politik</i>	90 %	Jawa Timur	Bakesbangpol	√
		Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penerapan budaya politik yang demokratis	Jumlah Tokoh Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penerapan Budaya Politik yang Demokratis	390 tokoh	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		<i>Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi</i>	<i>Persentase Peran Ormas/ LSM</i>	8 %	Jawa Timur	Bakesbangpol	
			<i>Jumlah tersusunnya Peta Politik Jawa Timur</i>	<i>2 peta</i>	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Forum Silaturahmi Ormas/LSM di Jawa Timur	Jumlah Ormas/LSM yang mengikuti Forum Silaturahmi	120 ormas/lsm	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Pengembangan Demokratisasi dan Partisipasi Politik bagi Supra dan Infrastruktur Politik	Jumlah Infrastruktur Politik yang mengikuti kegiatan Penguatan Demokratisasi	50 lembaga	Jawa Timur	Bakesbangpol	
b)	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang memperkuat sinergitas antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat serta dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.	<i>Program Layanan Persidangan</i>	<i>Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi persidangan</i>	78, 50 %	Kota Surabaya	Sekretariat DPRD	√
		Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	85 kali	Kota Surabaya	Sekretariat DPRD	
c)	Penguatan sinergitas Forpimda untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan serta peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan Provinsi Jawa Timur.	<i>Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Jumlah Kejadian terkait Konflik Sosial</i>	<i>50 jumlah kejadian</i>	Jawa Timur	Bakesbangpol	√
			<i>Jumlah laporan Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Konflik</i>	<i>25 laporan</i>	Jawa Timur	Bakesbangpol	
			<i>Persentase Pemahaman Peserta Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika</i>	75 %	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jatim	Jumlah Laporan Pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas di Jatim	12 Laporan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
		Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur	Jumlah Laporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial	3 Laporan	Jawa Timur	Bakesbangpol	
3.	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						
a.	Memantapkan kebijakan Government Business Related						x
b.	Peningkatan basis produksi UMKM	Program Pemasaran Produk Koperasi UKM	Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi	5%	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan	√



No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
	yang berjalan terpadu dengan usaha besar.		pemasarannya (target 5%)			UKM Provinsi Jawa Timur	
		Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM	Jumlah K-UKM yang difasilitasi kemitraan usaha	320 unit	Bojonegoro, Jember, Kota Madiun, Malang, Pamekasan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
c.	Membangun koperasi dan UMKM yang mandiri dan berdaya saing melalui mekanisme pembiayaan yang kompetitif, baik dalam skala banking system maupun yang non bankable.	Program Peningkatan Akses Pembiayaan koperasi dan UKM	Persentase K-UKM yang mengajukan pembiayaan	5,50%	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	√
		Penguatan Akses Permodalan K-UKM	Jumlah K-UKM yang disosialisasikan akses permodalan	2.020 unit	Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota Kediri, kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Sampang, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Usaha Syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah	Jumlah Usaha Syariah yang dikuatkan melalui KSP dan Pembiayaan Syariah	2.290 unit	Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Malang, Mojokerto, Pacitan, Pasuruan, Sumenep, Tuban	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Kualitas Layanan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya	810 unit	Bojonegoro, Jombang, Kota Batu, kota Madiun, Kota malang, Ngawi, Probolinggo, Sumenep, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM	Jumlah usaha simpan pinjam Koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya	410 unit	Bojonegoro, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Surabaya, Madiun, Malang, Mojokerto, Ngawi, Ponorogo, Sidoarjo, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
d.	Memfasilitasi lahirnya generasi milenial di sektor koperasi dan UMKM.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat baik	60%	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	ü
		Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM	Persentase peserta diklat yang berkualitas	80%	Malang	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM	Jumlah peserta diklat Koperasi UKM	1.500 orang	Malang	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja	Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan	1.560 orang	Malang	Dinas Koperasi dan	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		bagi Koperasi UKM	keterampilan kerja bagi Koperasi UKM			UKM Provinsi Jawa Timur	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM	1) Persentase Koperasi Aktif 2) Jumlah Koperasi UKM yang mendapatkan legalitas usaha	70% 100 unit	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM	Jumlah K-UKM yang dinilai kualitas kinerjanya	250 unit	Bojonegoro, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Malang, Malang, Pamekasan, Tulungagung		
e.	Trading house untuk Koperasi dan UMKM khususnya di sektor agrobisnis, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri kreatif.	Program Pemasaran Produk Koperasi UKM	Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi pemasarannya	5%	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	√
		Penguatan informasi pasar bagi K-UKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar	1.160 unit	Kota Batu, Kota Malang	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri	Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui pameran	320 unit	Bojonegoro, Jember, Madiun, Malang, Pamekasan, Blitar	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk KUKM	320 unit	Kota Surabaya, Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	1)Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi 2)Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya	15 unit	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
f.	Bantuan permodalan, promosi produk, dan intervensi pembiayaan melalui mekanisme yang transparan dan peningkatan kualitas produksi.	Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	1)Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi 2)Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya	15 unit	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	√
		Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produk dan jaringan usahanya	390 unit	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo,	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
		Standardisasi Produk Koperasi dan UKM	Jumlah produk KUKM yang distandardisasi	15 unit	Bondowoso, Gresik, Kediri, Lumajang, Madiun, Ngawi, Probolinggo, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Program Pemasaran Produk Koperasi UKM	Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi pemasarannya	5%	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	ü
		Penguatan informasi pasar bagi K-UKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar	1.160 unit	Kota Batu, Kota Malang	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri	Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui pameran	320 unit	Bojonegoro, Jember, Madiun, Malang, Pamekasan, Blitar	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk KUKM	320 unit	Kota Surabaya, Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	1)Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi 2)Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya	15 unit	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produk dan jaringan usahanya	390 unit	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Program Peningkatan Akses Pembiayaan	Persentase K-UKM yang mengajukan	5,50%	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan	ü

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		koperasi dan UKM	pembiayaan			UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Akses Permodalan K-UKM	Jumlah K-UKM yang disosialisasikan akses permodalan	2.020 unit	Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota Kediri, kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Sampang, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Usaha Syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah	Jumlah Usaha Syariah yang dikuatkan melalui KSP dan Pembiayaan Syariah	2.290 unit	Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Malang, Mojokerto, Pacitan, Pasuruan Sumenep, Tuban	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Kualitas Layanan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya	810 unit	Bojonegoro, Jombang, Kota Batu, kota Madiun, Kota malang, Ngawi, Probolinggo, Sumenep, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM	Jumlah usaha simpan pinjam Koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya	410 unit	Bojonegoro, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Surabaya, Madiun, Malang, Mojokerto, Ngawi, Ponorogo, Sidoarjo, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
g.	Membangun jaringan UMKM yang bertaraf regional MEA dan global.	Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	1)Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi 2)Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya	15 unit	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	√
		Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produk dan jaringan usahanya	390 unit	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun,	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
		Program Pemasaran Produk Koperasi UKM	Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi pemasarannya (target 5%)	5%	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan informasi pasar bagi K-UKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar	1.160 unit	Kota Batu, Kota Malang	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
h.	Pelatihan berkelanjutan agar pelaku UMKM mampu mengubah mindset dan culture set menuju daya saing nasional dan global.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat baik	60%	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	√
		Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM	Persentase peserta diklat yang berkualitas	80%	Malang	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM	Jumlah peserta diklat Koperasi UKM	1.500 orang	Malang	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM	Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM	1.560 orang	Malang	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
i.	Pengembangan agrobisnis, revitalisasi infrastruktur agar agropolitan dan minapolitan dapat berkembang karena memiliki daya saing secara produk maupun ekonomi.						
j.	Penguatan dan pengembangan kebaradaan KPD-KPD bagi jejaring perdagangan nasional dan regional serta internasional melalui penguatan fungsi:						
a)	meningkatkan dan mengembangkan perdagangan antar pulau,	Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	1)Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi 2)Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya	15 unit	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	√
		Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri	Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui pameran	320 unit	Bojonegoro, Jember, Madiun, Malang, Pamekasan, Blitar	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk KUKM	320 unit	Kota Surabaya, Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
b)	memperkuat jaringan pasar produk potensial JawaTimur,	Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	1)Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi 2)Persentase K-UKM yang difasilitasi	15 unit	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	√

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			usahanya				
		Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produk dan jaringan usahanya	390 unit	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Program Pemasaran Produk Koperasi UKM	Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi pemasarannya (target 5%)	5%	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan informasi pasar bagi K-UKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar	1.160 unit	Kota Batu, Kota Malang	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
c)	memotong rantai distribusi perdagangan,						x
d)	meningkatkan dan mengembangkan UKM.	Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	1)Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi 2)Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya	15 unit	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	√
		Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produk dan jaringan usahanya	390 unit	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun,	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
		Standardisasi Produk Koperasi dan UKM	Jumlah produk KUKM yang distandardisasi	15 unit	Bondowoso, Gresik, Kediri, Lumajang, Madiun, Ngawi, Probolinggo, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE	Jumlah K-UKM yang diberdayakan melalui Business Dev. Centre	500 unit	Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya	965 unit	Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Sampang, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang difasilitasi untuk penguatan dan perlindungan usahanya	600 unit	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Restrukturisasi usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya	300 unit	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan,	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	



No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
		Program Pemasaran Produk Koperasi UKM	Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi pemasarannya	5%	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	√
		Penguatan informasi pasar bagi K-UKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar	1.160 unit	Kota Batu, Kota Malang	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri	Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui pameran	320 unit	Bojonegoro, Jember, Madiun, Malang, Pamekasan, Blitar	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk KUKM	320 unit	Kota Surabaya, Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	1)Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi 2)Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya	15 unit	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produk dan jaringan usahanya	390 unit	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
k.	Peningkatan dan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan pembinaan serta izin	Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	1)Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi 2)Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya	15 unit	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	√

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
	usaha yang sederhana, pendampingan untuk pengembangan usaha, serta akses pembiayaan dengan perbankan yang ringan.						
		Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produk dan jaringan usahanya	390 unit	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Standardisasi Produk Koperasi dan UKM	Jumlah produk KUKM yang distandardisasi	15 unit	Bondowoso, Gresik, Kediri, Lumajang, Madiun, Ngawi, Probolinggo, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE	Jumlah K-UKM yang diberdayakan melalui Business Dev. Centre	500 unit	Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya	965 unit	Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Sampang, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang difasilitasi untuk penguatan dan perlindungan usahanya	600 unit	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang,	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
		Restrukturisasi usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya	300 unit	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Program Peningkatan Akses Pembiayaan koperasi dan UKM	Persentase K-UKM yang mengajukan pembiayaan	5,50%	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	ü
		Penguatan Akses Permodalan K-UKM	Jumlah K-UKM yang disosialisasikan akses permodalan	2.020 unit	Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota Kediri, kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Sampang, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Usaha Syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah	Jumlah Usaha Syariah yang dikuatkan melalui KSP dan Pembiayaan Syariah	2.290 unit	Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Malang, Mojokerto, Pacitan, Pasuruan Sumenep, Tuban	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Kualitas Layanan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya	810 unit	Bojonegoro, Jombang, Kota Batu, kota Madiun, Kota malang, Ngawi, Probolinggo, Sumenep, Tuban,	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM	Jumlah usaha simpan pinjam Koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya	410 unit	Tulungagung Bojonegoro, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Surabaya, Madiun, Malang, Mojokerto, Ngawi, Ponorogo, Sidoarjo, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
1.	Penguatan UMKM, terdapat 6,8 juta UMKM menyumbang 54% terhadap PDRB Jawa Timur. Namun hanya 3% yang memenuhi syarat untuk bersaing di pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, penguatan UMKM terus didorong khususnya kepastian tempat berusaha bagi PKL, dengan memperkuat koordinasi, motivasi, integrasi, sinkroniasi, dan sinergitas dengan Pemerintah Kab/Kota.						√
m.	Program pengembangan system pendukung UMKM;	Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	1)Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi 2)Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya	15 unit	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	√
		Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produk dan jaringan usahanya	390 unit	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Standardisasi Produk Koperasi dan UKM	Jumlah produk KUKM yang distandardisasi	15 unit	Bondowoso, Gresik,	Dinas Koperasi dan	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Kediri, Lumajang, Madiun, Ngawi, Probolinggo, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	UKM Provinsi Jawa Timur	
		Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE	Jumlah K-UKM yang diberdayakan melalui Business Dev. Centre	500 unit	Sidoarjo	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya	965 unit	Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Sampang, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang difasilitasi untuk penguatan dan perlindungan usahanya	600 unit	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Restrukturisasi usaha K-UKM	Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya	300 unit	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
n.	Program Pemberdayaan skala mikro;						X
o.	Program peningkatan usaha dan akses permodalan bagi perempuan	Program Peningkatan Akses Pembiayaan koperasi dan UKM	Persentase K-UKM yang mengajukan pembiayaan	5,50%	Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa	√

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
	melalui Pengembangan Koperasi wanita;					Timur	
		Penguatan Akses Permodalan K-UKM	Jumlah K-UKM yang disosialisasikan akses permodalan	2.020 unit	Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota Kediri, kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Sampang, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Usaha Syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah	Jumlah Usaha Syariah yang dikuatkan melalui KSP dan Pembiayaan Syariah	2.290 unit	Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Malang, Mojokerto, Pacitan, Pasuruan Sumenep, Tuban	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Kualitas Layanan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya	810 unit	Bojonegoro, Jombang, Kota Batu, kota Madiun, Kota malang, Ngawi, Probolinggo, Sumenep, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
		Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM	Jumlah usaha simpan pinjam Koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya	410 unit	Bojonegoro, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Surabaya, Madiun, Malang, Mojokerto, Ngawi, Ponorogo, Sidoarjo, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	
4.	URUSAN BUDAYA DAN PARIWISATA						
a.	Pelatihan ekonomi dan bisnis untuk memperkuat daya saing pelaku usaha sektor agrobisnis, pariwisata dan industri kreatif.	Program pengembangan ekonomi kreatif	Prosentase produk ekonomi kreatif yang difasilitasi pemasarannya	33,33%	Pasuruan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	√
		Penguatan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta pelaku usaha Ekonomi kreatif	200 orang	Pasuruan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Penguatan Produk Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha Ekonomi kreatif	60 usaha	Pasuruan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Program Pengembangan Industri Pariwisata	Prosentase usaha pariwisata yang dikembangkan		Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Penguatan Usaha Sarana Pariwisata	Jumlah usaha sarana pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya	128 usaha	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Penguatan Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah Pelaku usaha Jasa yang	90 usaha	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			ditingkatkan kualitasnya			dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Penguatan Sumber Daya Manusia Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih tersertifikasi	150 orang	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
b.	Pengembangan modal melalui pembiayaan yang kopetitif.						X
c.	Fasilitasi dan promosi melaui KPD-KPD sekaligus membuka gerai palayanan agrobisnis, pariwisata dan industri kreatif Jawa Timur.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah KSPP (Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi) yang dikembangkan	3 KSPP	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	√
		Ekstentifikasi Destinasi Wisata Budaya Dan Buatan	Jumlah daya tarik wisata budaya dan buatan yang dikembangkan	23 DTW	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Ekstentifikasi Destinasi Wisata Alam	Jumlah daya tarik wisata alam yang dikembangkan	4 DTW	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Destinasi	Jumlah Masyarakat dan tata kelola pariwisata yang dikembangkan di destinasi pariwisata provinsi	420 orang	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
d.	Proyek nasional pengembangan destinasi pariwisata kawasan Bromo, Tengger, dan Semeru,	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	3 KSPP	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	√
		Promosi Dalam Negeri	Jumlah promosi pariwisata dalam negeri yang telah dilaksanakan dan diikuti	- (10 Kali)	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Promosi Pariwisata Luar Negeri	Jumlah promosi pariwisata luar negeri yang telah diikuti	- (4 kali)	Luar Negeri	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Penguatan sarana promosi dan informasi pariwisata	Jumlah Jenis Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata	19 jenis	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Pendataan dan pemetaan pasar	Jumlah dokumen analisa pasar	2 dokumen	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah KSPP (Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi) yang dikembangkan	3 KSPP	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Ekstentifikasi Destinasi Wisata Budaya Dan Buatan	Jumlah daya tarik wisata budaya dan buatan yang dikembangkan	23 DTW	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Ekstentifikasi Destinasi Wisata Alam	Jumlah daya tarik wisata alam yang dikembangkan	4 DTW	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Destinasi	Jumlah Masyarakat dan tata kelola pariwisata yang dikembangkan di destinasi pariwisata provinsi	420 orang	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Program pengembangan ekonomi kreatif	Prosentase produk ekonomi kreatif yang difasilitasi pemasarannya	33,33%	Pasuruan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Penguatan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta pelaku usaha Ekonomi kreatif	200 orang	Pasuruan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	



No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Penguatan Produk Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha Ekonomi kreatif	60 usaha	Pasuruan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Program Pengembangan Industri Pariwisata	Prosentase usaha pariwisata yang dikembangkan		Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Penguatan Usaha Sarana Pariwisata	Jumlah usaha sarana pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya	128 usaha	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Penguatan Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah Pelaku usaha Jasa yang ditingkatkan kualitasnya	90 usaha	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
		Penguatan Sumber Daya Manusia Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih tersertifikasi	150 orang	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa timur	
5.	URUSAN KEPASTIAN HUKUM						
a.	Pengembangan keahlian pembentukan peraturan perundang-undangan.	Program Pembentukan Produk Hukum Provinsi	Prosentase pembentukan Produk Hukum Provinsi Jawa Timur	85 %	Kota Surabaya	Biro Hukum	√
		Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Provinsi	Prosentase Perda yg Diundangkan	60 %	Kota Surabaya	Biro Hukum	
			Jumlah Pergub yg Diundangkan	100 Produk			
b.	Melakukan inventarisasi kebutuhan regulasi dan penelaahan mengenai regulasi yang menghambat kemajuan serta memberatkan masyarakat.	Program Pembentukan Produk Hukum Provinsi	Prosentase pembentukan Produk Hukum Provinsi Jawa Timur	85 %	Kota Surabaya	Biro Hukum	√
		Pengkajian Produk Hukum Provinsi	Jumlah Pengkajian Produk Hukum Provinsi yang dihasilkan	25 Nota Dinas, Surat, Telaahan Hukum	Kota Surabaya	Biro Hukum	
c.	Program pengembangan regulasi di bidang pemerintahan, infrastruktur, Sumber Daya Alam, pendidikan, kesehatan dan pelayaann publik.						x
6.	URUSAN TENAGA KERJA, SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEMISKINAN						
a.	Program peningkatan investasi yang mendorong investor di Jawa Timur untuk mendirikan perusahaan guna memperluas kesempatan kerja						
b.	Penguatan Balai Latihan kerja sebagai pusat pelatihan yang lengkap, modern dan Inovatif yang mampu mencetak tenaga kerja trampil plus.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	% kejuruan lembaga pelatihan yang memenuhi standar mutu pelatihan di LPK	65%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√
			% penempatan tenaga kerja magang dalam negeri	72%			
			% tenaga kerja magang ke luar negeri	28%			
		Standarisasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemagangan	Jumlah Modul PBK yg tersusun	5 Modul	Kota Batu, Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pemagangan Luar Negeri yg	350 Orang			

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			mengikuti seleksi				
		Pembinaan Kelembagaan Pelatihan dan Pemberdayaan SDM Kepelatihan dan Instruktur	Jumlah LPK yang dibina	350 LPK	Kota Batu, Kota Surabaya, Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah LPK yang difasilitasi dan diakreditasi	50 LPK			
			Jumlah instruktur yg ditingkatkan kompetensinya	200 Orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Singosari	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% penempatan lulusan pelatihan	32 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Singosari Malang	Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan	1 Gedung	Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah pengadaan alat / sarana	15 Unit		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			ISO	1 Paket		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Jember	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Jember	Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan	2 Gedung	Jember	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah pengadaan alat / sarana	20 Unit			
			ISO	2 paket			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Pasuruan	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Pasuruan	Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan	2 Gedung	Pasuruan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah pengadaan alat / sarana	10 Unit			
			ISO	1 Paket			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Mojokerto					
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Mojokerto	Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan	2 Gedung;15	Mojokerto	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah pengadaan alat / sarana	20 Unit			
			ISO	1 Paket			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Jombang	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Jombang	Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan	2 Kegiatan	Jombang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah pengadaan alat / sarana	10 Unit			
			ISO	1 Paket			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Tuban	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Tuban	Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan	2 gedung	Tuban	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Iso	1 paket			
			Jumlah pengadaan alat / sarana	7 unit			
			%lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan / kompetensi	0%			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Nganjuk	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Nganjuk	Jumlah pengadaan alat / sarana	13 Unit	Nganjuk	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan;	1 Gedung			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Surabaya					
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Surabaya	Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan	6 Gedung	Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah pengadaan alat / sarana	121 unit			
			ISO	1 Sertifikat			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Sumenep	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84 0			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Sumenep	ISO	1 Paket	Sumenep	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan;ISO	2 Gedung			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Situbondo	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Situbondo	ISO	1 paket	Situbondo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan;	3 gedung			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Kediri	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Kediri	Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan	3 Gedung	Kediri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah pengadaan alat / sarana	15 unit			
			ISO	1 paket			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Tulungagung					
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Tulungagung	Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan	1 Gedung	Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah pengadaan alat / sarana	18 Unit			
			ISO	1 Paket			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Madiun	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Madiun	Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan	3 1 Gedung	Madiun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah pengadaan alat / sarana	0 Unit			
			ISO	1 Paket			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Ponorogo	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Ponorogo	Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan	4 Gedung	Ponorogo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah pengadaan alat / sarana	20 Unit			
			ISO	1 Paket			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Bojonegoro	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Bojonegoro	Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan	1 Gedung	Bojonegoro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK PPPTKLN Wonojati Malang	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	85%			

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			berbasis masyarakat				
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK PPPTKLN Wonojati	Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan	1 Gedung	Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah pengadaan alat / sarana	8 Unit			
			ISO	1 Paket			
c.	Program Life skill dengan memperbanyak kursus-kursus baik jenis kursus maupun frekwensi dan daya jangkau sampai ke pelosok pedesaan guna menciptakan wirausaha muda di pedesaan dan terciptanya lapangan kerja baru berbasis proyeksi kebutuhan tenaga kerja trampil 3 (tiga) tahun ke depan.						√
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Singosari	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% penempatan lulusan pelatihan	32 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di PK Singosari Malang	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	128 orang	Kota Batu, Kota Malang, Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Singosari Malang	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	96 Orang	Kota Batu, Kota Malang, Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	160 Orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Jember	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Jember	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	320 Orang	Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja	Jumlah peserta pelatihan berbasis	80 orang	Banyuwangi,	Dinas Tenaga Kerja	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jember	masyarakat		Bondowoso, Jember, Lumajang	dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	160 orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Pasuruan	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Pasuruan	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	288 orang	Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Pasuruan, Probolinggo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Pasuruan	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	340 Orang	Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Pasuruan, Probolinggo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan swadana	80 Orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Mojokerto	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Mojokerto	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	304 Orang	Kota Mojokerto, Mojokerto	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan swadana	80 Orang			
			Jumlah peserta uji kompetensi	80 Orang			
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Mojokerto	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	120 Orang	Kota Mojokerto, Mojokerto	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat;	96 Orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Jombang	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	464 orang	Jombang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Jombang					
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jombang	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	96 orang	Jombang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	60 orang			
			Jumlah peserta pelatihan Swadana	0 orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Tuban	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Tuban	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	384 orang	Lamongan, Tuban	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Tuban	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	48 orang	Lamongan, Tuban	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat;	48 orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Nganjuk	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Nganjuk	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	208 orang	Nganjuk	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Nganjuk	Jumlah peserta pelatihan swadana	32 orang	Nganjuk	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat;	160 orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Surabaya	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	32 orang	Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Surabaya					
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	0 orang			
			Jumlah peserta pelatihan Swadana	0 orang			
			Pelatihan kerja bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (bekerjasama dengan DIII - ITS)	112 orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Sumenep	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84 0			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Pelatihan Kerja Sumenep	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	560 orang	Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Sumenep	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	60 orang	Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Situbondo	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Pelatihan Kerja Situbondo	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	540 orang	Banyuwangi, Situbondo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Situbondo	Jumlah peserta pelatihan swadana	32 orang	Banyuwangi, Situbondo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat;	100 orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Kediri	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Kediri	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	112 orang	Blitar, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis	32 orang			

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			kompetensi				
			Jumlah Peserta pelatihan swadana	20 orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Tulungagung	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Tulungagung	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	500 Orang	Trenggalek, Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Tulungagung	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	80 Orang	Trenggalek, Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	208 Orang			
			Jumlah peserta pelatihan swadana	120 Orang			
			Jumlah kelompok usaha mandiri yang terbentuk	20 Kelompok			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Madiun	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Madiun	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	320 Orang	Kota Madiun, Madiun, Ngawi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Madiun	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	200 Orang	Kota Madiun, Madiun, Ngawi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetens	128 Orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Ponorogo	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Ponorogo	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	400 Orang	Magetan, Pacitan, Ponorogo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Ponorogo	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	0 Orang	Magetan, Pacitan, Ponorogo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	96 Orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Bojonegoro	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Bojonegoro	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	400 Orang	Bojonegoro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Bojonegoro	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	112 Orang	Bojonegoro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan swadana	20 Orang			
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	32 Orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK PPPTKLN Wonojati Malang	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT PK PPPTKLN Wonojati Malang	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	384 Orang	Kota Batu, Kota Malang, Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK PPPTKLN Wonojati	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	80 Orang	Kota Batu, Kota Malang, Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	32 Orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	70%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Hasil survey IKM pelayanan produktivitas	80, 75 %			
			% pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas	13%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan Pembinaan Produktivitas	Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan dan peningkatan manajemen Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan.	400 Orang	Jember, Kota Surabaya, Lamongan,	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya			Magetan, Mojokerto, Pacitan, Pasuruan, Probolinggo		
			;Jumlah peserta pelatihan yang dimonitoring	400 Orang			
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PPTK Surabaya	Jumlah peserta pelatihan peningkatan produktivitas	150 Orang	Blitar, Kota Batu, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Ngawi, Ponorogo, Probolinggo, Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			;Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	350 Orang			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di Bidang Pelatihan dan Produktivitas	Jumlah peserta pelatihan dan pemagangan dalam negeri	250 orang	Gresik, Jombang, Kota Surabaya, Mojokerto, Pasuruan		
		Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN				
			% binaan di sektor informal yg berhasil menyerap tenaga kerja baru				
			Jumlah mitra kerja jejaring bursa kerja				
			Hasil survey IKM pelayanan penempatan tenaga kerja				
		Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Informal	Jumlah peserta WUB yang mengikuti terapan TTG	60 orang	Kota Batu, Kota Malang, Pasuruan		
			Jumlah peserta TKM yang mengikuti TTG	60 orang			
			Jumlah peserta usaha mandiri yang dievaluasi	50 orang			
			Jumlah Kab/Kota asal petugas lapangan yang mengikuti evaluasi	38 Kab./Kota			
			Jumlah petugas lapangan yang mengikuti temu konsultasi	50 orang			
d.	Penguatan Program padat karya berkelanjutan, disamping untuk menggiatkan budaya gotong royong sekaligus juga bernilai ekonomis.						x
e.	Penataan, Pembinaan dan Identifikasi Tenaga Kerja Indonesia dari Jawa Timur yang lewat Daerah lain.	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN	310.000 Orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√
			% binaan di sektor informal yg berhasil menyerap tenaga kerja baru	85 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah mitra kerja jejaring bursa kerja	550 perusahaan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Hasil survey IKM pelayanan penempatan tenaga kerja	78		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Jumlah Peserta dan lokasi Sosialisasi AKAD;	600 orang	Jawa Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah Peserta dan lokasi Orientasi Pra Pemberangkatan Program AKAD;	350 orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Pengguna TKA;	100 orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			Jumlah lokasi movev pengguna Tenaga Kerja Asing	38 Lokasi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
f.	Regulasi yang mengatur manajemen tenaga kerja daerah sehingga tidak hanya menjadi penonton di kampung sendiri						
g.	Pemberian kesempatan kerja sebanyak-banyaknya sehingga menghindarkan TKW sektor rumah tangga di luar daerah maupun luar negeri	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di UPT P3TKI	Hasil survey IKM pelayanan penempatan tenaga kerja	80		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√
			% TKI yang ditempatkan pada jabatan informal (Penata Laksana Rumah Tangga)	65%			
			% TKI yang ditempatkan pada jabatan formal	35%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia	Jumlah TKI / CTKI dan PPTKIS yang dilayani LPTSA	15.000 Orang	Jember, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, Pasuruan, Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta Pembekalan Akir Pemberangkatan (PAP)	0 CTKI			
			Jumlah peserta sosialisasi mekanisme penempatan TKI keluar negeri	0 Orang			
			Jumlah dokumen SPR yang dilayani	5.000 Dokumen			
			Jumlah dokumen rekomendasi Perjanjian Penempatan (PP) yang dilayani	1.000 1.000 Dokumen			
			Jumlah peserta bimtek AKAN	300 Orang			
			Jumlah Dokumen Penempatan TKI ke Luar Negeri	12 Dokumen			
h.	Program perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (TKI) dan pembinaan pasca menjadi TKI	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di UPT P3TKI	Hasil survey IKM pelayanan penempatan tenaga kerja	80		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√
			% TKI yang ditempatkan pada jabatan informal (Penata Laksana Rumah Tangga)	65%			
			% TKI yang ditempatkan pada jabatan formal	35%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Revitalisasi dan Pengembangan Kelembagaan, Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri	Jumlah TKI yang dilayani di Kedatangan TKI di bandara juanda	40.000 Orang	Banyuwangi, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah TKI bermasalah yang ditangani	190 CTKI/TKI			
			Jumlah peserta bimtek pemberdayaan TKI purna	150 orang			
			Jumlah lembaga penempatan yang dibina;	0 Lembaga			
			Jumlah peserta sosialisasi pencegahan TKI non prosedural	1.800 Orang			
		Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN				

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			% binaan di sektor informal yg berhasil menyerap tenaga kerja baru				
			Jumlah mitra kerja jejaring bursa kerja				
			Hasil survey IKM pelayanan penempatan tenaga kerja				
		Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Jumlah Peserta dan lokasi sosialisasi Pencegahan TKI Non Prosedural ;	800 orang	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
			Jumlah Peserta dan lokasi pemulangan TKI bermasalah dari luar negeri	5.000 orang			
a)	Terus menerus melakukan pembinaan dan pembenahan serta penguatan berbagai OPD yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	32%	Kota Surabaya	BAPPEDA Prov Jatim	√
		Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen	1 dokumen			
		Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Yang Terbentuk	40 lembaga		Dinas Pemberdayaan Masy dan Desa Prov Jatim	
			Jumlah RTS Yang Memiliki Usaha	500 jumlah RTS			
		Penanggulangan Kemiskinan Kelompok program pemberdayaan masyarakat	Jumlah program/kegiatan yang diinventarisir terkait program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kelompok program pemberdayaan masyarakat	10 program/kegiatan	Kota Surabaya		
			Jumlah peserta rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelompok program pemberdayaan masyarakat	202 orang			
b)	Pengembangan informasi pengurangan kemiskinan yang real time dengan cara memanfaatkan	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	32%	Kota Surabaya	BAPPEDA Prov Jatim	√

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
	data PPLS (TNP2K) dengan menindaklanjuti update data kelompok miskin, rentan miskin, dan hampir miskin.						
		Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen	1 dokumen			
c)	Memperhatikan daerah-daerah yang menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan tanpa melupakan daerah-daerah kantong kemiskinan yang dijadikan prioritas kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Timur.	<i>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</i>	<i>Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan</i>	32%	Kota Surabaya	BAPPEDA Prov Jatim	√
		Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen	1 dokumen			
		<i>Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan</i>	<i>Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Yang Terbentuk</i>	<i>40 lembaga</i>		Dinas Pemberdayaan Masy dan Desa Prov Jatim	
			<i>Jumlah RTS Yang Memiliki Usaha</i>	<i>500 jumlah RTS</i>			
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal	Jumlah Desa sangat tertinggal dan Desa Tertinggal yang diberikan bantuan	75 Desa	Jombang, Kediri		
			Jumlah pengelola kegiatan yang diberikan orientasi	300 orang			
			Jumlah peserta rakor	300 Orang			
			Jumlah pendamping yang mendampingi pengelolaan kegiatan	75 orang			
q.	Harus ada solusi antisipatif dalam rangka mewujudkan daya saing SDM di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini karena kualitas tenaga kerja di Jawa Timur yang didominasi sekitar 70% lulusan pendidikan SD & SMP.	<i>Program Pendidikan Menengah Kejuruan</i>	<i>APM SMK</i>	33, 74 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Manajemen Kelembagaan SMK Mini	Jumlah tenaga terampil yang ada di SMK Mini	60.000 orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
r.	Keterampilan yang dapat memenuhi tuntutan dunia kerja serta standarisasi yang dibuktikan dengan sertifikasi berstandar internasional menjadi kebutuhan yang mendesak untuk disegerakan.	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	<i>APM SMK</i>	33, 74 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik SMK	Jumlah siswa SMK bersertifikasi kompetensi yang terserap di dunia Usaha dan dunia Industri	20.702 siswa	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
			Jumlah Lembaga SMK yang berstandar LSP	228 Lembaga	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
s.	Perlunya antisipasi perlambatan ekonomi sebagai akibat gejolak perekonomian global maupun penurunan daya beli konsumen						x
t.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur supaya melaksanakan perencanaan sasaran						x



No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
	pembangunan Jawa Timur Tahun 2019 sesuai dengan perhitungan Bappenas.						
u.	Harus ada solusi inovatif untuk mengurangi angka kemiskinan di pedesaan,						x
7.	URUSAN PELAYANAN DASAR (PENDIDIKAN DAN KESEHATAN)						
a.	Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun.	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan	65 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Penyelenggaraan BOS Pendidikan Khusus	Jumlah siswa pendidikan khusus yang mendapatkan bantuan operasional sekolah	19.170 Siswa	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Program Pendidikan Menengah Atas	APM SMA	34, 73 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMA	Jumlah siswa yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Menengah Atas	379.567 Siswa	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Program Pendidikan Menengah Kejuruan	APM SMK	33, 74 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Pendidikan SMK	Jumlah siswa miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan di SMK	18.799 Siswa	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
b.	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga di sekolah	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan	65 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Penyelenggaraan SMAN Olahraga Sidoarjo	Jumlah peserta didik yang memiliki bakat istimewa untuk menjadi olahragawan yang berprestasi tingkat regional, nasional, internasional	101 siswa	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
c.	Pemantaban dan peningkatan prestasi anak didik baik khususnya prestasi	Program Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta Didik	Persentase siswa yang berprestasi	21 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Penyelenggaraan Mutu Prestasi Akademik	Jumlah siswa didik yang mengikuti lomba prestasi akademik	1.100 orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan Mutu Prestasi Non Akademik	Jumlah siswa didik yang mengikuti lomba prestasi Non Akademik	2.200 orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Bina Prestasi Peserta Didik	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan UPT Bina Prestasi Peserta Didik	5 Paket	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
d.	Ujian Nasional (UN) sebagai tolok ukur prestasi belajar.	Program Pendidikan Menengah Atas	APM SMA	34, 73 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA	Jumlah guru untuk pemenuhan 8 standart nasional pendidkan SMA	16.885 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
			Prosentase sekolah pelaksana UNBK SMA	100 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
			Jumlah sekolah yang menyelenggarakan K13	580 Lembaga	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
			Jumlah siswa yang mendapatkan pembelajaran dan pelatihan yang bermutu	1.264 Siswa	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
e.	Program pengembangan akreditasi sekolah.	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan	65 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik PK-PLK	Jumlah lembaga pendidikan khusus yang memenuhi standar akreditasi	110 Lembaga	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Program Pendidikan Menengah Atas	APM SMA	34, 73 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA	Jumlah guru untuk pemenuhan 8 standart	16.885 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			nasional pendidikan SMA				
			Prosentase sekolah pelaksana UNBK SMA	100 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
			Jumlah sekolah yang menyelenggarakan K13	580 Lembaga	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
			Jumlah siswa yang mendapatkan pembelajaran dan pelatihan yang bermutu	1.264 Siswa	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		<i>Program Pendidikan Menengah Kejuruan</i>	<i>APM SMK</i>	33, 74 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Mutu dan Relevansi Pendidikan SMK	Jumlah peserta kegiatan yang dkembangkan dan diselaraskan kualitas pendidikan SMK dengan Industri	7.169 orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
f.	Mewujudkan zonasi sekolah dengan menegakan peraturan tentang tata ruang (RT/RW) bagi peningkatan mutu anak didik.	<i>Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu TIK Pendidikan</i>	<i>Persentase sekolah yang menerapkan TIK dalam proses belajar mengajar</i>	11, 52 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP)	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan UPT TIKP	5 Paket	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
g.	Meningkatkan mutu pendidik diantaranya melalui penuntasan sertifikasi bagi guru.	<i>Program Pengembangan dan peningkatan mutu Kompetensi Guru dan Siswa SMK</i>	<i>Persentase guru dan siswa SMK yang lulus uji kompetensi keahlian</i>	30 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan di UPT PPK untuk Guru dan Siswa SMK	Jumlah Guru /Siswa SMK di Jawa Timur yang meningkat dan lulus uji kompetensinya	30.000 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		<i>Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan</i>	<i>Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PKLK berkualifikasi S1/D4 atau setara</i>	99 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Manajemen Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kesejahteraan dan motivasi pengabdiannya	9.400 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Pendidikan Lanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru yang ditingkatkan kualifikasi pendidikan S2 sesuai dengan kompetensinya	99 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan SDM dan Kinerjanya	2.070 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang terpilih berprestasi dan berdedikasi	1.561 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan Manajemen Karir Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kualitas sesuai dengan prestasi yang dicapai dan standart kinerja	29.768 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
h.	Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya, Perilaku Mulia/Budi Pekerti dan kejujuran.						
i.	Mengembangkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.	<i>Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)</i>	<i>Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan</i>	65 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Mutu Sarana dan Prasarana PK - PLK	Jumlah lembaga pendidikan khusus yang mendapatkan bantuan sarana prasarana	60 Lembaga	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan BOS Pendidikan Khusus	Jumlah siswa pendidikan khusus yang mendapatkan bantuan operasional sekolah	19.170 Siswa	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik PK-PLK	Jumlah lembaga pendidikan khusus yang memenuhi standar akreditasi	110 Lembaga	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Mutu dan Relevansi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Jumlah Guru PK/MKKS yang mengikuti pelatihan/workshop/FGD (Focus Group Discusion) dalam peningkatan	1.378 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			mutu/pelayanan pendidikan khusus dan inklusif				
			Jumlah Guru MKKS yang mengikuti pelatihan/workshop/FGD (Focus Group Discusion) dalam peningkatan mutu/pelayanan pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terpecil dan Terbelakang)	228 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
j.	Mengoptimalkan tehnologi komunikasi dan informasi untuk tujuan pendidikan	Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu TIK Pendidikan	Persentase sekolah yang menerapkan TIK dalam proses belajar mengajar	11, 52 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Penyelenggaraan Metode Belajar Mengajar Menggunakan TIK	Jumlah Guru yang memanfaatkan TIK dalam pengembangan metode pembelajaran	2.000 orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Penyebarluasan dan Pemanfaatan TIK Pendidikan	Jumlah Guru yang akses penyebaran dan pemanfaatan TIK Pendidikan	1.500 guru	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP)	Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan UPT TIKP	5 Paket	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
k.	Meningkatkan manajemen pendidikan, antara lain kebijakan penerimaan siswa, partisipasi biaya sekolah.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Prosentase bantuan yang disalurkan tepat waktu	100 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Manajemen BOS Pendidikan	Jumlah peserta kegiatan koordinasi pengelolaan BOS Dikdas	225 oang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
l.	Meningkatkan pendidikan berbasis ketrampilan ( life skill).	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	APM SMK		Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Mutu dan Relevansi Pendidikan SMK	Jumlah peserta kegiatan yang dkembangkan dan diselaraskan kualitas pendidikan SMK dengan Industri		Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
m.	Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Timur kedepan bebas Buta Huruf;						X
n.	Perlu desain pendidikan inklusi, yang mengakomodasi semua anak-anak dari segala lapisan, terutama anak-anak yang tereksklusi (terpinggirkan), baik karena keterbatasan ekonomi (kemiskinan) maupun keterbatasan fisik (anak dengan kebutuhan khusus/disable)	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan	65 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Mutu Sarana dan Prasarana PK - PLK	Jumlah lembaga pendidikan khusus yang mendapatkan bantuan sarana prasarana	60 Lembaga	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan BOS Pendidikan Khusus	Jumlah siswa pendidikan khusus yang mendapatkan bantuan operasional sekolah	19.170 Siswa	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik PK-PLK	Jumlah lembaga pendidikan khusus yang memenuhi standar akreditasi	110 Lembaga	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Mutu dan Relevansi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Jumlah Guru PK/MKKS yang mengikuti pelatihan/workshop/FGD (Focus Group Discusion) dalam peningkatan mutu/pelayanan pendidikan khusus dan inklusif	1.378 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
			Jumlah Guru MKKS yang mengikuti pelatihan/workshop/FGD (Focus Group	228 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			Discusion) dalam peningkatan mutu/pelayanan pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terpececil dan Terbelakang)				
		<i>Program Pendidikan Menengah Atas</i>	<i>APM SMA</i>	34, 73 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) SMA	Jumlah siswa SMA Miskin di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan bantuan	20.961 Siswa	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		<i>Program Pendidikan Menengah Kejuruan</i>	<i>APM SMK</i>	33, 74 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Pendidikan SMK	Jumlah siswa miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan di SMK	18.799 Siswa	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
o.	pembangunan di bidang kesehatan, perlu adanya program antisipasi terhadap wabah/virus apa saja, yang bisa datang kapan saja serta dapat mengancam kesehatan masyarakat Jawa Timur	Program Pengendalian Penyakit	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemantauan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	100%			√
		Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis pemberantasan penyakit menular dan wabah	38 kab/kota	Kab Sumenep, Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Pacitan, Malang	Dinas Kesehatan	
p.	Meningkatkan pengembangan infrasturktur pendidikan SLTA / MA / SMK agar mampu menampung ledakan permintaan masyarakat akan pendidikan, disertai dukungan sarana pendidikan yang layak dalam rangka terwujudnya pendidikan yang berkualitas.	<i>Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)</i>	<i>Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan</i>	65 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Mutu Sarana dan Prasarana PK - PLK	Jumlah lembaga pendidikan khusus yang mendapatkan bantuan sarana prasarana	60 Lembaga	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		<i>Program Pendidikan Menengah Atas</i>	<i>APM SMA</i>	34, 73 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Atas (DAK)	Jumlah lembaga sekolah Pendidikan Menengah Umum yang mendapatkan Bantuan Sarana Prasarana	1.000 Lembaga	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		<i>Program Pendidikan Menengah Kejuruan</i>	<i>APM SMK</i>	33, 74 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Mutu Sarana dan Prasarana SMK	Jumlah lembaga yang mendapatkan sarana dan prasarana penunjang di SMK	63 Lembaga	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
q.	Menambah infrastruktur kesehatan dengan membangun rumah sakit Provinsi di wilayah Eks. Karesidenan Madura, Jember, dan Kediri serta rumah sakit apung (Kapal Rumah Sakit) di wilayah kepulauan Sumenep dan daerah pesisir Jawa Timur sebagai penjabaran dari paradigma pembangunan yang berbasis maritim.						

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
r.	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus;	<i>Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)</i>	<i>Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan</i>	65 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Mutu Sarana dan Prasarana PK - PLK	Jumlah lembaga pendidikan khusus yang mendapatkan bantuan sarana prasarana	60 Lembaga	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan BOS Pendidikan Khusus	Jumlah siswa pendidikan khusus yang mendapatkan bantuan operasional sekolah	19.170 Siswa	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik PK-PLK	Jumlah lembaga pendidikan khusus yang memenuhi standar akreditasi	110 Lembaga	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Mutu dan Relevansi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Jumlah Guru PK/MKKS yang mengikuti pelatihan/workshop/FGD (Focus Group Discusion) dalam peningkatan mutu/pelayanan pendidikan khusus dan inklusif	1.378 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
			Jumlah Guru MKKS yang mengikuti pelatihan/workshop/FGD (Focus Group Discusion) dalam peningkatan mutu/pelayanan pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terpececil dan Terbelakang)	228 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
s.	Program Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan;	<i>Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan</i>	<i>Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PKLK berkualifikasi S1/D4 atau setara</i>	99 %	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	√
		Manajemen Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kesejahteraan dan motivasi pengabdianya	9.400 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Pendidikan Lanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru yang ditingkatkan kualifikasi pendidikan S2 sesuai dengan kompetensinya	99 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan SDM dan Kinerjanya	2.070 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang terpilih berprestasi dan berdedikasi	1.561 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan Manajemen Karir Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kualitas sesuai dengan prestasi yang dicapai dan standart kinerja	29.768 Orang	Jawa Timur	Dinas Pendidikan	
t.	Program Pendidikan Anak Usia Dini;						X
u.	Program upaya Kesehatan masyarakat;	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar	35 %			√
			Cakupan Ponkesdes sesuai standar	52 %			
			Cakupan pelayanan kesehatan USILA	58 %			
		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Persentase Program Prioritas yang disosialisasikan melalui media promosi kesehatan	100%	Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Sumenep, Mojokerto dan Tuban	Dinas Kesehatan	
		Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat)	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 25 % Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI	16 kab/kota	Trenggalek, Malang, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Sampang,	Dinas Kesehatan	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Pamekasan, Pasuruan, Kota Batu		
		Penyehatan Sarana Sanitasi Dasar	Jumlah Kab/Kota melaksanakan STBM sesuai standar	31 Kab/Kota	Pacitan, blitar, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Nganjuk, Ngawi, Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Kota Kediri	Dinas Kesehatan	
v.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum daerah (BLUD);						
w.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat;	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Kurang	10, 10 %			√
		Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	Jumlah Pengadaan MP-ASI dalam rangka Intervensi Gizi bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), buffer stock MP-ASI bagi balita dalam rangka antisipasi keadaan bencana, dan kegiatan momentum	4 kali	Trenggalek, Malang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep	Dinas Kesehatan	
		Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah pertemuan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)	4 kali	Trenggalek, Malang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep	Dinas Kesehatan	
		Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah indikator yang disepakati untuk pelaksanaan surveilans gizi	4 indikator	Trenggalek, Malang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep	Dinas Kesehatan	
x.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar	35 %			√
			Cakupan Ponkesdes sesuai standar	52 %			
			Cakupan pelayanan kesehatan USILA	58 %			
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar/jamban sehat	84 %			
		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Persentase Program Prioritas yang disosialisasikan melalui media promosi kesehatan	100	Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Sumenep, Mojokerto dan Tuban	Dinas Kesehatan	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat)	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 25 % Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI	16 kab/kota	Trenggalek, Malang, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Sampang, Pamekasan, Pasuruan, Kota Batu	Dinas Kesehatan	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Kurang	10, 10 %			
		Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah pertemuan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)	4 kali	Trenggalek, Malang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep	Dinas Kesehatan	
8.	URUSAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR						
a.	Revitalisasi Rancangan Tata Ruang dan Wilayah, diantaranya adalah reklamasi wilayah pantai dan pesisir, serta reklamasi kawasan bertebing.						x
b.	Diperlukan penambahan bandar udara (bandara) di Jawa Timur. terutama di daerah kepulauan Madura.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda	Prosentase terpenuhinya sarana prasarana keterpaduan multimoda (%)	0, 79 %		Dinas Perhubungan	√
		Pembangunan Bandara Pulau Kangean	kegiatan pembangunan Bandara Pulau Kangean	1 paket	Sumenep	Dinas Perhubungan	
		Pembangunan Bandara Pulau Masalembo	kegiatan pembangunan Bandara Pulau Masalembo	1 paket	Sumenep	Dinas Perhubungan	
c.	Peningkatan kapasitas bandara yang sudah ada melalui tambahan fasilitas berupa terowongan tembus yang menghubungkan terminal 1 dengan terminal 2, baik untuk angkutan kargo maupun angkutan orang.						X
d.	Bandara Juanda agar terpisah cukup jauh dari kawasan Pangkalan militer. Hal itu mengingat Pangkalan Militer maupun bandara sipil komersial, akan sama-sama berkembang makin sibuk. Sebagaimana terjadi bandara sipil komersial di bandara Kemayoran di Jakarta dipindahkan ke Tangerang.						X
e.	Moda Penghubung dari dan ke bandara melalui Moda transportasi Kereta Api (KA) sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan. Hal						X

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
	ini untuk melindungi masyarakat pengguna jasa penerbangan, agar tidak dirugikan karena kemacetan lalu lintas di darat.						
f.	Pengembangan Pelabuhan Laut	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut	Prosentase terpenuhinya Sarana Prasarana Transportasi Laut (%)	58 %		Dinas Perhubungan	√
		Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong Kabupaten Lamongan	Pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan Brondong	2 pekerjaan	Lamongan	Dinas Perhubungan	
		Pembangunan Pelabuhan Laut Boom Kabupaten Banyuwangi	Pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan Boom	2 pekerjaan	Banyuwangi	Dinas Perhubungan	
		Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliraja Kabupaten Sumenep	pekerjaan pembangunan pelabuhan giliraja	1 pekerjaan	Sumenep	Dinas Perhubungan	
		Pembangunan Pelabuhan Laut Probolinggo Kota Probolinggo	Pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan Probolinggo	3 pekerjaan	Probolinggo	Dinas Perhubungan	
		Pembangunan Pelabuhan Laut di Pulau Gilimandagin Kabupaten Sampang	pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan gili mandagin	1 pekerjaan	Sampang	Dinas Perhubungan	
		Pembangunan Pelabuhan Laut P. Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo	pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan gili ketapang	1 pekerjaan	Probolinggo	Dinas Perhubungan	
		Pembangunan Pelabuhan Laut P. Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo	pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan gili ketapang	1 lokasi	Probolinggo	Dinas Perhubungan	
		Pembangunan Pelabuhan Laut Prigi Kabupaten Trenggalek	pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan Prigi Kabupaten Trenggalek	1 lokasi	Trenggalek	Dinas Perhubungan	
g.	sharing wewenang pengelolaan pelabuhan oleh daerah dengan pemerintah pusat.						X
h.	Revitalisasi Rel KA (Kereta-api) sebagai "jawaban" atas kemacetan semakin tahun semakin parah.						X
i.	Percepatan Realisasi Proyek Kereta Api Super Cepat Jakarta - Surabaya						X
j.	Penambahan Pemasangan Palang Pintu Kereta Api hingga 100%	Program Pelayanan Angkutan Kereta Api	Prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api	0, 01 %		Dinas Perhubungan	√
		Pengadaan dan Pemasangan EWS di Perlintasan Sebidang KA se-Jatim	early warning system terpasang	34 unit	Bojonegoro, Jember, Lamongan, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo	Dinas Perhubungan	
k.	Percepatan Penyelesaian JLS (Jalur Lintas Selatan)						X
l.	Pelebaran Jalan Provinsi dengan penambahan luas ruas jalan	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REKONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Surabaya	78, 10 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	√
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Mojokerto	62, 87 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Bojonegoro	50, 72 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi	85, 26 %		Dinas Pekerjaan	



No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Madiun			Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Pacitan	50, 72 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Kediri	55, 11 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Malang	38, 22 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Probolinggo	25, 46 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Jember	34, 77 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Banyuwangi	7, 62 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Pamekasan	39, 75 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di kawasan potensial	25 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
		Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Surabaya	Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan jalan	4 dokumen	Gresik, Kota Surabaya, Lamongan, Sidoarjo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Jumlah dokumen laporan pembangunan/rekonstruksi jalan	4 dokumen			
			Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan	14, 80 km			
		Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Mojokerto	Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jalan	4 dokumen	Jombang, Mojokerto	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan	6, 20 Km			
			jumlah dokumen laporan pembangunan / rekonstruksi jalan	4 dokumen			
		Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Bojonegoro	Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jalan	4 dokumen	Bojonegoro, Tuban	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan	12, 16 Km			
			jumlah dokumen laporan pembangunan/rekonstruksi jalan	4 dokumen			
		Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Madiun	Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jalan	4 dokumen	Magetan, Ponorogo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan	5, 50 Km			
			jumlah dokumen laporan pembangunan/rekonstruksi jalan	4 dokumen			
		Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Pacitan	Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jalan	4 dokumen	Pacitan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			Panjang pembangunan / penggantian jembatan	10 M			
			Jumlah dokumen laporan pembangunan / rekonstruksi jalan	4 dokumen			
		Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Kediri	Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jalan	4 dokumen	Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Trenggalek, Tulungagung	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan	14, 25 Km			
			Jumlah dokumen laporan pembangunan / rekonstruksi jalan	4 dokumen			
		Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Malang	jumlah dokumen laporan pembangunan / rekonstruksi jalan	4 dokumen	Kota Batu, Kota Malang, Malang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jalan;	4 dokumen			
			Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan;	6 Km			
		Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Probolinggo	Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan jalan	4 dokumen	Kota Pasuruan, Lumajang, Pasuruan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Jumlah dokumen laporan peningkatan/pembangunan jalan	4 dokumen			
			Panjang pembangunan/ rekonstruksi jalan	7, 50 KM			
		Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Jember	Panjang pembangunan/ rekonstruksi jalan	12 Kilometer	Bondowoso, Jember	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Jumlah dokumen laporan pembangunan/rekonstruksi jalann	4 dokumen			
			Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jalan	4 dokumen			
		Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Banyuwangi	Panjang pembangunan / rekonstruksi jalan	4, 25 Kilometer	Banyuwangi, Situbondo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan jalan	4 dokumen			
			Jumlah dokumen laporan peningkatan/pembangunan jalan	4 dokumen			
		Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Pamekasan	Panjang pembangunan/ rekonstruksi jalan (KM)	12, 50 Km	Pamekasan, Sampang, Sumenep	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jalan	4 dokumen			
			Jumlah dokumen laporan pembangunan/rekonstruksi jalan	4 dokumen			
m.	Perbaikan Jembatan dengan audit konstruksi seluruh jembatan, serta tidak abaikan pada tanda-tanda awal kerusakan jembatan.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Surabaya	84, 82 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	√
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Mojokerto	96, 31 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Bojonegoro	75, 25 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Madiun	96, 31 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Pacitan	97, 87 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi	90 %		Dinas Pekerjaan	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			mantap di wilayah UPT Kediri			Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Malang	96, 31 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional di wilayah UPT Probolinggo	91, 38 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Jember	89, 23 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di Wilayah UPT Banyuwangi	89, 23 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Pamekasan	95, 85 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Surabaya	Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan	4 dokumen	Gresik, Kota Surabaya, Lamongan, Sidoarjo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang rehabilitasi/ pelebaran pemeliharaan jalan (M)	15 m			
			Panjang pemeliharaan rutin jembatan (M)	761, 75 m			
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Mojokerto	Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan	4 dokumen	Jombang, Mojokerto	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang rehabilitasi/ pelebaran pemeliharaan jembatan	6 M			
			Panjang pemeliharaan rutin jalan	263, 20 Km			
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Bojonegoro	Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan	4 dokumen	Bojonegoro, Tuban	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang rehabilitasi/ pelebaran pemeliharaan jembatan	20 M			
			Panjang pemeliharaan rutin jembatan	2.180, 64 M			
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Madiun	Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan	4 dokumen	Magetan, Ponorogo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang rehabilitasi/ pelebaran pemeliharaan jembatan	6 M			
			Panjang pemeliharaan rutin jembatan	619, 90 M			
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Pacitan	Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan	4 dokumen	Pacitan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang rehabilitasi / pelebaran pemeliharaan jembatan	10 M			
			Panjang pemeliharaan rutin jembatan	889, 59 M			
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Kediri	Jumlah dokumen data jalan dan jembatan dalam rangka pemeliharaan jalan	4 dokumen	Blitar, Kediri, Trenggalek, Tulungagung	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang rehabilitasi/pelebaran pemeliharaan jembatan	116, 40 M			
			Panjang pemeliharaan rutin jembatan	1.260 M			
			Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan	4 dokumen			
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Malang	Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan	4 dokumen	Kota Batu, Kota Malang, Malang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang rehabilitasi / pelebaran pemeliharaan jembatan	71, 40 M			
			Panjang pemeliharaan rutin jembatan	789, 54 M			
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Probolinggo	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	749, 21 Meter	Kota Pasuruan, Lumajang,	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Pasuruan		
			Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan	4 dokumen			
			Panjang rehabilitasi/ pelebaran pemeliharaan jembatan	0 Meter			
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Jember	Panjang pemeliharaan rutin jembatan	1.317 Meter	Bondowoso, Jember	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan	4 dokumen			
			Panjang rehabilitasi/ pelebaran pemeliharaan jalan	0 Meter			
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Banyuwangi	Panjang rehabilitasi/ pelebaran jembatan	11, 87 Meter	Banyuwangi, Situbondo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan	4 dokumen			
			Panjang pemeliharaan rutin jembatan	1.244, 71 Meter			
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Pamekasan	Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan	4 dokumen	Pamekasan, Sampang, Sumenep	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang rehabilitasi/ pelebaran pemeliharaan jalan (M)	23, 36 m			
			Panjang pemeliharaan rutin jembatan (M)	835, 59 m			
		Pemeliharaan Jembatan Rangka Baja dan Jembatan Khusus	Panjang jembatan rangka baja dan jembatan khusus yang direhabilitasi/ dipelihara	120 m	Pamekasan, Sampang, Sumenep	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
		PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REKONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Surabaya	78, 10 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Mojokerto	62, 87 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Bojonegoro	50, 72 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Madiun	85, 26 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Pacitan	50, 72 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Kediri	55, 11 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Malang	38, 22 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Probolinggo	25, 46 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi	34, 77 %		Dinas Pekerjaan	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Jember			Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Banyuwangi	7, 62 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Pamekasan	39, 75 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di kawasan potensial	25 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
		Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Surabaya	Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pembangunan/Penggantian jembatan	4 dokumen	Gresik, Kota Surabaya, Lamongan, Sidoarjo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Jumlah dokumen laporan pembangunan/ penggantian jembatan	4 dokumen			
			Panjang pembangunan/penggantian jembatan	8, 50 m			
		Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Mojokerto	Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pembangunan /penggantian jembatan	4 dokumen	Jombang, Mojokerto	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang pembangunan / penggantian jembatan	10 M			
			jumlah dokumen laporan pembangunan/penggantian jembatan	4 dokumen			
		Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Bojonegoro	Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pembangunan /penggantian jembatan	4 dokumen	Bojonegoro, Tuban	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang pembangunan / penggantian jembatan	27 M			
			jumlah dokumen laporan pembangunan / penggantian jembatan	4 dokumen			
		Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Madiun	Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pembangunan /penggantian jembatan	4 dokumen	Magetan, Ponorogo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Jumlah dokumen laporan pembangunan / penggantian jembatan	4 dokumen			
			Panjang pembangunan / penggantian jembatan	10, 20 M			
		Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Pacitan	Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pembangunan /penggantian jembatan	4 dokumen	Pacitan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang pembangunan / penggantian jembatan	15 M			
			jumlah dokumen laporan pembangunan/penggantian jembatan	4 dokumen			
		Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Kediri	Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pembangunan /penggantian jembatan	4 dokumen	Kediri, Kota Blitar, Trenggalek, Tulungagung	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang pembangunan / penggantian	116, 40 M			

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			jembatan				
			jumlah dokumen laporan pembangunan/penggantian jembatan	4 dokumen			
		Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Malang	Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pembangunan /penggantian jembatan	4 dokumen	Kota Batu, Kota Malang, Malang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Panjang pembangunan / penggantian jembatan	105 M			
			Jumlah dokumen laporan pembangunan/ penggantian jembatan	4 dokumen			
		Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Probolinggo	Panjang pembangunan/Penggantian jembatan	40 M	Kota Pasuruan, Lumajang, Pasuruan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka peningkatan/ pembangunan jembatan	4 dokumen			
			Jumlah dokumen laporan peningkatan/ pembangunan jembatan	4 dokumen			
		Pembangunan dan penggantian Jembatan Wilayah UPT Jember	Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka peningkatan/ pembangunan jembatan	4 dokumen	Bondowoso, Jember	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			Jumlah dokumen laporan peningkatan/ pembangunan jembatan	4 dokumen			
			Panjang pembangunan/penggantian jembatan	70 meter			
		Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Pamekasan	Panjang pembangunan/penggantian jembatan	12 Meter	Pamekasan, Sampang, Sumenep	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
			jumlah dokumen data jembatan dalam rangka peningkatan / pembangunan jembatan	4 dokumen			
			jumlah dokumen laporan peningkatan / pembangunan jembatan	4 dokumen			
n.	Peningkatan kualitas Jalan Nasional, kualitas bahan dan konstruksi dalam perbaikan jalan.						X
o.	Memperjuangkan kelanjutan pembangunan proyek-proyek strategis di Jawa Timur, seperti : Jalur lintas selatan, jalur kereta api di pulau Madura, pembangunan waduk-waduk skala besar sedang dan kecil serta rencana pembangunan bandara di wilayah selatan,						X
p.	Program percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS);						X
q.	Program Fasilitasi peningkatan penambahan panjang jalan Nasional, baik tol, non tol maupun Fly over serta pembangunan	jalan Tembus Senduro-Malang dan Gucialit- Probolinggo;					X
r.	Program percepatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan insfrastruktur yang	Program Operasi, Pemeliharaan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPT PSDA	Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Malang	68, 50 %		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	√

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
	menunjang pembangunan sector pertanian dan wilayah pedesaan;						
			Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Kediri	68, 50 %			
			Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Surabaya	68, 50 %			
			Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Bojonegoro	68, 50 %			
			Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Madiun	68, 50 %			
			Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Bondowoso	68, 50 %			
			Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Lumajang	68, 50 %			
			Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Pasuruan	68, 50 %			
			Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Pamekasan	68, 50 %			
		Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Malang	km jaringan irigasi	1 km	Malang	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	√
		Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Kediri	Km jaringan irigasi	1 km	Kediri	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	√
		Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Surabaya	Km jaringan irigasi	1 km	Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	√
		Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Bojonegoro	Km jaringan irigasi	1 km	Bojonegoro	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	√
		Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Madiun	Km jaringan irigasi	1 km	Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	√
		Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Bondowoso	Km jaringan irigasi	1 km	Bondowoso	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	√
		Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Lumajang	Km jaringan irigasi	1 km	Lumajang	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	√
		Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Pasuruan	Km jaringan irigasi	1 km	Pasuruan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	√
		Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Pamekasan	Km jaringan irigasi	1 km	Pamekasan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	√
s.	Program pembangunan Jalan dan Jembatan;	Program PEMBANGUNAN DAN REKONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN MENUJU KAWASAN POTENSIAL	Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial	61 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	√
			Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial	70 %		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
		Pembangunan/Rekonstruksi jalan Kawasan Potensial	Panjang pembangunan jalan	75 Km	Banyuwangi, Bondowoso, Kota Mojokerto, Pacitan,	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Trenggalek		
t.	Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi;	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Jalan	Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana Angkutan Jalan Terhadap Standar Pelayanan			Dinas Perhubungan	√
		Pembangunan Sarana Prasana dan Fasilitas Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Pembangunan Prasarana Terminal Penumpang Angkutan Jalan (lokasi)	29 lokasi	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Kota Batu, Kota Malang, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo	Dinas Perhubungan	
		Pemeliharaan Sarana Prasana dan Fasilitas Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Prasarana Terminal Penumpang Angkutan Jalan terpelihara(lokasi)	29 lokasi	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Kota Batu, Kota Malang, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo	Dinas Perhubungan	
		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	Prosentase terpenuhinya Sarana Prasarana Transportasi ASDP (%)	0, 89 %		Dinas Perhubungan	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana ASDP	Pekerjaan pemeliharaan prasarana dermaga sungai danau dan penyeberangan	4 pekerjaan	Banyuwangi, Sumenep	Dinas Perhubungan	
		Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kab. Banyuwangi	Pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan penyeberangan Ketapang	1 pekerjaan	Banyuwangi	Dinas Perhubungan	
		Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kab. Lamongan	Pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan penyeberangan Paciran	1 pekerjaan	Lamongan	Dinas Perhubungan	
		Pembangunan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jawa Timur	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Penyeberangan Sungai dan Danau	2 pekerjaan	Blitar, Gresik, Situbondo, Tulungagung	Dinas Perhubungan	
9.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTAKARYA DAN PENGAIRAN						
a.	Bedah rumah, dengan plafon bantuan lebih dari Rp 9 juta per-unit,						
b.	Hibah Sanitasi Masyarakat, diperluas cakupannya,						
c.	Pembangunan Rusunawa, terutama di kawasan sub-urban,						



No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
	antara lain, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto.						
d.	Mendorong percepatan pembangunan 4 waduk di Jawa Timur yang sampai saat ini progresnya belum signifikan diantaranya : Waduk Tugu-Trenggalek, Waduk Gongseng-Bojonegoro, Waduk Tukul-Pacitan, Waduk Bendo-Ponorogo	Program Operasi, Pemeliharaan & Rehabilitasi Sungai, Waduk & Pantai	Kinerja Pengelolaan Sungai, Waduk dan Pantai	62%		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	X
		Kegiatan Eksploitasi Sungai, Waduk dan Pantai	Dokumen Pedoman Operasi Sungai, Waduk & Pantai	1 Dokumen	Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	X
			Inventarisasi Sumber Air	1 Kegiatan			
			Dokumen SOP Operasi Sungai	1 Dokumen			
			RAAT	3 Kegiatan			
			Laporan UPB	1 Laporan			
e.	Perbaikan tangkis, serta klep pintu air lebih masif, dengan prioritas kawasan langganan banjir,	Program Pengendalian Daya Rusak Air di UPT PSDA	Monitoring dan koordinasi penanganan banjir pada wilayah kerja UPT PSDA di Malang	100 %		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	√ untuk 5 Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
			Monitoring dan koordinasi penanganan banjir pada wilayah kerja UPT PSDA di Kediri	100 %			
			Monitoring dan koordinasi penanganan banjir pada wilayah kerja UPT PSDA di Surabaya	100 %			
			Monitoring dan koordinasi penanganan banjir pada wilayah kerja UPT PSDA di Bojonegoro	100 %			
			Monitoring dan koordinasi penanganan banjir pada wilayah kerja UPT PSDA di Madiun	100 %			
			Penanganan banjir pada daerah rawan banjir sesuai kewenangan pada wilayah kerja UPT PSDA di Bondowoso	80 Ha			
			Penanganan banjir pada daerah rawan banjir sesuai kewenangan pada wilayah kerja UPT PSDA di Lumajang	80 Ha			
			Penanganan banjir pada daerah rawan banjir sesuai kewenangan pada wilayah kerja UPT PSDA di Pasuruan	80 Ha			
			Penanganan banjir pada daerah rawan banjir sesuai kewenangan pada wilayah kerja UPT PSDA di Pamekasan	80 Ha			
		Kegiatan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA di Bondowoso	Infrastruktur sungai	5 Lokasi	Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	√ untuk 5 Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
		Kegiatan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA di Lumajang	Infrastruktur sungai	5 Lokasi	Jember, Lumajang	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya	√ untuk 5 Wilayah

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
						Air	Sungai Kewenangan Provinsi
		Kegiatan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak UPT PSDA di Pasuruan	Infrastruktur sungai	5 Lokasi	Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Pasuruan, Probolinggo	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	√ untuk 5 Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
		Kegiatan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA di Pamekasan	Infrastruktur sungai	5 Lokasi	Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	√ untuk 5 Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
f.	Percepatan progres penyelesaian beberapa waduk yang ada di Jawa Timur dengan pembebasan lahan milik Perhutani,	Program Operasi, Pemeliharaan & Rehabilitasi Sungai, Waduk & Pantai	Kinerja Pengelolaan Sungai, Waduk dan Pantai	62%		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	X
		Kegiatan Eksploitasi Sungai, Waduk dan Pantai	Dokumen Pedoman Operasi Sungai, Waduk & Pantai	1 Dokumen	Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	X
			Inventarisasi Sumber Air	1 Kegiatan			
			Dokumen SOP Operasi Sungai	1 Dokumen			
			RAAT	3 Kegiatan			
			Laporan UPB	1 Laporan			
g.	Perbaikan dan penambahan gully-plug.					Dinas Kehutanan	X
h.	Inten berkoordinasi dengan BBWS Brantas dan BBWS Bengawan Solo guna pengendalian banjir pada wilayah Jawa Timur	Program Pengendalian Daya Rusak Air	Kinerja Pengelolaan Banjir	65 %		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	X
		Kegiatan Pengendalian Daya Rusak Air & Pengamanan Pantai	Dokumen SOP Banjir	1 Dokumen	Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	X
			Posko Banjir	1 Kegiatan			
			FEWS	1 Kegiatan			
			Peta Rawan Banjir	2 Dokumen			
i.	Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 10.000 unit pertahun.						
10.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						
a.	Menegakkan seluruh peraturan dan perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup,	Prograam Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat pada peraturan perundang - undang lingkungan hidup	29%		Dinas Lingkungan Hidup	√
			Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %		Dinas Lingkungan Hidup	
		Pengawasan Penerapan Izin Lingkungan dan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi melalui Pengawasan Langsung	175 Kegiatan	Kota Surabaya Kab. Sidoarjo Kab. Gresik Kab. Pasuruan Kota Pasuruan Kab. Malang Kota Malang Kab. Mojokerto	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Kab. Jombang		
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi melalui Pengawasan Tidak Langsung	225 Kegiatan		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan pengawasan	1 Kegiatan		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan hasil Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung	1 dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/workshop/pembinaan pengawasan	1 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
b.	Membuat sistem audit lingkungan hidup dengan memperhatikan penyusutan daya dukung lingkungan,	Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Peningkatan Rata-Rata Waktu Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Lingkungan (hari)	14 (hari)	Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup	√
			Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan RPPLH dan KLHS	100 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor Limbah (juta ton eq CO2)	4 (juta ton eq CO2)		Dinas Lingkungan Hidup	
		Penerapan Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Lingkungan yang diterbitkan sesuai tata laksana	100%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah rapat kerja AMDAL	1 Kegiatan		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah rapat koordinasi kajian dampak lingkungan hidup atau KLHS	1 Kegiatan		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan hidup	1 Kegiatan		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan hasil penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Lingkungan	1 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan hasil rapat kerja AMDAL	1 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan hasil rapat koordinasi kajian dampak lingkungan hidup atau KLHS	1 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/workshop/pembinaan dan verifikasi tata laksana penilaian dokumen lingkungan hidup	1 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah rapat koordinasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup	1 Kegiatan		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan hasil rapat koordinasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup	1 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
c.	Melakukan audit limbah RS (rumahsakit) secara sistem dan berkala, serta uji petik IPAL	Prograam Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat pada peraturan perundang - undang lingkungan hidup	29%		Dinas Lingkungan Hidup	√
			Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %		Dinas Lingkungan Hidup	
		Pengawasan Penerapan Izin Lingkungan dan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi melalui Pengawasan Langsung	175 Kegiatan	Kota Batu Kab. Pamekasan Kab. Bangkalan Kab. Nganjuk Kab. Malang	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Kab. Ngawi Kab. Kediri Kab. Jombang		
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi melalui Pengawasan Tidak Langsung	225 Kegiatan		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan pengawasan	1 Kegiatan		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan hasil Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung	1 dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/workshop/pembinaan pengawasan	1 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
d.	Meng-inisiasi Pergub tentang ambang batas lingkungan hidup,						X
e.	Meng-inisiasi kawasan untuk pengumpulan limbah pasca-kelola (di-aman-kan).						X
f.	Percepatan Pembangunan Pengelolaan Limbah B3 di Jawa Timur	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang dikelola	45 %		Dinas Lingkungan Hidup	√
			Persentase Sampah yang di kelola	35 %		Dinas Lingkungan Hidup	
		Penguatan Fasilitas Teknis, Investasi dan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah dan Limbah B3	Jumlah sarana dan prasarana teknologi pengelolaan sampah dan/atau limbah B3	2 Unit	Kab. Mojokerto	Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah DED fasilitas dan teknologi pengelolaan sampah dan/atau limbah B3	1 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah rapat koordinasi pengembangan fasilitas, teknologi dan investasi pengelolaan sampah dan/atau limbah B3	2 Kegiatan		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan hasil penyediaan sarana dan prasarana teknologi pengelolaan sampah dan/atau limbah B3	1 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan hasil rapat koordinasi pengembangan fasilitas, teknologi dan investasi pengelolaan sampah dan/atau limbah B3	2 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah dokumen perencanaan teknis pengembangan fasilitas dan teknologi pengelolaan sampah dan/atau limbah B3	1 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
g.	Program rehabilitasi dan konstruksi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan;	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kualitas udara ambien parameter SO2 (ppm)	8, 20 (ppm)		Dinas Lingkungan Hidup	√
			Kualitas udara ambien parameter NO2 (ppm)	14, 30 (ppm)		Dinas Lingkungan Hidup	
			Kualitas air sungai parameter BOD (mg/l)	4, 12 (mg/l)		Dinas Lingkungan Hidup	
			Kualitas air sungai parameter COD (mg/l)	11, 84 (mg/l)		Dinas Lingkungan Hidup	
		Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.	Jumlah action learning rehabilitasi kerusakan lingkungan	3 Kegiatan	Kec. Grati, Kab. Pasuruan Kec. Soca, Kab. Bangkalan	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Kec. Sambeng, Kab. Lamongan		
			Jumlah demplot rehabilitasi kerusakan lingkungan	3 Kegiatan		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan hasil action learning rehabilitasi kerusakan lingkungan	3 Kegiatan		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan hasil demplot rehabilitasi kerusakan lingkungan	3 dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah review instrumen pengendalian kerusakan lingkungan hidup	1 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah rapat koordinasi pengendalian dan pemulihan kerusakan	1 dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan hasil rapat koordinasi pengendalian dan pemulihan kerusakan	1 Kegiatan		Dinas Lingkungan Hidup	
h.	Program peningkatan konservasi pesisir dan laut serta rehabilitasi ekosistem yang rusak;	Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Jatim					
i.	Program pemberdayaan masyarakat yang bertempat tinggal disepanjang daerah aliran sungai;	Prograam Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat pada peraturan perundang - undang lingkungan hidup	29%		Dinas Lingkungan Hidup	√
			Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %		Dinas Lingkungan Hidup	
		Pelaksanaan Upaya dan Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup	Jumlah institusi dan non-institusi yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	187 Inst dan Non-Inst	Jawa Timur	Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah institusi dan non-institusi yang diberi penghargaan terkait lingkungan hidup	4 Inst dan Non-Inst		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/ workshop/pembinaan institusi dan non-institusi	4 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah laporan hasil pemberian penghargaan dan/atau sarana dan prasarana institusi dan non-institusi	1 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan institusi dan non-institusi	4 Kegiatan		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan kerjasama yang diberikan kepada institusi dan non-institusi	3 Unit		Dinas Lingkungan Hidup	
j.	Program perencanaan Kawasan strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah.	Kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya Prov.Jatim					
11.	URUSAN PERTAMBANGAN, PERINDUSTRIAN DAN ESDM						
a.	Mengevaluasi/audit pertambangan galian C yang ada di Jawa Timur terkait dengan perizinannya	Program Pengelolaan Usaha Pertambangan	Jumlah rekomtek ijin pertambangan	350 rekom		Dinas ESDM Prov. Jatim	√
		Inventarisasi wilayah dan sumber daya minerba	Jumlah penetapan rekomtek Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	150 Rekomtek	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik,		

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
		Pengusahaan Pertambangan Mineral dan batubara	Jumlah rekomtek Izin Usaha Pertambangan (IUP)	200 Rekomtek	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
		Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan minerba	Jumlah pemegang izin yang membayar Jaminan Reklamasi	100 Pmegang Izin	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu,		

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
	serta menindak/melakukan penindakan pada pertambangan yang ilegal.						Saran : supaya diisi oleh OPD Satpol PP Provinsi karena hal ini bukan kewenangan dari Dinas ESDM
b.	Penyambungan listrik untuk keluarga miskin, sampai seribu rumah tangga gakin pada tahun 2019	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Peningkatan ketersediaan listrik	10.000 KVA		Dinas ESDM Prov. Jatim	√
		Pendataan dan Penyediaan Ketenagalistrikan	Jumlah Rumah Tangga (RT) Berlistrik bagi Warga Miskin	1.000 RT	Bondowoso, Madiun, Pacitan, Probolinggo, Sampang, Sumenep		
		Pengusahaan Ketenagalistrikan	Jumlah rekomtek izin ketenagalistrikan	200 rekomtek	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan,		

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
		Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan	Jumlah badan usaha/pemegang izin ketenagalistrikan yang diawasi	100 Pemegang Izin	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
c.	- Lebih me-masal-kan fasilitasi bio-gas di 38 kabupaten / kota. - Inovasi pembangunan PLTMH , tenaga surya serta tenaga angin.	<i>Program Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan</i>	<i>Peningkatan penyediaan energi</i>	300 KK		Dinas ESDM Prov. Jatim	√
		Pendataan dan Pengembangan Energi (Pengembangan infrastruktur energi)	Jumlah dokumen data dan informasi energi	5 Dokumen	Jember, Malang, Probolinggo, Situbondo, Sumenep		
		Pengusahaan dan Pemanfaatan Energi	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan dan fasilitasi energi	300 Kepala Keluarga (KK)	Blitar, Bojonegoro, Jember, Mojokerto		
		Konservasi Energi	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi konversi energi	400 Orang	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota		



No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
d.	Inovasi pembangunan PLTMH , tenaga surya serta tenaga angin						
e.	Program peningkatan standarisasi Industri;	Program Peningkatan Standarisasi Industri	prosentase IKM yang telah menerapkan standardisasi dan HKI	8, 50 persen	Surabaya, malang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	√
		Pembinaan Mutu Produk Industri dan Hak Kekayaan Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya	Jumlah Industri yang mendapatkan fasilitasi	800 Pelaku industri	Surabaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Pembinaan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya	Jumlah Industri yang mendapatkan fasilitasi	533 Pelaku industri	Surabaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Pembinaan Mutu Produk Industri dan Hak Kekayaan Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang	Jumlah industri yang mendapatkan fasilitasi	420 Pelaku industri	Malang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Pembinaan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang	Jumlah industri yang mendapatkan fasilitas	279 Pelaku industri	Malang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
12.	URUSAN KEDAULATAN PANGAN						
a.	Pencapaian kedaulatan pangan meliputi; penetapan lahan produksi pangan, pemanfaatan lahan terlantar untuk pemanfaatan sawah pertanian, pelepasan kawasan HPK untuk lahan sawah, jaringan irigasi, serta sarana pengelolaan hasil pertanian pasca panen.						
b.	Kebijakan pengendalian impor pangan di daerah						
c.	Penguatan cadangan pangan di daerah.						
d.	Program peningkatan ketahanan Pangan;						
e.	Program peningkatan Diversifikasi Pangan						

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
f.	Antisipasi terhadap kondisi alih-fungsi lahan yang terus mengalami peningkatan, sedangkan minat masyarakat untuk berbudidaya di sektor pertanian terus menurun.						
13.	URUSAN SOSIAL						
a.	Program peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;						
b.	Program peningkatan dan penguatan kerukunan internal, dan antar umat beragama;						
c.	Program peningkatan jalinan kerjasama lintas umat agama dan memperat forum silaturahmi pemuka agama;						
d.	Program peningkatan organisasi kemasyarakatan/LSM dalam mencegah ketidakadilan, diskriminasi serta pelanggaran HAM, sebagai penguatan Civil Society.						
14.	URUSAN KESEJAHTERAAN DAN KETENAGAKERJAAN						
a.	Program perluasan dan penempatan kerja;	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN	310.000 Orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√
			% binaan di sektor informal yg berhasil menyerap tenaga kerja baru	85 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah mitra kerja jejaring bursa kerja	550 perusahaan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Hasil survey IKM pelayanan penempatan tenaga kerja	78		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Informal	Jumlah peserta WUB yang mengikuti terapan TTG	60 orang	Kota Batu, Kota Malang, Pasuruan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta TKM yang mengikuti TTG	60 orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta usaha mandiri yang dievaluasi	50 orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah Kab/Kota asal petugas lapangan yang mengikuti evaluasi	38 Kab./Kota		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah petugas lapangan yang mengikuti temu konsultasi	50 orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Jumlah Peserta dan lokasi Sosialisasi AKAD;	600 orang	Jawa Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah Peserta dan lokasi Orientasi Pra Pemberangkatan Program AKAD;	350 orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Pengguna TKA;	100 orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah lokasi monev pengguna Tenaga Kerja Asing	38 Lokasi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Jumlah Peserta dan lokasi sosialisasi Pencegahan TKI Non Prosedural ;	800 orang	Jawa Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			Jumlah Peserta dan lokasi pemulangan TKI bermasalah dari luar negeri	5.000 orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Penciptaan Pasar Kerja melalui Pembinaan Kelembagaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja Dalam dan Luar Negeri	Jumlah perusahaan dan pencari kerja yang mendapatkan promosi BKO	125 Perusahaan	Jawa Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah perusahaan dan pencari kerja yang mengikuti JMF	65 Perusahaan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah pencari kerja dan siswa yang mendapat penyuluhan & bimbingan jabatan	3.500 orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta petugas pelayan publik yang mendapat pembinaan SDM	50 orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Setifikat ISO	1 paket		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Penguatan SDM Antar Kerja untuk Mengoptimalkan Penciptaan Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah peserta PNS kab/kota yang mengikuti bimtek antar kerja	40 orang	Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat di Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan/orientasi kewirausahaan	250 orang	Kota Batu, Kota Malang, Pasuruan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja di Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah siswa yg diberikan penyuluhan IPK;	200 orang	Jawa Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah perusahaan dan pencari kerja yang mendapat sosialisasi program dan informasi penempatan melalui bursa kerja keliling	100 perusahaan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah perusahaan dan pencari kerja yang mengikuti bursa kerja bulanan;	70 Perusahaan dan Pencari kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah perusahaan dan pencari kerja yang mengikuti job market fair;	50 Perusahaan dan Pencari kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta dan perusahaan yang mengikuti orientasi pra penempatan AKAD	350 orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Singosari	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85 %			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32 %			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Singosari Malang	Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK	55 perusahaan	Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Jember	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			% <u>penempatan lulusan pelatihan</u>	32%			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Jember	Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK	50 Perusahaan	Jember	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Pasuruan	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% <u>penempatan lulusan pelatihan</u>	32%			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Pasuruan	Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK	55 Perusahaan	Pasuruan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Mojokerto	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% <u>penempatan lulusan pelatihan</u>	32%			
			Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat;	96 Orang			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Mojokerto	Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK	100 perusahaan	Mojokerto	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Jombang	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% <u>penempatan lulusan pelatihan</u>	32%			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Jombang	Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK	50 perusahaan	Jombang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Tuban	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% <u>penempatan lulusan pelatihan</u>	32%			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Tuban	Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK	30 perusahaan	Tuban	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Nganjuk	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Nganjuk	Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK	30 perusahaan	Nganjuk	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Surabaya	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Surabaya	Job Market Fair	1 kegiatan	Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Sumenep	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84 0			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Sumenep	Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK	75 perusahaan	Sumenep	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Situbondo	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Situbondo	Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK	100 perusahaan	Situbondo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Kediri	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Kediri	Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK	50 perusahaan	Kediri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Tulungagung	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Tulungagung	Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK	50 Perusahaan;	Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			;Jumlah kelompok usaha mandiri yang terbentuk	20 Kelompok			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Madiun	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Madiun	Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK;	450 Perusahaan;	Madiun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah kelompok usaha mandiri yang terbentuk	30 Kelompok			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Ponorogo	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Ponorogo	Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK	60 Perusahaan	Ponorogo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah kelompok usaha mandiri yang terbentuk	40 Kelompok			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Bojonegoro	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks	80			

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			siswa UPT PK				
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Bojonegoro	Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK	30 Perusahaan	Bojonegoro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK PPPTKLN Wonojati Malang	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK PPPTKLN Wonojati	Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK	10 Perusahaan;	Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah kelompok usaha mandiri yang terbentuk	20 Kelompok			
b.	Program Peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga kerja;	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Singosari	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% penempatan lulusan pelatihan	32 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di PK Singosari Malang	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	128 orang	Kota Batu, Kota Malang, Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT- PK Singosari Malang	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	752 Orang	Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan swadana	240 Orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta uji kompetensi	752 Orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Singosari Malang	Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan	1 Gedung	Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah pengadaan alat / sarana	15 Unit		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			ISO	1 Paket		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Singosari Malang	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	96 Orang	Kota Batu, Kota Malang, Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	160 Orang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Singosari Malang	Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK	55 perusahaan	Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Jember	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% <u>penempatan lulusan pelatihan</u>	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Jember	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	320 Orang	Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Jember	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	304 Orang	Jember	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jember	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	80 orang	Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	160 orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Pasuruan	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% <u>penempatan lulusan pelatihan</u>	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Pasuruan	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	288 orang	Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Pasuruan, Probolinggo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Pasuruan	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	432 orang	Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Pasuruan, Probolinggo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Pasuruan	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	340 Orang	Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Pasuruan, Probolinggo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			<u>Jumlah peserta pelatihan swadana</u>	80 Orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Mojokerto	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks	80			



No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			siswa UPT PK				
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Mojokerto	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	304 Orang	Kota Mojokerto, Mojokerto	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Mojokerto	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	320 Orang	Kota Mojokerto, Mojokerto	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan swadana	80 Orang			
			Jumlah peserta uji kompetensi	80 Orang			
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Mojokerto	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	120 Orang	Kota Mojokerto, Mojokerto	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat;	96 Orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Jombang	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Jombang	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	464 orang	Jombang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Jombang	Jumlah peserta uji kompetensi	96 orang	Jombang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi;	384 orang			
			Jumlah peserta pelatihan swadana;	200 orang			
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jombang	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	96 orang	Jombang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	60 orang			
			Jumlah peserta pelatihan Swadana	0 orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Tuban	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	384 orang	Lamongan, Tuban	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Tuban					
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Tuban	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	400 orang	Tuban	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan swadana	160 orang			
			Jumlah peserta uji kompetensi	320 orang			
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Tuban	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	48 orang	Lamongan, Tuban	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat;	48 orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Nganjuk	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Nganjuk	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	208 orang	Nganjuk	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Nganjuk	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	640 orang	Nganjuk	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Nganjuk	Jumlah peserta pelatihan swadana	32 orang	Nganjuk	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat;	160 orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Surabaya	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Surabaya	Jumlah sosialisasi program pelatihan	192 orang	Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah sosialisasi program three in one (3 in 1)	192 orang			
			Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Institusional	416 orang			
			Jumlah peserta pelatihan berbasis swadana	73 orang			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam	Jumlah peserta pelatihan berbasis	352 orang	Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Surabaya	kompetensi			dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Surabaya	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	32 orang	Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	0 orang			
			Jumlah peserta pelatihan Swadana	0 orang			
			Pelatihan kerja bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (bekerjasama dengan DIII - ITS)	112 orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Sumenep	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84 0			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Pelatihan Kerja Sumenep	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	560 orang	Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Sumenep	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	0 Orang	Sumenep	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta uji kompetensi	288 orang			
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi;	288 orang			
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Sumenep	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	60 orang	Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Situbondo	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Pelatihan Kerja Situbondo	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	540 orang	Banyuwangi, Situbondo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Situbondo	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	64 orang	Situbondo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja	Jumlah peserta pelatihan swadana	32 orang	Banyuwangi,	Dinas Tenaga Kerja	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Situbondo			Situbondo	dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat;	100 orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Kediri	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Kediri	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	448 orang	Blitar, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Kediri	Jumlah peserta uji kompetensi	160 orang	Kediri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi;	160 orang			
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Kediri	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	112 orang	Blitar, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	32 orang			
			Jumlah Peserta pelatihan swadana	20 orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Tulungagung	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Tulungagung	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	500 Orang	Trenggalek, Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Tulungagung	Jumlah peserta uji kompetensi	368 Orang	Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi;	368 Orang			
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Tulungagung	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	80 Orang	Trenggalek, Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	208 Orang			
			Jumlah peserta pelatihan swadana	120 Orang			

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			;Jumlah kelompok usaha mandiri yang terbentuk	20 Kelompok			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Madiun	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Madiun	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	320 Orang	Kota Madiun, Madiun, Ngawi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Madiun	Jumlah peserta pelatihan swadana	40 Orang	Kota Madiun, Madiun, Ngawi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi;	240 Orang			
			;Jumlah peserta uji kompetensi	336 Orang			
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Madiun	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	200 Orang	Kota Madiun, Madiun, Ngawi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetens	128 Orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Ponorogo	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Ponorogo	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	400 Orang	Magetan, Pacitan, Ponorogo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Ponorogo	Jumlah peserta uji kompetensi	256 Orang	Ponorogo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi;	256 Orang			
			Jumlah peserta pelatihan swadana;	50 Orang			
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Ponorogo	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	0 Orang	Magetan, Pacitan, Ponorogo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	96 Orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Bojonegoro					
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Bojonegoro	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	400 Orang	Bojonegoro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Bojonegoro	Jumlah peserta uji kompetensi	160 Orang	Bojonegoro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi;	160 Orang			
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Bojonegoro	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	112 Orang	Bojonegoro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan swadana	20 Orang			
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	32 Orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK PPPTKLN Wonojati Malang	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	92%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	85%			
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan	84			
			Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK	80			
			% penempatan lulusan pelatihan	32%			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT PK PPPTKLN Wonojati Malang	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	384 Orang	Kota Batu, Kota Malang, Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT PK PPPTKLN Wonojati Malang	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	432 Orang	Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK PPPTKLN Wonojati	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	80 Orang	Kota Batu, Kota Malang, Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	32 Orang			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	70%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Hasil survey IKM pelayanan produktivitas	80, 75 %			
			% pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas	13%			

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Revitalisasi dan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya	Jumlah perusahaan dalam pelaksanaan kompetisi 5R/5S	50 Perusahaan	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan Pembinaan Produktivitas di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya	Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan dan peningkatan manajemen Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan.	400 Orang	Jember, Kota Surabaya, Lamongan, Magetan, Mojokerto, Pacitan, Pasuruan, Probolinggo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan yang dimonitoring	400 Orang			
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PPTK Surabaya	Jumlah peserta pelatihan peningkatan produktivitas	150 Orang	Blitar, Kota Batu, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Ngawi, Ponorogo, Probolinggo, Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	350 Orang			
c	Program Ketransmigrasian	Program Ketransmigrasian	Jumlah penempatan transmigran	150 KK		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			% kerja Sama Antar Daerah (KSAD) yang direalisasikan	83%			
		Pembinaan Perpindahan dan Penempatan Penduduk ke Luar Jawa	Jumlah MOU/PKS yang dihasilkan dengan Kab./Kota di Luar Jawa	8 MOU / PKS	Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Pasuruan, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang,	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
			Jumlah temu teknis atau sosialisasi yang dilakukan	4 Kegiatan			
			Jumlah dokumen kesepakatan kuota penempatan transmigran	3 Dokumen			
			Jumlah peserta temu teknis bidang ketransmigrasian	70 Orang			
			Laporan kesiapan lokasi penempatan	10 Laporan			
			% rekomendasi penanganan masalah yang dihasilkan	80%			
		Pembinaan Kapasitas Calon Transmigran	Jumlah bimbingan teknis peningkatan kompetensi calon transmigran dan penyuluhan program transmigran	4 Kegiatan	Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Jember, Kediri, Malang, Sampang, Situbondo, Sumenep	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah kegiatan pameran/promosi program ketransmigrasian	5 Kegiatan			
			Jumlah laporan hasil monitoring	5 Lokasi			
			Jumlah laporan hasil analisa keberhasilan	0 Lokasi			
		Penyiapan calon transmigran	Jumlah transmigran yang diseleksi;Jumlah kerjasama antar daerah yang dilakukan	200 200 KK;30 KSAD	Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Pasuruan, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Program Ketransmigrasian di UPT Pelatihan Ketransmigrasian dan Kemasyarakatan	% masyarakat potensial transmigran/calon transmigran yang mendapatkan pelatihan	55%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Hasil survey IKM pelayanan pelatihan transmigran	79			
		Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Revitalisasi dan Pengembangan	Jumlah peserta pelatihan	200 Orang	Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro,	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		Kelembagaan di UPT Pelatihan Transmigrasi			Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Pasuruan, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
d.	Program Pemberdayaan masyarakat						
		<i>Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan</i>	<i>Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Yang Terbentuk</i>	<i>40 lembaga</i>		Dinas Pemberdayaan Masy dan Desa Prov Jatim	
			<i>Jumlah RTS Yang Memiliki Usaha</i>	<i>500 jumlah RTS</i>			
		Pemberdayaan Pasar Desa	Jumlah data Pasar Desa yang memiliki pengelola pasar	29 Dokumen	Jawa Timur		
			Jumlah data Pasar Desa yang sudah memiliki Perdes	29 Dokumen			
			Jumlah Pasar Desa terbaik Jawa Timur	3 pasar			
			Jumlah peserta rakor/orientasi/bimtek Pengelola Pasar Desa	60 peserta			
			Jumlah pasa desa yang terbantu	20 pasar			
			Jumlah peserta orientasi pengelola pasar yang mendapat bantuan	60 Orang			
		Pemberdayaan BUMDesa	Jumlah data BUMDesa yang terbentuk di Jatim	29 BUMDesa	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
			Jumlah data BUMDesa yang aktif	29 BUMDesa			
			Jumlah BUMDesa terbaik Jawa Timur	6 BUMDesa			
			Jumlah pengelola BUMDesa yang diberikan orientasi/bimtek	24 Orang			
			Jumlah BUMDesa yang dibantu	20 BUMDesa			
			Jumlah peserta orientasi pengurus BUMDesa yang mendapat bantuan	60 Orang			
		Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah Kelompok UEM yang difasilitasi	14 UEM	Jember, Jombang		
			Jumlah UEM yang difasilitasi akses permodalan	90 UEM			

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			Jumlah UEM yang dibina oleh Pelaku Dunia Usaha	3 UEM			
			Jumlah peserta rakor/orientasi/bimtek pengelola UEM	180 orang			
			Jumlah UEM yang difasiltasi pengembangan pemasaran usaha dengan pihak terkait	3 UEM			
		Penanggulangan Kemiskinan Kelompok program pemberdayaan masyarakat	Jumlah program/kegiatan yang diinventarisir terkait program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kelompok program pemberdayaan masyarakat	10 program/kegiatan	Kota Surabaya		
			Jumlah peserta rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelompok program pemberdayaan masyarakat	202 orang			
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal	Jumlah Desa sangat tertinggal dan Desa Tertinggal yang diberikan bantuan	75 Desa	Jombang, Kediri		
			Jumlah pengelola kegiatan yang diberikan orientasi	300 orang			
			Jumlah peserta rakor	300 Orang			
			Jumlah pendamping yang mendampingi pengelolaan kegiatan	75 orang			
		Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel.	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPMD/K, TP PKK desa/kel.) yang aktif	85 % 20, 94 %		Dinas Pemberdayaan Masy dan Desa Prov Jatim	
			Persentase KPM yang aktif				
		Pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan desa/kel.	Jumlah data Lembaga Kemasyarakatan ds/kel yang aktif	76 Dokumen	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
			Jumlah Pengurus Lembaga kemasyarakatan ds/kel yang diberikan pembinaan	240 orang			
			Jumlah Lembaga pelaksana Gotong Royong terbaik	10 lembaga			
		Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen data TP PKK ds/kel yang aktif	38 dokumen	Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota		
			Jumlah TP PKK yang difasilitasi	38 lembaga			

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			Jumlah Pengurus TP PKK yang diberikan sosialisasi/orientasi peningkatan kapasitas SDM nya	500 orang	Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan,		
			Jumlah pengurus/anggota TP PKK yang diberikan penghargaan	76 orang	Lumajang, Madiun, Magetan, Malang,		
			Jumlah Pemenang lomba 10 program pokok PKK Jatim	4 TP PKK	Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan,		
			Jumlah Peserta Rakor PKK	76 orang	Pamekasan,		
			Jumlah Peserta Jambore PKK	370 orang	Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		
		Pelestarian dan Pemberdayaan adat istiadat	Jumlah peserta sosialisasi/workshop/orientasi	216 orang	Lamongan, Lumajang		
			Jumlah lembaga adat yang difasilitasi akses pengembangannya dengan pihak terkait	20 lembaga			
		Penguatan kapasitas lembaga adat	Jumlah Lembaga adat yang di Perdes Kan	25 lembaga	Madiun, Magetan		
			Jumlah Pengurus Lembaga adat yg diberikan peningkatan kapasitas SDM	500 orang			
		Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah KPM yang dilatih	1.170 KPM	Malang, Mojokerto		
			Jumlah Peserta Sosialisasi/Temu karya/Bimtek KPM	114 orang			
		Pemberdayaan Forum/Asosiasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Jawa Timur	Jumlah terbentuknya forum KPM di Jawa Timur	14 orang	Nganjuk, Ngawi		
			Jumlah Peserta Bimtek	228 Orang			
		Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa	Persentase desa yang aparaturnya telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparaturnya pemdes (%)	25%		Dinas Pemberdayaan Masy dan Desa Prov Jatim	
			Persentase desa yang telah menyusun RPJMDes, RKPDDes dan APBDes yang tepat waktu	25%			
			Persentase desa yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahunan (%)	11%			
		Pembinaan kapasitas aparaturnya pemerintahan desa	Jumlah data desa yang Aparatur pemerintahan desanya telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparaturnya pemdes	30 desa	Pacitan, Pamekasan		
			Jumlah peserta rakor	160 orang			
			umlah peserta pelatihan aparaturnya desa	360 orang			
		Evaluasi kinerja aparaturnya pemerintahan desa	Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang dievaluasi kinerjanya	275 kabupaten	Pasuruan, Ponorogo		
		Pembinaan perencanaan pembangunan desa	Jumlah data kabupaten yang telah menerapkan aplikasi perencanaan pembangunan desa	30 Dokumen	Probolinggo, Sampang		
			Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	7 kali			
			Jumlah peserta rakor perencanaan pembangunan desa	128 Orang			
		Pendataan dan Pendayagunaan profil desa/kecamatan	Jumlah desa yang telah memiliki profil	8.504 desa/kecamatan	Sidoarjo, Situbondo		

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			desa/kel				
			Jumlah desa yang melakukan update data profil desa/kel	8.504 desa/kelurahan			
			Jumlah peserta pelatihan pokja profil desa/kel	304 orang			
		Evaluasi tingkat perkembangan desa/kel	Jumlah desa/kel berhasil	8 desa/kelurahan	Sumenep, Trenggalek		
			Jumlah peserta rakor/sosialisasi TPD	114 orang			
			Jumlah data TPD	30 Dokumen			
		Pembinaan Pengelolaan Administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan tertib administrasi	60 Desa	Sumenep, Trenggalek		
			Jumlah Peserta Bimtek	38 orang			
		Pembinaan penataan aset desa	Jumlah desa yang telah melakukan penataan aset desa	60 Desa	Tuban, Tulungagung		
			Jumlah Peserta Pembinaan Penataan aset desa	240 Orang			
		Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah instrumen evkin pendamping desa yang dievaluasi	30 Dokumen	Bangkalan, Banyuwangi		
			Jumlah Pendamping desa yang berkinerja baik	2.960 Orang			
			Jumlah Bimtek P3MD yang dilaksanakan	4 Kali			
		Program Peningkatan kerjasama desa	Jumlah kerjasama desa di Jawa Timur dalam pembangunan kawasan perdesaaan	25%		Dinas Pemberdayaan Masy dan Desa Prov Jatim	
			Jumlah kerjasama pendayagunaan sarana prasarana desa	13%			
			Jumlah kerjasama pemanfaatan dan pendayagunaan TTG	6%			
		Pemberdayaan sumberdaya lokal berbasis kawasan perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang dipetakan untuk pengembangan kawasan yang dikerjasamakan	14 kawasan	Blitar, Bojonegoro		
			Jumlah peserta workshop Kerjasama Pengembangan Kawasan Pedesaan	90 orang			
			Jumlah peserta Bimtek Kerjasama Pengembangan Kawasan Pedesaan	90 orang			
		Pembangunan potensi kawasan perdesaan	Jumlah pemetaan potensi kerjasama pembangunan kawasan perdesaan	20 kawasan	Blitar, Bojonegoro		
			Jumlah peserta workshop Kerjasama Pembangunan Kawasan Pedesaan	120 orang			
		Pembinaan pendayagunaan sarana pedesaan	Jumlah potensi Kerjasama Peningkatan pendayagunaan / peningkatan kualitas sarana perdesaan yang dipetakan	12 kawasan	Bondowoso, Gresik		
			Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Kerjasama Peningkatan pendayagunaan sarana perdesaan	120 orang			
		Pemberdayaan kualitas prasarana perdesaan	Jumlah pemetaan kawasan potensi Kerjasama Peningkatan kualitas prasarana perdesaan yang difasilitasi	12 kawasan	Jember, Jombang		
			Jumlah data dan informasi kerjasama peningkatan kualitas prasarana perdesaan	12 dokumen			
			Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Kerjasama Peningkatan kualitas prasarana perdesaan	120 orang			
		Pendayagunaan TTG	Jumlah Kerjasama pemanfaatan Jenis alat	15 kerjasama	Kediri, Lamongan		

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			TTG				
			Jumlah Peserta Bimtek Pendayagunaan TTG	105 orang			
			Jumlah jenis alat alat TTG yang dipetakan di Jatim	10 jenis			
		Inovasi TTG	Jumlah Kerjasama pengembangan inovasi TTG	3 kerjasama			
			Jumlah inovasi TTG yang dapat difasilitasi	5 buah			
			Jumlah peserta gelar TTG	38 kelompok			
			Jumlah jenis peralatan TTG yang diikutkan dalam gelar TTG	38 jenis			
			Jumlah Peserta workshop/lokakarya/rakortek TTG	114 orang			
e.	Meningkatkan pembangunan Ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/Agroindustri, dan industrialisasi						
f.	Program peningkatan produksi pertanian;						
g.	Program peningkatan produksi Perkebunan;	Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman semusim	1,59		Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur	
		Standarisasi kualitas bahan baku	Jumlah luas intensifikasi tembakau (Ha)	7.000,00	Kelompok petani Tembakau di Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Blitar Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bondowoso Kabupaten Jember Kabupaten Jombang Kabupaten Lamongan Kabupaten Lumajang Kabupaten Madiun Kabupaten Magetan Kabupaten Mojokerto Kabupaten Nganjuk Kabupaten Ngawi Kabupaten Pamekasan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Probolinggo Kabupaten Sampang Kabupaten Situbondo Kabupaten Sumenep Kabupaten Tuban		

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Kabupaten Tulungagung		
		Penanganan panen dan pasca panen bahan baku	Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen tembakau (bh/unit/pkt)	1.800,00	Kelompok petani Tembakau di Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Blitar Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bondowoso Kabupaten Jember Kabupaten Jombang Kabupaten Lamongan Kabupaten Lumajang Kabupaten Madiun Kabupaten Magetan Kabupaten Mojokerto Kabupaten Nganjuk Kabupaten Ngawi Kabupaten Pamekasan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Probolinggo Kabupaten Sampang Kabupaten Situbondo Kabupaten Sumenep Kabupaten Tuban Kabupaten Tulungagung		
		Pengembangan, Intensifikasi, Diversifikasi, penanganan panen dan pasca panen tanaman tebu	Jumlah luas pengawalan dan pendampingan intensifikasi tanaman Tebu (Ha)	6.235,00	Kelompok petani Tebu di seluruh Jawa Timur		
			Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen tebu (bh/unit/pkt)	2,00			
		Pengembangan, Intensifikasi, diversifikasi, penanganan panen dan pasca panen tanaman semusim lainnya	Jumlah luas Pengembangan tanaman semusim lainnya (Ha)	20,00	Kelompok petani tanaman semusim lainnya di Kabupaten Bangkalan, Kab. Madiun, Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek		
			Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen tanaman semusim lainnya (bh/unit/pkt)	10,00			
		Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tahunan perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman tahunan	1,25			
		1. Pengembangan, Intensifikasi, Rehabilitasi, diversifikasi, penanganan panen dan pasca	Jumlah luas tertanam bibit kopi arabika (ha)	4.000,00	Kelompok petani Kopi di Kabupaten		

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
		panen tanaman kopi			Gresik		
			Jumlah luas pemupukan tanaman kopi (Ha)	400,00	Kabupaten Banyuwangi		
			Jumlah luas rehabilitasi tanaman kopi rakyat (Ha)	150,00	Kabupaten Bondowoso		
			Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen kopi (bh/unit/pkt)	30,00	Kabupaten Jember Kabupaten Lumajang Kabupaten Madiun Kabupaten Malang Kabupaten Pasuruan Kabupaten Probolinggo Kabupaten Situbondo Kabupaten Tulungagung Kabupaten Ngawi Kabupaten Magetan Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung		
		2. Pengembangan dan penanganan panen dan pasca panen tanaman kopi di kawasan agropolitan	Jumlah luas tertanam bibit kopi arabika di kawasan agropolitan (Ha)	2,00	Kelompok petani Kopi di kawasan Agropolitan (Kota Batu)		
		Pengembangan, Intensifikasi, Rehabilitasi, diversifikasi, penanganan panen dan pasca panen tanaman kakao	Jumlah luas tertanam bibit kakao (Ha)	4.000,00	Kelompok petani Kakao di Kabupaten Jombang		
			Jumlah luas pemupukan tanaman kakao (Ha)	950,00	Kabupaten Kediri Kabupaten Lumajang		
			Jumlah luas rehabilitasi tanaman kakao rakyat (Ha)	35,00	Kabupaten Magetan		
			Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen kakao (bh/unit/pkt)	20,00	Kabupaten Malang Kabupaten Ngawi Kabupaten Trenggalek Kabupaten Tulungagung Kabupaten Madiun Kabupaten Mojokerto		
		Pengembangan, Intensifikasi, Rehabilitasi, diversifikasi, Penanganan panen, dan pasca panen tanaman tahunan lainnya	Jumlah luas pengembangan tanaman Kelapa (Ha)	300,00	Kelompok petani tanaman Kelapa di Kabupaten Bangkalan,		
			Jumlah luas rehabilitasi tanaman cengkeh rakyat	300,00	Kabupaten Banyuwangi		
			Jumlah luas rehabilitasi tanaman kelapa rakyat	300,00	Kabupaten Blitar		
			Jumlah luas pemupukan tanaman cengkeh	200,00	Kabupaten Bojonegoro		
			Jumlah luas pemupukan tanaman kelapa rakyat	300,00	Kabupaten Bondowoso		

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			Jumlah luas pemupukan jambu mete	75,00	Kabupaten Jember Kabupaten Kediri		
			Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen tanaman tahunan lainnya (bh/unit/pkt)	200,00	Kabupaten Pacitan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Sumenep		
		Program Perlindungan Tanaman Perkebunan	Persentase peningkatan pengamanan nilai produksi	20,00			
		Sarana dan Prasarana pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) perkebunan	Jumlah sarana prasana pengendalian OPT (Ha)	300,00	Kabupaten Jombang, Kab. Magetan, Kab.		
			Jumlah sarana prasarana konservasi	350,00	Madiun, Kab. Lumajang, Kab.		
			Jumlah pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati pengendalian OPT	52,00	Tulungagung, Kab. Lamongan, Kab. Jember, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Probolinggo		
		Pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan	Jumlah luas pengendalian OPT perkebunan (Ha)	300,00	Kabupaten Bangkalan, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Kediri, Kab. Probolinggo, Kab. Situbondo, Kab. Trenggalek, Kabupaten Jombang, Kab. Magetan, Kab. Madiun, Kab. Lumajang, Kab. Tulungagung, Kab. Lamongan, Kab. Jember		
		Pengembangan Usaha tani konservasi komoditi Perkebunan	Jumlah luas konservasi lahan perkebunan (Ha)	350,00	Kabupaten Kediri, Kab. Malang, Kab. Probolinggo		
h.	Program peningkatan produksi Peternakan;	Program peningkatan Produksi Peternakan	Produksi Daging	438.620 Ton		Dinas Peternakan	√
			Produksi Telur	488.765 Ton		Dinas Peternakan	
			Produksi Susu	511.137 Ton		Dinas Peternakan	
		Budidaya ternak	Jumlah kelompok pembudidaya ternak yang menerapkan good farming practice	7 kelompok	Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Lamongan, Magetan, Situbondo, Tuban	Dinas Peternakan	
		pengawasan mutu bibit ternak	Jumlah sapi potong layak bibit yang dibudidayakan masyarakat	157 ekor	Banyuwangi, Bojonegoro, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lamongan, Madiun, Magetan, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Sampang, Sumenep,	Dinas Peternakan	



No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
					Trenggalek, Tuban		
			Jumlah sapi perah layak bibit yang dibudidayakan masyarakat	30 ekor		Dinas Peternakan	
			Jumlah kambing senduro layak bibit yang dibudidayakan masyarakat	178 ekor		Dinas Peternakan	
			Jumlah domba sapudi layak bibit yang dibudidayakan masyarakat	90 ekor		Dinas Peternakan	
			Jumlah wilayah sumber bibit sapi potong	1 wilayah		Dinas Peternakan	
			Jumlah wilayah sumber bibit kambing senduro	1 wilayah		Dinas Peternakan	
			Jumlah wilayah sumber bibit domba sapudi	1 wilayah		Dinas Peternakan	
		Penataan Kawasan Agropolitan/Minapolitan Jawa Timur	Jumlah kelompok partisipatif penataan kawasan agropolitan	7 kelompok	Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Pamekasan, Ponorogo, Trenggalek	Dinas Peternakan	
		Pembinaan dan pengawasan mutu pakan, penerapan teknologi pakan, dan penyaluran benih HPT	Jumlah alsin pengolah pakan yang sesuai standar	100 unit	Banyuwangi, Bojonegoro, Jombang, Lamongan, Lumajang, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Situbondo, Trenggalek, Tulungagung	Dinas Peternakan	
			Jumlah bibit HPT legume unggul yang disebar	30.000 stek		Dinas Peternakan	
			Jumlah bibit HPT rumput unggul yang disebar	80.000 stek		Dinas Peternakan	
			Jumlah hasil pengujian sampel pakan	500 sampel		Dinas Peternakan	
		Pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi masyarakat melalui pengembangan budidaya ternak	Jumlah penerima manfaat	42 kelompok	Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Sidoarjo, Sumenep, Tuban, Tulungagung	Dinas Peternakan	
i.	Program Pengembangan budidaya Perikanan;	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	10 ton		Dinas Perikanan dan Kelautan	√
		Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan	Jumlah kelompok penerima paket hibah	16 kelompok		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi	64 Orang		Dinas Perikanan dan Kelautan	
		Intensifikasi perikanan budidaya	Jumlah kelompok penerima paket hibah	265 kelompok		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah pembudidaya ikan yang	1.556 Orang		Dinas Perikanan dan	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			bersertifikat			Kelautan	
			Jumlah pembenih ikan yang bersertifikat	106 Orang		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi	32 Orang		Dinas Perikanan dan Kelautan	
		Pembangunan sarana dan prasarana budidaya	Jumlah kelompok penerima paket hibah	43 kelompok		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi	1 Orang		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah lokasi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana UPT/Instalasi perikanan budidaya	13 lokasi		Dinas Perikanan dan Kelautan	
		Pengendalian kesehatan ikan budidaya dan lingkungan	Jumlah lokasi monitoring peredaran dan pemakaian obat ikan, bahan kimia dan kontaminan biologi	38 38 lokasi		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah lokasi monitoring dan pengendalian hama penyakit ikan	38 Kab/Kota		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah pertemuan	20 kelompok		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah kelompok penerima paket hibah	26 orang		Dinas Perikanan dan Kelautan	
		Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau Bangil	Jumlah operasional UPT	12 bulan		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah lokasi pembinaan pembudidaya ikan	30 lokasi		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah produksi benih ikan air payau	20.102.700 ekor		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah pengujian laboratorium	725 kali		Dinas Perikanan dan Kelautan	
		Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar Umbulan	Jumlah operasional UPT	12 bulan		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah lokasi pembinaan pembudidaya ikan	20 lokasi		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah produksi benih ikan air tawar	45.256.850 ekor		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah produksi calon induk ikan air tawar	41.375 ekor		Dinas Perikanan dan Kelautan	
		Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Laut Situbondo	Jumlah operasional UPT	12 bulan		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah lokasi pembinaan pembudidaya ikan	12 lokasi		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah produksi benih ikan air laut	52.282.200 ekor		Dinas Perikanan dan Kelautan	
		Budidaya Perikanan di Kawasan Agropolitan	Jumlah kelompok penerima paket hibah	26 kelompok		Dinas Perikanan dan Kelautan	
		Klasterisasi Komoditas Perikanan Unggulan Berpotensi Ekspor	Jumlah kelompok penerima paket hibah	11 kelompok		Dinas Perikanan dan Kelautan	
		Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah operasional UPT	12 bulan		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah lokasi pembinaan pembudidaya ikan	20 lokasi		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			umlah pembudidaya ikan yang mengikuti	50 orang		Dinas Perikanan dan	

No	Pokok-pokok Piriran DPRD	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
			pelatihan			Kelautan	
j.	Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat;	Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat	Peningkatan produksi Garam Rakyat (Ton)	1.314.181 Ton		Dinas Perikanan dan Kelautan	√
		Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat	Jumlah kelompok penerima paket hibah	46 kelompok		Dinas Perikanan dan Kelautan	
			Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi	10 orang		Dinas Perikanan dan Kelautan	
k.	Program pendayagunaan Sumber Daya Air						X
15.	TERKAIT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)						
a.	Perlu adanya pembangunan yang "Integretad system" dimana perlu merencanakan pembangunan yang mempunyai sistem atau visi yang terintegrasi misalkan pembangunan rel KA dari Kota menuju bandara yang terintegrasi dengan beberapa terminal yang ada, sehingga memudahkan akses menuju bandara tanpa khawatir akan kemacetan sehingga pelayanan pada masyarakat dapat terpenuhi.						X
b.	Perlu adanya perencanaan pembangunan yang dapat "Mengungkit Perekonomian" Jawa Timur misalkan pembangunan Jembatan Suramadu, Pasar Puspa Agro meskipun sekarang puspa agro tidak seramai dulu akan tetapi pada awalnya sangat membantu mengungkit perekonomian masyarakat Jawa Timur.						X

### IV.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Prioritas Pembangunan RKPD tahun 2019 merupakan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2019 dan bersifat mandatori dan Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercatum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

Penentuan prioritas pembangunan dimaksud didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional dan Provinsi, isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

#### IV.3.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Prioritas Nasional serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJDM, maka Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2019, adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan
2. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan
3. Peningkatan agro industri melalui nilai tambah pengembangan agro maritim serta akselerasi kepariwisataan
4. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan pemilu

IV.3.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD tahun kelima, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2019. Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, adalah sebagai berikut:

Keterkaitan Tema RKP 2019 dengan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur 2019

TEMA RKP 2019		Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas
TEMA RKPD 2019		Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi

Tabel IV.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019

PRIORITAS RKP 2019		PRIORITAS RKPD 2019	
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN
1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	1) Mempercepat pengurangan kemiskinan 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat 3) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas 4) Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak 5) Meningkatkan tata kelola layanan dasar	1. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan.	1) Meningkatkan kualitas vokasional dan keahlian khusus 2) Meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan PK-PLK 3) Meningkatkan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih 4) Meningkatkan kualitas dan produktivitas

PRIORITAS RKP 2019		PRIORITAS RKPD 2019	
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN
			ketenagakerjaan serta “Link and Match” antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja 5) Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh
2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	1) Meningkatkan konektivitas 2) Mengembangkan telekomunikasi dan informatika 3) Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pembangunan desa 4) Melaksanakan pembangunan daerah afirmasi 5) Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu –hilir perikanan	2. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan	1) Memperkuat konektivitas darat, laut dan udara untuk mendukung kawasan potensial ekonomi dan Pembangunan Desa 2) Mengembangkan dan Mengelolaan Telekomunikasi dan Informatika
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan JasaProduktif	1) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan 2) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri 3) Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif 4) Peningkatan produktivitas tenaga kerja 5) Optimalisasi pemanfaatan Iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan	3. Peningkatan agro industri melalui nilai tambah pengembangan agro maritim serta akselerasi kepariwisataan	1) Meningkatkan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan 2) Meningkatkan Nilai Tambah Agroindustri , Agromaritim dan Daya Saing Koperasi dan UKM 3) Akselerasi Kepariwisata 4) Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Manusia Pertanian, Industri dan Pariwisata 5) Mengembangkan

PRIORITAS RKP 2019		PRIORITAS RKPD 2019	
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN
	penciptaan nilai tambah		Industrialisasi Berbasis Ekonomi Digital
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	1) Meningkatkan produksi energi primer 2) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi 3) Meningkatkan aksesibilitas energi 4) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik 5) Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri 6) Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan 7) Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat 8) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi 9) Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air 10) Meningkatkan perlindungan sumber air dan ekosistemnya 11) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata	4. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1) Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi, Stabilisasi Harga Pangan, Penganeka-ragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan 2) Meningkatkan Ketahanan Energi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Mineral 3) Meningkatkan Tata Kelola Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir 4) Melestarikan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PRIORITAS RKP 2019		PRIORITAS RKPD 2019	
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN
	12) Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS 13) Meningkatkan kesadaran terkait sumber daya air		
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	1) Meningkatkan Kamtibmas dan keamanan siber 2) Menjamin kesuksesan Pemilu 3) Memperkuat pertahanan wilayah nasional 4) Meningkatkan kepastian hukum dan Reformasi Birokrasi 5) Memperkuat efektivitas diplomasi	5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan pemilu	1) Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban terhadap isue potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba 2) Mensukseskan Pemilu Serentak

#### IV.3.3 Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Prioritas Pembangunan tahun 2019 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2019 yang berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Sasaran Pembangunan tahun 2019, sebagai berikut:



Tabel IV.7 Sasaran Pembangunan Tahun 2019 yang mendukung Tujuan Pembangunan pada Misi 1

Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan					
Tujuan : Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan perluasan lapangan kerja serta Mempercepat dan memperluas penanggulang-an kemiskinan					
Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	PD	Satuan	Target
1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Ketenaga-kerjaan	Disnakertrans	Persen	66,68
	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Ketenaga-kerjaan	Disnakertrans	Persen	67
2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase peningkatan pendapatan pekerja di Jawa Timur	Ketenaga-kerjaan	Disnakertrans	Persen	9,5
3. Meningkatnya akses pendidikan menengah yang berkualitas	Indeks Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Persen	0,63
4. Meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat di Jawa Timur	Indeks Minat Baca	Perpustaka-an	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indeks	74
5. Meningkatnya mutu pendidikdan tenaga kependidikan	Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PKLK berkualifikasi minimal S1/D4	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Persen	99
6. Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	per seribu penduduk	86
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	per seribu penduduk	22
	Persentase stunting	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	Persen	23
7. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan minimal	Angka Harapan Hidup (AHH)	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	Tahun	72,7
	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	Persen	80

Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan					
Tujuan : Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan perluasan lapangan kerja serta Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan					
Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	PD	Satuan	Target
	Persentase RFT Rate Kusta	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	Persen	95
	Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	Persen	83
	Persentase keberhasilan pengobatan TB	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	Persen	93
8. Meningkatnya Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Persen	78,14
9. Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	Kepemuda-an dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persen	18,19
	Jumlah Atlet Yang berprestasi	Kepemuda-an dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	orang	1288
10. Menurunnya presentase penduduk miskin	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kel. yang aktif	Pemberdaya-an Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persen	85
	Persentase tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan	Pemberdaya-an Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persen	0,4
	Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (kepala keluarga)	Ketrans-migrasian	Disnakertrans	Persen	83
11. Meningkat nya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan	Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Sosial	Dinas Sosial	Persen	1,47

Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan					
Tujuan : Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan perluasan lapangan kerja serta Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan					
Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	PD	Satuan	Target
Sosial (PMKS)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Pember-dayaan Perempuan dan Perlindung-an Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan	Indeks	72,89
12. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafficking di Jawa Timur	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung-an Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan	Persen	25
	Persentase laju pertumbuhan penduduk	Pengendali-an Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan	Persen	0,64
	Cakupan KB Aktif/CPR (%)	Pengendali-an Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan	Persen	71

Tabel IV.8 Sasaran Pembangunan Tahun 2019 yang mendukung Tujuan Pembangunan pada Misi 2

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ agroindustri, dan industrialisasi					
Tujuan : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan					
Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target
1. Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PPH	87,7
	Ketersediaan Pangan	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ton	
	- Beras	Pangan	Dinas Pertanian dan	Ton	9.035.

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ agroindustri, dan industrialisasi					
Tujuan : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan					
Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target
			Ketahanan Pangan		000
	- Jagung	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ton	6.500.000
	- Kedelai	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ton	360.000
2. Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Nilai Ijin Prinsip Investasi (PMA dan PMDN)	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Trilyun Rupiah	125
	Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi dan UKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Persen	9,7
	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Trilyun Rupiah	100
	Persentase Pertumbuhan Sub Kategori Perikanan trhadap PDRB	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	5,3
	Persentase Pertumbuhan sub kategori Tanaman Pangan terhadap PDRB	Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persen	2,931
	Persentase Pertumbuhan sub kategori perkebunan terhadap PDRB	Pertanian	Dinas Perkebunan	Persen	2,25-3,08
	Persentase Pertumbuhan sub kategori peternakan terhadap PDRB	Pertanian	Dinas Peternakan	Persen	2,94
	Persentase Kontribusi Sub kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu	Kehutanan	Dinas Kehutanan	Persen	0,4

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ agroindutri, dan industrialisasi

Tujuan : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan

Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target
	Terhadap PDRB				
	Persentase Share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan	Perdagang-an	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen	1,9
	Persentase Pertumbuhan Industri pengolahan	Perindustri-an	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen	5,85
	Persentase kontribusi pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persen	5,94
3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Persen	97,54
	Rasio Elektrifikasi	Energi, dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM	Rasio	0,9
	Persentase Pelayanan Air untuk Irigrasi	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Persen	83,8
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan	Perhubung-an	Dinas Perhubungan	Indeks	80
	Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB	Perhubung-an	Dinas Perhubungan	Persen	2

Tabel IV.9 Sasaran Pembangunan Tahun 2019 yang mendukung Tujuan Pembangunan pada Misi 3

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang					
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan					
Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, serta Melestarikan Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Fungsi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	89,4
	Indeks Kualitas Air	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	55
	Indeks Tutupan Lahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	63
	Indeks Tutupan Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan	Indeks	55,86 – 56,36
1. Terwujudnya Kepastian Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya Sesuai Dengan RTRW	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Persen	73,07

Tabel IV.10 Sasaran Pembangunan Tahun 2019 yang mendukung Tujuan Pembangunan pada Misi 4

Misi 4 : Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik					
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik					
Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target
1. Meningkatnya pemanfaatan TIK dan Layanan Informasi Publik	Hasil evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	96
2. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase release data statistik akurat yang tepat waktu	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	60%
3. Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengamanan informasi	Persentase informasi persandian yang diamankan	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	30%
4. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	Persentase organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tertib arsip	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persen	100
5. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100
	Persentase usulan musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	34

Misi 4 : Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik					
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta menjunjung tinggi profesionalis-me dalam pelaksanaan pelayanan publik					
Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target
	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Hasil Penelitian yang dimanfaatkan	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Badan Penelitian dan Pengembang-an	Persen	35
	Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki Kegiatan Mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Badan Penelitian dan Pengembang-an	Persen	13
6. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Badan Pendapatan Daerah	Rp (dalam Juta)	13.709.614,39
	Nilai opini BPK	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Nilai	WTP
	Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Inspektorat	Persen	75
	Nilai SAKIP	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Sekretariat Daerah	Nilai	AA
	Predikat Hasil Evaluasi LPPD	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Sekretariat Daerah	Nilai	Sangat Tinggi



Misi 4 : Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik					
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta menjunjung tinggi profesionalis-me dalam pelaksanaan pelayanan publik					
Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target
	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Sekretariat Daerah	Persen	85
	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggara-an Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Badan Perwakilan Provinsi (Baperprov)	Persen	95
	Persentase Pelayanan Keprotokolan	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Badan Penghubung	Persen	100
	Persentase penduduk ber KTP	Administrasi Kependuduk-an dan Catatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan	Persen	95
7. Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah	Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Badan Kepegawaian Daerah	Persen	99
	Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Badan Kepegawaian Daerah	Indeks	90

Misi 4 : Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik					
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik					
Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target
	Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persen	95
8. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Badan Penanggulang-an Bencana Daerah	Persen	100
9. Meningkatnya peran DPRD sesuai fungsinya	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Sekretariat DPRD	Indeks	78,5

Tabel IV.11 Sasaran Pembangunan Tahun 2019 yang mendukung Tujuan Pembangunan pada Misi 5

Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial					
Tujuan : Menjamin terciptanya iklim demokrasi yang kondusif					
Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target
1. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak	Persentase kejadian terkait poleksosbud di Jawa Timur yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Bakesbangpol	Persen	90

Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial					
Tujuan : Menjamin terciptanya iklim demokrasi yang kondusif					
Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	OPD	Satuan	Target
politik dan penanganan konflik sosial.	Indeks Demokrasi Indonesia	Penunjang Urusan Pemerintah-an	Bakesbangpol	Indeks	82,5
2. Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang taat hukum	Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum & ketentraman yang diselesaikan	Ketentrama	Satpol PP	Persen	5
		Ketertiban Umum, dan Perlindung-an Masyarakat			
	Persentase penegakan supremasi hukum dan HAM di Jawa Timur	Ketentrama	Sekretariat Daerah	Persen	85
		Ketertiban Umum, dan Perlindung-an Masyarakat			
3. Meningkatnya pelestarian seni budaya	Jumlah Karya Seni Budaya yang mendapat penghargaan nasional	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Buah	20
	Persentase Cagar Budaya (benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang dipelihara/ dilestarikan	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persen	100

## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

#### V.1 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan wilayah tahun 2019 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang terintegrasi dengan kebijakan sektoral guna mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh Perangkat Daerah (PD) maupun pelaku pembangunan lainnya. Arah kebijakan spasial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019.

Fokus pembangunan Jawa Timur pada tahun 2014-2019 diarahkan pada pemantapan perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai metropolitan di Jawa Timur, pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan serta memantapkan pengembangan kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya.

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Pemerataan pembangunan antarwilayah melalui sinkronisasi program yang mendukung terciptanya keamanan, kenyamanan, produktif dan berkelanjutan untuk memperkecil dikotomi antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.
2. Peningkatan dan pemantapan struktur ruang sebagai pendukung kegiatan sosio-ekonomi masyarakat wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
3. Pendayagunaan pola ruang wilayah berdasarkan fungsi kawasan lindung dan budidaya untuk memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, mempercepat perkembangan wilayah, serta mengurangi kesenjangan antar kawasan.
5. Penguatan kelembagaan penataan ruang sebagai upaya meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergitas program pembangunan dalam rangka memanfaatkan potensi pada masing-masing Kabupaten/Kota sebagai instrumen pemanfaatan ruang jangka menengah yang menjadi pedoman pembangunan sektoral.
6. Pendayagunaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasar Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam rangka pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensi daerah sehingga meningkatkan nilai tambah pada wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan untuk peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti dari sistem agropolitan. Selain itu untuk membangun sumber-sumber pertumbuhan baru di Jawa Timur dilakukan dengan penciptaan pusat-pusat kegiatan perwilayahan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, tidak hanya terpusat pada kawasan utara. Pusat – pusat kegiatan yang tercipta diharapkan akan mampu memberikan efek penyebaran kegiatan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur dan juga dapat memberikan efek positif terciptanya kegiatan – kegiatan ekonomi baru pada pusat – pusat kegiatan dimaksud. Kemudian kebijakan pengembangan dalam infrastruktur dapat dilakukan dengan pemantapan penyediaan infrastruktur dengan meningkatkan kelengkapan, skala pelayanan, pemerataan, serta sistem interkoneksi dan keterpaduan antar jenis prasarana dengan wilayah-wilayah agropolitan.

Klaster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Penetapan klaster dirumuskan berdasarkan arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka yang disinkronisasikan dengan

agenda pembangunan Tahun 2014-2019 yang difokuskan pada pengembangan kawasan strategis, utamanya kawasan strategis agropolitan, kawasan agroindustri, kawasan metropolitan, kawasan tertinggal dan Kawasan Pesisir Pulau-Pulau Kecil.

Adapun pembagian kluster kewilayahan dan arahan masing-masing strategi kewilayahan dalam rangka penekanan terhadap kondisi kesenjangan wilayah yang terjadi di Jawa Timur sebagai berikut:

Gambar 5.1 Peta Pembagian Kluster Di Jawa Timur



A. Klaster Agropolitan Madura

Gambar 5.2 Peta Klaster Agropolitan Madura



Pulau Madura dalam arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi, yaitu Kawasan Agropolitan Madura (terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep), dan Kawasan Tertinggal (terdiri dari Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan) sehingga Klaster Agropolitan Madura ditetapkan pada Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, dengan arahan sebagai berikut:

- a. Pengembangan agribisnis pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai sektor utama menuju pasar regional dengan komoditas unggulan tembakau, sapi, tebu, tepung cassava, jambu mete, sorghum, jagung, dan garam.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan, Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan, Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat, Program Pengembangan Industri Agro, Program Peningkatan Produksi Produktivitas Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan, Program Pemanfaatan Dan Perlindungan Sumber Daya Air

- b. Pengembangan infrastruktur dengan fokus pendukung produksi, distribusi, maupun pemasaran komoditas unggulan dengan upaya mewujudkan keterkaitan produksi dengan pasar regional dan membuka akses.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

- c. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (RSU Muhammad Noer Pamekasan), Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

- d. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah di Madura mendukung pengembangan Agropolitan yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, dan stabilitas sosial.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program :  
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal,  
Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

## B. Klaster Agropolitan Ijen

Gambar 5.3 Peta Klaster Agropolitan Ijen



Dalam arahan pengembangan kewilayahan Kawasan Ijen ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi, yaitu Kawasan Agropolitan Ijen (terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi), serta Kawasan Tertinggal (terdiri dari Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso) sehingga Klaster Agropolitan Ijen ditetapkan pada Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi dengan arahan sebagai berikut:

- a. Peningkatan infrastruktur wilayah untuk memperkuat peran sebagai Agropolitan dan pariwisata regional/nasional, serta pengembangan industri kecil-menengah pendukungnya dengan komoditas unggulan kopi, tembakau, sapi, ternak kecil, dan buah-buahan (manggis, durian, jeruk), tanaman pangan.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program :  
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan Produksi Produktivitas



Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan, Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan, Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan, Program Pengembangan Industri Agro, Program Pemanfaatan Dan Perlindungan Sumber Daya Air

- b. Peningkatan produksi dan pemasaran industri dan UKM dengan upaya mewujudkan keterkaitan hulu-hilir dengan pasar regional termasuk pasar ke Provinsi Bali.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pengembangan Industri Agro, Program Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- c. Peningkatan keterjangkauan dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang selaras dengan pengembangan agropolitan.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengendalian Penyakit

- d. Peningkatan prasarana-sarana pendukung pertanian dan perkebunan termasuk penyediaan benih dan mesin pengolah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian, Program Penataan Ruang dan Pertanahan, Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan

- e. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah Selingkar Ijen mendukung pengembangan Agropolitan dan pariwisata yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, stabilitas sosial, dan mitigasi bencana.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

### C. Klaster Agropolitan Bromo Tengger Semeru

Gambar 5.4 Klaster Agropolitas Bromo Tengger Semeru



Dalam arahan pengembangan kewilayahan klaster agropolitan Bromo Tengger Semeru ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi dan Kepentingan Sosial Budaya, yaitu Kawasan Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo dan Kabupaten Lumajang dengan arahan sebagai berikut:

- a. Pengembangan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan pendukung agroindustri kecil-menengah dengan komoditas unggulan susu, sapi (potong), buah-buahan (apel, pisang kirana, durian, salak mangga), sayur-sayuran (kentang, kubis, wortel, tomat, cabai besar), tanaman pangan.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan, Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan, Program Pengembangan Industri Agro, Program Peningkatan Produksi Produktivitas Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan, Program Pemanfaatan Potensi dan Pemantauan Peredaran Hasil Hutan

- b. Peningkatan infrastruktur wilayah untuk memperkuat peran sebagai Agropolitan dan mewujudkan pariwisata internasional.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pengembangan Industri Agro, Program Pemanfaatan Dan

Perlindungan Sumber Daya Air, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan,

- c. Penguatan produksi dan pemasaran industri dan UKM pendukung agropolitan pada pasar nasional maupun internasional.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pengembangan Industri Agro, Program Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- d. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang mendukung pengembangan agropolitan dan pariwisata.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengendalian Penyakit

- e. Peningkatan prasarana-sarana pendukung pertanian, perkebunan, dan pariwisata disertai pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian, Program Penataan Ruang dan Pertanahan, Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan

- f. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah Selingkar Bromo-Tengger-Semeru mendukung pengembangan Agropolitan dan pariwisata yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, stabilitas sosial, dan mitigasi bencana.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

#### D. Klaster Agropolitan Wilis

Gambar 5.6 Klaster Agropolitan Wilis



Klaster Agropolitan Wilis dalam arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi berupa Kawasan Agropolitan Wilis (Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan) dan Kawasan Strategis Perbatasan Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, sehingga klaster Agropolitan Wilis ditetapkan pada Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan dengan arahan sebagai berikut:

- a. Pengembangan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan, dengan komoditas unggulan kopi, buah-buahan (durian, manggis), kakao, cengkeh, tanaman pangan, sayur-sayuran (bawang, buncis, kentang), kayu dan kerajinannya, serta sapi.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan, Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan, Program Pengembangan Industri Agro, Program Peningkatan Produksi Produktivitas Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan, Program Pemanfaatan Potensi dan Pemantauan Peredaran Hasil Hutan

- b. Peningkatan infrastruktur wilayah untuk memperkuat peran sebagai Agropolitan dan konektivitas regional dengan wilayah Jawa tengah dan D.I. Yogyakarta.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pengembangan Industri Agro, Program Pemanfaatan Dan Perlindungan Sumber Daya Air, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan,

- c. Penguatan pemasaran produk industri dan UKM pendukung pada pasar nasional maupun internasional.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pengembangan Industri Agro, Program Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- d. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang mendukung pengembangan agropolitan dan pariwisata.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengendalian Penyakit

- e. Peningkatan prasarana-sarana pendukung pertanian, perkebunan, dan pariwisata disertai pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian, Program Penataan Ruang dan Pertanahan, Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan

- f. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah Selingkar Wilis mendukung pengembangan Agropolitan dan pariwisata yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, stabilitas sosial, dan mitigasi bencana.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

## E. Klaster Metropolitan

Gambar 5.7 Klaster Metropolitan



Dalam arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Rencana sistem perkotaan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional atau beberapa provinsi meliputi (1) Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertokusila) dan (2) Kota Malang
- b. Kawasan Strategis Provinsi Sudut kepentingan Ekonomi berupa Kawasan Metropolitan yang berfokus pada pemantapan sektor industri, perdagangan, dan jasa komersial yang terdiri dari koridor Metropolitan yang meliputi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kabupaten Bangkalan, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kota Surabaya, Kawasan Pusat Bisnis (Central Bussines District/CBD) Surabaya, High Tech Industrial Park (HTIP) di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Kawasan Industri Gempol di Kabupaten Pasuruan, Kawasan Komersial di Lawang Kabupaten Malang, Kawasan Pusat Bisnis Kota Malang, dan Pusat Pariwisata Batu).

Berdasarkan arahan sistem perkotaan dan penetapan kawasan strategis metropolitan, maka Klaster Metropolitan ditetapkan pada Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto dengan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kelengkapan infrastruktur wilayah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan simpul Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- b. Pengembangan permukiman dan perdagangan-jasa sebagai pusat perkotaan didukung sektor industri di sekitarnya.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Program Pengembangan Industri Non Agro, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan,

- c. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengembangan UKM untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran perkotaan

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengendalian Penyakit, Program Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

- d. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah mendukung pengembangan Agropolitan dan pariwisata yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, stabilitas sosial, dan mitigasi bencana.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana



## F. Klaster Segitiga Emas

Gambar 5.8 Klaster Segitiga Emas



Klaster Segitiga Emas berdasarkan arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan beberapa kawasan antara lain :

- a. Kawasan Agro Industri sebagai kawasan yang mengintegrasikan kawasan penghasil bahan dan pengolahan bahan baku pertanian, perikanan, dan bahan baku kebutuhan dasar lainnya dengan pusat koleksi dan distribusi regional dengan komoditas unggulan mangga dan jagung, yang ditetapkan pada :
  - 1) Kab. Gresik (Bagian Utara)
  - 2) Kab Lamongan (Bagian Utara)
- b. Kawasan Perbatasan antar Kabupaten/Kota sebagai kawasan Segitiga Emas Pertumbuhan dengan komoditas unggulan migas (minyak dan gas) dan industri kondensat sebagai kawasan perbatasan antar-kabupaten/kota yang memiliki potensi pertumbuhan perekonomian sektoral yang tinggi yang ditetapkan pada:
  - 1) Kab. Tuban
  - 2) Kab. Lamongan
  - 3) Kab. Bojonegoro



Berdasarkan arahan Kawasan Agroindustri Gresik-Lamongan dan kawasan perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sisi utara, maka Klaster Segitiga Emas ditetapkan pada Kabupaten Tuban-Lamongan-Bojonegoro sebagai wilayah inti pengembangan Klaster Segitiga Emas dan Kabupaten Gresik sebagai pendukung pengembangan Klaster Segitiga Emas dengan arahan sebagai berikut:

- a. Pengembangan sektor industri agro, kondensat, dan maritim yang dengan kelengkapan infrastruktur wilayah pendukung konektivitas regional menuju pasar internasional dan nasional untuk mewujudkan daya saing wilayah.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pengembangan Industri Non Agro, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Penanaman Modal

- b. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, dengan komoditas unggulan jagung, mangga, tanaman pangan.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan, Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan, Program Pengembangan Industri Agro, Program Peningkatan Produksi Produktivitas Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan,

- c. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengembangan UKM untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengendalian Penyakit, Program Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

- d. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah mendukung pengembangan Agropolitan dan pariwisata yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, stabilitas sosial, dan mitigasi bencana termasuk kerjasama dengan Jawa Tengah.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

## G. Klaster Regional Kelud

Gambar 5.9 Regional Kelud



Klaster Regional Kelud berfungsi sebagai pemerataan aktifitas pusat pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur yang terdiri dari :

- Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Kediri : Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung
- Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Blitar yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Blitar

Berdasarkan arahan wilayah pengembangan, maka Klaster Regional Kelud ditetapkan pada Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar dengan arahan sebagai berikut:

- Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi agro (perkebunan, pertanian, peternakan) dan pariwisata dengan komoditas unggulan ternak unggas dan telur, kakao, buah-buahan (nanas, belimbing), tembakau.
- Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan, Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan, Program

Pengembangan Industri Agro, Program Peningkatan Produksi Produktivitas Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan, Program Pemanfaatan Dan Perlindungan Sumber Daya Air, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,

- c. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengembangan UKM untuk menurunkan tingkat kemiskinan
- d. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengendalian Penyakit, Program Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial
- e. Pengembangan infrastruktur wilayah pendukung konektivitas regional untuk mewujudkan daya saing wilayah dan membuka akses
- f. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
- g. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah mendukung pengembangan Agropolitan dan pariwisata yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, stabilitas sosial, dan mitigasi bencana.
- h. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

H. Klaster Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Gambar 4.10 Klaster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil



Klaster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berfungsi sebagai pemerataan dan sebagai upaya untuk membuka akses pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih belum terlayani di Provinsi Jawa Timur. Klaster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diarahkan pada wilayah yang berada pada pesisir Jawa Timur dan wilayah kepulauan dengan arahan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sumber daya pesisir-laut dan sektor unggulan termasuk potensi pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diiringi pemberdayaan masyarakat pesisir.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

- b. Pengembangan infrastruktur untuk membuka akses dan mendorong investasi kemaritiman dengan konsep minapolitan dengan lokus pengembangan di wilayah Malang, Pacitan, Trenggalek, Banyuwangi, Tuban, dan Sumenep

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut,

- c. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah mendukung pengembangan Agropolitan dan pariwisata yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, stabilitas sosial, dan mitigasi bencana.

Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

## V.2 Arahan kepada Kabupaten/Kota

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota didasarkan pada kinerja seluruh pembangunan di daerah baik dari sisi ekonomi maupun social. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari integrasi pembangunan baik ditingkat provinsi maupun pusat. Focus pembangunan tersebut untuk menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data BPS tentang IPM, Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka didapatkan data kondisi sosial Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 5.5. Kondisi Sosial Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Ekonomi 2016	% Penduduk Miskin Mar 2017	TPT Feb 2016	AHH 2016	HLS 2016	RLS 2016
1	Kab. Pacitan	5,21	15,42	1,00	71,18	12,19	6,89
2	Kab. Ponorogo	5,29	11,39	3,94	72,18	13,69	6,97
3	Kab. Trenggalek	5,00	12,96	3,07	73,03	12,09	7,19
4	Kab. Tulungagung	5,02	8,04	3,60	73,40	13,03	7,73
5	Kab. Blitar	5,09	9,80	2,92	72,89	12,42	7,25
6	Kab. Kediri	5,02	12,25	5,44	72,20	12,57	7,58
7	Kab. Malang	5,30	11,04	5,50	72,05	12,28	6,98
8	Kab. Lumajang	4,70	10,87	1,71	69,38	11,77	6,05
9	Kab. Jember	5,21	11,00	5,21	68,37	12,31	6,05
10	Kab. Banyuwangi	5,38	8,64	4,43	70,11	12,55	6,93
11	Kab. Bondowoso	4,97	14,54	1,81	65,89	12,87	5,54
12	Kab. Situbondo	5,00	13,05	3,98	68,41	12,99	5,68
13	Kab. Probolinggo	4,77	20,52	2,29	66,31	12,05	5,67
14	Kab. Pasuruan	5,44	10,34	5,44	69,86	11,81	6,58
15	Kab. Sidoarjo	5,51	6,23	5,56	73,67	14,13	10,22
16	Kab. Mojokerto	5,41	10,19	4,29	72,03	12,44	7,76
17	Kab. Jombang	5,40	10,48	4,95	71,77	12,69	7,68
18	Kab. Nganjuk	5,29	11,98	2,01	71,04	12,82	7,34
19	Kab. Madiun	5,27	12,28	6,69	70,55	13,11	7,00
20	Kab. Magetan	5,31	10,48	6,36	72,09	13,71	7,66
21	Kab. Ngawi	5,21	14,91	5,33	71,63	12,65	6,54
22	Kab. Bojonegoro	21,95	14,34	4,91	70,67	12,11	6,65
23	Kab. Tuban	4,90	16,87	2,78	70,67	12,17	6,25
24	Kab. Lamongan	5,86	14,42	3,88	71,77	13,44	7,29
25	Kab. Gresik	5,50	12,80	4,81	72,33	13,69	8,94
26	Kab. Bangkalan	0,66	21,32	5,28	69,77	11,56	5,13
27	Kab. Sampang	6,17	23,56	2,77	67,62	11,37	3,79
28	Kab. Pamekasan	5,35	16,00	4,19	66,95	13,35	6,08
29	Kab. Sumenep	2,58	19,62	2,00	70,56	12,73	5,08
30	Kota Kediri	5,50	8,49	8,22	73,65	14,61	9,89
31	Kota Blitar	5,76	8,03	4,81	73,09	14,00	9,88
32	Kota Malang	5,61	4,17	6,91	72,68	15,38	10,14
33	Kota Probolinggo	5,88	7,84	3,96	69,79	13,54	8,47
34	Kota Pasuruan	5,46	7,53	6,35	70,93	13,57	9,08
35	Kota Mojokerto	5,77	5,73	3,33	72,78	13,80	9,93
36	Kota Madiun	5,90	4,94	5,12	72,44	14,19	11,09
37	Kota Surabaya	6,00	5,39	7,29	73,87	13,99	10,44
38	Kota Batu	6,61	4,31	3,75	72,20	13,62	8,45
Jawa Timur		5,55	11,77	4,21	70,74	12,98	7,23

No	Kabupaten/Kota	Ekonomi 2016	% Penduduk Miskin Mar 2017	TPT Feb 2016	AHH 2016	HLS 2016	RLS 2016
	Nasional	5,02	10,64	5,61	70,90	12,72	7,95

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan kondisi sosial Kabupaten/Kota dan hasil analisa Location Quotient dan Shift Share Analysis, maka arahan pembangunan kepada kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

1. KABUPATEN PACITAN

Sektor basis/unggulan memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Kondisi sosial masih perlu penanganan yaitu dalam hal kemiskinan dan pendidikan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada:

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; serta Real Estate yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

## 2. KABUPATEN PONOROGO

Sektor basis/unggulan memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Jasa Pendidikan.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada:

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.

## 3. Kabupaten Trenggalek

Sektor basis/unggulan memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, dan Pendidikan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

#### 4. KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sektor basis/unggulan memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Jasa Pendidikan. Dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan akomodasi dan Makan Minum yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia



- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.

## 5. KABUPATEN BLITAR

Sektor basis/unggulan memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.

## 6. KABUPATEN KEDIRI

Sektor basis/unggulan memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, dan Pengangguran, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Perusahaan yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.

- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.

## 7. KABUPATEN MALANG

Sektor basis/unggulan memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Industri Pengolahan.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, Pengangguran dan Pendidikan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

#### 8. KABUPATEN LUMAJANG

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, Kesehatan dan Pendidikan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; serta Real Estate yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- i. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

## 9. KABUPATEN JEMBER

Sektor basis/unggulan memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, Pengangguran, Kesehatan dan Pendidikan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan Pergudangan; Real Estate; serta Jasa Perusahaanyang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- i. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

## 10. KABUPATEN BANYUWANGI

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Pengangguran, Kesehatan dan Pendidikan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Jasa Perusahaan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.

- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

#### 11. KABUPATEN BONDOWOSO

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Pendidikan.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, Pengangguran, Kesehatan dan Pendidikan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Real Estate yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- i. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

## 12. KABUPATEN SITUBONDO

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; serta Jasa Pendidikan.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, Pengangguran, Kesehatan dan Pendidikan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Real Estate yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- i. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

### 13. KABUPATEN PROBOLINGGO

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang; real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Lainnya.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, Kesehatan dan Pendidikan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan; serta Jasa Pendidikan yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- i. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

### 14. KABUPATEN PASURUAN

Sektor basis/unggulan memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Industri Pengolahan.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, Kesehatan dan Pendidikan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- i. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

#### 15. KABUPATEN SIDOARJO

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Industri Pengolahan.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Pengangguran, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; serta Jasa Pendidikan yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing



- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.

#### 16. KABUPATEN MOJOKERTO

Sektor basis/unggulan memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Industri Pengolahan; serta Informasi dan Komunikasi.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Pengangguran, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Jasa Perusahaan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.

#### 17. KABUPATEN JOMBANG

Sektor basis/unggulan memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi; Real Estate; serta Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Pengangguran, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Jasa Keuangan dan Asuransi; yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.

#### 18. KABUPATEN NGANJUK.

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Real Estate.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Informasi dan Komunikasi yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi

- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.

#### 19. KABUPATEN MADIUN

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Informasi dan komunikasi; dan Real Estate.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, pengangguran, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; serta Jasa Perusahaan yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.

## 20. KABUPATEN MAGETAN

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Pengangguran, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; serta Jasa Perusahaan yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.

## 21. KABUPATEN NGAWI

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, Pengangguran dan Pendidikan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; dan Jasa Perusahaan yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

## 22. KABUPATEN BOJONEGORO

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalan; serta Informasi dan Komunikasi.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, Pengangguran, Kesehatan dan Pendidikan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; serta Jasa Perusahaan yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing

- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- i. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

### 23. KABUPATEN TUBAN

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Konstruksi; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, Kesehatan dan Pendidikan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- i. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

#### 24. KABUPATEN LAMONGAN

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Real Estate; Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Industri pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.

## 25. KABUPATEN GRESIK

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Industri Pengolahan.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.

## 26. KABUPATEN BANGKALAN

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, Pengangguran, Kesehatan dan Pendidikan, sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :



- a. Meningkatkan Sektor Informasi dan Komunikasi yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- i. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

## 27. KABUPATEN SAMPANG

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Jasa Pendidikan.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, Kesehatan dan Pendidikan sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; serta Real Estate yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.

- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- i. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

## 28. KABUPATEN PAMEKASAN

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Informasi dan komunikasi; dan Real Estate.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, dan Kesehatan sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan; Transportasi dan pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Jasa Perusahaan yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

## 29. KABUPATEN SUMENEP

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalan.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Kemiskinan, Kesehatan dan Pendidikan sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Industri pengolahan; Transportasi dan pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.
- g. Akselerasi penurunan kemiskinan.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- i. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

## 30. KOTA KEDIRI

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Industri Pengolahan.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Pengangguran sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.

### 31. KOTA BLITAR

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Real Estate.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Pengangguran sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing

- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.

## 32. KOTA MALANG

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Pengangguran sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; serta Jasa Perusahaan yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.

### 33. KOTA PROBOLINGGO

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi; Real Estate; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.

### 34. KOTA PASURUAN

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Jasa Pendidikan.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Pengangguran sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Perusahaan yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing

- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.

### 35. KOTA MOJOKERTO

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa lainnya. Dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- b. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- c. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- d. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- e. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.

### 36. KOTA MADIUN

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi; Real Estate; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Pengangguran sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Jasa Perusahaan yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.

### 37. KOTA SURABAYA

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Keuangan dan Asuransi.

Kondisi sosial masih perlu penanganan dalam hal Pengangguran sehingga dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing



- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.

### 38. KOTA BATU

Sektor basis/unggulan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat serta daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Real Estate. Dalam mengembangkan wilayah disarankan untuk fokus pada :

- a. Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan; serta Transportasi dan Pergudangan yang merupakan sektor prioritas menjadi sektor unggulan.
- b. Akselesari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
- d. Mendorong investasi di semua sektordalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.
- e. Modernisasi Infrastruktur dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Standarisasi kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor.

## BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

### VI.1 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2019

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, selanjutnya dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2019 yang diharapkan juga untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019.

Penetapan program dan kegiatan prioritas didasarkan melalui harmonisasi dan keselarasan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 serta RKP tahun 2019 yang diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja utama di tahun 2019 dan mendukung target capaian prioritas nasional.

Sinkronisasi Program & Kegiatan Prioritas Provinsi dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2019, sebagai berikut:

VI.1.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN – 1 :

1. PRIORITAS NASIONAL
- Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. PRIORITAS PROVINSI
- Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan
3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI
- Program dan kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2019 yang mendukung PRIORITAS PEMBANGUNAN-1, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2019 yang mendukung Prioritas Pembangunan-1

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
1. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1. Peningkatan kualitas vokasional dan keahlian khusus					
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u>					
	Peningkatan Kualitas Lulusan SMK	222.180 Siswa, 1.420 guru	Se-Jawa Timur	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik SMK	Dinas Pendidikan
	SMK Mini	294 lembaga	34 Kab/Kota (4 Kota yang tidak termasuk yaitu Kota Batu, Kota Blitar, Kota	Program Pendidikan Menengah	Manajemen Kelembagaan SMK Mini	Dinas Pendidikan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			Mojokerto, dan Kota Pasuruan)	Kejuruan		Dinas Pendidikan
	Pola Pengelolaan Keuangan BLUD SMK	20 lembaga	Kab Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Sidoarjo, Madiun, Malang, Tulungagung, Kota Surabaya	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik SMK	
	Peningkatan kualitas melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP P-1) pada SMK	200 lembaga, 1.000 assesor	Se-Jawa Timur	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Mutu dan Relevansi Pendidikan SMK	
	2. Peningkatan kualitas Pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana					
	KEGIATAN PRIORITAS:					
	Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	2862 orang	Se-Jawa Timur	Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga kependidikan	Manajemen Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
					Pendidikan Lanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
					Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	Dinas Pendidikan
	Bosda Madin	1,097,548 orang	Se-Jawa Timur	program	kegiatan	Dinas

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
				koordinasi penyelenggaraa n tugas pembantuan	penyelenggaraan manajemen bantuan pendidikan	Pendidikan
	.Bantuan Keuangan Siswa Miskin (BKSM)	53.052 siswa SMK, 37.568 Siswa SMA	Se-Jawa Timur	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa Miskin SMK	Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Menengah Atas	Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa Miskin SMA	Dinas Pendidikan
	Pengembangan SMA Taruna Nala dan SMA 3 Taruna Angkasa	2 Gedung, 6 RKB dan 1 Lokasi	Kabupaten Malang, dan Kota Madiun	Program Pendidikan Menengah Atas	Mutu dan Sarana SMA	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas SMA Double Track Pendidikan SMA	9575 Siswa	Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep)	Program Pendidikan Menengah Atas	Mutu dan Relevansi SMA	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan PK-PLK	1449 lembaga	Se Jawa Timur	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Mutu Sarana dan Prasarana SMK	Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Menengah Atas	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Atas (DAK)	Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-	Mutu Sarana Prasarana PK-PLK	Dinas Pendidikan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
				PLK)		
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	3. Peningkatan kualitas Kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih					
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u>					
	Peningkatan Kualitas fasilitas pelayanan kesehatan berstandart		1. Kabupaten Sumenep 2. Kabupaten Pacitan 3. Kabupaten Gresik 4. Kabupaten Situbondo 5. Kabupaten Bondowoso	Program Pelayanan Kesehatan Primer	Pembinaan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat	Dinas Kesehatan
					Pembinaan kualitas pelayanan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes)	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di daerah terpencil	Dinas Kesehatan
				Program Pelayanan	Pembinaan Pengelolaan	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
				Kesehatan Rujukan	Kualitas Pelayanan RS	
	Program pelayanan kesehatan Ibu Hamil dan Upaya Kesehatan Keluarga		1. Kab Ponorogo 2. Kab Mojokerto 3. Kab Madiun 4. Kab Jombang 5. Kab Bondowoso 6. Kab Jember 7. Kab Pacitan 8. Kab Tulungagung 9. Kab Bangkalan 10. Kota Pasuruan	Program Upaya Kesehatan Keluarga	Pembinaan Pengembangan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut	Dinas Kesehatan
					Pembinaan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah	Dinas Kesehatan
					Pembinaan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan
	Program Preventif yang diarahkan untuk Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan tidak Menular		1. Kab Bangkalan 2. Kab Pamekasan 3. Kab Sampang 4. Kab Sumenep 5. Kab Probolinggo	Program Pengendalian Penyakit	Penyelenggaraan Imunisasi	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			6. Kab Situbondo 7. Kota Surabaya 8. Kab Jember 9. Kab Tulungagung 10. Kab Banyuwangi 11. Kab Sidoarjo 12. Kota Malang 13. Kab Lumajang			
					Pengendalian Penyakit Hipertensi	Dinas Kesehatan
					Pengendalian Penyakit Diabetes	Dinas Kesehatan
					Pengendalian penyakit kanker	Dinas Kesehatan
				Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta	Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia	Dinas Kesehatan
				Program Pencegahan dan Pengendalian HIV	Pengendalian HIV/AIDs	Dinas Kesehatan
				Program Pencegahan dan Pengendalian TB	Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis)	Dinas Kesehatan
				Program	Penanggulangan	Dinas Sosial,



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
				Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	dampak sosial HIV/AIDS	
	Penurunan Prevalensi Stunting melalui Optimalisasi Gizi 1000 Hari Pertama Kehidupan		1. Kab Trenggalek 2. Kab Malang 3. Kab Jember 4. Kab Bondowoso 5. Kab Probolinggo 6. Kab Nganjuk 7. Kab Lamongan 8. Kab Bangkalan 9. Kab Sampang 10. Kab Pamekasan 11. Kab Sumenep	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	Dinas Kesehatan
					Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Dinas Kesehatan
					Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi	Dinas Kesehatan
	Program Promotif Kesehatan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		1. Kab Situbondo 2. Kab Ngawi 3. Kab Bangkalan 4. Kab Sampang 5. Kab Pamekasan 6. Kab Tuban 7. Kota Probolinggo	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Dinas Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat)	
					Penyehatan Sarana Sanitasi Dasar	
					Penyehatan Sarana Air Minum	
					Penyehatan Kawasan dan Tempat Umum	
	4. Peningkatan kualitas dan produktivitas ketenagakerjaan serta "Link and Match" antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja					
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u> Pelatihan Tenaga Kerja	30,032 orang	Jawa Timur			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Standarisasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemagangan	
					Pembinaan Kelembagaan Pelatihan dan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Pemberdayaan SDM Kepeleatihan dan Instruktur	
					Pembinaan Produktivitas dan Penyelenggaraan Sertifikasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di Bidang Pelatihan dan Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Singosari	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di PK Singosari Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT- PK Singosari Malang	
					Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Singosari Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Singosari Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Singosari Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
				Tenaga Kerja di UPT PK Jember	Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Jember	
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Jember	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Jember	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jember	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan penempatan	Dinas Tenaga Kerja dan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Jember	Transmigrasi
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Pasuruan	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Pasuruan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Pasuruan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Pasuruan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Pasuruan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Pasuruan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Mojokerto	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Mojokerto	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Mojokerto	
					Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Mojokerto	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Mojokerto	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Mojokerto	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
				Jombang	Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Jombang	
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Jombang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Jombang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jombang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Jombang	
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Tuban	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Tuban	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Tuban	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Tuban	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan dan	Dinas Tenaga

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Tuban	Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Tuban	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Nganjuk	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Nganjuk	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Berbasis Kompetensi di UPT- PK Nganjuk	
					Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Nganjuk	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Nganjuk	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Nganjuk	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Surabaya	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Berbasis Masyarakat di UPT-PK Surabaya	
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Surabaya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Surabaya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Surabaya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Surabaya	
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Sumenep	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Pelatihan Kerja Sumenep	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Sumenep	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Sumenep	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan dan pelatihan keterampilan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Sumenep	
					Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Sumenep	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Situbondo	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Pelatihan Kerja Situbondo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Berbasis Kompetensi di UPT-PK Situbondo	
					Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Situbondo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Situbondo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Situbondo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Kediri	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Kediri	
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Kediri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Kediri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Kediri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					bagi pencari kerja di UPT PK Kediri	
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Tulungagung	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan dan	Dinas Tenaga

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Tulungagung	Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Tulungagung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Madiun	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Madiun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Madiun	
					Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Madiun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Madiun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Madiun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Ponorogo	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Ponorogo	
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Ponorogo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Ponorogo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Ponorogo	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					di UPT PK Ponorogo	
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Bojonegoro	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Bojonegoro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Bojonegoro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Bojonegoro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan dan	Dinas Tenaga

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Bojonegoro	Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Bojonegoro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK PPPTKLN Wonojati Malang	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT PK PPPTKLN Wonojati Malang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT PK PPPTKLN Wonojati Malang	
					Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK PPPTKLN Wonojati	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK PPPTKLN Wonojati	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK PPPTKLN Wonojati	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan	Pendidikan Kemasyarakatan	Dinas Tenaga Kerja dan



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
				Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Produktif Dalam Rangka Revitalisasi dan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya	Transmigrasi
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan Pembinaan Produktifitas di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PPTK Surabaya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
				Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Informal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Penciptaan Pasar Kerja melalui Pembinaan Kelembagaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja Dalam dan Luar Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Penguatan SDM Antar Kerja untuk Mengoptimalkan Penciptaan Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat di Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja di Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Percepatan Pengurangan Kemiskinan	5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh.					
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u>					
	Peningkatan kualitas penanganan masalah sosial melalui bantuan pengeluaran masyarakat miskin	3.360 Orang	Se-Jawa Timur	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin	Dinas Sosial,
					Pembinaan dan	Dinas Sosial,

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Klien Fakir Miskin	
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial,
					Penanganan Korban Pasung Psikotik berbasis Keluarga	Dinas Sosial,
					Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi klien Anak Jalanan	Dinas Sosial,
				Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Kesiap-siagaan penanggulangan bencana alam Berbasis Masyarakat	Dinas Sosial,
					Kesiap-siagaan penanggulangan bencana sosial Berbasis Masyarakat	Dinas Sosial,
				Program Pengembangan Penyelenggara n	Penyuluhan dan publikasi kesejahteraan sosial	Dinas Sosial,

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	Pembiayaan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin			Kesejahteraan Sosial		
				Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan,
				Program Ketransmigrasi an	Pembinaan Perpindahan dan Penempatan Penduduk ke Luar Jawa	Dinas Tenaga Kerja
					Pembinaan Kapasitas Calon Transmigran	Dinas Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pelaksanaan Gerakan anti kejahatan seksual terhadap anak	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak dan Kependuduk an,
					Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak dan Kependuduk an,
					Pelaksanaan Tumbuh Kembang Anak	Dinas Pemberdayaa n Perempuan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
						Perlindungan Anak dan Kependudukan,
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Penguatan Sistem Pendataan Dinamika Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan,
					Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan,
					Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Pengarusutamaan Gender (PUG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan,
				Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	Penanganan Air Bersih Daerah Rawan Kekeringan		kab. Pasuruan, kab. Pamekasan, kab. Bondowoso, ab situbondo, kab. Sampang, kab. Bangkalan,kab. Tuban, kab lmongan kab. Mojokerto, kab. Sumenep	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Bersih Daerah Rawan Air	Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya
	SPAM Regional Mojokerto-Lamongan		Mojokerto-Lamongan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Regional	Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya
	Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		Jawa Timur	Program Penyelenggaraa n Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur	Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya

VI.1.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN – 2 :

1. PRIORITAS NASIONAL
- Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
2. PRIORITAS PROVINSI
- Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan
3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI
- Program dan kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2019 yang mendukung PRIORITAS PEMBANGUNAN - 2, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.2 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2019 yang mendukung Prioritas Pembangunan - 2

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
1. Peningkatan Konektivitas	1. Penguatan Konektivitas Darat, Laut dan udara untuk mendukung kawasan Potensial Ekonomi dan Pembangunan Desa					
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u> Pengembangan Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pembangunan Desa ( <i>usulan</i> )			Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan	Pemberdayaan Pasar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Pemberdayaan BUMDesa	Dinas



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
						Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Penanggulangan Kemiskinan Kelompok program pemberdayaan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
				Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel.	Pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan desa/kel.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Pelestarian dan Pemberdayaan adat istiadat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Penguatan kapasitas lembaga adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					(KPM)	Masyarakat Dan desa
					Pemberdayaan Forum/Asosiasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Jawa Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
				Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa	Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Pembinaan perencanaan pembangunan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Pendataan dan Pendayagunaan profil desa/kel	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Evaluasi tingkat perkembangan desa/kel	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Pembinaan Pengelolaan Administrasi pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Pembinaan penataan aset desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
						desa
					Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
				Program Peningkatan kerjasama desa	Pemberdayaan sumberdaya lokal berbasis kawasan perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Pembangunan potensi kawasan perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Pembinaan pendayagunaan sarana pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Pemberdayaan kualitas prasarana perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Pendayagunaan TTG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
					Inovasi TTG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
	Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi	1 project prospectus	Surabaya	Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Investasi	Kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	Pemeliharaan Jalan Provinsi	94,48%	Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kota, Surabaya, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo, Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Kab. Sumenep	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Surabaya	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Surabaya	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Mojokerto	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Mojokerto	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Bojonegoro	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Bojonegoro	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Madiun	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Madiun	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Pacitan	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Pacitan	Dinas PU Bina Marga

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Rehabilitasi/Pemeliharaann Jalan Wilayah UPT Kediri	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Kediri	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Malang	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Malang	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Probolinggo	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Probolinggo	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Jember	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Jember	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Banyuwangi	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Banyuwangi	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Pamekasan	Dinas PU Bina Marga
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Pamekasan	Dinas PU Bina Marga

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	Pembangunan dan Pelebaran Jalan Provinsi	54,8% 642 km	Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kota, Surabaya Kab. Mojokerto, Kab. Jombang Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban Kab. Magetan, Kab. PonorogoKab. Pacitan Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Blitar, Kota Blitar Kab. Malang, Kota Malang, Kota Batu Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Lumajang Kab. Jember, Kab. Bondowoso Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Kab. Sumenep	Program Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan	Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Surabaya	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Surabaya	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Mojokerto	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Mojokerto	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Bojonegoro	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Bojonegoro	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Madiun	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Madiun	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Pacitan	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Pacitan	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Kediri	Dinas PU Bina Marga

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Kediri	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Malang	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Malang	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan Jalan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Probolinggo	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Probolinggo	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Jember	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan penggantian Jembatan Wilayah UPT Jember	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Banyuwangi	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan penggantian Jembatan Wilayah UPT Banyuwangi	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Pamekasan	Dinas PU Bina Marga
					Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Pamekasan	Dinas PU Bina Marga

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	Peningkatan Infrastruktur Pelabuhan Laut	7 Pelabuhan Laut	pelabuhan laut brondong (Kab. Lamongan) pelabuhan laut Boom (Kab. Banyuwangi) pelabuhan P. Giliraja (Kab. Sumenep) Pelabuhan laut probolinggo (Kota Probolinggo) Pelabuhan laut di pulau gilimandangin (Kab. Sampang) Pelabuhan laut P gili ketapang(kab. probolinggo) Pelabuhan laut Prigi (Kab. Trenggalek)	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut	Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong Kabupaten Lamongan	Dinas Perhubungan
					Pembangunan Pelabuhan Laut Boom Kabupaten Banyuwangi	Dinas Perhubungan
					Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliraja Kabupaten Sumenep	Dinas Perhubungan
					Pembangunan Pelabuhan Laut Probolinggo Kota Probolinggo	Dinas Perhubungan
					Pembangunan Pelabuhan Laut di Pulau Gilimandangin Kabupaten Sampang	Dinas Perhubungan
					Pembangunan Pelabuhan Laut P. Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo	Dinas Perhubungan
					Pembangunan Pelabuhan Laut Prigi Kabupaten Trenggalek	Dinas Perhubungan
	Peningkatan Infrastruktur Transportasi Darat	26 Terminal Tipe B	terminal Padangan(Kabupaten Bojonegoro) terminal Temayang(Kabupaten	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana	Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
					Pemeliharaan Sarana	Dinas



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			Bojonegoro) terminal	Prasarana Angkutan Jalan	Prasana dan Fasilitas Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Perhubungan
			Betek(Kabupaten Bojonegoro) terminal		Manajemen Sistem Informasi Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
			Lamongan(Kabupaten Lamongan) terminal		Standarisasi ISO 9001 Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
			Bunder(Kabupaten Gresik) terminal		Pengadaan dan Pemasangan Variable Message Signs (VMS) di Terminal	Dinas Perhubungan
			Larangan(Kabupaten Sidoarjo) terminal		Pemeliharaan Variable Message Signs (VMS)	Dinas Perhubungan
			Kertajaya(Kota Mojokerto) terminal			
			Anjuk Ladang (Kabupaten Nganjuk) terminal			
			Caruban(Kabupaten Madiun) terminal			
			Maospati(Kabupaten Magetan) terminal			
			Magetan(Kabupaten Magetan) terminal			
			Ngadirojo(Kabupaten Pacitan) terminal			
			Kesamben(Kabupaten Blitar) terminal			
			Batu(Kota Batu)			

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			terminal Hamid Rusdi (Kota Malang) terminal Landungsari(Kota Malang) terminal Untung Suropati (Kota Pasuruan) terminal Minak Koncar (Kabupaten Lumajang ) terminal Ambulu (Kabupaten Jember) terminal Arjasa(Kabupaten Jember) terminal Bondowoso (Kabupaten Bondowoso ) terminal Situbondo(Kabupaten Situbondo ) terminal Brawijaya(Kabupaten Banyuwangi) terminal Trunojoyo(Kabupaten Sampang) terminal Ronggo Sukowati (Kabupaten Pamekasan) terminal Bangkalan(Kabupaten Bangkalan) Pelabuhan			
		4 Pelabuhan		Program	Pemeliharaan Sarana	Dinas

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
		Penyeberangan	Penyeberangan Ketapang (Kabupaten Banyuwangi) Pelabuhan Penyeberangan Paciran (Kabupaten Lamongan) Pelabuhan Penyeberangan Jangkar (Kabupaten Situbondo) Pelabuhan Penyeberangan Pulau Bawean (Kabupaten Gresik)	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	Prasarana ASDP Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kab. Banyuwangi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kab. Lamongan Pembangunan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jawa Timur	Perhubungan
						Dinas Perhubungan
						Dinas Perhubungan
						Dinas Perhubungan
	Pengembangan Bandara	3 Bandara	Bandara Abdulrachman Saleh Malang (Kabupaten Malang)  Bandara Pulau Kangean (Kabupaten Sumenep)  Bandara Pulau Masalembo (Kabupaten Sumenep)	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda	Pembangunan Sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda	Dinas Perhubungan
					Pemeliharaan Sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda	Dinas Perhubungan
					Pembangunan Bandara Pulau Kangean	Dinas Perhubungan
					Pembangunan Bandara Pulau Masalembo	Dinas Perhubungan
	Peningkatan Keselamatan Transportasi	61,94 persen	Jalan Provinsi di Jawa Timur	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pengadaan dan pemasangan RPPJ model Bando	Dinas Perhubungan
					Pengadaan dan pemasangan paku marka	Dinas Perhubungan
					Pengadaan dan pemasangan traffic light	Dinas Perhubungan
					Pengadaan dan Pemasangan Flashing Light	Dinas Perhubungan
					Pengadaan dan	Dinas

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
		12 unit	Perlindungan Sebidang di Jawa Timur		Pemasangan RPPJ model F	Perhubungan
					Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	Dinas Perhubungan
					Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Dinas Perhubungan
					Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
					Pengadaan dan Pemasangan Papan Himbauan	Dinas Perhubungan
					Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan (delineator)	Dinas Perhubungan
					Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Dinas Perhubungan
					Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
					Pengadaan dan Pemasangan Alat Pantau Kendaraan Terklasifikasi	Dinas Perhubungan
		528 kali	Jawa Timur	Program Pelayanan Angkutan Kereta Api	Pengadaan dan Pemasangan EWS di Perlindungan Sebidang KA se-Jatim	Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Jalan	Sadar Keselamatan dan Ketertiban Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	Mudik Balik Gratis	24.300 pemudik	Jawa Timur	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi Darat berbasis Jalan (Bus)	Dinas Perhubungan
		117.850 pemudik	Jawa Timur	Program Pelayanan Angkutan Kereta Api	Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi Darat Berbasis Rel (Kereta Api)	Dinas Perhubungan
		5 rute pelayaran	Jawa Timur	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pelayaran	Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi Laut (Kepulauan)	Dinas Perhubungan
		400 unit	Jawa Timur	Program Pengelolaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Penyelenggaraan Angkutan Sepeda Motor Gratis	Dinas Perhubungan
2. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika	2. Pengembangan dan Pengelolaan telekomunikasi dan Informatika					
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u> pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	62%	Jawa Timur	program aplikasi informatika	tata kelola dna pemberdayaan TIK	Dinas Komunikasi dan Informasi
					penguatan fungsional aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informasi
					persandian dan keamanan informasi	Dinas Komunikasi dan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
						Informasi
				program infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	pembangunan infrastruktur jaringan TIK	Dinas Komunikasi dan Informasi
					pemeliharaan infrastruktur TIK	Dinas Komunikasi dan Informasi
					pengendalian infrastruktur TIK	Dinas Komunikasi dan Informasi
				Program pengelolaan data dan statistik	pengelolaan Data	Dinas Komunikasi dan Informasi
					Analisis statistik	Dinas Komunikasi dan Informasi
					evaluasi dan informasi data statistik	Dinas Komunikasi dan Informasi

VI.1.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN – 3 :

1. PRIORITAS NASIONAL
- Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif
2. PRIORITAS PROVINSI
- Peningkatan nilai tambah agroindustri melalui pengembangan agromaritim serta akselerasi kepariwisataan.
3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI
- Program dan kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2019 yang mendukung PRIORITAS PEMBANGUNAN - 3, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.3 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2019 yang mendukung Prioritas Pembangunan - 3

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
1. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	1. Peningkatan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan					
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u>					
	Pengembangan peralatan pengolahan pakan ternak (mini feedmill) untuk efisiensi pakan ternak dalam rangka menekan biaya produksi	Jumlah alsin pengolah pakan yang sesuai standar (40 unit)	Pacitan, ternggalek, tulungagung, bojonegoro, lamongan, pasuruan, pamekasan, banyuwangi, jombang, lumajang, sitbondo	Program peningkatan Produksi Peternakan	Pembinaan dan pengawasan mutu pakan, penerapan teknologi pakan, dan penyaluran benih HPT	Dinas Peternakan
	Penguatan kelembagaan kelompok peternak dan	Jumlah kelompok yang difasilitasi	se Jawa Timur	Program pengembangan	Kegiatan Pengembangan	Dinas Peternakan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	unit-unit usaha peternakan	pembiaayaan (50 kelompok); Jumlah kelompok yang difasilitasi asuransi ternak (100 kelompok); Jumlah kelompok peternak berprestasi (20 kelompok)		agribisnis peternakan	investasi usaha dan penguatan kelembagaan kelompok peternak	
		Jumlah kelompok pengolah hasil peternakan yang dibina (20 kelompok); Jumlah produk yang dihasilkan kelompok pengolah hasil peternakan (10 produk)		Program pengembangan agribisnis peternakan	Kegiatan Pengolahan produk hasil peternakan	Dinas Peternakan
	Penjaminan mutu produk peternakan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh Halal)	Jumlah unit usaha produk hewan yang memenuhi standar NKV 20(unit); Jumlah RPH yang memenuhi standar (2unit)	se Jawa Timur	Program Peningkatan Produk Hewan yang ASUH	Penerapan jaminan keamanan pangan	Dinas Peternakan
		Jumlah hewan/ternak yang di vaksin	se Jawa Timur	Program Penjaminan Kesehatan Hewan	Pencegahan Pengendalian dan Penanggulangan	Dinas Peternakan



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
		PHMS tertentu (400.000 ekor); Jumlah petugas dan peternak yang dilatih penerapan bio security 3 zona (210 orang); Jumlah ternak sapi di UPT lingkup Disnak Provinsi yang memperoleh penanganan gangguan reproduksi (200 ekor); jumlah desa yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan terpadu (4 desa); jumlah pos pemeriksaan hewan dan wilayah perbatasan yg terfasilitasi (5 pos)			Penyakit Hewan Menular lainnya	
	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Hasil dan Nilai Tambah Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	5 kemitraan, 8 promosi dan 125 pembinaan	Kelompok petani perkebunan yang telah menerapkan teknologi budidaya dan teknologi pengolahan hasil di Jawa Timur	Program Bimbingan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Pembinaan kemitraan, promosi produk, dan pembinaan usaha perkebunan besar	Dinas Perkebunan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
		10 kelompok tani	Kabupaten Situbondo, Kab. Mojokerto, Kab. Kediri, Kab. Madiun, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Malang		Pengawalan dan sertifikasi Mutu Produk Perkebunan	Dinas Perkebunan
	Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih	612 sertifikat	Lokasi sebaran benih yang akan dan yang telah disertifikasi di Jawa timur	Program Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	Pelayanan Teknis pengawasan dan pengujian mutu benih	Dinas Perkebunan
	Penataan Agribisnis melalui Cooperative Farming	28 Kelompok	Kabupaten Bangkalan,Kabupaten Banyuwangi,Kabupaten Blitar,Kabupaten Bojonegoro,Kabupaten Bondowoso,Kabupaten Gresik,Kabupaten Jember,Kabupaten Jombang,abupaten Lamongan,Kabupaten Lumajang,Kabupaten Madiun,Kabupaten Magetan,Kabupaten Malang,Kabupaten Mojokerto,Kabupaten Nganjuk,Kabupaten Ngawi,Kabupaten Ponorogo,KKabupaten Sidoarjo,Kabupaten Situbondo,Kabupaten Sumenep,Kabupaten Trenggalek,Kabupaten Tuban,Kabupaten Tulungagung,	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan	Penataan Agribisnis melalui Cooperative Farming	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	Standardisasi Mutu Produk	38 Kab/Kota	Kabupaten Bangkalan,Kabupaten Banyuwangi,Kabupaten Blitar,Kabupaten Bojonegoro,Kabupaten Bondowoso,Kabupaten Gresik,Kabupaten Jember,Kabupaten Jombang,Kabupaten Kediri,Kabupaten Lamongan,Kabupaten Lumajang,Kabupaten Madiun,Kabupaten Magetan,Kabupaten Malang,Kabupaten Mojokerto,Kabupaten Nganjuk,Kabupaten Ngawi,Kabupaten Pacitan,Kabupaten Pamekasan,Kabupaten Pasuruan,Kabupaten Ponorogo,Kabupaten Probolinggo,Kabupaten Sampang,Kabupaten Sidoarjo,Kabupaten Situbondo,Kabupaten Sumenep,Kabupaten Trenggalek,Kabupaten Tuban,Kabupaten Tulungagung,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota	Program Pengembagn Mutu dan Standarisasi Hasil	Standardisasi Mutu Produk	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			Probolinggo,Kota Surabaya,Kota Batu			
	Pembinaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	274 Unit	Kabupaten Bangkalan,Kabupaten Banyuwangi,Kabupaten Blitar,Kabupaten Bojonegoro,Kabupaten Bondowoso,Kabupaten Gresik,Kabupaten Jember,Kabupaten Jombang,Kabupaten Kediri,Kabupaten Lamongan,Kabupaten Lumajang,Kabupaten Madiun,Kabupaten Magetan,Kabupaten Malang,Kabupaten Mojokerto,Kabupaten Nganjuk,Kabupaten Ngawi,Kabupaten Pacitan,Kabupaten Pamekasan,Kabupaten Pasuruan,Kabupaten Ponorogo,Kabupaten Probolinggo,Kabupaten Sampang,Kabupaten Sidoarjo,Kabupaten Situbondo,Kabupaten Sumenep,Kabupaten Trenggalek,Kabupaten Tuban,Kabupaten Tulungagung,	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan	Pembinaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan
	Peningkatan nilai tambah produk hasil kelautan dan	Jumlah produk olahan dari UPI	38 Kab/Kota	Program Peningkatan	Pengendalian jaminan mutu	Dinas Perikanan dan Kelautan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	perikanan	yang bersertifikat 900.000 ton		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	dan diversifikasi produk hasil perikanan	
					Penguatan usaha kelautan dan perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Promosi, Pemasaran dan Penguatan Logistik	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Banyuwangi	Dinas Perikanan dan Kelautan
	Peningkatan Produksi, Produktifitas, Mutu Hasil dan Nilai Tambah Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	317 pelaku industri	- Kab. Trenggalek - Kota Malang Kota Surabaya	Program Pengembangan Industri Agro	Pembinaan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Pengembangan Kawasan Agro Industri	535 pelaku industri	- Kab. Bondowoso - Kab. Ponorogo	Program Pengembangan	Pembinaan Industri Hasil	Dinas Perindustrian dan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			-Kab. Trenggalek -Kab. Tulungagung Kab. Pasuruan	Industri Agro	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	Perdagangan
		883 pelaku industri	-Kota Batu -Kota Mojokerto -Kab. Probolinggo -Kab. Tulungagung -Kab. Pasuruan -Kab. Ngawi -Kab. Nganjuk Kab. Bojonegoro		Pembinaan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		323 pelaku industri	Surabaya		Pembinaan Pelaku Industri di Kawasan Agropolitan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		83 kelompok	Kab. Probolinggo		Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri Agro	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan	2. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Agro-Industri, Koperasi dan UKM					
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u>					
	Penguatan kelembagaan Koperasi UKM	200 KUKM	- Malang - Sumenep - Bojonegoro - Kab. Kediri - Magetan	Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM	Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Tata Laksana Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UMKM
	Perluasan akses	2290 KUKM	- Kt. Malang	Program	Penguatan usaha	Dinas Koperasi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	pembiayaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumenep</li> <li>- Kab. Mojokerto</li> <li>- Kab. Pasuruan</li> <li>- Jombang</li> <li>- Pacitan</li> <li>- Tuban</li> <li>- Kt. Kediri</li> <li>- Jember</li> <li>- Bondowoso</li> <li>- Bojonegoro</li> </ul>	Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM	syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah	dan UMKM
	Peningkatan produktivitas dan pemasaran koperasi dan UKM	2945 KUKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Madiun</li> <li>- Tulungagung</li> <li>- Kab. Blitar</li> <li>- Nganjuk</li> <li>- Bojonegoro</li> <li>- Kab. Mojokerto</li> <li>- Kab. Kediri</li> <li>- Kab. Malang</li> <li>- Sampang</li> <li>- Banyuwangi</li> <li>-Pamekasan</li> <li>- Kab. Malang</li> <li>- Bojonegoro</li> <li>- Jember</li> <li>- Kab. Madiun</li> <li>-Makassar</li> <li>- Medan</li> <li>- Bandung</li> <li>- Bali</li> <li>- Palembang</li> <li>- Sidoarjo</li> </ul>	Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Penguatan Usaha K-UKM	Dinas Koperasi dan UMKM
					Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE	Dinas Koperasi dan UMKM
				Program Pemasaran Produk Koperasi UKM	Promosi Produk K-UKM melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri	Dinas Koperasi dan UMKM
					Penguatan informasi pasar bagi K-UKM	Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	Peningkatan Teknologi Industri, Standarisasi dan Sertifikasi Produk	4625 jasa	Kota Surabaya Kota Pasuruan Kab. Magetan Kab. Sidoarjo	Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri	Pelayanan Teknis pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Pelayanan Teknis pada UPTI Kayu dan Produk Kayu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Pelayanan Teknis pada UPTI Kulit dan Produk Kulit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Pelayanan Teknis pada UPTI Logam dan Perekayasaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Pelayanan Teknis pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Peningkatan Standarisasi Industri	Pembinaan Mutu Produk Industri dan Hak Kekayaan Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Pembinaan Mutu Produk Industri dan Hak Kekayaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang	
	Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif	Gedung (Pendopo)	UPT Ekraf Taman Chandra Wilwatikta Pasuruan	Program pengembangan ekonomi kreatif	Penguatan sarana dan prasarana UPT. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3. Akselerasi Kepariwisata					
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u> Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Jumlah kelompok yang difasilitasi pembinaan (55 grup dan 580 orang) Jumlah penyelenggaraan kesenian (27 kali dan 60 karya seni) Jumlah revitalisasi (2 kegiatan)	Se-Jawa Timur			
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pembinaan Kesenian	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan festival budaya daerah	

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
				Program pengembangan Lembaga Seni Wilwatikta	Penyelenggaraan Lembaga Seni Wilwatikta	
				Program Pengembangan Taman Budaya	Penyajian Seni Budaya	
				Program Pengembangan Laboratorium, pelatihan dan Kesenian	Revitalisasi dan Reaktualisasi Seni Budaya	
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan	
				Program pengelolaan Museum	Penyajian dan Bimbingan Edukasi Museum	
	Optimalisasi pemasaran pariwisata	19 jenis penguatan sarana promosi dan 14 kali promosi Dalam dan Luar Negeri	Se-Jawa Timur	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Penguatan sarana promosi dan informasi pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Promosi Dalam Negeri	
					Promosi Pariwisata Luar Negeri	
	Pengembangan industri	218 usaha	Se-Jawa Timur	Program	Penguatan Usaha	Dinas

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	pariwisata			Pengembangan Industri Pariwisata	Sarana Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengembangan Industri Pariwisata	Penguatan Usaha Jasa Pariwisata	
	Pengembangan destinasi pariwisata	27 DTW dan 420 orang	Se-Jawa Timur	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Ekstentifikasi Destinasi Wisata Budaya Dan Buatan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Ekstentifikasi Destinasi Wisata Alam	
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Destinasi	
	Pengembangan ekonomi kreatif	200 orang dan 60 usaha	Kab/Kota di Jatim	Program pengembangan ekonomi kreatif	Penguatan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
				Program pengembangan ekonomi kreatif	Penguatan Produk Ekonomi Kreatif	
	4. Peningkatan Produktifitas Sumber Daya Manusia Pertanian, Industri dan Pariwisata					

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u>					
	Pemberdayaan Kelompok Mitra Usaha Kawasan Agropolitan	9 Kelompok	Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pertanian	Pemberdayaan Kelompok Mitra Usaha Kawasan Agropolitan	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan
	Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian, Industri dan Pariwisata dan koperasi	689 pelaku industri	-Kab. Bojonegoro -Kab. Ponorogo -Kab. Bondowoso -Kota Malang -Kota Mojokerto -Kab. Lamongan	Program Pengembangan Industri Non-Agro	Pembinaan Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		593 pelaku industri	-Kota Malang -Kab. Bojonegoro -Kab. Magetan -Kab. Lamongan -Kab. Mojokerto -Kab. Trenggalek -Kab. Jombang -Kota Probolinggo -Kota Malang -Kab. Nganjuk -Kab. Magetan -Kota Surabaya		Pembinaan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		83 kelompok	-Kab. Probolinggo		Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					non Agro	
		250 pelaku industri	- Kota Suarabayaa - Kota Probolinggo		Pembinaan Industri Elektronik dan Telematika	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		317 pelaku industri	- Kab. Trenggalek - Kota Malang - Kota Surabaya	Program Pengembangan Industri Agro	Pembinaan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		535 pelaku industri	- Kab. Bondowoso - Kab. Ponorogo - Kab. Trenggalek - Kab. Tulungagung - Kab. Pasuruan		Pembinaan Industri Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		883 pelaku industri	- Kota Surabaya - Kota Batu - Kota Mojokerto - Kab. Probolinggo - Kab. Tulungagung - Kab. Pasuruan - Kab. Ngawi - Kab. Nganjuk - Kab. Bojonegoro		Pembinaan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		323 pelaku industri	- Kota Surabaya		Pembinaan Pelaku Industri di Kawasan Agropolitan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		83 kelompok	- Kab. Bojonegoro - Kab. Trenggalek		Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri Agro	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		110 pelaku	- Kota Surabaya	Program	Pembinaan	Dinas

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
		industri	- Kota Malang - Kab. Lamongan	Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri	industri pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan	Perindustrian dan Perdagangan
		110 pelaku industri	- Kab. Bondowoso - Kab. Malang - Kota Pasuruan - Kab. Pasuruan - Kab. Trenggalek - Kab. Tulungagung - Kota Surabaya - Medan - Jakarta - Tomohon		Pembinaan industri pada UPTI Kayu dan Produk Kayu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		110 pelaku industri	- Kab. Magetan - Kab. Ponorogo - Kab. Pacitan - Kab. Bondowoso - Kab. Pasuruan - Jogjakarta - Jakarta		Pembinaan industri pada UPTI Kulit dan Produk Kulit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		110 pelaku industri			Pembinaan industri pada UPTI Logam dan Perekayasaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		110 pelaku industri	Kota Surabaya, Kab Ngawi, Kab. Lumajang, Kab. Tuban, Kab. Trenggalek, kab. Sidoarjo		Pembinaan industri pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		820 pelaku industri	38 Kab/Kota Se Jawa Timur	Program Peningkatan Standarisasi Industri	Pembinaan Mutu Produk Industri dan Hak Kekayaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya	
		540 pelaku industri	-Kota Surabaya -Kab Sidoarjo -Kab. Banyuwangi		Pembinaan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		425 pelaku industri	-Kota Malang -Kab. Malang -Kota Blitar -Kab Blitar -Kota Batu		Pembinaan Mutu Produk Industri dan Hak Kekayaan Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		286 pelaku industri	-Kota Malang -Kab. Malang -Kota Blitar -Kab Blitar -Kota Batu		Pembinaan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif pada UPT	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang	
		317 pelaku industri	-Kab. Trenggalek -Kota Malang -Kota Surabaya	Program Pengembangan Industri Agro	Pembinaan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		535 pelaku industri	-Kab. Bondowoso -Kab. Ponorogo -Kab. Trenggalek -Kab. Tulungagung Kab. Pasuruan		Pembinaan Industri Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		883 pelaku industri	-Kota Surabaya -Kota Batu -Kota Mojokerto -Kab. Probolinggo -Kab. Tulungagung -Kab. Pasuruan -Kab. Ngawi -Kab. Nganjuk -Kab. Bojonegoro		Pembinaan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		323 pelaku industri	-Kota Surabaya		Pembinaan Pelaku Industri di Kawasan Agropolitan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		83 kelompok	-Kab. Bojonegoro -Kab. Trenggalek		Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri Agro	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Peningkatan Kapasitas	150 orang dan	Kab/Kota di Jatim	Program	Penguatan	Dinas



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	SDM Non Aparatur Pertanian, Industri dan Pariwisata dan koperasi	360 UKM		Pengembangan Industri Pariwisata	Sumber Daya Manusia Profesionalisme Bidang Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM	Dinas Koperasi dan UKM
3. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas	5. Pengembangan Industrialisasi Berbasis Ekonomi Digital					
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u>					
	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal (EJISC)	1 aplikasi	Surabaya	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal PTSP
	Integrasi SIPAP, dan Dashboard PEPI	20 importir	- Kota Surabaya	Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	Pengendalian dan pengawasan produk-produk impor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal (Ejisc)	85 unit usaha	- Amerika Utara - Eropa Barat - Eropa Timur - Eropa Utara - Afrika Utara - Asia Pasific - Asia Tenggara - Asia Selatan		Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	Integrasi Aplikasi Sistem produksi	77 UKM	-Kota Surabaya		Pelaksanaan Promosi Produk Potensi Ekspor UPT P3E Surabaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		156 unit usaha	- Surabaya - Manado - Kupang - Bantam - Ambon - Makasar - Semarang - Padang - Palembang - Banjarmasin - Bandung	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Penyelenggaraan Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Pengembangan Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		235 kerjasama	-26 Kantor Perwakilan dagang di 26 Provinsi Mitra di Indonesia - Batam - Manado - Pontianak - Jakarta - Surabaya		Penguatan Kantor Perwakilan Dagang (KPD)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2 dokumen	-Kota Surabaya	Program Penataan Struktur Industri dan Pengembangan Perdagangan	Penyusunan Sistem Pendataan Industri dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

VI.1.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN – 4 :

1. PRIORITAS NASIONAL
- Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan Dan Sumber Daya Air Melalui Pelestarian Lingkungan
2. PRIORITAS PROVINSI
- Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI
- Program dan kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2019 yang mendukung PRIORITAS PEMBANGUNAN - 4, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.4 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2019 yang mendukung Prioritas Pembangunan - 4

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
1. Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	1. Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi, Stabilisasi Harga Pangan, Penganeka-ragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan					
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u> Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan	30 kelompok	Kabupaten Bangkalan,Kabupaten Bojonegoro,Kabupaten	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/Perkebunan)	Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			Ngawi,Kabupaten Pamekasan,Kabupaten Situbondo,Kabupaten Trenggalek		Pangan	
	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	60 kelompok	Kabupaten Bangkalan,Kabupaten Banyuwangi,Kabupaten Blitar,Kabupaten Bojonegoro,Kabupaten Bondowoso,Kabupaten Gresik,Kabupaten Jember,Kabupaten Jombang,Kabupaten Kediri,Kabupaten Lamongan,Kabupaten Lumajang,Kabupaten Madiun,Kabupaten Magetan,Kabupaten Malang,Kabupaten Mojokerto,Kabupaten Nganjuk,Kabupaten Ngawi,Kabupaten Pacitan,Kabupaten Pamekasan,Kabupaten Pasuruan,Kabupaten Ponorogo,Kabupaten Probolinggo,Kabupaten Sampang,Kabupaten Sidoarjo,Kabupaten Situbondo,Kabupaten Sumenep,Kabupaten Trenggalek,Kabupaten Tuban,Kabupaten Tulungagung,Kota	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/Perkebunan)	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Kota Batu			
	Pemanfaatan Lahan Pekarangan Masyarakat untuk Karangkitri	100 desa	Kabupaten Bangkalan,Kabupaten Banyuwangi,Kabupaten Blitar,Kabupaten Bojonegoro,Kabupaten Bondowoso,Kabupaten Gresik,Kabupaten Jember,Kabupaten Jombang,Kabupaten Kediri,Kabupaten Lamongan,Kabupaten Lumajang,Kabupaten Madiun,Kabupaten Magetan,Kabupaten Malang,Kabupaten Mojokerto,Kabupaten Nganjuk,Kabupaten Ngawi,Kabupaten Pacitan,Kabupaten Pamekasan,Kabupaten Pasuruan,Kabupaten Ponorogo,Kabupaten Probolinggo,Kabupaten Sampang,Kabupaten Sidoarjo,Kabupaten Situbondo,Kabupaten Sumenep,Kabupaten	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ Perkebunan)	Pemanfaatan Lahan Pekarangan Masyarakat untuk Karangkitri	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Batu			
	Pembinaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	152 Kelompok	Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pertanian	Pembinaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			Sidoarjo,Kabupaten Situbondo,Kabupaten Sumenep,Kabupaten Trenggalek,Kabupaten Tuban,Kabupaten Tulungagung,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Kota Batu			
	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	7000 Ha	Kelompok petani Tembakau di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten	Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim perkebunan	Standarisasi kualitas bahan baku	Dinas Perkebunan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			Tuban, Kabupaten Tulungagung			
		6.235 Ha	Kelompok petani Tebu di seluruh Jawa Timur		Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Panen dan Pasca Panen Tanaman Tebu	Dinas Perkebunan
		4.000 ha	Kelompok petani Kopi di Kabupaten Gresik, Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tulungagung, Kabupten Ngawi, Kabupeten Magetan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung	Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman Tahunan perkebunan	Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Rehabilitasi, Panen dan Pasca Panen Tanaman Kopi	Dinas Perkebunan
		4.000 ha	Kelompok petani Kakao di Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek,		Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Rehabilitasi, Panen dan Pasca Panen Tanaman Kakao	Dinas Perkebunan



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			Kabupaten Tulungagung Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto			
		300 ha	Kabupaten Bangkalan, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Kediri, Kab. Probolinggo, Kab. Situbondo, Kab. Trenggalek, Kabupaten Jombang, Kab. Magetan, Kab. Madiun, Kab. Lumajang, Kab. Tulungagung, Kab. Lamongan, Kab. Jember	Program Perlindungan Tanaman Perkebunan	Pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan	Dinas Perkebunan
	Peningkatan produktifitas ternak sapi melalui optimalisasi Inseminasi Buatan mendukung Swasembada daging Nasional	Jumlah sapi potong layak bibit yang dibudidayakan masyarakat (120 ekor); Jumlah sapi perah layak bibit yang dibudidayakan masyarakat (40 ekor); Jumlah kambing senduro layak bibit yang dibudidayakan masyarakat (220 ekor); Jumlah domba	Kabupaten Madiun, Pacitan, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Magetan, Kota Probolinggo, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Trenggalek, Banyuwangi, Pasuruan, Malang, Ponorogo, Tulungagung, Lumajang, Bondowoso, Jember, Situbondo, Magetan, Bangkalan.	Program peningkatan Produksi Peternakan	Kegiatan pengawasan mutu bibit ternak	Dinas Peternakan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
		<p>sapudi layak bibit yang dibudidayakan masyarakat (176 ekor);</p> <p>Jumlah wilayah sumber bibit sapi potong (2wilayah);</p> <p>Jumlah wilayah sumber bibit kambing senduro (1 wilayah);</p> <p>Jumlah wilayah sumber bibit domba sapudi (1 wilayah)</p>				
		<p>Jumlah semen beku yang terdistribusi (2.100.000 ekor);</p> <p>Jumlah pemeriksaan kualitas semen beku (102 laporan);</p> <p>Jumlah akseptor IB (1.500.000 ekor)</p>	jawa timur	Program Peningkatan Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan	Pelayanan inseminasi buatan	Dinas Peternakan
	Peningkatan produksi perikanan Tangkap	Jumlah produksi Perikanan Tangkap	38 Kab/Kota	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pembangunan Kepelabuhanan Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
		430.000 ton				
					Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mayangan	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tamperan	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bulu	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pelayanan Unit Pelaksana Teknis	Dinas Perikanan dan Kelautan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bawean	
					Pelestarian Sumberdaya Ikan	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pemberdayaan Nelayan	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasongsongan	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis	Dinas Perikanan dan Kelautan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Puger	
					Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tambakrejo	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Popoh	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pelayanan UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
	Peningkatan Produksi Budidaya	Jumlah produksi Perikanan	38 Kab/Kota	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
		Budidaya 1.194.149 ton				
					Intensifikasi perikanan budidaya	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pembangunan sarana dan prasarana budidaya	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pengendalian kesehatan ikan budidaya dan lingkungan	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau Bangil	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar Umbulan	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Laut Situbondo	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Budidaya Perikanan di Kawasan Agropolitan	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Klasterisasi Komoditas Perikanan Unggulan	Dinas Perikanan dan Kelautan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Berpotensi Ekspor	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	
		Peningkatan produksi Garam Rakyat 1.314.181 ton	12 Kab/Kota	Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat	Dinas Perikanan dan Kelautan
		Jumlah kelompok yang terakses 4.070 kelompok	38 Kab/Kota	Program peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Perikanan	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pendidikan kemasyarakatan produktif perikanan tangkap	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	Peningkatan Rehabilitasi Pesisir, Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pengawasan	Rehabilitasi Mangrove 175 Ha Rehabilitasi Terumbu Karang 18 Ha Luasan zonasi wilayah ruang laut dan pesisir 3.300 km2	38 Kab/Kota	Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan	Pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pemanfaatan Ruang Laut	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasongsongan	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis	Dinas Perikanan dan Kelautan



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap	
					Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Puger	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tambakrejo	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan	Dinas Perikanan dan Kelautan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Popoh	
					Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mayangan	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tamperan	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan	Dinas Perikanan dan Kelautan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bulu	Dinas Perikanan dan Kelautan
					Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar	
					Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bawean	Dinas Perikanan dan Kelautan
2. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi	2. Peningkatan Ketahanan Energi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Mineral					
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u>					
	Peningkatan Elektrifikasi	2000 KK	Kab. Sampang Kab. Bondowoso Kab. Probolinggo	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pendataan dan Pemanfaatan Ketenagalistrikan	Dinas ESDM

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			Kab. Pacitan Kab. Madiun Kab. Situbondo			
					Pengusahaan Ketenagalistrikan	Dinas ESDM
	Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	3 unit PLTMH (213 KK )  25 unit Biogas (25 KK) 1 unit 1 Dok RUED	Situbondo, Blitar, Kab. Mojokerto  Jember  Bojonegoro Jawa Timur	Pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Tak Terbarukan	Pengusahaan dan Pemanfaatan Energi	Dinas ESDM
					Pendataan dan Pengembangan Energi	Dinas ESDM
	Pengembangan Potensi Sumber Daya Mineral	3 WP Mineral logam yang ditetapkan  2 WP Mineral logam yang dilelang  500 Rekomtek Pertambangan 1 Regulasi Pertambangan	Kab. Lumajang dan Malang, Kab. Trenggalek dan Pacitan, Kab. Blitar dan Tulungagung Kab. Banyuwangi, Kab. Jember	Pengelolaan Usaha Pertambangan	Pendataan Wilayah Sumber Daya Mineral dan Batubara	Dinas ESDM
					Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Dinas ESDM
3. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air	3. Peningkatan Tata Kelola Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir					

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u>					
	Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah	9 unit sumur bor	1. Ds Tempuran Kec Sawoo Kab Ponorogo. 2. Ds Arjosari Kec Arjosari Kab Pacitan. 3. Ds Panggung Gunung Kec. Panggung Gunung Kab Tulungagung. 4. Ds Candi Mulyo Kec. Dolopo Kab Madiun. 5. Ds Alastuwo Kec Poncol Kab Magetan. 6. Ds Bungbungan Kec Bluto Kab Sumenep. 7. Ds Pancor Kec Ketapang Kab Sampang. 8. Ds. Klampar Kec Proppo Kab Pamekasan. 9. Ds Balung Kec Kendit Kab Situbondo 10. Ds Sumberpetung Kec Ranuyoso Kab Lumajang.	Pengelolaan Kegeologian dan Air Tanah	Pengusahaan dan Konservasi Air Tanah	Dinas ESDM
		1.000 Rekomtek Air Tanah  3 unit sumur pantau	Jawa Timur  Ds Muncar Kec Muncar Kab Banyuwangi, Ds Wonorejo Kec Kedungjajang Kab Lumajang, Ds Talon Kec Talon Kab Blitar		Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah	Dinas ESDM

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	Perlindungan Sumber Air	2.250       90	Wilayah Sungai di Jawa Timur (Pasuruan, Sampang, Lumajang, Bondowoso, Banyuwangi, Malang, Bojonegoro)  Wilayah Sungai di Jawa Timur (Pasuruan, Sampang, Lumajang, Bondowoso, Banyuwangi, Malang, Bojonegoro)	Program Pengelolaan Jaringan Hidrologi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air di UPT PSDA  Program Pengelolaan Jaringan Hidrologi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air di UPT PSDA	Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA di Malang	Dinas PU SDA
					Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA di Kediri	Dinas PU SDA
					Data dan Jaringan Hidrologi UPT di Surabaya	Dinas PU SDA
					Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA di Bojonegoro	Dinas PU SDA
					Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA di Madiun	Dinas PU SDA
					Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA di Bondowoso	Dinas PU SDA
					Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA di Lumajang	Dinas PU SDA
					Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA di Pasuruan	Dinas PU SDA
					Data dan Jaringan	Dinas PU SDA

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Hidrologi UPT PSDA di Pamekasan	
					Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA di Malang	Dinas PU SDA
					Pemanfaatan dan Pengawaetan Sumber Daya Air UPT PSDA di Kediri	Dinas PU SDA
					Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA di Surabaya	Dinas PU SDA
					Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air di UPT Bojonegoro	Dinas PU SDA
					Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA di Madiun	Dinas PU SDA
					Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA di Bondowoso	Dinas PU SDA
					Pemanfaatan dan Pengawetan	Dinas PU SDA

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Sumber Daya Air UPT PSDA di Lumajang	
					Pemanaatan dan Pengaetan Sumber Daya Air UPT PSDA di Pasuruan	Dinas PU SDA
					Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA di Pamekasan	Dinas PU SDA
				Program Pengelolaan Jaringan Hidrologi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air di UPT PSDA	Hidrologi dan Kualitas Air	Dinas PU SDA
	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	50	176 Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi (Malang, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Jombang, Nganjuk, Kediri, Mojokerto, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, Jember, Pasuruan, Probolinggo, Bangkalan, Sumenep)	Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pantai UPT Depo Peralatan	Eksplorasi dan Pemeliharaan Peralatan UPT Depo Peralatan	Dinas PU SDA
					Pemeliharaan dan	Dinas PU SDA
		25	Wilayah Kerja pada 4			



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
			Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (Pasuruan, Sampang, Jember, Situbondo)		Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pantai UPT Depo Peralatan	
				Program Pengendalian Daya Rusak Air	Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengamanan Pantai	Dinas PU SDA
				Program Pengendalian Daya Rusak Air Di UPT PSDA	Monitoring Banjir UPT PSDA di Malang	Dinas PU SDA
					Monitoring Banjir UPT PSDA di Kediri	Dinas PU SDA
					Monitoring Banjir UPT PSDA di Surabaya	Dinas PU SDA
					Monitoring Banjir UPT PSDA di Bojonegoro	Dinas PU SDA
					Monitoring Banjir UPT PSDA di Madiun	Dinas PU SDA
					Monitoring Banjir UPT PSDA di Bondowoso	Dinas PU SDA
					Monitoring Banjir UPT PSDA di Lumajang	Dinas PU SDA
					Monitoring Banjir UPT PSDA di Pasuruan	Dinas PU SDA
					Monitoring Banjir UPT PSDA di	Dinas PU SDA

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Pamekasan	Dinas PU SDA
					Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA di Bondowoso	
					Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA di Lumajang	Dinas PU SDA
					Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak UPT PSDA di Pasuruan	Dinas PU SDA
					Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA di Pamekasan	Dinas PU SDA
				Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA	Eksplorasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA di Bondowoso	Dinas PU SDA
					Eksplorasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA di Lumajang	Dinas PU SDA
					Eksplorasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk	Dinas PU SDA

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					dan Pantai UPT PSDA di Pasuruan	
					Eksplorasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA di Pamekasan	Dinas PU SDA
				Program Pengelolaan Jaringan Hidrologi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air di UPT PSDA	Sistem Informasi Sumber Daya Air	Dinas PU SDA
				Program Penatagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Perencanaan Umum Sumber Daya Air	Dinas PU SDA
					Tata Pengaturan Sumber Daya Air Provinsi	Dinas PU SDA
					Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Dinas PU SDA
				Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Eksplorasi jaringan irigasi	Dinas PU SDA
					Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas PU SDA
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Dinas PU SDA
				Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan	Eksplorasi Jaringan Irigasi UPT PSDA di	Dinas PU SDA

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
				Irigasi UPT PSDA	Malang	
					Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Malang	Dinas PU SDA
					Eksplorasi Jaringan Irigasi UPT PSDA di Kediri	Dinas PU SDA
					Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Kediri	Dinas PU SDA
					Eksplorasi Jaringan Irigasi UPT PSDA di Surabaya	Dinas PU SDA
					Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Surabaya	Dinas PU SDA
					Eksplorasi Jaringan Irigasi UPT PSDA di Bojonegoro	Dinas PU SDA
					Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Bojonegoro	Dinas PU SDA
					Eksplorasi Jaringan Irigasi UPT PSDA di Madiun	Dinas PU SDA

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Madiun	Dinas PU SDA
					Eksplorasi Jaringan Irigasi UPT PSDA di Bondowoso	Dinas PU SDA
					Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Bondowoso	Dinas PU SDA
					Eksplorasi Jaringan Irigasi UPT PSDA di Lumajang	Dinas PU SDA
					Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Lumajang	Dinas PU SDA
					Eksplorasi Jaringan Irigasi UPT PSDA di Pasuruan	Dinas PU SDA
					Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA di Pasuruan	Dinas PU SDA
					Eksplorasi Jaringan Irigasi UPT PSDA di Pamekasan	Dinas PU SDA
					Pemeliharaan	Dinas PU SDA

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Jaringan Irigasi UPT PSDA di Pamekasan	
					Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA di Malang (DAK)	Dinas PU SDA
					Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA di Surabaya (DAK)	Dinas PU SDA
					Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA di Madiun (DAK)	Dinas PU SDA
					Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA di Bondowoso (DAK)	Dinas PU SDA
					Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA di Lumajang (DAK)	Dinas PU SDA
					Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA di Pasuruan (DAK)	Dinas PU SDA
					Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA di Pamekasan (DAK)	Dinas PU SDA
					Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT	Dinas PU SDA

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					PSDA di Kediri (DAK)	
				Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pantai	Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai	Dinas PU SDA
					Eksplorasi Sungai, Waduk dan Pantai	Dinas PU SDA
	Pemanfaatan dan Pengendalian Air Permukaan	750	Wilayah Kerja pada 5 Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Program Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Air	Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	Dinas PU SDA
		750	Wilayah Kerja pada 5 Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		Pengawasan dan Pengendalian	Dinas PU SDA
	Peningkatan Partisipatif Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	450	176 Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi (Malang, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Jombang, Nganjuk, Kediri, Mojokerto, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, Jember, Pasuruan, Probolinggo, Bangkalan, Sumenep)	Program Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Air	Pemberdayaan Masyarakat	Dinas PU SDA
		350	Surabaya, Pasuruan, Lumajang, Bondowoso	Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan	Pembinaan Sumber Daya Manusia pada	Dinas PU SDA

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
				Irigasi Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPT PSDA	Jaringan Irigasi	
					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat UPT PSDA di Malang	Dinas PU SDA
					Pemberdayaan Masyarakat UPT PSDA di Kediri	Dinas PU SDA
					Pemberdayaan Masyarakat UPT PSDA di Surabaya	Dinas PU SDA
					Pemberdayaan Masyarakat UPT PSDA di Bojonegoro	Dinas PU SDA
					Pemberdayaan Masyarakat UPT PSDA di Madiun	Dinas PU SDA
					Pemberdayaan Masyarakat UPT PSDA di Bondowoso	Dinas PU SDA
					Pemberdayaan Masyarakat UPT PSDA di Lumajang	Dinas PU SDA
					Pemberdayaan Masyarakat UPT PSDA di Pasuruan	Dinas PU SDA
					Pemberdayaan Masyarakat UPT PSDA di Pamekasan	Dinas PU SDA
4. Peningkatan Daya	4. Pelestarian Sumber					



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Daya Alam dan Lingkungan Hidup					
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u>					
	Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 dokumen IKPLHD  1 dokumen Raperda RPPLH	Jawa Timur  Jawa Timur	Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Inventarisasi dan Penerapan Kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Penanggulangan Pencemaran dan Perusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 dokumen DED PPSLI-B3	Kab. Mojokerto	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Penguatan Fasilitas Teknis, Investasi dan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
	Rehabilitasi dan/atau Restorasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	6 lokasi Sumber Mata Air	Kec. Semen, Kab. Kediri Kec. Parang, Kab. Magetan Kec. Panggungrejo, Kab. Blitar Kec. Winongan, Kab. Pasuruan Kec. Tutur, Kab. Pasuruan Kec. Prigen, Kab. Pasuruan	Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan	1.000.000 btg	Jawa Timur	Program Pemanfaatan Potensi Perbenihan	Sertifikasi Perbenihan	Dinas Kehutanan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	Hutan dan Lahan		Jawa Timur	<i>Tanaman Hutan</i>	Tanaman Hutan	
					Inventarisasi Sumber Benih Tanaman Hutan	Dinas Kehutanan
		2 jenis	Jawa Timur	<i>Program Tata Hutan dan Pemantauan Kawasan Hutan</i>	Kegiatan Pemantauan Kawasan Hutan dan Pengendalian Perubahan Iklim	Dinas Kehutanan
					Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Hutan	Dinas Kehutanan
					Kegiatan Penyusunan Data Statistik dan Informasi Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
		150 Ha	Jawa Timur	Program Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam	Kegiatan Perlindungan Hutan	Dinas Kehutanan
					Kegiatan Konservasi dan Wisata Alam	Dinas Kehutanan
					Kegiatan Pemantapan dan Perpetaan Kawasan Hutan	Dinas Kehutanan
		3.000 Ha	Jawa Timur	Program Pengelolaan Hutan Kewilayahan	Kegiatan Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah I	Dinas Kehutanan
					Kegiatan	Dinas

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
					Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah II	Kehutanan
					Kegiatan Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah III	Dinas Kehutanan
					Kegiatan Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah IV	Dinas Kehutanan
					Kegiatan Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah V	Dinas Kehutanan
					Kegiatan Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VI	Dinas Kehutanan
					Kegiatan Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VII	Dinas Kehutanan
					Kegiatan Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VIII	Dinas Kehutanan
					Kegiatan Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah IX	Dinas Kehutanan
		27.868,3 Ha	Kawasan Tahura R Soerjo	Program Perlindungan, Pelestarian dan	Kegiatan Pemanfaatan	Dinas Kehutanan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
				Pemanfaatan Kawasan Tahura R Soerjo	Potensi Kawasan Tahura R Soerjo	
					Kegiatan Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Tahura R Soerjo	Dinas Kehutanan
	Pengembangan dan Lomba desa tangguh bencana	40 Desa	Kab. Ponorogo, Kab. Lumajang, Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek, Kab. Probolinggo	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sistem peringatan dini	5 Alat EWS			Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengkajian kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	2 Dokumen		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pasca Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

VI.1.5 PRIORITAS PEMBANGUNAN – 5 :

1. PRIORITAS NASIONAL

Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilu

2. PRIORITAS PROVINSI

Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban serta Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu.

3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI

Program dan kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2019 yang mendukung PRIORITAS PEMBANGUNAN - 5, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.5 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2019 yang mendukung Prioritas Pembangunan - 5

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
1. Kamtibmas dan Keamanan Siber	1. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban terhadap issue potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba					
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u>					
	<i>Penguatan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial</i>	<i>4 Laporan Penguatan Deteksi dan Cegah Dini</i>	<i>Prov Jawa Timur</i>	<i>Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Penguatan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial di Masyarakat</i>	Bakesbangpol
	<i>Pemantauan dan Pemetaan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>Prov Jawa Timur</i>	<i>Program</i>	<i>Pemantauan</i>	Bakesbangpol

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	<i>Situasi dan Kondisi Kamtibmas</i>	<i>Situasi Kondisi Kamtibmas</i>		<i>Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jatim</i>	
	<i>Aksi TimDU Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>3 Laporan TimDU PKS</i>	<i>Kota Surabaya</i>	<i>Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur</i>	Bakesbangpol
	<i>Pemantauan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing</i>	<i>4 Laporan Pemantauan</i>	<i>Prov Jawa Timur</i>	<i>Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Pemantauan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing Kab./Kota se-Jatim</i>	Bakesbangpol
	<i>Pencegahan penyalahgunaan narkoba</i>	<i>1500 orang generasi muda</i>	<i>5 Baperwil</i>	<i>Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Pencegahan gangguan penyakit masyarakat khususnya pencegahan penyalahgunaan narkoba</i>	Bakesbangpol
	Pencegahan situasi dan kondisi sosial politik yang rentan memicu konflik horisontal dan konflik antar kelas.			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pengamanan Unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemantauan serta Patroli wilayah Terhadap NAPZA			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Patroli wilayah trantibum	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	Peningkatan (Sekretariat PPNS ) koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penegakan Perda baik internal dalam wilayah kota/Kabupaten maupun lintas wilayah			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Penegakan Perda	Penyelenggaraan Tibum dan tranmas :	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
					Penegakkan Peraturan Daerah	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
					Penyuluhan, pengawasan dan Advokasi Perda serta Perkada	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
2. Kesuksesan Pemilu	2. Kesuksesan Pemilu Serentak					
	<u>KEGIATAN PRIORITAS:</u>					
	1. Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	7600 orang pemilih	Prov Jawa Timur	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Di Jawa Timur	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
	2. Pemantauan Situasi Kondisi Politik Daerah	38 Kab/Kota	Prov Jawa Timur	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Pemantauan Perkembangan Politik Kab/Kota di Jawa Timur	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
	3. Peningkatan partisipasi politik pemilih pemula	1500 orang pemilih pemula	5 Baperwil	Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik	Pemantapan Etika Politik bagi Generasi Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	4. Peningkatan kualitas proses politik Jawa Timur	600 orang elemen masyarakat	Prov Jawa Timur	Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penerapan budaya politik yang demokratis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
	5. Peningkatan Kualitas Kaderisasi Parpol	10 Parpol	Kota Surabaya	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Verifikasi Bantuan Dana Pada Partai Politik Se Jatim	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
	6. Peningkatan peran Ormas/LSM dalam pembangunan politik Jawa Timur	300 Ormas/LSM	Prov Jawa Timur	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Pemberdayaan Ormas/LSM dan Elemen Masyarakat dalam Pembangunan Politik di Jawa Timur	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
	Peningkatan Stabilitas Keamanan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres		Jawa Timur	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pengamanan, pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
					Pengamanan Unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
					Patroli wilayah trantibum	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
					Penyelenggaraan Tibum dan tranmas	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI	TARGET	LOKASI	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pileg dan Pilpres		Jawa Timur	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pemberdayaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa (Community Policing)	
	Kesuksesan Pemilu Serentak			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pengintegrasian Sistem DataBase Informasi Administrasi Kependudukan Terpadu (SIAK)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
					Sinkronisasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
					Penataan Administrasi Sistim Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan

## VI.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2019 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana tabel Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan pada Buku 2 Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2019.



BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan, sebagai berikut:

VII.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Capaian dan target indikator kinerja utama berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sebagai berikut:

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

NO	Indikator Kinerja Utama	Capaian				Target		Akhir Periode RPJMD 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pertumbuhan PDRB/LPE (%)	5,86	5,44	5,55	5,45	5,61-5,96	5,66-6,06	5,66-6,06
2	Indeks Gini	0,368	0,369	0,403	0,415	0,385-0,400	0,380-0,400	0,380-0,400
3	Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia (<40%)	18,63	16,61	17,03	16,49	18,20-18,40	18,40-18,60	18,40-18,60
4	Persentase Penduduk Miskin	12,28	12,28	11,85	11,20	11,50-11,20	11,20-10,90	11,20-10,90
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,14	68,95	69,74	69,75 <sup>1)</sup>	69,75-70,00	70,00-70,25	70,00-70,25
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,83	91,07	91,77	92,39 <sup>2)</sup>	92,91-93,50	93,51-94,01	93,51-94,01
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,19	4,47	4,21	4,00	4,08-3,99	3,99-3,90	3,99-3,90
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	56,48	61,7	63,98	65,54	65,49-67,00	67,00-68,52	67,00-68,52
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	80	81	81,33	82,00-83,00	83,00-84,00	83,00-84,00
10	Indeks Reformasi Birokrasi	61,04	61,28	69,54	71,11 <sup>3)</sup>	67,00-69,00	69,00-71,00	69,00-71,00
11	Indeks Kesalehan Sosial				62,34 <sup>3)</sup>	>60	>60	>60

Keterangan :

- <sup>1)</sup> Target tertinggi RPJMD
- <sup>2)</sup> Target terendah RPJMD
- <sup>3)</sup> Angka BPS yang belum dirilis

## VII.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Capaian dan target indikator kinerja daerah berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sebagai berikut:

Tabel VII.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah  
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
Provinsi Jawa Timur

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian							Target		Akhir Periode RPJMD 2019
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
	1.1	Pertumbuhan PDRB/	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	5,55	5,45	5,61-5,96	5,66-6,06	5,66-6,06
	1.2	Indeks Gini	0,37	0,36	0,36	0,368	0,369	0,403	0,415	0,385-0,400	0,380-0,400	0,380-0,400
	1.3	Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia (<40%)	21,09	20,15	19,82	18,63	16,61	17,03	16,49	18,20-18,40	18,40-18,60	18,40-18,60
	1.4	Persentase Penduduk Miskin	13,85	13,08	12,73	12,28	12,28	11,85	11,20	11,50-11,20	11,20-10,90	11,20-10,90
	1.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,06	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74	69,75	69,75-70,00	70,00-70,25	70,00-70,25
	1.6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,28	89,36	90,22	90,83	91,07	91,77	92,39	92,91-93,50	93,51-94,01	93,51-94,01
	1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,16	4,12	4,33	4,19	4,47	4,21	4,00	4,08-3,99	3,99-3,90	3,99-3,90
	1.8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	-	-	56,25	56,48	61,70	63,98	66,29	65,49-67,00	67,00-68,52	67,00-68,52
	1.9	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	79,00	80,00	81,00	81,33	82,00-83,00	83,00-84,00	83,00-84,00
	1.10	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	61,04	61,28	69,54	71,11	67,00-69,00	69,00-71,00	69,00-71,00
	1.11	Indeks Kesalehan Sosial	-	-	-	-	-	-	62	>60	>60	>60
B	ASPEK PELAYANAN UMUM											
	1.	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar										
	1.1.	Pendidikan										
	1.1.1	Pendidikan Menengah										
	1.1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 - 18 tahun	59,65	62,51	65,95	71,23	72,14	72,76	73,38	73,76	74,26	74,26
	1.1.1.2	Angka Putus Sekolah - SMA/MA/SMK	0,84	0,80	0,68	0,65	0,62	0,58	0,54	0,5	0,46	0,46
	1.1.1.3	Angka Kelulusan Sekolah - SMA/MA/SMK	97,73	98,14	98,27	98,52	98,57	98,63	98,68	98,73	98,78	98,78
	1.1.1.4	Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PKLK berkualifikasi minimal S1/D4	87,46	91,93	92,36	94,84	96,55	98,78	98,80	98,9	99	99
	1.1.1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/MA/SMK	54,97	55,94	59,78	65,78	65,83	68,21	68,65	68,31	68,36	68,36
	1.1.1.6	Indeks pendidikan	0,55	0,55	0,57	0,58	0,59	0,60	0,60*	0,62	0,63	0,63
	1.1.1.7	Angka Rata-rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Ke Atas	6,79	6,85	6,9	7,05	7,14	7,23	7,23*	7,47	7,58	7,58
	1.1.1.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	73,78	74,21	78,21	78,23	79,14	81,42	82,80	81,52	81,57	81,57
	1.2.	Kesehatan										
	1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	29,24	25,50	25,00	24,50	24,00	23,60	23,10	22,5	22,00	22,00
	1.2.2	Angka Kematian Ibu (AKI)	104,3	97,43	97,39	93,52	89,6	91,00	91,92	88,00	86,00	86,00
	1.2.3	Angka Harapan Hidup	70,02	70,14	70,34	70,45	70,68	70,74	71,00	72,55	72,7	72,7

[illegible]

[illegible]



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian							Target		Akhir Periode RPJMD 2019
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	2.12.1	Nilai Izin Prinsip Investasi (PMA & PMDN) (trilyun rupiah)	70,91	76,71	113,6	110,6	172,5	61,43	328,15	100	115	125
	2.12.2	Nilai Realisasi Investasi (trilyun rupiah)	110,47	133,43	145,03	145,03	163,68	155,04	152,39	80	90	100
	2.13.	Kepemudaan dan Olahraga										
	2.13.1	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	-	-	16,62	26,13	29,52	20,73	14,43	16,53	18,19	18,19
	2.13.2	Persentase pembibitan olahragawan berbakat	-	-	16,07	37,96	8,64	13,73	23,73	25,86	27,15	27,15
	2.13.3	Jumlah Atlet Yang berprestasi	-	-	-	-	-	1121	1261	1055	1288	4725
	2.14.	Statistik										
	2.14.1	Persentase release data statistik akurat yang tepat waktu	-	-	-	-	-	-	20%	20%	30%	30%
	2.15.	Persandian										
	2.15.1	Persentase informasi persandian yang diamankan	-	-	-	-	-	-	100	55%	60%	60%
	2.16.	Kebudayaan										
	2.16.1	Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan nasional	-	-	13	11	16	22	26	20	20	109
	2.16.2	Persentase cagar budaya (benda,struktur,situs,kawasan) yang dipelihara/dilestarikan	-	-	-	-	-	94,50	96,30	98,2	100	100
	2.17.	Perpustakaan										
	2.17.1	Indeks Minat Baca	-	-	-	-	65,25	69,75	72	72	74	74
	2.17.2	Persentase penerbit dan Perusahaan Rekaman yang Menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam	-	-	-	-	-	48,00	50,00	55,00	60,00	60,00
	2.18.	Kearsipan										
	2.18.1	Persentase arsip yang terselamatkan	-	-	-	-	-	-	25	27,65	29,78	29,78
	2.18.2	Persentase organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tertib arsip	-	-	-	-	-	20,41	21,28	70	100	100
	3.	Fokus Layanan Urusan Pilihan										
	3.1.	Kelautan dan Perikanan										
	3.1.1	Persentase Pertumbuhan sub kategori Perikanan terhadap PDRB	-	-	-	6,87	5,71	5,06	4,82	5,2	5,3	5,3
	3.2.	Pariwisata										
	3.2.2	Prosentase Kontribusi pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB	-	-	4,98	5,26	5,48	5,73	5,82	5,87	5,94	5,94
	3.3.	Pertanian										
	3.3.1	Persentase Pertumbuhan sub kategori tanaman pangan terhadap PDRB	-	-	1,38	2,98	3,13	1,76	-2,18	2,843	2,931	2,931
	3.3.2	Persentase Pertumbuhan sub kategori perkebunan terhadap PDRB	-	-	1,81	4,97	1,25	-0,74	1,36	2,20-3,04	2,25-3,08	2,25-3,08
	3.3.3	Persentase Pertumbuhan sub kategori peternakan terhadap PDRB	-	-	1,07	1,15	2,01	3,11	3,89	2,9	2,94	2,94
	3.4.	Kehutanan										
	3.4.1	Persentase sub kategori Kehutanan dan	-	-	0,53	0,13	3,34	-9,12	7,23	0,4	0,4	0,4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian							Target		Akhir Periode RPJMD 2019
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		Penebangan Kayu Terhadap PDRB										
	3.4.2	Indeks Tutupan Hutan	-	-	-	-	64,01	54,83	62,01	55,35 – 55,86	55,86 – 56,36	55,86 – 56,36
	3.5.	Energi dan Sumber Daya Mineral										
	3.5.1	Rasio Elektrifikasi	-	-	0,80	0,83	0,85	0,87	0,91	0,89	0,9	0,9
	3.6.	Perdagangan										
	3.6.1	Persentase Share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan	-	-	1,7	-0,5	1,63	4,06	4,67	1,8	1,9	1,9
	3.7.	Perindustrian										
	3.7.1	Persentase Pertumbuhan Industri pengolahan	-	-	-	7,67	5,60	4,51	5,69	5,8	5,85	5,85
	3.8.	Ketransmigrasian										
	3.8.1	Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya	-	-	-	-	82,00	81,65	72,00	82,75	83	83
	4.	Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
	4.1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
	4.1.1	Persentase usulan musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	-	-	-	-	-	-	42	32	34	34
	4.1.2	Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	4.2.	Badan Pendapatan Daerah										
	4.2.1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp. Juta)	8,89	9,58	11.57	14.44	15,40	15,90	17,33	13.460.593,41	13.709.614,39	13.709.614,39
	4.3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah										
	4.3.1	Nilai opini BPK	-	-	WTP	WDP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	WTP
	4.4.	Badan Kepegawaian Daerah										
	4.4.1	Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi	-	-	75,30	87,70	96,20	96,80	84,22	98	99	99
		Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	-	-	73,00	73,50	75,00	75,73	81,11	85	90	90
	4.5.	Badan Pendidikan dan Pelatihan										
		Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)	-	-	86,14	90,70	91,00	92,50	93,00	94	95	95
	4.6.	Badan Penelitian dan Pengembangan										
	4.6.1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Hasil Penelitian yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-	24	26,25	30	35	35
	4.6.2	Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki Kegiatan Mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur	-	-	-	-	-	6	7	10	13	13
	4.7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
		Indeks Demokrasi Indonesia	-	54,99	59,32	70,36	76,9	72,24	-	81,5	82,5	82,5
		Persentase kejadian terkait poleksosbud di Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	100	90	90	90
	4.8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
	4.8.1	Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian							Target		Akhir Periode RPJMD 2019
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	4.8.2	Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	4.9.	Badan Penghubung										
	4.9.1	Persentase Pelayanan Keprotokolan	-	-	91	91	92	100	99,94	100	100	100
	4.9.2	Persentase promosi potensi daerah di Jabodetabek	-	-	-	-	100	100	96,64	100	100	500
	4.10.	Inspektorat										
	4.10.1	Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	-	-	-	-	70	70	50	75	75	75
	4.11	Sekretariat Daerah										
	4.11.1	Nilai SAKIP	C	C	B	B+	A	A	A	AA	AA	AA
	4.11.2	Predikat Hasil Evaluasi LPPD	-	-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	4.11.3	Persententase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesesuaian dan kepentingan umum	-	-	-	-	-	-	100	85	85	85
	4.11.4	Persentase penegakan supremasi hukum dan HAM di Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	85	85	85
	4.12	Badan Perwakilan Provinsi (Baperprov)										
	4.12.1	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	60	80	93	90	95	95
C	4.13	Sekretariat DPRD										
	4.13.1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	-	70	71,23	76,04	76,5	77,5	78,5	78,5
	ASPEK DAYA SAING DAERAH											
	1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah											
	1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
	1.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Rp)	479.490	524.225	586.407	674.580	830.472	950.000	938.801	1.100.000	1.150.000	1.150.000
	1.1.2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	49,36	49,36	49,46	50,5	54,12	52,5	49.21	53,08	53,32	53,32
	1.2.	Pertanian										
	1.2.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,65	103,83	104,59	104,75	104,83	104,62	104,10	106,42	106,96	106,96
	1.2.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	148,46	99,79	103,16	106,54	106,69	111,84	121,77	105,06	105,61	105,61
	2	Fokus Iklim Berinvestasi										
	2.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
	2.1.1	Angka Kriminalitas	3,98	4,01	3,8	3,57	2,67	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian							Target		Akhir Periode RPJMD 2019
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	2.1.2	Lama Proses Perizinan	1-17	1-17	1-17	1-17	1-17	1-17	1-17	1-17	1-17	1-17
	3	Fokus Sumber Daya Manusia										
	3.1.	Ketenagakerjaan										
	3.1.1	Rasio Lulusan S1/S2/S3	315	341	323	356	386	406	426	446	466	466
	3.1.2	Rasio Ketergantungan	45,69	45,26	44,85	44,50	44,22	44,10	43,80	43,9	43,8	44



## BAB VIII

### PENUTUP

Dengan tersusunnya RKPD ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, selain itu RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

- a. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
- b. penyusunan KUA dan menentukan PPAS Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
- c. penyusunan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
- d. evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- e. penyesuaian prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO